AKUNTAN INDONESIA

ARDAN ADIPERDANA
GCG Tekan Peluang Terjadinya Korupsi di Lembaga Publik

DWI SETIAWAN
Banyak Dana Kampanye yang Disembunyikan

RISSA SUSMEX
Akuntan Itu Seni Komunikasi Keuangan

MEI 2013 • HARGA Rp 20.000,-/ LUAR P. JAWA RP 22.500

AUDIT DANA KAMPANYE

BUKTI TRANSPARANSI ATAU SEKADAR FORMALITAS?

- Keuangan Negara Terus Bocor
- Tax Center IAI Percepat Sosialisasi Perpajakan

www.iaiglobal.or.id
ISSN 1978-7537

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
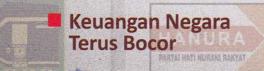
PLUS: IFRS 10 KONSOLIDASI, IFRIC 18 TRANSFER ASET

JURNAL MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
BALAIRUNG
Rokok Dari Hulu Ke Hilir
tegur sapa tradisi dan industri

KONDANG SEJAK 1985
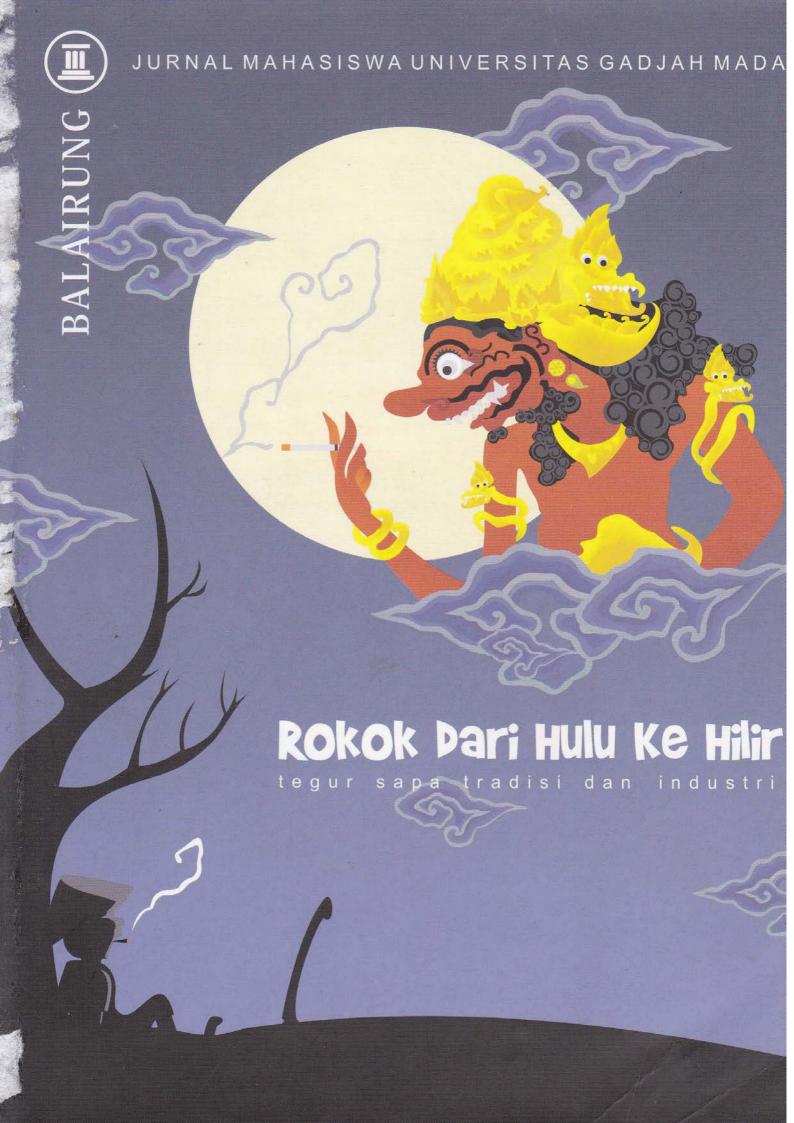
Penerbit: Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) BALAIRUNG UGM **Izin Penerbitan Khusus:** SK Menpen RI No. 1039/DIRJEN/PPG/STT/1986; SK Rektor UGM No. UGM/82/7798/um/01/37 Tgl. 14 Desember 1985 ISSN: 0215-076X **Pelindung:** Prof. Dr. Sudjarwadi, M.Eng.Ph.d (Rektor UGM) **Penasihat:** Drs. Haryanto, M.Si (Direktur Kemahasiswaan), Drs. Amir Effendi Siregar, MA., Ir. Abdul Hammid Dipopramono **Pembimbing:** Prof. Dr. Edhi Martono, M.Sc | **Pemimpin Umum:** Eka Suryana Saputra **Biro Kesekretariatan dan Dokumentasi:** Muhammad Rifki, Manggala Ismanto **Biro Pengembangan:** Ginanjar Tamimy, Arif Kurniar Rahman **Koordinator balkon**: Mohammad Lubabun Ni`am Asshibbamal Shoddamiyah | **Pemimpin Redaksi:** Rifky Firmana **Sekretaris Redaksi:** Sri Zuliari **Redaktur Pelaksana:** Noor Alifa Ardianingrum, Upik Dyah Eka N. **Redaktur Bahasa:** Azizah Fitriyanti, Nuraini, Indra HP **Staf Redaksi:** Iryan Ali Herdiansyah (Tim Kreatif balkon), Setiawan, Ahmad Baiquni, Ridwan Nugroho, Henry Krisbudi H, Menadion Nasser Tamtama, Astri Melawati, Rai Saputra, Nurul Ismiyatun, Achmad Faisal Amrie, Rika Melati, Purnawan Setyo Adi, Hellatsani Widya Ramadhani, Achmad Choirudin, Yuda Purnomo, Rita Pamilia, Latifah Fitriyanti, Akmala Rahmasanti, Nur Kumala Hapsari, Muhammad Sofwan Hadi, Ike Yulandri, Vinia Rizqi Primawati, Meily Lisdiyanti, Fitria Nursanti, Retno Indriyani, Rifki Darmawan, Lucia Febriarlita, Ciptaningrat Larastiti, Tryas Wardani Nurwan, Wisnu Prasetya Utomo, Rosmawati Siregar, Robertus Rony Setiawan, Hesthi Widya Puspitarini, At Tachirotul M, Yuliana Yuli Astuti | **Kepala Riset:** Pratiwi **Wakil Kepala Riset:** Nuri Hidayati **Sekretaris Riset:** Tuti Elfrida **Staf Riset:** Muhammad Ghofur (Koordinator Riset Jurnal), Rhea Febriani Tritami (Tim Kreatif balkon), Antonius M. Z Galih, Farid Fatahillah, Andya D., Yulianti Retno Wibowo, Kahai Atit Thoiri, Rendy, Adelia Rosa Hastarini, Ahmad Musthofa Harun, Eka Yulianti Wijaya, Nurul Azizah Zayzda, Jems Arison Zacharias, Hesti Pratiwi, Niken Y. Pratiwi, Olivia Elfatma, Narinta Titisari Nur Wardhani. | **Pemimpin Perusahaan:** Teguh Prayitno **Wakil Pemimpin Perusahaan:** Ika Rahayu **Kabag Iklan:** Fazli Sofiandhori **Kabag Keuangan:** Clara Emylia **Kabag Distribusi:** Wisnu Rizky Pratama **Kabag Promosi dan Jaringan:** Dewi Setyaningrum **Staf Perusahaan:** Sriningsih, Nuki Mayasari (Tim Kreatif balkon), Adisty L. Egis Mulia Suri, Tryas Oleg Widyoko, Eni J. Silitonga, Irma Widyasti, Johana Aditya, Maria Rosarina, Rizki Tuti Ayu Maruti, Rizki Widihatmoko Aryo Nugroho, Zoraya Adryana. | **Kepala Produksi dan Artistik:** M.Rizal Abdi **Majelis Musyawarah**: Irsyad Muharram, Ade Chandra, Kirana Yunita, Monika Windriya S., Estu Suryowati (Tim Kreatif Balkon), **Staf Produksi dan Artistik: Fotografer:** Aji Akbar Titimangsa, Eka Wahyu N.H., Nana, Ratna, Iwan **Ilustrator**: Intan Putri K., **Desain dan Tata Letak** : Warsini Handayani, Nufina Amina, Jehan Rochmatika. **Penjaga Web** : Muh. Iqbal

BPPM BALAIRUNG UGM
Perum. Dosen UGM Jl. Kembang Merak B21, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Faks: (0274) 566171
balairung_ugm@yahoo.co.id; www.balairungpress.com

Daftar Isi

edisi #43 :

ROKOK DARI HULU KE HILIR :

tegur sapa tradisi dan industri
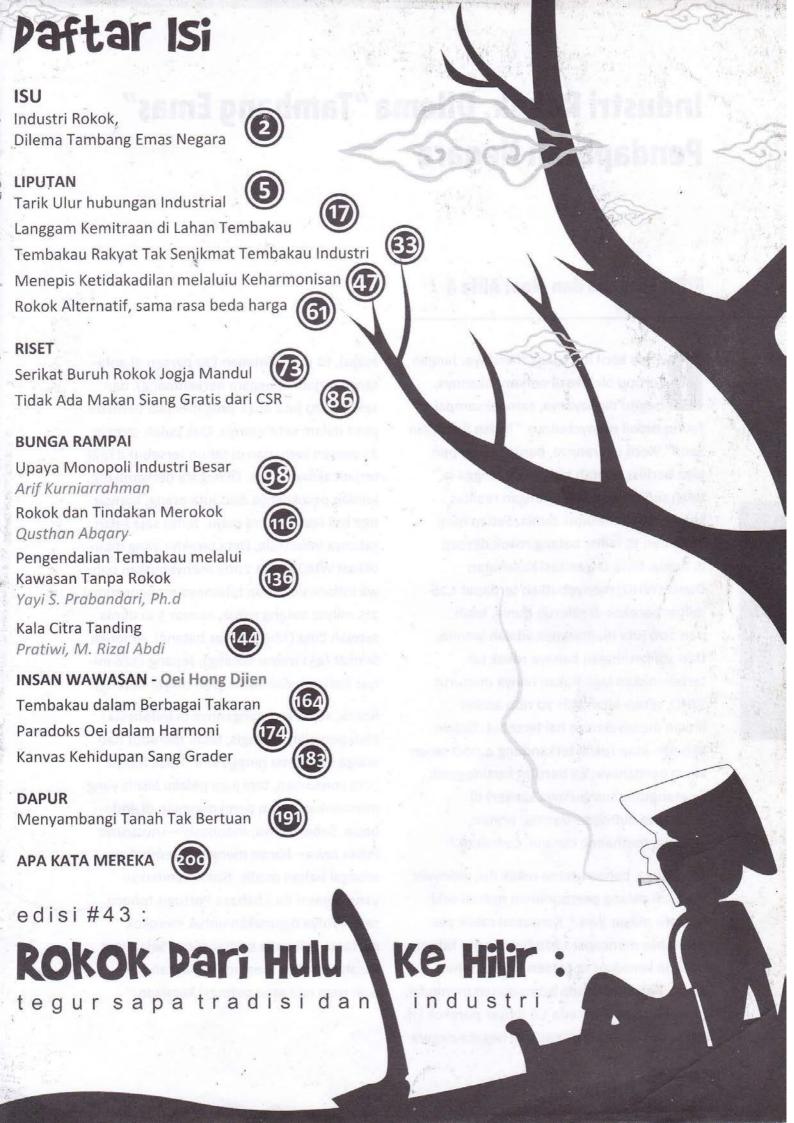
Industri Rokok, Dilema "Tambang Emas" Pendapatan Negara

Rifky Firmana dan Noor Alifa A

Benda kecil itu, rokok namanya. Jangan tertipu oleh kecil penampakannya, begitu digdayanya, sampai-sampai Taufiq Ismail menyebutnya "Tuhan Sembilan Senti".[1] Kecil ukurannya, panjang usia pun juga berliku sejarah hidupnya, hingga ia telah sedemikian lekat dengan realitas keseharian penduduk dunia. Setiap hari, lebih dari 15 miliar batang rokok dihisap di dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan terdapat 1,26 milyar perokok di seluruh dunia, lebih dari 200 juta diantaranya adalah wanita. Dari sisi kesehatan bahaya rokok tak terbantahkan lagi. Bukan hanya menurut WHO, tetapi lebih dari 70 ribu artikel ilmiah membuktikan hal tersebut. Dalam kepulan asap rokok terkandung 4.000 racun kimia berbahaya, 43 bersifat karsinogenik (merangsang tumbuhnya kanker) di antaranya hidrogen-sianida, aceton, amonia, methanol, butane, cadmium.[2]

Tembakau, bahan utama rokok itu, disinyalir menjadi dalang pembunuhan massal sekitar satu milyar jiwa.[3] Konsumsi rokok per kapitanya mencapai 1.370 batang per tahun, dengan kenaikan 12 persen hingga tahun 2000. Kalau tidak ada penanganan memadai, maka di 2030 akan ada 1,6 milyar perokok (15 persen di antaranya tinggal di negara-negara maju), 10 juta kematian (70 persen di antaranya terjadi di negara berkembang), dan sekitar 770 juta anak yang menjadi perokok pasif dalam setahunnya. Dua puluh sampai 25 persen kematian di tahun tersebut dapat terjadi akibat rokok. Di negara berkembang, jumlah perokoknya 800 juta orang, hampir tiga kali lipat negara maju. Tentu saja salah satunya Indonesia. Data terakhir yang dipublikasi WHO tahun 2002 menyebutkan bahwa Indonesia setiap tahunnya mengonsumsi 215 milyar batang rokok, nomor 5 di dunia setelah Cina (1.643 milyar batang), Amerika Serikat (451 milyar batang), Jepang (328 milyar batang), dan Rusia (258 milyar batang).

Rokok, sejak kedatangannya di Indonesia oleh penjajah Portugis, telah merebut hati warga Indonesia hingga kini. Tidak hanya para konsumen, tapi juga pelaku bisnis yang memainkan peran perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia—khususnya Pulau Jawa—hanya mengenal tembakau sebagai bahan medis. Nama tembakau yang berasal dari bahasa Portugis *tabaco*, selanjutnya digunakan untuk merokok pertama kali pada sekitar 1600. Sejak saat itulah merokok menjadi kebiasaan mewah para raja atau petinggi kerajaan.[4]

ISU

Sejarahnya membuat keberadaan rokok di Indonesia menyata dimana-mana, dari ruang publik hingga ruang privat, dari jalan, sekolah, sampai ruangan dalam rumah. Rokok telah menjadi budaya, kebiasaan setelah sarapan, kebutuhan ketika lelah pikiran, bahkan jadi teman saat sendirian. Peminatnya pun bertambah banyak. Sampai sekarang jumlah perokok di Indonesia sudah mencapai 70 persen penduduk Indonesia, 60 persen di antara perokok adalah kelompok penghasilan rendah. Tingginya konsumsi rokok menimbulkan implikasi negatif yang luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi menyangkut juga kehidupan sosial ekonomi.

Rokok sebagai konsumsi yang tak tergantikan masih tetap melenggang hingga saat ini, meskipun tak sedikit pula yang menentangnya. Tembakau Indonesia menjadi komoditas yang diekspor ke Bremen, Jerman. Pun dengan Industrinya. Industri rokok memang sebuah industri yang menjanjikan. Industri rokok dianggap mampu menjawab permasalahan negara berkembang seperti

Tabel Sejarah Rokok

Tahun	Sejarah Rokok
6000 SM	Tembakau dipanen di Amerika untuk yang pertama kalinya
1 Masehi	Suku Indian di Amerika mulai memanfaatkan tembakau untuk merokok
600	Seorang filosof Cina bernama Fang Yizhi mulai menyebutkan bahwa kebiasaan merokok dalam jangka lama akan dapat merusak paru.
1492	Columbus membawa tembakau ke Eropa.
1500	Tembakau menyebar ke Afrika via Mesir dan ke Timur Tengah melalui orang-orang Turki
1558	Tembakau mulai dicoba ditanam di Eropa namun gagal
1560	Tembakau masuk ke Afrika melalui orang-orang Afrika keturunan Portugis
1530-1600	Tembakau Cina diperkenalkan melalui Jepang dan Filipina
1729	Tercatat sebagai tahun pertama ada aturan tertulis larangan merokok, yaitu di tempat-tempat ibadah di negara Bhutan
1761	Dilakukan studi pertama tentang dampak merokok yang dilakukan oleh John Hill
1769	James Cook membawa tembakau ke Australia
1950	Diterbitkan 2 publikasi utama tentang hasil penelitian dampak merokok bagi kesehatan
1981	Penelitian besar tentang dampak merokok pasif oleh Hirayama di Jepang

Diolah dari berbagai sumber

Indonesia--pengangguran. Untuk penyerapan tenaga kerja, diperkirakan industri ini menyerap 6,5 juta pekerja, antara lain: 250 ribu orang bekerja di pabrik, 2,5 juta bekerja di sektor pertanian tembakau, 1,9 juta bekerja di perkebunan cengkeh, 1.150 berprofesi sebagai pedagang asongan, dan 9 persennya bekerja di sektor distribusi.[5]

Berawal dari budaya, ketika tembakau ditanam oleh suku Maya di Amerika Tengah dan dirokok (dihisap kemudian dibakar) pada setiap upacara keagamaan mereka, kini rokok telah mengalami transformasi lewat industrialiasi. Proses industrialisasi, dari sanalah kompleksitas itu berujung pangkal. Industri yang membutuhkan pasar untuk menjual hasil industrinya membutuhkan rekanan. Siapa lagi kalau bukan pemerintah. Sebagai salah satu komoditas industri yang terkena beban cukai, dengan sumbangan terbesar, dapat dikatakan industri rokok memegang peranan besar dalam dunia ekonomi Indonesia.

Kontribusi cukai rokok yang cukup besar terhadap pendapatan negara, membuat pemerintah seolah tak punya daya menghadapi imperium kuasa industri. Industri rokok diperkirakan mampu memberikan masukan 90 persen dari total cukai yang pada 1998 mencapai nominal 7,5 trilyun rupiah. Belum lagi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Industri rokok juga mendorong peningkatan surplus perdagangan komoditas tembakau dan hasil olahannya yang mencapai 147,79 juta dolar AS.[6] Sampai sekarang mahadaya puntung itu masih menyisakan devisa setidaknya 27 triliun rupiah setiap tahun (data 2004). Pendapatan pemerintah dari penetapan cukai rokok memang kian merayap naik dari tahun ke tahun. Terbuai, pemerintah seolah menggadai jaminan kesehatan warganya dengan untung cukai.

Menurut Suwarta Kosen (2007), biaya kesehatan akibat rokok yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2006 sebesar 18,1 milyar dolar AS atau sekitar 5,1 kali pendapatan negara dari cukai tembakau pada tahun yang sama.[7]

Tak cuma cukai dan pengangguran, citra positif rokok kian memuai lewat iklan dan model *Corporate Social Responsibility* yang efektif. Rokok menjadi sponsor utama berbagai kegiatan seni kemasyarakatan, acara-acara hiburan anak muda, sampai pemberian beasiswa. Dengan keadaan seperti ini, regulasi seolah selalu mentah. Terlalu sering aturan di negeri ini ditawar dan ditekuk demi kepentingan pengusaha. Gerakan moral seperti kampanye penyadaran yang kian marak menjadi penanda pada pemerintah agar jangan sampai abai, ada jaminan kesehatan warga negara yang tergadai.

Pemerintah gamang. Kebimbangan pemerintah Indonesia tercermin dalam sikapnya yang hingga kini belum juga berkenan meratifikasi Konvensi Antirokok atau *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tidak menandatangani dan belum melakukan aksesi FCTC tersebut. FCTC adalah suatu hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang telah disepakati secara aklamasi dalam sidang WHO 2003.[8] Sulit memang posisi pemerintah. Apalagi merekalah sekutu terbaik industri rokok guna memperbesar pasar. Kompleksitas permasalahan yang menyelubungi rokok bukan lagi semata tentang untung rugi namun juga jejaring kehidupan yang lebih luas. Sementara asap rokok kian membuat pengap, banyak orang angkat bicara. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3),

Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai hendak menurunkan fatwa. Fatwa halal-haramnya rokok menyeruap jadi polemik meresahkan petani tembakau, buruh pabrik, sampai ulama penikmatnya. Permasalahannya kini bukan lagi rokok dan antirokok.

Bagi negara yang sangat tergantung pada modal, investasi, dan keterjagaan stabilitas ekonomi, semacam Indonesia, keberadaan industri rokok memiliki posisi tersendiri. Ia menjadi primadona di tengah gersangnya lahan ekonomi nasional. Padahal sebuah industri, sebagai bagian dari paham kapital, selalu menyisakan masalah kolosal yang hingga kini belum tuntas. Diantaranya, hak-hak para pekerja yang tidak terjamin penuh, ketimpangan sosial yang tetap menganga, atau dominasi sebagian kelompok atas nama kesejahteraan.

Buruh selalu berada dalam posisi yang lemah. Dalam kajian mengenai hubungan industrial setidaknya tiga pihak bermain di sana, pemilik modal, buruh, dan negara. Idealnya, negara merupakan pihak yang tidak bersengketa atau netral. Akan tetapi, dalam tradisi marxisme, negara cenderung lebih berpihak kepada pemilik modal. Tak hanya buruh, petani tembakau, lini terbawah industri rokok, turut terkena imbas keberpihakan tersebut. Lagu sumbang praktik patronasi yang berjenjang dan selalu timpang menjadi kian akrab bagi minoritas petani pemilik lahan pun sekadar penggarap.[9] Semuanya bermuara pada kepentingan industri, tetapi bukan itu ujung polemik.

Kerasnya persaingan industri membawa pada dominasi. Industri rokok besar menggelembung menguasai pasar. Seperti dalam industri musik ketika dikuasai perusahaan rekaman ternama, musik *indie* lahir sebagai alternatif sekaligus perlawanan. Demikian pula rokok alternatif. Di tengah kompetisi industri rokok besar, rokok *tingwe* (*linting dhewe*) justru kian dicari meski bahaya kanker mengintai. Harganya yang murah dan mengakomodasi kebutuhan penikmatnya atas eksperimen rasa sekelas rokok-rokok ternama, meracik sendiri komposisi tembakaunya, membuat *tingwe* digemari.[10] Sementara rokok *tingwe* mendapat nama, giliran rokok lokal yang harus sengsara lantaran cukai kian mahal. Tak mampu membeli cukai industri rokok lokal jadi ilegal. Pemasarannya terbatas, kurang luas peminatnya, dan semakin malang pula nasibnya.

Di lain pihak, relevansi industri rokok sebagai penyerap tenaga kerja menjadi hal yang perlu ditinjau kembali. Pengkajian dampak jangka menengah dan jangka panjang masih dibutuhkan, tetapi perlu didudukkan dalam konteks kondisi pasar. Saat ini, mempekerjakan buruh dengan upah murah masih dipandang lebih menguntungkan daripada menerapkan teknologi canggih, walaupun kapasitas produksinya lebih rendah.

relevansi industri rokok sebagai penyerap tenaga kerja menjadi hal yang perlu ditinjau kembali.

Pengalaman dimanapun di dunia ini menunjukkan bahwa penurunan tenaga industri rokok akan terjadi karena: 1) penerapan teknologi canggih, dan 2) kenaikan upah buruh dimana pekerja memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dan berani menggunakan haknya. Pertimbangan ekonomi untuk meningkatkan volume dan efisiensi biaya produksi akan memaksa industri memilih teknologi tinggi daripada memekerjakan tenaga manusia yang berupah tinggi.[11] Penurunan pekerja industri rokok terjadi secara alamiah sebagai dampak jangka panjang industrialisasi yang mensyaratkan hal ini. Bukan karena penanggulangan masalah tembakau.

Polemik sekian sisi sang "Tuhan Sembilan Senti" tak lantas makin menyurutkan kiprahnya. Perlu lebih dari sekadar fatwa, imbauan, pendidikan, dan regulasi untuk menumbuhkan kebijakan bersikap agar jangan sampai lalai memberikan hak sehat pada warga negara. Penanaman kesadaran membutuhkan konsistensi dan komitmen pengajaran bukan hanya sekadar aturan yang didengungkan di setiap seremonial. Kesadaran dalam bentuk kepentingan bersama, *shared values, shared culture, dan shared point of view*—seperti dikatakan Lenin dan Gramsci, seringkali harus dibina dan direproduksi. Apalagi sumber-sumber pembinaan kesadaran kelas semacam sekolah, media massa, serta lembaga-lembaga agama cenderung berada di bawah pengaruh pemilik modal.[12]

Perimbangan peran dari ketiga aras; negara, industri, dan masyarakat dalam posisi yang pas menjadi suatu hal yang didamba. Tapi, bukankah jauh lebih penting untuk mendedah, merunut masalah asal jangan sampai bertindak gegabah dan salah arah?

catatan akhir

[1]Sajak Taufiq Ismail, "Tuhan 9 cm".

[2]Heri Setiyawan, Indonesia 5 Besar Konsumen Rokok Sedunia, *http://www.kr.co.id/article.php?sid=125074*.

[3]Keterangan pers Dirjen WHO Margaret Chan, Jumat (8/2/2008) seperti dilansir berbagai media massa.

[4]Budiman, Amen dan Onghokham. *Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara.*1987. PT. Djarum Kudus.

[5]Data diambil pada tahun 2000. Sutedjo B. 2-2-2007. Berita Indonesia, hlm 11.

[6]Data diambil dari *http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/31/ekonomi/indu15.htm.* Diakses pada tanggal 1 April 2008.

[7]Kompas, Rabu, 3 September 2008.

[8]Keterangan diunduh dari situs *http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/30/1429175/pemerintah.belum.tegas.soal.antirokok.*
Akses terakhir tanggal 6 September 2008.

[9]Lihat hasil liputan tim redaksi di jurnal ini.

[10]*Ibid.*

[11]Dr. Widyastuti Soerojo, MSc. Konsultan Independen Kesehatan Masyarakat /Pemerhati Masalah Tembakau

[12]*Ibid.*

Reporter : Eka. S. Saputra, Rifky Firmansyah | **Visual :** Ade Chandra, M. Rizal Abdi

Tarik Ulur Hubungan Industrial

Unsur yang paling penting, kita perlu sadar bahwa yang dilakukan adalah memilih perspektif.

Sebuah pembahasan tentang hubungan industrial, pertama-tama perlu diawali dengan pendedahan atas perspektif yang dibangun dalam memandang hubungan tersebut. Perspektif yang dimaksud tidak lain, dalam bahasa yang ekstrim atau menyeramkan menurut sementara orang, ideologi. Sehingga, persoalannya adalah menentukan sudut pandang yang, supaya tidak kelihatan subjektif, biasa juga dikenal dengan asumsi. Apakah seseorang bisa berpikir dan mengemukakan pendapat tanpa "sudut pandang" atau "-isme"? Memang tidak sesederhana yang diucapkan, karena pilihan sudut pandang akan menentukan pemahaman kita selanjutnya tentang wajah hubungan industrial.

Pemahaman bahwa "hubungan industrial melibatkan tiga pihak; buruh, negara, serta pemilik industri", misalnya, sudah mengandung perspektif tertentu. Ungkapan ini cenderung menempatkan negara sebagai pihak yang tidak bersengketa. Padahal, dalam tradisi marxisme sampai sebelum datangnya sosialisme, negara selalu berpihak kepada pemilik modal. Jadi, hubungan industrial pada dasarnya adalah hubungan konfliktual antara pekerja dan pemilik kapital.

Dalam penggalan cerita dunia industri rokok, akan berbeda kalau buruh memiliki kuasa atas saham perusahaan. Jika ada Peraturan Daerah (perda) melarang rokok, misalnya, buruh tidak akan terlalu khawatir. Karena, andai usaha rokok harus berganti dengan yang lain sebagai bagian dari pemilik saham, buruh dapat memikirkan usaha baru bersama-sama dengan pemilik modal.

Buruh sudah tentu selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah apa makna posisi buruh yang lemah itu? Apakah lemah diartikan dalam wujud jumlah upah, serta kondisi kerja? Ataukah ditentukan berdasarkan akses dan kendali terhadap alat-alat produksi? Dalam tradisi marxisme klasik, posisi buruh yang lemah dilihat dalam cara kedua, yakni persoalan kendali atas alat produksi. Sehingga, jalan keluarnya adalah pemilikan bersama atas alat produksi. Sebuah pengertian lain dari apa yang dikenal dengan komunisme.

Komunisme, sering kali diinterpretasi menjadi kepemilikan publik lewat perusahan-perusahan negara. Hanya saja, dalam praktiknya negara berubah menjadi majikan baru yang sama menindasnya dengan pemilik modal. Di negara lain dengan tradisi sosial demokrat dan negara kesejahteraaan yang kuat, kepemilikan bersama diantaranya diterjemahkan dengan cara korporatisme. Cara yang memungkinkan buruh, sudah tentu dalam bentuk organisasi perwakilan, ikut menentukan kebijakan (nasional) yang menyangkut ekonomi dan sektor industri.

Sebaliknya, tradisi yang nonmarxis—dapat dikatakan tradisi liberal—menerjemahkan posisi buruh yang lemah dalam kategori pertama. Yakni, persoalan upah, kondisi kerja, dan lainnya. Karena itu, penyelesaian persoalan buruh tidak perlu mengubah struktur kekuasaan—akses terhadap penguasaan alat produksi, baik di tingkat perusahaan maupun pada skala politik nasional. Cukup dengan memenuhi hak-hak buruh saja.

Gerakan buruh macam itulah—yang "hanya" memperjuangkan persoalan upah dan kondisi kerja—dalam istilah Lenin disebut sebagai gerakan buruh borjuis. Vladimir Illyich Lenin bukan hendak mengatakan bahwa upah dan kondisi kerja tidak penting untuk diperjuangkan. Bagi dia, dan juga Karl Marx atau Rosa Luxemburg, buruh dibayar murah dan bekerja dalam kondisi yang buruk lebih dikarenakan tidak memiliki kuasa atas pekerjaannya sendiri. Dengan perkataan lain, tidak memiliki akses terhadap penguasaan alat-alat produksi.

Mengatakan buruh harus memiliki akses kekuasaan ke alat-alat produksi bukan perkara mudah. Menurut bayangan saya ini berarti, pada bentuk yang paling moderat, buruh dengan modal "*labour*" yang

Indonesia--pengangguran. Untuk penyerapan tenaga kerja, diperkirakan industri ini menyerap 6,5 juta pekerja, antara lain: 250 ribu orang bekerja di pabrik, 2,5 juta bekerja di sektor pertanian tembakau, 1,9 juta bekerja di perkebunan cengkeh, 1.150 berprofesi sebagai pedagang asongan, dan 9 persennya bekerja di sektor distribusi.[5]

Berawal dari budaya, ketika tembakau ditanam oleh suku Maya di Amerika Tengah dan dirokok (dihisap kemudian dibakar) pada setiap upacara keagamaan mereka, kini rokok telah mengalami transformasi lewat industrialiasi. Proses industrialisasi, dari sanalah kompleksitas itu berujung pangkal. Industri yang membutuhkan pasar untuk menjual hasil industrinya membutuhkan rekanan. Siapa lagi kalau bukan pemerintah. Sebagai salah satu komoditas industri yang terkena beban cukai, dengan sumbangan terbesar, dapat dikatakan industri rokok memegang peranan besar dalam dunia ekonomi Indonesia.

Kontribusi cukai rokok yang cukup besar terhadap pendapatan negara, membuat pemerintah seolah tak punya daya menghadapi imperium kuasa industri. Industri rokok diperkirakan mampu memberikan masukan 90 persen dari total cukai yang pada 1998 mencapai nominal 7,5 trilyun rupiah. Belum lagi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Industri rokok juga mendorong peningkatan surplus perdagangan komoditas tembakau dan hasil olahannya yang mencapai 147,79 juta dolar AS.[6] Sampai sekarang mahadaya puntung itu masih menyisakan devisa setidaknya 27 triliun rupiah setiap tahun (data 2004). Pendapatan pemerintah dari penetapan cukai rokok memang kian merayap naik dari tahun ke tahun. Terbuai, pemerintah seolah menggadai jaminan kesehatan warganya dengan untung cukai.

Menurut Suwarta Kosen (2007), biaya kesehatan akibat rokok yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2006 sebesar 18,1 milyar dolar AS atau sekitar 5,1 kali pendapatan negara dari cukai tembakau pada tahun yang sama.[7]

Tak cuma cukai dan pengangguran, citra positif rokok kian memuai lewat iklan dan model *Corporate Social Responsibility* yang efektif. Rokok menjadi sponsor utama berbagai kegiatan seni kemasyarakatan, acara-acara hiburan anak muda, sampai pemberian beasiswa. Dengan keadaan seperti ini, regulasi seolah selalu mentah. Terlalu sering aturan di negeri ini ditawar dan ditekuk demi kepentingan pengusaha. Gerakan moral seperti kampanye penyadaran yang kian marak menjadi penanda pada pemerintah agar jangan sampai abai, ada jaminan kesehatan warga negara yang tergadai.

Pemerintah gamang. Kebimbangan pemerintah Indonesia tercermin dalam sikapnya yang hingga kini belum juga berkenan meratifikasi Konvensi Antirokok atau *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tidak menandatangani dan belum melakukan aksesi FCTC tersebut. FCTC adalah suatu hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang telah disepakati secara aklamasi dalam sidang WHO 2003.[8] Sulit memang posisi pemerintah. Apalagi merekalah sekutu terbaik industri rokok guna memperbesar pasar. Kompleksitas permasalahan yang menyelubungi rokok bukan lagi semata tentang untung rugi namun juga jejaring kehidupan yang lebih luas. Sementara asap rokok kian membuat pengap, banyak orang angkat bicara. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3),

Pengalaman dimanapun di dunia ini menunjukkan bahwa penurunan tenaga industri rokok akan terjadi karena: 1) penerapan teknologi canggih, dan 2) kenaikan upah buruh dimana pekerja memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dan berani menggunakan haknya. Pertimbangan ekonomi untuk meningkatkan volume dan efisiensi biaya produksi akan memaksa industri memilih teknologi tinggi daripada memekerjakan tenaga manusia yang berupah tinggi.[11] Penurunan pekerja industri rokok terjadi secara alamiah sebagai dampak jangka panjang industrialisasi yang mensyaratkan hal ini. Bukan karena penanggulangan masalah tembakau.

Polemik sekian sisi sang "Tuhan Sembilan Senti" tak lantas makin menyurutkan kiprahnya. Perlu lebih dari sekadar fatwa, imbauan, pendidikan, dan regulasi untuk menumbuhkan kebijakan bersikap agar jangan sampai lalai memberikan hak sehat pada warga negara. Penanaman kesadaran membutuhkan konsistensi dan komitmen pengajaran bukan hanya sekadar aturan yang didengungkan di setiap seremonial. Kesadaran dalam bentuk kepentingan bersama, *shared values, shared culture, dan shared point of view*—seperti dikatakan Lenin dan Gramsci, seringkali harus dibina dan direproduksi. Apalagi sumber-sumber pembinaan kesadaran kelas semacam sekolah, media massa, serta lembaga-lembaga agama cenderung berada di bawah pengaruh pemilik modal.[12]

Perimbangan peran dari ketiga aras; negara, industri, dan masyarakat dalam posisi yang pas menjadi suatu hal yang didamba. Tapi, bukankah jauh lebih penting untuk mendedah, merunut masalah asal jangan sampai bertindak gegabah dan salah arah?

catatan akhir

[1]Sajak Taufiq Ismail, "Tuhan 9 cm".
[2]Heri Setiyawan, Indonesia 5 Besar Konsumen Rokok Sedunia, *http://www.kr.co.id/article.php?sid=125074.*
[3]Keterangan pers Dirjen WHO Margaret Chan, Jumat (8/2/2008) seperti dilansir berbagai media massa.
[4]Budiman, Amen dan Onghokham. *Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara.*1987. PT. Djarum Kudus.
[5]Data diambil pada tahun 2000. Sutedjo B. 2-2-2007. Berita Indonesia, hlm 11.
[6]Data diambil dari *http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/31/ekonomi/indu15.htm.* Diakses pada tanggal 1 April 2008.
[7]Kompas, Rabu, 3 September 2008.
[8]Keterangan diunduh dari situs *http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/30/1429175/pemerintah.belum.tegas.soal.antirokok.*
Akses terakhir tanggal 6 September 2008.
[9]Lihat hasil liputan tim redaksi di jurnal ini.
[10]*Ibid.*
[11]Dr. Widyastuti Soerojo, MSc. Konsultan Independen Kesehatan Masyarakat /Pemerhati Masalah Tembakau
[12]*Ibid.*

dimilikinya dalam memproduksi barang harus dipertimbangkan sebagai salah satu "pemegang saham" perusahaan. Saham sama artinya dengan "kekuasaan politik" perusahaan. Dan, karena "kerja" yang menghasilkan barang sama pentingnya dengan "uang"—yang diinvestasikan oleh pengusaha—(modal "labour" tanpa investasi tidak jadi barang dan jasa, juga sebaliknya) maka besar saham buruh dalam sebuah industri harus "separuh atau lima puluh persen" dari total jumlah saham perusahaan.

Kebanyakan orang memang memafhumkan bahwa yang punya hak atas perusahan (hanya) pemilik modal—dalam bentuk uang yang diinvestasikan. Sementara buruh adalah pekerja yang tidak punya hak apa-apa atas perusahan, dengan implikasi kerjanya tidak pernah dihitung sama sekali. Beberapa pendapat juga mengemukakan bahwa buruh sudah digaji dan karenanya sudah "menjual diri" kepada pengusaha. Sehingga, terlihat sudah cukup adil.

Hanya saja pendapat tersebut melupakan sesuatu yang disebut nilai tambah. Sudah tentu buruh diupah sebagai jaminan atas "tubuhnya", tetapi reward atas kerjanya yang terwujud dalam nilai tambah sebuah barang atau jasa yang diproduksi tidak pernah dikembalikan. Nilai tambah tersebut diambil dan dikuasai sepenuhnya oleh pemilik modal dalam bentuk profit, selisih antara nilai komoditi praproduksi dan pascaproduksi.

Dalam penggalan cerita dunia industri rokok, akan berbeda kalau buruh memiliki kuasa atas saham perusahaan. Jika ada Peraturan Daerah (perda) melarang rokok, misalnya, buruh tidak akan terlalu khawatir. Karena, andai usaha rokok harus berganti dengan yang lain sebagai bagian dari pemilik saham, buruh dapat memikirkan usaha baru bersama-sama dengan pemilik modal. Akan tetapi, karena buruh tidak memiliki kekuasaan politik dalam perusahaan, perda semacam ini berarti PHK massal. Pemilik modal sebagai satu-satunya pemegang saham dapat langsung angkat kaki tanpa perlu mengindahkan nasib pekerjanya.

Memang cukup sulit menentukan langkah yang harus dilakukan agar buruh bisa memperoleh akses kekuasaan untuk mengendalikan alat-alat produksi. Masalahnya sangat kompleks. Di Indonesia, sebelum benar-benar tumbuh, gerakan buruh sudah dibabat habis melalui korporatisme yang dilakukan Orde Baru (Orba). Hal serupa terjadi di negara-negara berkembang, yang mungkin lebih tepat disebut sebagai negara "revolusi industri generasi belakangan" dalam konteks ini.

Sementara, di negara maju gerakan buruh sudah lama kehilangan tajinya karena: (1) "Kontra revolusi dari atas", yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin konservatif seperti Margaret Thatcher dan Ronald Reagen; (2) Krisis ideologi setelah percobaan komunisme yang gagal di Uni Soviet, Eropa Timur, Cina dan beberapa negara lain; dan (3) Gelombang pemikiran baru, terutama diinspirasikan oleh poststrukturalisme, yang mendebat beberapa asumsi dasar sosialisme.

Pemahaman tentang perspektif dalam meninjau hubungan industrial tidak terlepas dari peran golongan intelektual. Dalam golongan tersebut juga terjadi perdebatan tentang keberpihakan yang seharusnya diterapkan.

Dengan demikian, beberapa hal penting yang perlu dilakukan sekarang ini adalah: (1) Mengembalikan "ikon" buruh itu sendiri sebagai agen perubahan sosial. Dapat dilakukan dengan pendidikan politik, propaganda yang dimaksudkan sebagai *counter discourse*, dsb. Penggunaan istilah 'buruh' ketimbang 'tenaga kerja' atau 'Sumber Daya Manusia' (SDM), contohnya, merupakan sebuah langkah maju dalam konteks *counter discourse*. Karena, buruh secara politik mencerminkan kekuasaan, penindasan, tidak "netral", dan "bersih ideologi" seperti istilah tenaga kerja atau SDM yang sering digunakan, terutama oleh teman-teman kita yang belajar Ilmu Ekonomi. (2) Memupuk kesadaran buruh, dalam bahasa marxisme menerjemahkan alienasi yang dideritanya menjadi ideologi dan program politik. (3) Membuat masalah buruh, yakni masalah hubungan industrial, sebagai persoalan politik. Karena, yang diperlukan bukan sekadar perubahan kebijakan melainkan juga—mungkin dalam bahasa yang agak berlebihan—perebutan negara dari tangan pemilik modal. (4) Menempatkan masalah buruh sebagai masalah nasional atau bahkan global, bukan masalah buruh pada tiap industri masing-masing. Sumber persoalannya sama, yakni hubungan industrial yang berat sebelah, di manapun dan dalam bentuk apapun industri tersebut.

Selanjutnya, kedua perspektif memahami posisi buruh yang lemah tersebut memiliki implikasi panjang dalam pemahaman kita tentang dunia industri. Semisal, terkait kehadiran *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jika kita menganggap persoalan buruh dan industri adalah upah dan kondisi kerja, maka perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan CSR agar dilakukan secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dan pada gilirannya kesejahteraan buruh.

Hanya saja, menurut saya, sudut pandang tersebut tidak seberapa meyakinkan. Masih dalam tradisi marxisme, sebelum sanggup bekerja dan mendapat upah, buruh memerlukan sesuatu yang disebut dengan "sosialisasi". Maksudnya tidak lain, adalah proses memberikan pemahaman pada buruh tentang cara mengoperasikan mesin, atau bekerja di pabrik secara umum. Sosialisasi biasanya memakan waktu panjang, juga melibatkan pelbagai sarana seperti: media, sekolah, lembaga agama, atau asosiasi sosial lainnya.

Catatan penting dalam proses sosialisasi, yakni ia dapat berbentuk brutal maupun berwajah beradab. Yang pasti tujuannya satu, agar pemilik modal selalu memiliki buruh yang siap digunakan dari waktu ke waktu tanpa harus terganggu oleh peralihan generasi dalam kelas pekerja. Selain sosialisasi, buruh juga harus selalu dipenuhi basis material yang memungkinkan eksistensinya sebagai pekerja tetap bertahan.

Unsur terakhir inilah, pemenuhan basis material buruh, yang tidak gampang dipenuhi. Secara matematis saja, upah (harga) buruh selalu lebih rendah dari nilai (harga) barang yang diproduksinya. Kalau pemilik

modal tidak mengatasi situasi ini, suatu saat akan ada keadaan krisis dimana produksi mandeg karena buruhnya tidak mampu memenuhi nilai kebutuhan hidup—yang selalu lebih tinggi dari nilai kerjanya sendiri. Nah, agar buruhnya tidak "kelaparan" atau tidak miskin-miskin sekali, pemilik modal, sering dengan bala bantuan negara, memberikan "kesejahteraan" kepada para pekerja. Bentuknya bisa berupa subsidi atau macam bantuan lainnya. Artinya, bagi saya, CSR paling baik dilihat dalam kerangka "sosialisasi" dan "upaya menjaga eksistensi pekerja sebagai labour". Sehingga, jika memanfaatkan perspektif marxisme, CSR dapat dikatakan sebagai bentuk penindasan yang lebih halus dan beradab ketimbang, misalnya, sistem tanam paksa.

Adapun memandang aspek manfaat dalam CSR, sangat tergantung pada pemaknaan dari yang dimaksudkan dengan "manfaat". Apakah gaji yang tinggi, akses pendidikan yang lebih baik, atau seperti yang berulang-ulah saya sebut, akses pada penguasaan atas alat-alat produksi yang dapat disebut manfaat? Begitu juga soal etika. Apakah menaikkan gaji ataukah memberikan kekuasaan politik kepada buruh dalam perusahan yang jauh lebih etis?

Jika kita menganggap persoalan buruh dan industri adalah upah dan kondisi kerja, maka perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan CSR agar dilakukan secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dan pada gilirannya kesejahteraan buruh.

Pemahaman tentang perspektif dalam meninjau hubungan industrial tidak terlepas dari peran golongan intelektual. Dalam golongan tersebut juga terjadi perdebatan tentang keberpihakan yang seharusnya diterapkan. Semisal bagi akademisi yang berniat mengubah keadaan dengan memasuki sistem kapital. Mungkin saja mereka tidak melihat "kapitalisme" sebagai sumber persoalan. Atau ada juga yang percaya kapitalisme dapat dilumpuhkan—atau dijinakkan—dengan

menggunakan kapitalisme itu sendiri. Seperti "politik etis" Belanda pada zaman dahulu yang justru mencetak sejumlah tokoh nasional, yang kemudian berada di garda terdepan perjuangan nasional menentang penjajahan.

Guna mengamati peran dan pengaruh golongan ini dapat dimanfaatkan sudut pandang Antonio Gramsci. Menurutnya, golongan intelektual memiliki fungsi penting untuk memproduksi ideologi dan pengetahuan yang menjadi basis pembenar bagi keberadaan kelas sosial tertentu—istilahnya intelektual organik. Sudah tentu ada intelektual yang kerjanya memproduksi gagasan yang mendukung pemilik modal, namun ada juga yang sebaliknya.

Perdebatan antara kedua jenis intelektual ini menggambarkan konflik buruh dan majikan. Permasalahannya, bagaimana kita membedakan kedua jenis intelektual tersebut? Kenyataan jelas bahwa hampir semua intelektual adalah kelas pekerja. Begitupun, tidak semua kelas pekerja bisa dianggap buruh atau proletar. Contohnya, bagaimana kita mengategorikan manajer perusahaan? Apakah dia pekerja atau pemilik modal? Dalam tradisi marxisme juga pernah ada perdebatan panjang tentang hal ini. Salah seorang pemikir neomarxis, yang bernama Nicos Poulantzas, mengeluarkan ide membedakan kedua jenis intelektual berdasarkan jarak kepentingannya dengan pemilik modal. Semakin dekat kepentingannnya maka intelektual atau manajer tersebut dikategorikan sama dengan majikannya, dan sebaliknya.

Untuk mengukur kedekatan kepentingan intelektual dengan modal pun dapat diilustrasikan dengan posisi manajer tersebut. Seorang manajer tidak dibayar dengan upah melainkan insentif yang ditentukan berdasarkan jumlah keuntungan perusahaan. Semakin besar keuntungan perusahan semakin besar pula penghasilannya. Karena itu, masuk akal jika manajer selalu menindas buruh dan berada satu gerbong dengan pemilik modal. Sedangkan untuk posisi intelektual, kita dapat menerapkan argumen sederhana ini dengan sebuah pertanyaan: darimana sumber penghasilannya berasal? Sudah tentu ini bukan satu-satunya cara untuk membedakan dua jenis intelektual, ada hal lain yang juga berpengaruh seperti tradisi inetelektual, latar belakang keluarga, ataupun ideologi.

Saya ingat sewaktu masih menjadi mahasiswa S1 dulu pernah berdebat panjang tentang boleh atau tidaknya menerima beasiswa yang diberikan Toyota Foundation. Ada beberapa sikap waktu itu. Pertama, menolak sama sekali. Kedua, menerima jika tidak bersifat mengikat karena itu hak kita—dengan asumsi pengusaha menjadi kaya karena menindas orang miskin. Ketiga, menerima sebagai strategi perlawanan, tentu jika tidak bersifat mengikat. Seperti yang dilakukan pejuang nasional, ketika memanfaatkan politik etis Belanda, untuk melawan kolonialisme.

Persoalan hubungan industrial akhirnya menyisakan perdebatan panjang dalam kaitan dengan negara. Seperti pernah disebutkan, merunut tinjauan marxisme, negara merupakan aktor yang berpihak pada pemilik modal. Dengan alasan demikian, salah satu tujuan pertama revolusi dalam tradisi marxisme klasik adalah merebut negara dari tangan pemilik modal. Hanya saja, memang, dalam marxisme ada perdebatan luas dan tidak selesai sampai sekarang menyangkut "bagaimana keberpihakan itu terjadi?".

Pandangan paling ekstrim akan mengatakan negara tak lebih dari *organizing committee* para pemilik modal. Pandangan ini diambil dari tulisan Marx, *The Communist Manifesto*. Tetapi, pada sisi ekstrim yang lain, negara dianggap jauh lebih independen. Tindakannya yang cenderung berpihak pada pemilik modal, menurut anggapan ini, lebih karena pertimbangan tindakan tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, investasi asing, serta prospek lain yang menguntungkan negara. Jadi, negara mendukung kapital karena secara otonom memerlukannya. Cara pandang ini juga bersumber dari tulisan Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*.

Tentu kita bisa saja melihat negara sebagai penengah konflik dalam hubungan industrial—terutama antara pemilik modal dan pekerja. Tetapi, dalam kaitan kesadaran memilih perspektif, saya tergolong orang yang skeptis dengan "netralitas", "*win-win solution*", "dialog", "akomodasi kepentingan semua orang", "kepentingan umum", dan sejenisnya. Seringkali jargon-jargon

Golongan intelektual memiliki fungsi penting untuk memproduksi ideologi dan pengetahuan yang menjadi basis pembenar bagi keberadaan kelas sosial tertentu—istilahnya intelektual organik.

ini memistifikasi hubungan kekuasaan, politik kelas, ideologi, bahkan represi.

Meneruskan pemahaman dari tinjauan neomarxis, sekurangnya ada dua cara pandang yang melihat hubungan negara dan pengusaha. Pertama, melihat hubungan tersebut bersifat subjektif. Yakni, karena pejabat negara dan pengusaha sekolah di universitas yang sama, makan di restoran yang sama, atau sama-sama main golf. Dari kebersamaan macam itulah keberpihakan negara terhadap dunia usaha bermula. Kedua, menganggap hubungan seperti ini sudah tentu ada tetapi tidak bisa dipertahankan terus menerus karena akan merusak kapitalisme dan sistem pasar.

Seperti kita ketahui, hubungan ini menimbulkan sesuatu yang di Indonesia dikenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar sistem pasar tidak dirasuki korupsi, dan kapitalisme bisa tumbuh sempurna maka hubungan negara dan kapital harus bersifat objektif. Terlebih jika mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama, menghendaki pertumbuhan ekonomi, serta investasi asing yang masuk. Negara terkadang juga dapat bertindak "tidak sesuai" dengan kepentingan pemilik

modal. Terutama jika menganggap perilaku sebuah perusahaan atau industri dalam jangka panjang justru membahayakan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan akumulasi kapital berkelanjutan lain. Sehingga, negara boleh mengambil inisiatif melakukan sesuatu sebelum dipikirkan para pengusaha demi perhitungan akumulasi kapital di masa depan. Lihat misalnya upaya pemerintah Amerika Serikat dalam memelopori internet sekitar tiga dekade setelah Perang Dunia II dan implikasinya terhadap dunia usaha sekarang ini.

Konstelasi relasi yang dibangun negara dalam hubungan industrial akan berpengaruh pada atmosfer dunia buruh yang ambil bagian dalam proses produksi industri.

Menanggapi kenyataan minimnya tuntutan buruh terhadap akses atas penguasaan alat-alat produksi, dapat diajukan pertanyaan; apakah buruh merasa tidak ingin, takut, atau enggan melakukan perlawanan untuk sekadar protes? Ataukah memang sudah merasa cukup karena gajinya memadai?

Jika jawabannya yang pertama, maka salah satu persoalannya adalah depolitisasi buruh yang terjadi selama Orba. Setelah Soeharto jatuh banyak muncul serikat buruh baru dan banyak usaha untuk membuat dunia buruh "lebih politis". Akan tetapi, upaya ini belum berhasil karena mungkin kita terlalu sibuk dengan isu-isu lain seperti masyarakat sipil, dialog, dan rekonsiliasi. Hampir tidak ada yang berbicara dalam konteks kelas politik.

Padahal, salah satu langkah penting untuk menumbuhkan "kesadaran politik buruh" adalah membuat mereka memiliki "kesadaran kelas". Seorang buruh tidak otomatis memiliki kesadaran sebagai buruh. Kesadaran dalam bentuk kepentingan bersama, *shared values, shared culture, dan shared point of view*—seperti dikatakan Lenin dan Gramsci, seringkali harus dibina dan direproduksi. Apalagi sumber-sumber pembinaan kesadaran kelas semacam sekolah, media massa, serta lembaga-lembaga agama cenderung berada di bawah pengaruh pemilik modal. Jika kesadaran kelas buruh tidak dibina maka mereka akan memiliki kesadaran lain yang tidak sejalan dengan kelas sosialnya. Buruh tanpa kesadaran kelas adalah bentuk kontrol, dari pemilik modal dan negara terhadap pekerja, yang sangat canggih dan murah.

Dalam konteks Indonesia, depolitisasi yang dialami buruh merupakan cerita panjang dan kompleks. Orba mewarisi gerakan buruh yang sangat politis dibawah pengaruh PKI. Upaya yang dilakukan Orba adalah mengambil alih kendali atas gerakan buruh dengan mengorganisasikannya ke dalam asosiasi yang bersifat tunggal. Maksudnya, tidak boleh ada organisasi atau serikat buruh tandingan, dan semua buruh harus menjadi anggota organisasi tersebut—di bawah kendali pemerintah.

Bahkan, pada awalnya pemimpin asosiasi ini, pertama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) kemudian diubah namanya menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), berada di bawah kendali militer atau setidaknya figur yang berkaitan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selain itu, Orba juga melakukan beberapa strategi untuk mencegah perlawanan kelas dengan cara memecah-belah kelas pekerja berdasarkan kategori profesi yang ditempatkan dalam organisasi korporatis berbeda-beda. Sebut saja Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain itu, dibuat aturan hubungan industrial yang sangat berpihak pada pemilik modal dan mengutamakan kendali atas pekerja. Mereka

juga mengganti istilah "buruh" yang jauh lebih politis, dengan "tenaga kerja"—yang cenderung netral dan bersifat ekonomis.

Sudah tentu depolitisasi ini tidak sepenuhnya berhasil. Setidaknya tercatat sejak awal '90-an muncul kembali gerakan buruh dan juga gerakan petani, yang menurut saya merupakan faktor penting yang terlupakan dan berperan signifikan bagi gerakan mahasiswa dan gerakan kelas menengah di tahun 1997-1998. Walaupun, kedua gerakan tersebut hanya bertahan sampai sekitar paruh kedua '90-an.

Adapun gerakan buruh yang marak dalam sepuluh tahun terakhir, diantaranya merupakan sisa dari gerakan buruh yang menggeliat di awal '90-an tersebut. Pengalaman Indonesia memang sedikit berbeda dengan negara-negara otoriter birokratik lainnya. Di beberapa negara Amerika Latin, kemunculan pemerintah otoriter yang didominasi perwira militer tidak berhasil memberangus kelas pekerja. Salah satunya disebabkan kelas pekerja memiliki tradisi politik yang jauh lebih lama dan tua dibanding rezim otoriternya. Sehingga, ketika rezim otoriternya tumbang, tidak ada persoalan yang berarti dalam hal mengembalikan kesadaran politik para pekerja.

Kembali ke konteks gerakan buruh, jika jawabannya yang kedua, yakni buruh tidak protes karena merasa gajinya sudah memadai, maka persoalannya lebih rumit. Perlu dipahami, di negara-negara maju pun kecenderungan umumnya adalah buruh industri tidak akan lagi protes jika mereka sudah menerima gaji yang cukup. Buktinya, hampir semua perdebatan tentang nasib buruh adalah soal gaji, kondisi kerja, tunjangan sosial, bonus, dan hari libur.

Bagi beberapa pengamat yang "radikal" situasi ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan menggunakan konsep "kesadaran kelas". Adalah fakta bahwa kelas pekerja, tidak seperti yang dibayangkan Marx, menerima dan setuju dengan kapitalisme. Dalam bahasa lain, jika kita ingin mengubah kapitalisme, maka kelas pekerja bukan lagi agen perubahan sosialnya. Mereka menjadi sama konservatifnya dengan pemilik modal.

Di beberapa negara maju, seperti Amerika, salah satu pendukung utama pemerintahan konservatif—seperti George W. Bush, ialah kelas pekerja. Begitupun, gejala ini tidak berarti kapitalisme sudah tidak perlu didebatkan lagi atau kapitalisme tidak membawa malapetaka seperti yang dijelaskan Marx. Sebaliknya, kapitalisme tetap menindas dan tetap menyebabkan dislokasi sosial, kemiskinan, eksploitasi, dan kesengsaraan. Hanya saja, penindasan serta eksploitasi tersebut memerlukan cara pandang baru. Untuk memahami kapitalisme, yang sekaligus menjelaskan gejala bahwa saat ini buruh bukan satu-satunya kekuatan revolusioner. Sekarang, sudah banyak muncul kekuatan-kekuatan baru yang bersumber dari gerakan lingkungan, budaya tandingan, atau juga gerakan pembelaan terhadap suku minoritas. []

Disarikan dari hasil wawancara.

Narasumber: Eric Hiariej, SIP, M.Phil, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM serta Peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian.

LANGGAM KEMITRAAN di LAHAN TEMBAKAU

Kemitraan menjadi basis hubungan kerja di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden dan Virginia. Meski dipraktikkan dalam wajah yang berbeda, tetapi sama-sama melanggengkan struktur patronasi yang timpang.

Gelombang reformasi 1998 berhasil membuka pekikan suara dari masyarakat akar rumput untuk mengubah struktur pemerintahan Orde Baru yang konvensional, kaku, bahkan represif. Peristiwa itu diikuti dengan menjamurnya arus gerakan sosial yang mengusung keberpihakan pada kelompok yang terpinggirkan oleh birokrasi tertutup. Kecenderungan tersebut meletup juga di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dikelola PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X).

Sebelum reformasi, kehidupan petani tembakau Vorstenlanden dilumuri kebijakan yang sepihak dan memaksa. Petani dibonsai lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Klaten menyangkut penyerahan tanah sebagai lahan perkebunan dan harga pembelian tembakau Vorstenlanden yang mesti dibayarkan PTPN X. SK Bupati itu merupakan tindak lanjut dari perundingan antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

Sistem Pengusahaan Tembakau Vorstenlanden 1962-2008 (Tabel 1)

Periode	Luas (Hektar)	Sistem Pengusahaan
1962-1969	932-1.897	Kolektif
1970-1979	1.573-1.903	Sewa
1980-1982	1.638-1.860	TVI-Jasa
1983-2001	700-1.200	ITVL
2002-sekarang	700-900	KTVL

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X

(HKTI), instrumen kontrol pemerintahan Orde Baru di bidang pertanian, dan PTPN X. Kedaulatan petani atas tanah sekaligus mata pencaharian pun tereliminasi struktur pemerintahan Orde Baru yang birokratis.

Dengan demikian, adanya upaya petani tembakau Vorstenlanden untuk menguatkan posisi tawar di hadapan PTPN X merupakan bagian dari arus gerakan sosial yang semakin massif pasca-Orde Baru. Dalam praktik, peran Forum Petani Tembakau Vorstenlanden (FPTV) terbilang sentral dalam membangun jejaring kemitraan antara petani dan PTPN X. FPTV yang terbentuk pada 1998 dirancang sebagai "pintu masuk" bagi PTPN X dalam menjalin hubungan kerja dengan petani tembakau Vorstenlanden. Munculnya gerakan FPTV itu merupakan resistensi terhadap birokratisasi ala Orde Baru. Ketika birokratisasi tersebut terkikis, harapan akan menguatnya daya tawar petani pun menyembul.

Sejak 2002, interaksi kemitraan yang diadik atau melibatkan dua pihak antara PTPN X dan petani tembakau Vorstenlanden secara legal formal tertuang dalam perjanjian Kemitraan Tembakau Vorstenlanden (KTVL). Sebelum itu, pada 1983 sampai 2001, sistem pengusahaan tembakau Vorstenlanden dikenal dengan sebutan Intensifikasi Tembakau Vorstenlanden (ITVL) (Lihat Tabel 1). Menurut Murtono, Kepala Bagian Tanaman Unit Tembakau Klaten, PTPN X, adanya perubahan dari ITVL ke KTVL, hanya sebatas pergantian peristilahan. "Mitra itu *kan* sahabat, sebagai teman. Kalau PTPN X merasa ada yang memberatkan, *ya*, petani mesti turut merasakan," tuturnya.

Baik ITVL maupun KTVL, dalam penerapan teknisnya, memang tidak ada perubahan signifikan. "Sebelum musim tanam, PTPN X sama-sama mengadakan perundingan dengan petani untuk menentukan harga pembelian tembakau," tambah Subagio selaku Kepala Bagian Pengolahan Unit Tembakau Klaten, PTPN X. Meskipun mekanisme ITVL dan KTVL dipersepsikan seragam oleh PTPN X, tetapi terdapat perubahan krusial pada 1998 dengan terbentuknya FPTV. Semenjak itu, dalam kerja sama penanaman tembakau Vorsten-landen, FPTV selalu menyodorkan tuntutan ke PTPN X sebagai wujud konkret keberpihakan pada petani dan buruh perkebunan.

Tuntutan FPTV berintikan agar seluruh proses penanaman tembakau Vorstenlanden dilandasi dengan perjanjian kemitraan yang melibatkan petani dan PTPN X. Adanya model "menuntut" dari petani itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, sebelum 1998 pihak yang berunding dengan PTPN X adalah HKTI. Usai HKTI mengadakan perundingan, turunlah SK Bupati yang berisi ketentuan tentang area penanaman dan harga tembakau

Vorstenlanden. "Kalau sudah di-SK-kan, mau tidak mau, petani harus menerima. Itu dilakukan setelah masa tanam tembakau," ungkap Ketua FPTV, Wening Swasono, S.Pt.

Dalam sistem pengusahaan tembakau Vorstenlanden, bercokolnya unsur birokratisasi sebelum 1998 tersebut turut diamini Murtono. Lelaki separuh baya itu menyadari, "Zaman Mas Harto kan begitu. Tetapi, sekarang semua harus ketemu langsung antara wakil petani dengan PTPN X." Karena ketentuan SK Bupati memosisikan petani sedemikian disetir, tuntutan yang pertama kali disodorkan FPTV yakni penolakan terhadap SK. Pasalnya, konsekuensi yang diderita petani akibat SK itu, harga pembelian tembakau yang ditanggung PTPN X ditetapkan secara sepihak alias tanpa mekanisme keterlibatan langsung dengan petani.

Dengan ditolaknya SK Bupati, keberadaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten praktis tidak berperan signifikan atas perkebunan tembakau Vorstenlanden. Kondisi itu berimbas pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. Selama ini, meski kegiatan ekonomi perkebunan tembakau Vorstenlanden terus berputar, Pemkab Klaten tidak pernah "disumbang" kontribusi pendapatan. Karena itu, seluruh harga pembelian tembakau dapat diterima petani secara utuh, tanpa pemangkasan serupiah pun untuk PAD. "Itulah yang menguntungkan petani pemilik lahan hingga kami pun tak menghendaki ada kontribusi ke PAD," tandas Wening.

Alasan lain petani tidak menginginkan pemasukan ke PAD yakni pengalokasiannya yang merata ke seluruh wilayah kabupaten sehingga belum tentu dinikmati kembali oleh desa yang ditanami tembakau Vorstenlanden. "Padahal, saluran irigasi dan jalan-jalan di desa jadi lebih baik karena ada kontribusi langsung dari PTPN X. Pemerintah belum tentu mau membiayai," tukas Wening. Alhasil, kontribusi pembangunan dari PTPN X lebih baik dialirkan langsung ke petani. Pada 2008 ini, sesuai ketentuan yang tertera dalam perjanjian KTVL, institusi desa mendapatkan kontribusi 175 ribu rupiah per hektar.

Selain menghendaki adanya perjanjian kemitraan yang melibatkan petani, FPTV pun menuntut diselesaikannya perundingan perjanjian kemitraan di awal musim tanam. Dengan demikian, petani masih dapat menolak atau menerima tawaran harga tembakau dari PTPN X. "Lewat FPTV, sifatnya memang petani yang meminta, bukan PTPN X. Kalau tidak begitu, petani tidak akan mau menyerahkan lahan," jelas Wening. Sikap

petani tersebut dapat dipahami karena status lahan perkebunan yang merupakan milik petani, meskipun keseluruhan biaya pengolahan lahan bersumber dari PTPN X.

Setelah adanya tuntutan petani melalui FPTV, Wening menengarai, PTPN X sekaligus pemerintah tentu merasa diberatkan. Saat dua tahun awal pengadaan perundingan, 1998 dan 1999, PTPN X tak pernah absen menghadirkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Subdinas Perkebunan Dinas Pertanian, Klaten. Kedua institusi itu merupakan delegasi pemerintah untuk mendampingi PTPN X dalam perundingan. Tetapi, setahun kemudian, FPTV menolak kehadiran wakil kedua institusi itu lantaran dinilai tidak berpihak pada petani, justru cenderung membantu PTPN X. Sejak saat itu, tidak ada lagi campur tangan kedua institusi dalam perundingan. "Kalau orang Pemkab datang, ditolak sama petani yang banyak dari Lembaga Swadaya Masyarakat," ujar Murtono sembari meluapkan tawa.

FPTV berperan dalam memperjuangkan kepentingan petani dengan jalan menuntut pengadaan perundingan perjanjian KTVL. Saat perundingan berlangsung, setiap individu petani yang terlibat, otomatis berstatus wakil desa. Setiap desa mengirimkan personel sesuai jumlah kelompok tani yang aktif di masing-masing desa. Itu pun dapat terjadi pergantian personel karena keberadaan wakil desa diputuskan lewat perundingan kelompok tani. "Kami mengadakan pertemuan kelompok tani terlebih dulu, baru kemudian memilih wakil untuk berunding dengan PTPN X," terang Waluyo (48), Ketua Kelompok Tani Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Klaten.

Secara birokratis, pemerintah desa mesti mengedarkan surat kuasa dengan diketahui ketua kelompok tani dan kepala desa terkait. Surat kuasa yang menerangkan nama dan jumlah personel yang disepakati sebagai wakil desa tersebut diturunkan sebelum perundingan FPTV dengan PTPN X dimulai. Terkait mekanisme penentuan wakil desa, PTPN X menilainya sebagai bagian dari otonomi desa. "Itu merupakan kebijakan masing-masing desa," ujar Murtono.

Perundingan antara FPTV dan PTPN X dimulai sebelum memasuki musim tanam tembakau

Materi Tuntutan FPTV pada PTPN X (Tabel 2)

1. Batas waktu penyerahan dan pengembalian lahan.
2. Jaminan minimal produksi (sesuai waktu penyerahan lahan) sebagai jaminan kegagalan panen.
3. Uang ajon-ajon (uang untuk lahan yang disahkan lebih awal dari waktu yang ditentukan).
4. Penanaman *Crotaria Juncea* untuk pemulihan kesuburan tanah pascapanen.
5. Biaya pemulihan lahan yang harus ditanggung PTPN X.
6. Pengolahan lahan yang harus sesuai baku teknis yang disepakati.
7. Petani harus dilibatkan dalam pengawasan proses produksi, panen, dan pascapanen.
8. Harga tembakau kering los.
9. Uang muka bagi pemilik lahan.
10. Tuntutan agar membagi laba bersih PTPN X kepada petani.
11. Kontribusi pembangunan sarana pertanian.

Aktivitas Produksi di Gudang Sorogedu PTPN X (Skema 1)
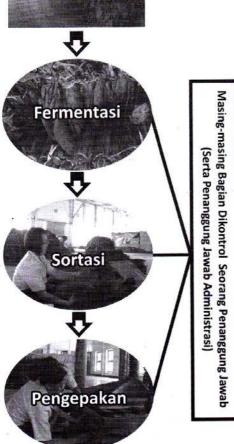
Vorstenlanden, baik jenis Vorstenlanden Bawah Naungan (VBN), Vorstenlanden Klaten (F1K), maupun Vorstenlanden Na-Oogst (Lihat Bagan 1). Pada 2008 ini, misalnya, perundingan digelar pada Februari. Dalam perundingan, terdapat sebelas *item* yang menjadi substansi tuntutan FPTV kepada PTPN X (Lihat Tabel 2). Patokan harga tembakau kering los, tembakau hasil penyimpanan dalam gubug pengeringan di lahan perkebunan, merupakan *item* yang paling sengit diperdebatkan. Untuk menyepakati harga pembeliannya, dibutuhkan tiga sampai empat kali pertemuan atau hampir sebulan. Ditambah penentuan jaminan minimal dan *item* yang lain, keseluruhan proses perundingan memang menghabiskan waktu yang relatif panjang. "Rata-rata bisa sampai 10 hingga 12 kali pertemuan atau hampir tiga bulan," ungkap Wening.

Terkait perdebatan harga tembakau kering los, pada 2008 ini misalnya, petani semula mematok Rp10.000 per kilogram. Namun, bagi PTPN X, nominal tersebut dianggap tidak rasional. Murtono mengemukakan, biaya produksi yang meliputi pengelolaan lahan, proses di gudang pengolahan, sampai ekspor tembakau yang tidak ditanggung petani mestinya dijadikan bahan pertimbangan. "Petani justru tidak pernah menggubris ongkos produksi itu sampai-sampai mematok harga tinggi," tutur Murtono.

Persepsi serupa juga diungkapkan Wening. Menurutnya, karena pertimbangan ongkos produksi, PTPN X akhirnya memutuskan tetap menawar dengan harga tahun sebelumnya, Rp8.250, meski ujung-ujungnya tersepakati Rp8.500 untuk VBN dan Rp8.160 untuk Vorstenlanden Na-Oogst. "Di situlah tarik ulur yang alot. Petani menurunkan, PTPN X menaikkan, sampai ketemu titik kesepakatan," simpul Wening.

Masih berkaitan dengan perhitungan harga tembakau, Wening mengakui, petani memang lebih mementingkan aspek kuantitas daripada kualitas. "Semakin banyak produksi, semakin petani diuntungkan. Soal kualitas, itu urusan PTPN X," ungkap Ketua Kelompok Tani Desa Towangsan ini. Petani memutuskan pertimbangan itu karena PTPN X sendiri yang berkepentingan terhadap kualitas tembakau.

Selain menyodorkan tuntutan ke PTPN X, FPTV juga mengadvokasi kepentingan

warga desa dengan meminta agar buruh di lahan perkebunan dan gudang diutamakan dari desa setempat. Upah antara laki-laki dan perempuan pun tidak boleh dibedakan. Wening mengisahkan, sebelum FPTV berdiri, upah antara laki-laki dan perempuan tidak disamakan dan semua buruh diganjar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). "Seharusnya acuan upah buruh sesuai UMK," tegasnya.

Jika buruh dibayar di bawah UMK, lanjut Wening, FPTV bakal mengajukan komplain ke PTPN X atau bahkan mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans), Klaten. Misalnya, pada musim tanam 2008 ini, upah buruh tidak boleh di bawah Rp18.235 per hari. Upah minimal merupakan standar kesejahteraan hidup bagi buruh di lahan perkebunan dan gudang. Mereka berstatus tenaga lepas yang bisa masuk kerja setiap saat, pun memutuskan hubungan kerja setiap saat.

Tukirah (45) dan Yati (46), misalnya. Kedua buruh di lahan perkebunan di Desa Gadungan itu mengaku diupah Rp18.235 per hari. Di lahan yang terletak di belakang Gudang Wedi-Birit itu, mereka tekun menyirami tiga kali dalam sehari benih tembakau VBN dalam *polybag* kecil yang masih berjajar di bedeng, bidang tanah yang digunakan

Selama ini, meski kegiatan ekonomi perkebunan tembakau Vorstenlanden terus berputar, Pemkab Klaten tidak pernah "disumbang" kontribusi pendapatan.

untuk perkecambahan biji di persemaian. Upah harian itu baru diterima mereka setiap akhir pekan. Pemberian upah yang sama dengan Tukirah dan Yati diterapkan pula oleh Waluyo terhadap 24 buruhnya di lahan seluas 5.3893 hektar di Desa Dukunan, Kelurahan Bakung, Kecamatan Jogonalan, Klaten. "Selain upah harian," lelaki yang juga mandor PTPN X ini melanjutkan, "Tidak ada bonus atau uang kesejahteraan lain yang diberikan PTPN X kepada buruh perkebunan."

Seperlakuan dengan buruh lahan, buruh gudang pun mendapatkan upah secara harian. Menurut Purwanto (38) selaku Penanggung Jawab Sortasi di Gudang Sorogedug, pengupahan buruh gudang secara harian tidak lepas dari kebutuhan PTPN X akan jumlah tenaga kerja yang tidak tetap (Lihat Skema 1). "Kalau harus mengekspor dalam

Perangkat Desa Madurejo yang Menyewakan Tanah Lungguh ke PTPN X (Tabel 3)

No.	Nama	Jabatan	Lokasi
1	Darto Sumantri	Kepala Dusun Ketandan	Utara Dusun Candi Songo
2	Suhadi	Kepala Dusun Tinjon	
3	Sudiro	Kepala Dusun Candi Songo	
4	Lipur	Kepala Dusun Majasem	
5	Bambang Marsudi	Staf Keamanan Desa Madurejo	
6	Supriyanto	Kepala Dusun Serut	Barat Dusun Majasem
7	Mulyanto	Kepala Dusun Gangsiran	
8	Sumadi	Staf Kaurbang Desa Madurejo	
9	Agus Santoso	Kepala Dusun Potrojayan	
10	Suyatno	Kepala Dusun Kebundalem	

Diolah dari: Wawancara dengan Kepala Dusun Sorogedug Lor dan Ketandan

Jumlah	2006	2007
■	106	80
●	117	92
▲	100	85,3
▼	194.233	167.476
Produktivitas/Ha	1.942	1.963

	2006	2007
■	7	4
●	7	4
▲	7	3,5
▼	13.878	6,412

	2006	2007
■	22	21
●	23	23
▲	20	21
▼	41.426	42.128

	2006	2007
■	3	1
●	3	1
▲	2,5	0,8
▼	4.700	1.390

	2006	2007
■	2	1
●	2	1
▲	1,5	0,7
▼	2.226	1.477

	2006	2007
■	8	6
●	10	9
▲	8	7
▼	15.917	14.118

	2006	2007
■	10	9
●	12	11
▲	11	13
▼	23.026	26.544

	2006	2007
■	4	2
●	4	2
▲	4	2
▼	8.044	4.506

	2006	2007
■	8	7
●	8	7
▲	7	8
▼	13.222	16.047

	2006	2007
■	7	3
●	7	3
▲	6,2	3
▼	11.654	5.116

	2006	2007
■	2	3
●	3	5
▲	2	3
▼	3.632	5.588

	2006	2007
■	4	3
●	4	3
▲	5	3
▼	9.828	5.470

	2006	2007
■	22	16
●	27	19
▲	20	17
▼	36.702	31.866

	2006	2007
■	1	1
●	1	1
▲	0,8	0,6
▼	1.449	1.241

	2006	2007
■	3	1
●	3	1
▲	2,5	1
▼	3.867	2.525

	2006	2007
■	3	2
●	3	2
▲	2,5	1,7
▼	4.662	3.048

TEMPEL, TURI, PAKEM, CANGKRINGAN, SLEMAN, NGAGLIK, NGEMPLAK, MINGGIR, SEYEGAN, MLATI, KALASAN, GODEAN, GAMPING, PRAMBANAN, BERBAH

■ : Petani (Orang) ● : Oven (Unit) ▲ : Luas (Ha) ▼ : Produksi (Ton)

Sumber: PT Sadhana Arifnusa

Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau Virginia di Kabupaten Bantul (Tabel 5)

	2006	2007
■	-	2
●	-	2
▲	-	2
▼	-	4.276

	2006	2007
■	3	3
●	3	3
▲	2	2,5
▼	3.569	4.292

	2006	2007
■	4	6
●	5	7
▲	4,5	7
▼	8.710	12.804

Jumlah	2006	2007
■	7	11
●	8	12
▲	6,5	11,5
▼	12.279	21.372

■ : Petani (Orang) ● : Oven (Unit) ▲ : Luas (Ha) ▼ : Produksi (Ton)

Sumber: PT Sadhana Arifnusa

jumlah besar, kami memerlukan buruh dalam jumlah besar," terang karyawan PTPN X asal Kecamatan Piyungan, Bantul ini.

Di Gudang Sorogedug, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Sleman pada Juni 2008, tengah memperkerjakan sekitar 200 buruh perempuan yang setiap hari mendapat upah Rp18.235 yang dibayarkan pada setiap Kamis. Uang tersebut merupakan imbalan bagi buruh yang setiap hari bekerja dari jam 07.00 hingga 11.30 dan dilanjutkan pada 12.30 hingga 15.30. "Lama jam kerja harus diperhatikan. Soalnya harus ada laporan ke Serikat Pekerja Indonesia," imbuh Purwanto. Kondisi jumlah buruh berbeda dapat ditemui pada November atau Desember karena biasanya Gudang Sorogedug hanya membutuhkan 15 buruh gudang.

Secara umum, gerakan FPTV diwujudkan dalam tuntutan perjanjian KTVL. Dalam perundingan tuntutan sebagai wujud dari advokasi petani dan buruh itu, lantaran terbungkus dalam kemitraan, posisi PTPN X menjadi tidak superior. Di hadapan petani, kedudukan PTPN X seimbang, meskipun tuntutan petani sejatinya lebih kuat. Petani justru terkesan menang karena PTPN X membutuhkan tanah. "Kita termasuk golongan 'NU', *nunut urip*," kelakar Murtono, mengomentari PTPN X yang tidak memiliki lahan perkebunan sama sekali. Meski demikian, PTPN X memang lebih kuat perihal pendanaan, jaringan pasar global, dan urusan mengekspor tembakau Vorstenlanden.

Adanya kepemilikan sumberdaya strategis oleh PTPN X, menurut penelitian Drs. Purwanto, M.Phill., Y. Sarworo Soeprato, dan Prof. Dr. J. Nasikun (*Sosiohumanika No. 16 A (11), Januari 2003*), telah menyebabkan bertahannya hubungan patron-klien di perkebunan tembakau Vorstenlanden. Dalam artikel "Hubungan Patron-Klien di Lingkungan Perkebunan Tembakau Vorstenlanden, Klaten Jawa Tengah: Perspektif Sosiologis tentang Ketahanan Nasional" itu diuraikan, praktik patronasi tersebut bertahan karena petani cenderung apatis dan menerima nasib. Di samping itu, tidak sedikit pihak selain petani dan buruh yang turut diuntungkan dari sistem serta roda perekonomian tembakau Vorstenlanden yang terintegrasi dengan kapitalisme global yang eksploitatif. Hanya saja, wujud patronasi itu semakin tersamar setelah mencuatnya tuntutan FPTV yang mengadvokasi petani dan buruh perkebunan. Dijelaskan Dr. Mansour Fakih dalam *Masyarakat Sipil untuk*

Bagan 2
Struktur Organisasi PT Sadhana Arifnusa Gudang Yogyakarta

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

Transformasi Sosial (2004) yang menyitir Antonio Gramsci, perjuangan gerakan kelas mesti dilakukan melalui dua strategi utama. Pertama, melalui "perang manuver" yang ditujukan untuk mengubah kondisi dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dan jangka pendek. Kedua, "perang manuver" tersebut mesti diinternalisasikan sebagai "perang posisi" dalam kerangka perjuangan ideologis dan kultural jangka panjang. Kedua strategi itu menuntut peran dan signifikansi pendidikan kritis guna meyakinkan kelas buruh akan politik perjuangan nilainya. Yakni, supaya tidak tunduk kepada disiplin tetap dari budaya.

Birokratisasi di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden merupakan bentuk disiplin tetap ala Orde Baru yang memosisikan petani dan buruh dalam hierarki yang lebih rendah daripada PTPN X. Apabila terdapat upaya-upaya yang bertendensi memotong mekanisme KTVL, gerakan petani mesti menolak upaya pemotongan tersebut. Kondisi demikian sempat terjadi pada 2007 ketika PTPN X menyewa 10 hektar lahan di Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tanpa melalui perjanjian KTVL, PTPN X langsung menyewa lahan pada petani-petani setempat, artinya tidak melalui kelompok tani. Saat itu, harga yang diperoleh petani ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan melalui KTVL, yakni hanya 7 juta rupiah per hektar. Terlebih lagi, uang sewa itu diserahkan di awal musim tanam sehingga petani tidak akan menikmati imbalan sesuai produktivitas yang dihasilkan saat panen. Politik perkebunan serupa juga dilancarkan PTPN X di Kecamatan Manjung, Klaten.

Untuk merespons balik upaya yang tidak melalui perjanjian KTVL tersebut, karena ditengarai bakal lebih merugikan petani, FPTV selalu mengawal setiap ada pembukaan perkebunan tembakau oleh PTPN X. Strategi teknis yang dipakai yakni dengan menemui langsung pihak kelompok tani. Rumusan sikap yang disebarluaskan FPTV dalam pengawalan tersebut adalah menolak penerapan sistem sewa seperti di Jogonalan dan Manjung. "Untungnya produktivitas di dua tempat tersebut ternyata kecil. Ya, kita syukuri saja," ketus Wening. FPTV, menurutnya, dengan tegas menyatakan bahwa kemitraan

Pembagian Kerja dalam Kemitraan PT Sadhana Arifnusa (Tabel 6)

PT Sadhana Arifnusa

- ☑ Menyediakan seluruh sarana produksi yang berkaitan dengan teknologi budidaya yang meliputi sarana pembibitan, sarana pertanaman, dan sarana procesing. Teknologi budidaya yang dibawa akan ditransfer ke petani oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- ☑ Membuat perencanaan produksi bersama petani tembakau peserta kemitraan agar dicapai efisiensi proses produksi sehingga agribisnis tembakau Virginia layak dan menguntungkan kedua belah pihak.
- ☑ Berkewajiban membeli semua hasil tembakau peserta kemitraan berdasarkan mutu dan grade tembakau sesuai standar internasional.
- ☑ Membantu mencarikan dukungan pendanaan modal kerja dari perbankan atau pinjaman langsung dari PT Sadhana Arifnusa.
- ☑ Berhak mengevaluasi dan menyeleksi petani peserta kemitraan.

Petani Peserta Kemitraan

- ☑ Menyediakan lahan yang memenuhi syarat teknis minimal 0,8 Ha sebagai tempat kegiatan agribisnis tembakau Virginia.
- ☑ Melaksanakan standar teknologi budidaya agar dicapai hasil produksi dan mutu sesuai yang diinginkan sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
- ☑ Berhak mendapatkan fasilitas kredit yang disiapkan perusahaan, meliputi kredit modal kerja (pupuk, obat-obatan, dan sarana procesing) dan kredit investasi oven sesuai dengan tahapan pekerjaan di lapangan.
- ☑ Berkewajiban menjual seluruh hasil produksi ke perusahaan pengelola dan harus mengembalikan semua fasilitas kredit yang diterima.

Pemerintah

- ☑ Fasilitator dan regulator antara petani dan perusahaan guna kelancaran proses kemitraan sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kedua belah pihak.

Sumber: PT Sadhana Arifnusa

perkebunan tembakau dengan PTPN X harus melalui mekanisme KTVL.

Meskipun terus meluaskan pengaruh guna mentransformasikan gagasan keberpihakan terhadap kelompok petani dan buruh, wilayah gerakan yang tercakup oleh FPTV rupanya belum menyentuh kawasan sekitar Dusun Sorogedug. Di daerah itu berdiri gudang PTPN X yang masih beroperasi untuk pengolahan daun tembakau isi cerutu, baik tembakau VBN, F1K, maupun Vorstenlanden Na-Oogst. Menurut keterangan Kepala Dusun Sorogedug Lor, Hartono, pada 2004 dan 2006, setidaknya sepuluh perangkat desa yang memiliki tanah lungguh atau bengkok, tanah yang dalam tradisi Jawa merupakan upah kepada perangkat desa, seperti kepala dusun, masih menyewakan lahan ke PTPN X. Tanah yang disewakan itu terpisah di dua lokasi, yakni 4 hektar di sebelah barat Dukuh Majasem dan 5 hektar di sebelah utara Dukuh Candi Songo (Lihat Tabel 3).

Darto Sumantri (41), Kepala Dusun Ketandan, membenarkan bahwa dirinya pernah menyewakan tanah lungguh ke PTPN X. Tak hanya pada 2004 dan 2006, tetapi juga 2002. Lelaki yang sekaligus bekerja sebagai kontraktor bangunan itu memegang hak milik 1,02 hektar dari lima hektar tanah lungguh di utara Dusun Candi Songo. Karena tanahnya terhitung paling luas daripada empat pemilik yang lain, pada 2002, Dartolah yang berhubungan langsung dengan PTPN X terkait kesepakatan harga sewa. Saat itu, dengan sistem sewa borongan, ia mengantongi 8,7 juta rupiah. Dengan sistem sewa serupa, pada 2004, terjadi peningkatan harga berkat negosiasi para pemilik lahan. Darto pun menerima 9,7 juta rupiah. Sementara itu, pada 2006, penentuan uang sewa dihitung Rp1.000 untuk tiap meter persegi sehingga Darto mengantongi 10,2 juta rupiah.

Menyangkut kesepakatan harga sewa, Darto menilai, posisi tawar PTPN X terbilang lebih kuat dibandingkan pemilik tanah. "PTPN X itu prinsipnya kalau kita *nggak* mau, ya, sudah," ujarnya. Dengan demikian, para pemilik tanahlah yang menuruti ketentuan yang ditentukan PTPN X, termasuk mengenai kisaran harga sewa. Darto menekankan, kesediaannya untuk menyewakan lahan ke PTPN X lebih karena alasan teknis, yakni untuk memotong siklus tahunan penanaman di lahan. "Tanah di sini baik untuk padi. Tetapi, untuk kacang, misalnya, ketika panen sulit dicabut. Jadi, lebih baik ditanami tembakau," urainya. Meskipun demikian, Darto dan para pemilik tanah yang lain tetap tidak menggantungkan penghidupan pada PTPN X. Itu terlihat dari keengganan mereka untuk tidak meminta PTPN X agar menyewa kembali tanah lungguh pada musim tanam 2008. Hingga Juni 2008, tak kunjung ada penawaran sewa dari PTPN X. Tanah lungguh milik Darto justru ditanami jagung.

Selain ke PTPN X, sebagian tanah lungguh di Desa Madurejo juga disewakan ke Perusahaan Gula (PG) Madukismo untuk ditanami tebu. Tanah yang disewakan tersebut umumnya tandus dan tidak produktif. Jika dibandingkan, harga sewa lahan dari PTPN X terhitung lebih tinggi daripada PG Madukismo yang berkisar antara 2,75 juta rupiah sampai 3,25 juta rupiah per hektar. Perhitungan harga sewa itulah yang membuat para pemilik tanah lungguh kepincut untuk menyewakannya ke PTPN X. Selain itu, mereka juga diuntungkan dengan lamanya waktu sewa yang disesuaikan dengan lama musim tanam. Untuk tembakau Vorstenlanden, berlangsung selama tujuh bulan, mulai Mei

sampai November, sementara perkebunan tebu menghabiskan hampir setahun penuh.

Di Desa Madurejo, PTPN X hanya menyewa tanah lungguh untuk membuka perkebunan tembakau Vorstenlanden. Tidak ada tanah penduduk sipil yang diberdayagunakan untuk hal serupa. Adanya perkebunan tembakau Vorstenlanden ternyata tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pertanian di Desa Madurejo. Menurut Hartono, itu karena petani menganggap hasil tembakau Vorstenlanden tidak lebih menguntungkan ketimbang kalau ditanami padi ataupun tanaman palawija. "Lagipula, petani umumnya memiliki tanah yang sempit. Paling-paling 600 atau 1.200 meter. PTPN X menyewa tanah lungguh yang lokasinya sudah mengelompok," ungkap Darto. Kondisi tersebut berkaitan pula dengan mata pencaharian bertani di Desa Madurejo yang hanya dijadikan sambilan. "Mayoritas Pegawai Negeri Sipil. Kalau toh sudah pensiun, justru banyak yang ambisius ke ternak, bukan pertanian," tambahnya.

Selain tak berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pertanian setempat, adanya Gudang Sorogedug pun tidak memberikan kontribusi material ke Dusun Sorogedug Lor maupun Desa Madurejo. "Dalam hati kecil, saya juga bertanya-tanya. Ada perusahaan, kok tidak ada pemasukan?" kesah Hartono. Paling banter, urainya, Dusun Sorogedug Lor hanya meminta sumbangan untuk 17 Agustus-an, pengecoran jalan, ataupun rehabilitasi masjid. Hartono melanjutkan, dampak positif yang dinikmati penduduk Desa Madurejo dengan adanya Gudang Sorogedug sebatas terserapnya tenaga kerja perempuan sebagai buruh kasar di gudang. Gudang Sorogedug bisa menjadi ladang pencaharian ratusan buruh perempuan yang jumlah persisnya menyesuaikan dengan tingkat permintaan ekspor PTPN X. "Sejak zaman penjajahan Belanda, tenaga di sini memang dikenal terampil-terampil sebagai tenaga kasar di gudang," pungkas Hartono.

Sebagian tanah lungguh di Desa Madurejo dimanfaatkan untuk perkebunan tembakau Vorstenlanden walau tanpa melalui perjanjian KTVL. Gudang Sorogedug pun setiap hari menampung ratusan tenaga buruh perempuan. Meskipun demikian, Desa Madurejo secara institusional tetap tidak memperoleh kontribusi materi. Situasi bertambah tidak menguntungkan karena lahan-lahan di sekitar Gudang Sorogedug baru akan dimanfaatkan PTPN X apabila produktivitas dari areal perkebunan di Klaten tidak lagi menutupi jumlah permintaan ekspor. "Pada 2007 kemarin *kan* kita tidak tanam. Areal sini, Klaten, sudah mencukupi," elak Subagio.

Situasi hubungan timbal balik antara PTPN X dan masyarakat di sekitar Gudang Sorogedug di Sleman itu menunjukkan konfigurasi permasalahan yang berbeda dengan di Klaten. Lahan di desa-desa di Klaten setiap tahun dikelola PTPN X sebagai areal perkebunan tembakau. Desa pun secara otomatis mendapatkan kontribusi dana pembangunan dari PTPN X. Dengan begitu, PTPN X sebagai perusahaan negara tidak berdiri otonom di tengah-tengah medan interaksi dengan masyarakat sekitar. Karena itu, terfokusnya gerakan FPTV pada perjanjian KTVL sejak pertama kali dibentuk dapat dinilai tepat sasaran.

Pembibitan

Bibit merupakan pondasi awal dari sebuah keberhasilan. Tanpa bibit yang sehat, seragam dan tersedia cukup, maka akan sulit untuk menghasilkan tembakau yang berproduktivitas tinggi. Standart bibit umur 50-55 hari setelah sebar, tinggi 12 cm, batang sebesar pensil dan perakaran banyak. Untuk 1 ha diperlukan 4 bedengan dengan luas 25 x 1,2 m dengan jarak antar bedengan 60 cm.

Pengolahan tanah

Sasarannya adalah tanah tersebut harus gembur (masak) sebagai media tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman.

Tanam dan stress periode

Penanaman pada luasan 1 unit oven (0.8 - 1 ha) menggunakan bibit yang segaram dan dilakukan dengan jarak waktu maksimal 2 hari, sehingga memudahkan pekerjaan selanjutnya. Sedangkan stress periode adalah suatu masa dimana tanaman tembakau tidak diberi pengairan baik dengan system leb maupun cor (siram) selama lebih kurang 30 hari dengan sasaran merangsang perkembangan akar.

Pemupukan

Petani harus menggunakan pupuk yang memenuhi kebutuhan hara tanaman tembakau baik berupa N, P dan K yang berimbang (450 kg NPK dan 150 kg KNO_3). Dalam hal ini dianjurkan menggunakan pupuk yang resmi dikeluarkan pengelola yang telah diuji baik fisik atau kandungan haranya. Dalam pemanfaatan pupuk harus tepat cara, dosis dan waktunya.

Pengendalian hama dan penyakit

Penyemprotan dilakukan tergantung intensitas serangan, namun hendaknya penyemprotan pertama dilakukan segera setelah tanam dan penyemprotan kedua dilakukan sebelum umur 30 hari setelah tanam serta menggunakan pestisida alami (biologi).

Pengairan

Pada fase pertumbuhan cepat (30-70 HST) minimal dilakukan 3 kali pengairan dengan cara leb ½ guludan sasarannya untuk produktivitas dan untuk mencapai kualitas atau mutu yang optimal (80-105 HST) minimal 2 kali pengairan ¼ guludan.

Dangir

Dangir I dilakukan umur 7-14 HST dan II umur 40-42 HST (dilakukan tergantung kondisi tanah). Sasarannya adalah perbaikan struktur tanah, aerasi dan menambah media tumbuh bagi perkembangan akar.

Topping dan Pengendalinan Suli

Dilakukan dengan cara memotongpucuk (titik tumbuh) saat tanaman berdaun 18an lembar tergantung potensi yang dimiliki tanaman (umur 50-55 HST) dan dilakukan pengendalian suli (tunas samping) menggunakan bahan kimia maksimal 1 minggu setelah dilakukan topping. Sasarannya untuk mengalihkan kegiatan pertumbuhan bunga kearah pertumbuhan daun atas agar menjadi tebal dan besar.

Panen

Panen yang tepat sesuai posisi daun selain dapat mengurangi terjadinya kerusakan daun yang tidak dimasukkan oven (kuantitas) juga berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Untuk 1 ha dilakukan pemanenan 6-7 kali.

Pascapanen

Setelah panen serta pengovenan, harus segera dilakukan proses pemilihan tembakau kering dengan kualitas jelek hingga terbaik yang nantinya dikemas dan dijual ke perusahaan.

Hubungan kemitraan dalam pengusahaan perkebunan tembakau tidak hanya diterapkan PTPN X di Klaten, tetapi juga PT Sadhana Arifnusa (PTSA) di Sleman, Yogyakarta. Di hadapan petani tembakau Vorstenlanden, posisi tawar PTPN X lebih kuat karena memiliki modal dana dan jaringan pemasaran global. Demikian pula dengan PTSA, anak perusahaan PT HM Sampoerna itu berwenang dalam menentukan prasyarat sebelum menjalin kemitraan dengan petani. Pasalnya, PTSA memberikan jaminan harga sekaligus kemudahan untuk menjual tembakau langsung ke PTSA.

Gambaran yang berbeda juga tampak dari keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam kemitraan. Di Klaten, petani melalui FPTV tidak menginginkan keterlibatan Pemkab setempat. Sementara itu, di Yogyakarta, hubungan kemitraan PTSA justru banyak dicampuri peran pemda, baik tingkat propinsi maupun kabupaten. Namun, campur tangan pemda tidak banyak membantu petani, terutama dalam penentuan tugas dan kewajiban serta harga pembelian tembakau yang masih ditentukan PTSA.

Dimulai pada 2002 silam, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta petinggi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DIY mengadakan studi banding ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih dekat tentang keberhasilan perkebunan tembakau Virginia yang dikelola PTSA. "NTB merupakan pemasok 70 persen kebutuhan nasional tembakau Virginia," terang Lalu Kertanah, S.Pt. (33) se

laku Kepala Teknis PTSA Gudang Yogyakarta. Perkembangan perkebunan tembakau Virginia di NTB mulanya termasuk lambat. Meskipun, PTSA menerapkan sistem kemitraan dengan petani, produktivitasnya tetap saja rendah, yakni sekitar 1 ton per hektar. "Baru pada 1994, produktivitas tembakau meningkat pesat sampai 2,5 ton per hektar," ujarnya.

Mencermati perkembangan pesat di NTB, Sri Sultan selaku Gubernur DIY pun meminta PTSA menerapkan model kemitraan serupa di provinsinya. Langkah awal yang ditempuh, observasi lahan yang cocok dijadikan perkebunan tembakau Virginia. Dari hasil observasi, wilayah Sleman layak dijadikan proyek percobaan. Pada 2003, proyek percobaan itu pun terealisasi. Hasil yang ditunjukkan ternyata memuaskan. "Tanamannya tumbuh baik. Begitu pula kualitas daun yang dihasilkan," ungkap Ir. Mashudi, M.Si., Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Sleman. Saat itu, total produksi tembakau Virginia mencapai 88.739 ton dari 42 hektar lahan yang tersebar di empat kecamatan, yakni Cangkringan, Ngemplak, Pakem, dan Kalasan.

Pengembangan perkebunan tembakau Virginia terus berlanjut. Memasuki sewindu kiprah PTSA di Yogyakarta, perkebunan tembakau Virginia tidak hanya terkonsentrasi di Sleman, tetapi juga Bantul (Lihat Tabel 4 dan 5). Seluruh kegiatan itu dikontrol dari kantor PTSA Gudang Yogyakata di Jalan Cangkringan 234 Kecamatan Pakem, Sleman. Kantor tersebut memiliki 18 karyawan. Terdiri atas seorang penanggung jawab kegiatan, empat orang bagian administrasi dan keuangan, seorang *grader* atau penilai mutu tembakau, dua orang koordinator wilayah, dan sepuluh petugas penyuluh lapangan (Lihat Bagan 2).

Melengkapi kronologis keberadaan PTSA di Yogyakarta, Mashudi menuturkan, kedatangan PTSA berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab pemda (Lihat Tabel 6). "Pemda sebatas menjalankan fungsi fasilitasi dan regulasi," sebutnya. Penerapan fungsi fasilitasi, di antaranya, menjamin PTSA bertempat tinggal dan menyiapkan petani sebagai mitra. Sementara itu, fungsi regulasi atau perlindungan terwujud dalam bentuk kewenangan

untuk mengkaji penerapan peraturan atau pun teknologi perkebunan yang mutakhir.

Selain kedua fungsi tersebut, pemda juga berkewajiban moral untuk menengahi setiap konflik yang melibatkan PTSA dan petani. "Kami bisa memanggil kedua pihak untuk bermusyawarah," tutur Ir. Joko Susilo, M.M.A. (51) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), DIY. Seperti dicontohkan Kertanah, pemda mesti menyelesaikan polemik pada Maret 2006 menyangkut dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap petani.

Dalam kasus tersebut, petani tidak mendapatkan BBM bersubsidi untuk memanggang daun tembakau dalam oven (Lihat Tabel 7) seperti yang diterima pegiat industri kecil dan menengah. Untuk menyelesaikan polemik ini, Komisi B DPRD Provinsi DIY bersama Paguyuban Petani Tembakau Virginia (PPTV) akhirnya menggelar audiensi yang melibatkan Dishutbun Provinsi DIY, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi DIY, Pertamina Perwakilan DIY, beserta PTSA Gudang Yogyakarta. Hasilnya, petani berhak menerima BBM bersubsidi karena digolongkan sebagai pegiat industri kecil dan menengah.

Paguyuban yang terlibat dalam audiensi tersebut, PPTV, merupakan organisasi nonformal untuk pengoordinasian petani tembakau Virginia. Di Sleman, 192 petani tembakau Virginia tergabung di dalamnya. Paguyuban secara teknis tersebut masih dikembangkan dalam paguyuban wilayah, yakni wilayah Sleman bagian barat dan timur. Pelebaran struktur itu dimaksudkan untuk mempercepat arus informasi dan evaluasi. Sistem paguyuban per wilayah baru diterapkan pada 2007.

Selain polemik dampak kenaikan BBM yang telah mencuat, sumber konflik yang potensial melibatkan PTSA dan petani adalah mengenai penentuan mutu dan harga tembakau. "Meski di awal musim tanam selalu diselenggarakan forum bersama, kami tetap tidak berwenang menentukan mutu dan harga tembakau," ungkap Sri Setyowati (40), petani mitra PTSA dari Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Sleman. Adanya kewenangan PTSA untuk menentukan harga dan membeli tembakau sesuai mutu memang membuat petani tidak memiliki pilihan. "Mereka akan tetap melepaskan hasil produksinya karena berstatus mitra PTSA," terang Mashudi.

Dalam hubungan kemitraan yang dibangun PTSA, sistem pembagian hasil yang diterapkan berwujud peminjaman modal dari PTSA. Modal tersebut tidak berbentuk uang tunai, tetapi bahan material perkebunan seperti pupuk, obat antihama, dan bibit tembakau. Dalam hal ini, tidak terdapat retribusi ataupun pemasukan pendapatan ke pemda. "Modal diberikan dalam bentuk material agar tidak disalahgunakan dan benar-benar tepat sasaran," jelas Mashudi.

Melalui sistem peminjaman modal ini, petani yang menaati teknis pelaksanaan dari PTSA tentu menuai dampak positif berupa keuntungan (Lihat Tabel 8). Sebaliknya, bagi petani yang tak mengindahkan, sering tidak memperoleh keuntungan karena impas dalam pengembalian modal. Kondisi demikian terjadi karena dalam budidaya tembakau Virginia, teknologi yang diterapkan mesti benar-benar tepat. "Kalau tidak, tembakau yang dihasilkan dapat bernilai jual rendah," kata Sri Setyowati yang juga alumnus UGM ini.

Tabel 8
Estimasi Biaya
Pengusahaan Tembakau *Virginia* pada 2008 (per Hektar)

	No.	Uraian	Nilai (Rp)
Sarana Produksi	1	Pembibitan	530.000
	2	Pertanaman	3.400.000
	3	Processing	5.000.000
		Jumlah	**8.930.000**
Ongkos Produksi	1	Pembibitan	800.000
	2	Persiapan lahan	2.700.000
	3	Tanam dan Pemeliharaan	3.000.000
	4	Panen dan processing	4.000.000
		Jumlah	**10.500.000**
Penyusutan dan bunga bank			1.200.000
Sewa lahan			5.000.000
		Total	**25.630.000**
Produktivitas /ha			2.200
Everage harga			18.000
Total Penjualan			39.600.000
Keuntungan			13.970.000

Sumber: PT Sadhana Arifnusa

Jalinan kemitraan dalam sruktur perkebunan tembakau Virginia di Yogyakarta lahir karena inisiatif pemda. Kebijakan itu mencerminkan iktikad baik negara untuk memberdayakan kalangan petani. Sayangnya, justru merupakan tindakan yang mengerdilkan petani jika pembagian kerja dan penentuan harga saja tidak melibatkan partisipasi langsung mereka. Pemda, petani, dan perusahaan mula-mula mesti reflektif, untuk kemudian bersikap korektif. Reflektif karena langgam kemitraan yang dibangun dapat dimaknai sebagai hubungan patron-klien.

Petani tembakau Virginia dengan kondisi sosial ekonomi lebih rendah merupakan klien. Sedangkan PTSA merupakan patron dengan hak istimewa tertentu yang dapat menggunakan pengaruhnya pada petani. "Namun, tidak perlu memutus hubungan patron-klien. Yang penting adalah adanya proses negosiasi," tutur Prof. Dr. Suhartono, dosen Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Dengan demikian, tanpa terkecuali, mesti dirumuskan satu keseimbangan kolektivitas yang mengakomodasi ketiga kutub kepentingan demi hubungan kerja yang berkeadilan sosial.

Beranjak dari perkebunan tembakau Vorstenlanden di Klaten, lantas menyambangi lahan tembakau Virginia di Yogyakarta, tampak dua struktur perkebunan tembakau yang sama-sama menerapkan prinsip hubungan kerja yang diadik. Diadik berarti mendasarkan pada relasi resiprokal, timbal balik, antara perusahaan pengelola perkebunan dan petani. Di Klaten, PTPN X membangun struktur timbal balik dengan kelompok tani. Sedangkan di Yogyakarta, PTSA lebih menekankan pada interaksi dengan individu petani. Hubungan yang memang berbeda, tetapi melanggengkan lagu pemberdayaan atas minoritas petani yang memiliki lahan. Sementara dari sisi buruh perkebunan, kenyataan akan terputusnya kegiatan di lahan tanpa kontribusi mereka selalu ditempatkan sebagai isu pinggiran. Lagu lama praktik patronasi yang berjenjang dan selalu timpang. [ ]

M. Lubabun Ni'am A.S.

Editor: Upik Dyah Eka N.| **Reporter** : Ridwan Nugroho S., Latifah Fitriyanti, Rita Pamilia, Yuliana Yuli Astuti | **Visual** : Kirana Yunita

TEMBAKAU RAKYAT TAK SENIKMAT ROKOK INDUSTRI

Tembakau rakyat muncul sebagai kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Dalam alur distribusi, tembakau kerap berhubungan dengan industri rokok. Lantas, apakah hubungan tembakau rakyat dengan industri rokok menguntungkan petani?

Tangan kecil kurus itu dengan cekatan mencabuti rumput yang berada di lahannya. Sejak pagi sampai sore, Siti (70) mencabuti tanaman yang dinilai mengganggu dari bibit tembakau yang tengah ditanamnya, semisal rumput atau bibit yang mati kehujanan. Siti merupakan petani sekaligus penjual bibit tanaman tembakau di Desa Solodiran dan Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah. Untuk setiap bibit, ia jual seharga Rp25 sampai Rp50. Aktivitas yang sama dilakukan Gunardi (42), yang ketika ditemui tengah mencabuti hama di lahan tembakau miliknya, tidak jauh dari kebun Siti. Di lahan 50 m², Gunardi rajin menyambangi lahannya, sebelum bibit-bibit tembakau itu bisa dipindah ke pot. Ia juga menyediakan plastik memanjang dengan tiap sisi ditopang kayu untuk melindungi bibit tembakau apabila kehujanan. "Kalau kehujanan, bibit tembakau bisa mati," ujarnya sembari membuka-tutup plastik yang sewaktu-waktu bisa digulung untuk menunjuk bibit yang kuning kecokelatan akibat kehujanan.

Berbeda dengan Siti yang petani nonkemitraan, Gunardi harus merawat bibit tembakau Fertila lebih cermat. Pasalnya, bibit tembakau yang ia tanam merupakan hasil kerjasama atau kemitraan dengan PT Djarum. Ia mengaku seluruh pembiayaan tanam di lahan seluas dua hektar miliknya ditanggung oleh PT Djarum. Biaya total bisa menghabiskan 6 juta rupiah tiap hektar. Berarti, PT Djarum membiayai hingga 12 juta rupiah untuk pengelolaan lahannya. Apabila hasil panen Gunardi dijual ke PT Djarum, maka perusahaan itu menagih modal awal yang sebelumnya diberikan kepadanya. Sementara itu, pabrik menghargai tembakau Gunardi Rp28.000 per kilogram. Dari dua hektar lahannya, Gunardi dapat menghasilkan 5 ton tembakau. "Setiap kali panen, ya, untung bersihnya sekitar 10 juta," selorohnya.

Kerjasama atau kemitraan di Solodiran telah dilakukan sejak 1973. Menurut Jumiyo (54), Kepala Desa Solodiran, Manisrenggo, Klaten, saat itu industri-industri rokok besar datang ke Manisrenggo untuk menyurvei potensi kualitas tembakau. Hasilnya, beberapa industri rokok seperti PT Djarum, PT Gudang Garam, dan PT Bentoel getol menjalin kemitraan dengan warga karena kualitas tembakau asal Manisrenggo dianggap cocok dengan kebutuhan industri rokok. Industri-industri rokok itu pun mendirikan gudang cabang di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, untuk menampung tembakau dari petani di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Klaten.

Untuk kemitraan dengan PT Djarum, warga diberi modal mulai dari penanaman, pengolahan, pengepakan dalam keranjang, hingga pengangkutan. Seperti yang dialami Gunardi, segala kebutuhan petani dari penanaman hingga pengolahan dibiayai pabrik. Walaupun, nantinya pendapatan hasil penjualan tembakau akan dipotong untuk modal yang sebelumnya dipinjamkan pabrik. Pabrik memberikan jaminan pasti akan pembelian tembakau dari mitranya. Sistem ini yang membuat Gunardi betah menjalin kemitraan dengan PT Djarum selama tiga tahun terakhir.

Tak hanya Gunardi, ada juga warga yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, yakni PT Gudang Garam, Tbk. Dedi (47) merupakan salah seorang penilai mutu atau *grader* dari PT Gudang Garam Tbk. di Desa Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten. *Grader* ialah orang yang dapat mengetahui harga tembakau dengan mengukur kualitasnya melalui warna, aroma, dan rupa. Sebagai *grader*, dia harus memiliki gudang untuk menampung hasil pembelian tembakau dari petani di desa tersebut dan desa lain yang ada di Prambanan atau Manisrenggo.

Selain sebagai *grader*, Dedi juga menjalin kemitraan bersama warga sekitar dengan memberi pinjaman modal pada petani sebelum musim tanam. Besaran pinjaman yang diberikan Dedi disesuaikan dengan luas kepemilikan lahan petani. Model pemberian pinjamannya menggunakan sistem piramida terbalik dari atas ke bawah. Pinjaman diberikan pada salah seorang petani, kemudian dilanjutkan kepada petani lainnya. Model seperti ini dinilai efektif untuk mengontrol mitra yang dipercayainya. Dengan demikian, Dedi bisa membeli tembakau dari petani yang dipinjami modal untuk memenuhi kebutuhan stok gudangnya. Kemudian, dia menjualnya ke PT Gudang Garam, Tbk.

Harga Tembakau Kemitraan Petani yang dijual ke Pabrik dan Nonkemitraan di Manisrenggo (Tabel 1)

Harga Tembakau Kemitraan

Golongan Kualitas	Harga Jual
A	Rp 12.000
B	Rp 22.000
C+	Rp 25.000
C	Rp 29.000

Harga Tembakau Nonkemitraan

Golongan Kualitas	Harga Jual
A	Rp 8.000-10.000
B	Rp 14.000
C	Rp 22.000
D	Rp 30.000
E	Rp 35.000
F	Rp 40.000-60.000

Berbeda dengan PT Djarum, kemitraan Dedi dan petani sekadar pada pemberian modal penanaman saja. Untuk perajangan, pengolahan sampai pengangkutan ditanggung oleh petani. Modal yang dipinjamkan Dedi pun tidak mencukupi kebutuhan petani. Petani kerap meminjam uang pada pihak lain, seperti bank. Sementara itu, hampir seluruh masyarakat Desa Kebondalem Lor bergantung pada kemitraan pinjaman yang diberikan Dedi. "Ketika *grader* tidak memberi pinjaman modal, petani bisa kolaps," ujar Didik Purwadi Nugroho (39), Kepala Desa Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten.

Kemitraan yang dilakukan Dedi dengan petani bukanlah kemitraan resmi dengan PT Gudang Garam, Tbk. Dedi hanya *grader* pemilik gudang untuk pasokan kebutuhan pabrik. Karena itu, harga pembelian yang ditetapkan Dedi bukan harga ketetapan pabrik.

Berbeda dengan model kemitraan resmi, pabrik mendirikan gudang untuk kebutuhan pasokan industri dan menentukan harga beli tembakau untuk kebutuhan stok gudangnya. Dalam kerja kemitraannya pun pihak pabrik selalu melibatkan petani. Misalnya, petani diajak untuk berkumpul di cabang gudang penampungan tembakau Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Di Muntilan, petani diberi arahan untuk penanaman dan pengolahan yang sesuai keinginan pabrik. Pada pertemuan itu, harga pembelian tembakau dari petani juga ditetapkan oleh pabrik.

Jadi, ketetapan harga tembakau kemitraan bukan kesepakatan antara petani dan pabrik rokok. Soal besaran harga, pabrik juga menetapkan harga tembakau di bawah standar tembakau yang dijual bebas. Harga tembakau dipatok di bawah Rp30.000, berbeda dengan harga tembakau yang dijual tanpa kemitraan (Lihat Tabel 1).

Harga kemitraan di atas merupakan harga satuan yang ditentukan pabrik. Perbedaan harga penjualan kemitraan dan nonkemitraan ini membuat petani yang dirugikan oleh ketetapan harga dari pabrik memilih tidak bergantung pada kemitraan, seperti Gunardi. Dia menjadi pemborong spekulan tembakau di daerahnya karena harga

kemitraan pabrik dinilai murah dan harga tembakau nonkemitraan yang spekulatif.

Tanaman tembakau milik warga Solodiran dibeli olehnya saat daun belum dipetik, istilahnya sebagai penebas. Gunardi membeli daun tembakau yang masih di pohon dengan satuan hitung patok. Satu patoknya berukuran 1800 m^2 dan untuk setiap patoknya ia harus merogoh kantong sampai 2 juta rupiah. Dengan modal 15 juta rupiah, dia dapat mempekerjakan 15 orang buruh untuk menebas daun tembakau petani lalu dirajang di rumahnya dengan dua mesin perajang. Setelah itu, Gunardi menjual tembakau rajang kering ke tengkulak seharga Rp50.000 per kilogram.

Banyak faktor penentu harga tembakau, salah satunya warna daun (Lihat Tabel 2). Beda warna, harga pun berbeda. Menurut Sriharto, buruh tani yang bekerja di lahan Jumiyo, perbedaan warna daun ini menentukan aroma. Perbedaan warna daun diperoleh berdasar lama penyimpanan tembakau. Penyimpanan disesuaikan dengan pemetikan daun tembakau yang dipetik dari tangkai bawah ke atas dalam dua minggu sekali. Warna daun tembakau setelah penyimpanan itu menentukan golongan tembakau beserta harganya. Tembakau berwarna hitam mengkilat dijual paling tinggi karena disimpan lebih lama.

Setelah melalui proses pemetikan dan penyimpanan, tembakau tidak langsung dijual. Gudang-gudang pabrik di Muntilan, Magelang hanya menerima tembakau pascarajang. Secara tak langsung, petani harus memiliki mesin perajang. Sedangkan, harga satu mesin rajang mencapai 15 juta rupiah. Seperti diakui Sriharto, menggunakan mesin rajang hasilnya lebih cepat. Hasil rajangan mesin per hari bisa menghasilkan 8 ton, sementara memakai parang hanya 750 kilogram. Belum lagi kualitas rajang hasil mesin lebih halus, sedangkan alat rajang parang cenderung kasar. "Pabrik itu minta yang halus dan bagus," kata Sriharto.

Selama ini, petani bisa untung jika pabrik-pabrik semacam PT Djarum, PT Bentoel dan PT Gudang Garam, Tbk. membutuhkan tembakau rakyat sebagai pasokan industri tersebut. Apabila permintaan pabrik semakin meningkat, harga tembakau rajang kering bisa mencapai Rp80.000/ per kilogram. Namun, ketika permintaan pabrik tidak

Warna Daun Saat Ditebas (Tabel 2)

Sumber: hasil wawancara dengan Sriharto(31), buruh tembakau.
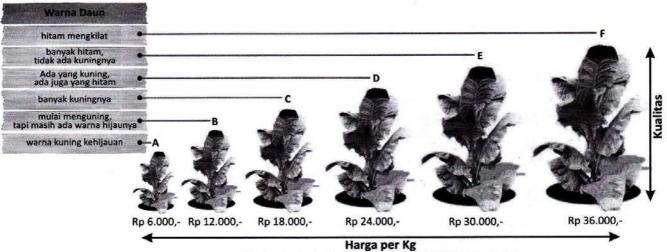
naik, maka harga tembakau rajang kering bisa merosot hingga Rp30.000. Sistem inilah yang disebut "buka-tutup gudang". Hasil panen petani tembakau di Solodiran kemudian mengalami ketergantungan terhadap pabrik atas pembelian tembakau. Pabrik memanfaatkan kondisi tersebut untuk menekan harga tembakau dengan alasan stok tembakau yang masih tersedia.

Jumiyo sebagai penadah tembakau dari masyarakat desanya mengungkapkan, pabrik kerap kali mempermainkan harga tembakau lewat *grader*. Pabrik menentukan harga untuk pembelian tembakau dari petani. Tapi, dengan siasat perbandingan harga di wilayah lain, *grader* menekan agar harga tembakau di bawah ketentuan harga pabrik. Harga yang turun menjadi keuntungan *grader*. Ditambah lagi, subjektivitas penilaian *grader* bisa seenaknya menentukan harga tembakau. "Penilaian rasa dan aroma itu *kan* abstrak," tambah Didik.

Sementara itu, Didik Purwadi Nugroho menilai terdapat ketidakpastian harga tembakau. Hal itu disebabkan oleh posisi petani tembakau yang lebih lemah dibanding industri. Walaupun tembakau sebagai komoditas yang berbiaya tinggi, tapi bisa dijual murah ke industri. "Istilahnya bisa diinjak," ujarnya sembari memeragakan kaki kanannya diangkat dan diputarkan posisi sandalnya. Penghasilan panen tembakau selama tiga bulan masa tanam tembakau harus mencukupi segala kebutuhan petani selama satu tahun.

Seperti petani lain, Gunardi juga merasa bahwa menanam tembakau kadang bisa beruntung besar, sekaligus bisa membangkrutkan petani. Petani diuntungkan jika pabrik rokok tengah membutuhkan tembakau atau yang disebut sistem "buka gudang". Menurut Didik, keuntungannya dapat berlipat dari modal yang dikeluarkan petani. "Sampai-sampai kalau petani tengah untung, *dealer* motor yang keliling di desa, ada warga yang memanggil, dan saat itu juga langsung dibeli," ujarnya sembari tertawa.

Luas Area Lahan dan Produktivitas Tembakau Rakyat Kabupaten Bantul (Tabel 3)

	Kecamatan	Luas TM	Luas Panen (ha)	Jumlah Produksi (ku)	Produktivitas (ku/ha)
2004	Piyungan	85	85	467, 50	5,5
	Dlingo	127,5	127,5	841, 50	6,6
	Pleret	27	27	137, 70	5,1
	Jetis	0,5	0,5	2, 50	5
	Pundong	7	7	44, 80	6,4
	Imogiri	275	275	1. 782, 00	6,48
	Kasihan	9	9	67, 50	7,5
	Total	**531**	**531**	**3.343, 50**	**6,29**
2005	Piyungan	85	85	482, 00	5, 67
	Dlingo	30	30	150, 00	5, 00
	Pleret	65	65	402, 00	6, 18
	Kasihan	5	5	32, 50	6, 50
	Pundong	0,5	0, 5	2, 50	5, 00
	Imogiri	201	201	1.105, 50	5, 50
	Total	**386, 50**	**386, 50**	**2.174, 50**	**5, 63**
2006	Pundong	3, 00	3, 00	18, 00	6, 00
	Imogiri	153, 00	153, 00	1.008, 05	6, 59
	Piyungan	40, 00	40, 00	245, 00	6, 13
	Pleret	3, 00	3, 00	18, 00	6, 00
	Total	**199, 00**	**199, 00**	**1.289, 05**	**6, 48**
2007	Pundong	2, 00	2, 00	9, 60	4, 8
	Imogiri	153, 00	153, 00	1.008, 50	6, 59
	Piyungan	62, 00	62, 00	406, 20	6, 55
	Pleret	6, 50	6, 50	40, 30	6, 2
	Dlingo	10, 00	10, 00	61, 00	6, 1
	Total	**233, 50**	**233, 50**	**1.525, 60**	**6, 53**

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul 2004-07

Lain dulu, lain sekarang. Kini, penjualan tembakau telah surut. Ketika pabrik tidak membutuhkan tembakau dari petani, pabrik bahkan sampai tidak membeli sama sekali tembakau dari petani. Saat itu, ada petani yang tidak bisa membayar hutang pada bank. Sampai-sampai, menurut Gunardi, Solodiran itu sudah dicap negatif sehingga tidak diberi pinjaman oleh bank. "Sudah di-*blacklist*," ujarnya sembari terkekeh. Padahal, sekitar 90 persen warga Kebondalem Lor, Prambanan, merupakan petani tembakau. Karena dinilai merugikan, Didik berencana mengganti komoditas tembakau ini dengan varietas tanaman sayuran organik yang pasarnya jelas dan bisa menguntungkan petani.

Serupa halnya dengan upaya Didik di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, peralihan tanam dari tembakau ke tanaman lain juga

Sumber: hasil wawancara dengan Sumardianto (34), Kepala Dukuh Siluk 1 Selopamioro dan petani tembakau.

mulai diintensifkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bantul lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan. Oleh karena arah penjualan dan harga tembakau yang tidak pasti, Idham Samawi, Bupati Bantul, DIY, menginstruksikan agar tembakau diganti dengan tanaman yang bisa menguntungkan petani, seperti tebu. Tebu dinilai tidak berisiko terkena hama dan tak membutuhkan pengairan seperti halnya padi.

Sebelumnya, penginstruksian dari bupati itu disebabkan oleh kerugian yang dialami petani beberapa tahun belakangan. Akibatnya, menurut Andar Arwiyati (59), Kepala Seksi Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bantul, banyak lahan pertanian beralih tanam ke komoditas pertanian yang menguntungkan saat musim kemarau. Semisal jagung, lombok, tebu, palawija, dan lainnya. Di beberapa kecamatan di Bantul sejak 2004, keinginan petani untuk menanam tembakau setelah menanam padi mulai susut (Lihat Tabel 3). Misalnya, di Imogiri pada 2004 luas pertanian tembakau seluas 275 hektar kemudian 2005 menjadi 201 hektar, dan 2006-07 menjadi 153 hektar. "Ini keberhasilan petani mengganti tembakau dengan tanaman lain," ujar Andar.

Meskipun demikian, di Bantul, petani tembakau masih banyak dijumpai. Hal itu dikarenakan kondisi tanah di Bantul cocok untuk ditanami tembakau. Masyarakat menanam padi saat musim hujan dan menanam tembakau ketika musim kemarau sekitar awal Mei. Warga Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, DIY, memilih masih menanam tembakau karena tekstur tanah di wilayah itu berbukit. Kondisi jenis tanah latosol yang berwarna merah kuning dan memiliki kandungan tanah liat dinilai cocok untuk tembakau. Sementara itu, daerah datarannya terdapat jenis tanah aluvial atau berpasir yang persebarannya pada Sungai Oya dan Celeng. Perbukitan ini mengalami kesulitan dalam penyediaan air. Itu sebabnya padi hanya ditanam saat musim penghujan, setelah itu masyarakat Selopamioro menanam lombok, jagung, dan tembakau.

Walaupun tembakau sebagai komoditas yang berbiaya tinggi, tapi bisa dijual murah ke industri.

Selain kecocokan tanah, bertanam tembakau di Bantul telah menjadi tradisi sekaligus sebagai pendapatan tambahan. Penanaman tembakau di Bantul telah berlangsung sejak masa kolonialisme Belanda di Jawa, termasuk di Desa Selopamioro. "Dari dulu kakek-nenek saya sudah menanam," ujar Sumardianto (34), Kepala Dukuh Siluk 1, Desa Selopamioro. Tembakau di Desa Selopamioro dikenal dengan tembakau Siluk. Sebab, dua di antara 18 dusun yang ada di Selopamioro ialah Dusun Siluk (Siluk 1 dan 2), dan di kedua dusun itu sebanyak 45 persen penanam padi sekaligus petani tembakau.

Menurut Tirtowardoyo (86), warga Siluk 1 RT01/04, Desa Selopamioro, sejak masa kolonialisme Belanda masyarakat desa ini sudah menanam tembakau. Pak Tirto, begitu biasa dipanggil, lahir pada 1921, dan saat itu orangtuanya sudah menanam tembakau. Masyarakat Selopamioro saat itu juga rutin menyetor tembakau Siluk ke Keraton Yogyakarta untuk bahan konsumsi. Tembakau Siluk dinilai wangi, sebab tembakau ini dibungkus dengan daun jati. Sampai Tirto mewariskan lahan pertanian ke sembilan anaknya pada '70-an, warga Selopamioro tidak pernah lagi mengirim tembakau Siluk ke keraton. Alasannya, setelah kemerdekaan, keraton tidak lagi menerima pemasukan dari masyarakat dalam bentuk hasil bumi seperti tembakau.

Menurut laporan penelitian Prof. Dr. Suhartono pada 1996, "Agroindustri dan Protes Petani di Yogyakarta 1870-1920" menyebutkan bahwa pertanian tembakau dikenalkan pemerintah kolonial sejak pemberlakuan masa sewa tanah 1870. Menurut guru besar Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM itu, pada 1870 para pengusaha swasta Belanda mulai mengintensifkan ekonomi perkebunan melalui sewa tanah perkebunan dari pejabat daerah di Kesultanan Yogyakarta. Tembakau adalah salah satu komoditas yang saat itu banyak ditanam.

Prof. Dr. Soegianto Padmo, M.Sc., bersama Drs. Edhie Djatmiko dalam buku "Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi" juga menambahkan bahwa tembakau rakyat dikenal karena perjumpaan kapitalisme Belanda yang menyewa lahan petani Jawa. Menurut Soegianto Padmo, hal itu bermula dari hubungan antara ekonomi petani yang subsisten dengan ekonomi perkebunan yang padat modal. Pada kenyataannya, hubungan itu tidak mesti dikaitkan dengan eksploitasi. Justru ekonomi perkebunan ternyata mampu menciptakan peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pendapa

Harga Tembakau Rakyat 2007 (Skema 2)

Prarajang: Rp 700 /pohon, yang biasanya berjumlah 27 lembar daun.

Rajang

Pascarajang:

Rp 22.000-25.000 /kg apabila dijual ke tengkulak dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul

Rp 25.000-30.000 /kg dijual petani langsung ke pasar

Sumber: hasil wawancara dengan Sumardianto, Kepala Dukuh Siluk 1.

tan kala itu. Tak heran, sampai sekarang masyarakat masih melakukan kegiatan pertanian tembakau sebagai usaha tambahan.

Pengertian tembakau rakyat sering dikaitkan dengan tembakau lokal, yang notabene berbeda dengan tembakau Virginia. Mulai dari perajangan hingga penjualan tembakau, petanilah yang menentukan sendiri. Di Desa Selopamioro, petani merajang tembakau dengan parang, lalu dikeringkan, hingga dibungkus dengan plastik dalam satuan kilogram, dan menjualnya. Dalam penjualan tembakau, petani ada yang menjualnya ke bakul kampung, tengkulak desa, atau tengkulak yang berasal dari daerah lain yang sengaja datang ke Selopamioro (Lihat Skema 1).

Dalam hal penjualan, tembakau rakyat cenderung tidak punya pangsa pasar sendiri. Mulai dari penanaman, perajangan, dan pengolahan sampai harga jual tembakau ditentukan oleh petani. Selain sebagai penanam, petani juga menjadi penjual tembakaunya. Petani mempunyai kewenangan untuk menjual tembakaunya ke pasar tertentu sampai menentukan harganya.

Di dalam alur penjualan tembakau rakyat pun ada pihak yang mendapat keuntungan yakni para pedagang perantara. Drs. Edhie Djatmiko menjelaskan dua sebab keberadaan tengkulak dalam ritme penjualan tembakau rakyat. Pertama, petani tidak dapat memasarkan hasil produksi tembakau, entah langsung ke konsumen atau ke industri rokok. Hal itu bisa disebabkan oleh tempat tinggal dan lahan petani yang jauh dari pabrik dan hasil panen yang jumlahnya sedikit. Sedangkan, pabrik tidak menerima tembakau dalam jumlah sedikit dan pengangkutan hasil tembakau yang akan dijual memerlukan biaya mahal. Kedua, pabrik rokok tidak mempunyai tenaga penilai mutu dan aroma tembakau. Oleh sebab itu, pabrik memerlukan *grader* yang memiliki kemampuan dapat menilai kualitas tembakau serta mempunyai jaringan dengan petani. Pabrik memanfaatkan *grader* untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan stok tembakau dari petani.

Saat petani memerlukan orang lain untuk memasarkan tembakaunya, maka keberadaan perantara menjadi penting. Di setiap desa, ada perantara yang punya hubungan dekat dengan petani tembakau, seperti bakul kampung. Bakul kampung ialah orang yang biasa mengambil hasil panen tembakau penduduk, baik dengan hutang maupun dibayar kontan. Mereka adalah orang kampung sekitar yang berkeliling dan menawari penduduk agar menjual tembakau kepadanya. Bakul kampung bisa melanjutkan penjualan tembakaunya kepada tengkulak di kampung atau tengkulak dari daerah luar yang sengaja datang ke Selopamioro.

Adanya tengkulak kampung, yaitu orang yang membeli tembakau dari petani dengan harga tidak lebih dari modal tanam merupakan kelanjutan dari siklus tembakau rakyat. Mereka meneruskan penjualan tembakau kepada tengkulak asal daerah lain. Tembakau rakyat bisa dijual ke tengkulak dalam bentuk tebas, tembakau basah, atau rajang kering. Tembakau tebas merupakan tembakau yang dijual saat masih ditanam dengan harga per pohon. Sementara, tembakau basah dijual dalam bentuk daun sebelum dirajang, dan tembakau rajang kering ialah tembakau yang dijual setelah melalui proses perajangan. Namun, biasanya tengkulak membeli tembakau sebelum ditebas. Sebab, harga daun tembakau yang belum dirajang lebih murah ketimbang yang telah dirajang (Lihat Skema 2). "Biasanya tengkulak membeli saat musim tebas," ujar Sumardianto, yang selain kepala dukuh juga berprofesi sebagai petani tembakau. Kemudian, tengkulak kampung pun bertindak sebagai pengumpul untuk dijual lagi ke tengkulak yang berasal dari daerah lain seperti Muntilan dan Temanggung.

Namun, selain petani yang memerlukan orang lain untuk memasarkan tembakaunya, ada sebagian petani yang memilih menjual tembakaunya langsung ke pasar. Petani menjual tembakaunya ke pasar dalam kemasan yang dibungkus plastik dalam satuan kilogram. Tembakau yang dibungkus tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat (rokok *tingwe*, "linting dhewe"). Dengan demikian, harga tembakau bisa ditentukan oleh petani. Harganya pun cenderung lebih tinggi ketimbang dijual kepada tengkulak sehingga dapat menguntungkan petani. Seperti yang dituturkan Sumardianto, masyarakat Selopamioro yang memilih menjual tembakaunya ke pasar. Petani menjual tembakau yang telah dipak plastik ke Pasar Pundong, Bantul dan Pasar Sentolo, Kulonprogo, DIY. Selain ke Pasar Pundong dan Sentolo, masyarakat juga biasa menjual tembakaunya tidak jauh dari pemukiman dan lahan pertanian warga yakni di pertigaan Desa Selopamioro yang ramai saat panen. Dengan sendirinya, para pembeli atau tengkulak datang ke pertigaan tersebut.

Dalam hal penjualan, tembakau rakyat cenderung tidak punya pangsa pasar sendiri. Mulai dari penanaman, perajangan, dan pengolahan sampai harga jual tembakau ditentukan oleh petani.

Skema tersebut merupakan harga tembakau pada 2007. Sementara harga tembakau rakyat sendiri tidak selalu pasti, berbeda dengan harga tembakau Virginia. Menurut Andar, hal itu diakibatkan oleh pabrik rokok yang memberlakukan buka-tutup gudang pabrik rokok. Di dalam sistem itu, pabrik dengan leluasa bisa mengatur kapan ingin membeli dan tidak membeli hasil panen tembakau dari petani. Pabrik memberlakukan pembukaan gudang saat tengah membutuhkan tembakau sebagai bahan produksi industrinya. Sedangkan menutup gudangnya ketika stok tembakau pabrik sudah merasa terpenuhi, sehingga tidak lagi ingin membeli tembakau dari petani. "Buka-tutup gudangnya tidak pasti, maka harganya pun tidak pasti," ujarnya.

Andar juga menyebutkan bahwa tidak pernah bertemunya keinginan petani dan kepentingan industri rokok menyebabkan harga tembakau tidak pasti. Alasan industri rokok tidak menerima penjualan tembakau rakyat ini dikarenakan perbedaan hasil rajang antara keinginan industri dan tembakau rajang petani. Petani merajang dengan halus, sementara itu pabrik meminta tembakau rajangan yang lebih kasar sebagai oplosan. Dari perbedaan hasil rajangan saja, pabrik tidak bersedia membeli tembakau dari petani. Padahal menurutnya, pabrik membutuhkan tembakau Siluk ini dari petani. Sementara di pihak lain, petani memerlukan pembeli hasil panen tembakaunya, dalam hal ini pabrik rokok. "Sulitnya minta ampun mempertemukan mereka," ujarnya. Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bantul pernah mempertemukan kedua belah pihak, tapi hampir dalam setiap pertemuan tidak menemukan titik temu.

Berbeda dengan tembakau Siluk, tembakau asal Manisrenggo dan Prambanan, Klaten, dikhususkan untuk pasokan utama industri

rokok. Harga tembakau di kedua tempat pun berbeda. Di Selopamioro harga tembakau tertinggi Rp30.000 sementara di Prambanan dan Manisrenggo harga tertinggi bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Perbedaan harga ini ditentukan berdasar kualitas dan aroma. Sedangkan aroma sangat dipengaruhi oleh kesesuaian cuaca dan pengolahan.

Selain itu, keempat industi rokok besar di Bantul tidak dapat menjamin pembelian tembakau dari petani, sehingga cenderung arogan. Menurut Andar, arogansi industri rokok itu tampak pada penolakan pembelian tembakau rakyat dengan alasan stok tembakau sudah tercukupi. Pabrik-pabrik itu juga selalu beralasan bahwa keberadaan pabrik rokoknya di Bantul sekadar untuk kerja pelintingan. Sedangkan stok tembakaunya diakui pabrik sudah mendapat pasokan dari Surabaya. Padahal itu merupakan siasat untuk menurunkan harga tembakau yang dijual petani. Lewat orang suruhannya, pabrik rokok tetap saja membeli tembakau dari petani.

Karena permainan industri rokok terhadap harga pasar tembakau, pada 2006, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul pernah bekerjasama dengan petani untuk membeli hasil tembakau rajang kering. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membeli tembakau petani yang tidak laku dijual ke gudang pabrik. Pemda membelinya seharga Rp15.000 sampai Rp22.000 per kilogram dengan "sistem tunda jual". Artinya, pemda sekadar menampung tembakau hasil rajangan petani yang kemudian oleh Pemda Bantul dijual ke pasar. "Tidak ke industri rokok," ujar Andar.

Tidak pernah bertemunya keinginan petani dan kepentingan industri rokok menyebabkan harga tembakau tidak pasti. Alasan industri rokok tidak menerima penjualan tembakau rakyat ini dikarenakan perbedaan hasil rajang antara keinginan industri dan tembakau rajang petani

Namun, kerjasama itu tidak berjalan mulus, sehingga tahun berikutnya pemda tidak lagi membeli tembakau dari petani. Sebab, lanjut Andar, tembakau itu bukan komoditas utama yang pembeliannya harus dilakukan oleh pemda, seperti padi dan sayuran. Selain itu, pemda juga mengalami kesulitan ketika harus menjual tembakau ke pasar. Tembakau yang terjual pun jumlahnya sedikit. Maka, pemda Bantul menganjurkan supaya petani mengganti tembakau ke tanaman yang arah pasarnya jelas dan meminimalkan risiko kegagalan panen akibat hama. Sebagai imbalan ganti alih tanam, pemda menawarkan bibit gratis dan pembinaan bagi petani oleh petugas Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bantul.

Komoditas tembakau tidak begitu saja mudah diganti. Imogiri sebagai daerah dengan lahan pertanian tembakau yang paling luas di Bantul, masih menanam tembakau. Oleh sebab itu, pemda memfasilitasi petani tembakau agar tetap bisa berkembang, salah satu caranya dengan pendirian koperasi.

Di Bantul Timur, tembakau digabung dengan jambu mete dan rempah obat ke dalam suatu unit, Koperasi Triarumsari namanya. Koperasi Triarumsari didirikan sejak 2003 untuk membantu pengembangan pertanian ketiga komoditas itu. Kegiatan pengembangan ketiga tanaman pertanian itu dengan cara pemberian pinjaman modal bagi petani. Menurut Sogiyanto (56), Kepala Koperasi Triarumsari, kerja koperasi bersifat "semidinas" yang berarti petani bisa meminjam modal ke pemda Bantul. Pengajuan pinjaman melalui koperasi yang kemudian dilanjutkan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul. Petani boleh mengembalikan pinjaman modal setelah panen. "Apabila panennya gagal, bisa diundur," tambahnya. Tetapi, saat pengembalian, petani wajib membayar bunga pinjaman untuk pemasukan kas koperasi.

Berbeda dengan model koperasi lainnya, Koperasi Triarumsari tidak berkegiatan jual-beli hasil komoditas anggotanya. Kegiatan jual-beli komoditas diserahkan pada ketua kelompok tani setiap komoditas. Koperasi hanya membantu dalam hal pemasaran setiap komoditas petani, misalnya berhubungan dengan industri. Hal itu, menurut Siswodiardjo (60) bendahara Koperasi Triarumsari, untuk membantu petani agar hasil panennya laku. Pada titik ini, Koperasi Triarumsari bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan ekonomi tembakau rakyat agar tetap bertahan dan bisa menguntungkan petani. Saat industri rokok cenderung arogan atas kebutuhan tembakau rakyat, aktivitas pertanian tembakau tidak lagi dapat menguntungkan bagi petani. Bagaimana tidak, bila harga tembakau sepenuhnya berada di tangan kepentingan industri. Ketidakpastian harga yang sengaja diciptakan membuat posisi petani semakin tidak berdaya.

Upaya antisipatif pemerintah mulai dilakukan meski efektifitasnya masih dipertanyakan. Pemda Bantul telah berusaha mengalihtanamkan tembakau dengan komoditas yang menguntungkan petani, seperti tebu. Namun, mental tradisi penanaman tembakau oleh petani tidak mudah menggantikan tembakau dengan komoditas pertanian lain. Koperasi Triarumsari kemudian hadir menjadi secercah harapan bagi petani menggantikan peran industri rokok. Tidak harus berpindah tanam, namun pemasaran terbantu.[]

Iryan Ali H

Editor: Noor Alifa A| **Reporter**:Rika Akmala, Akmala Rahmasanti, Robertus Roni Setiawan, Rosmawati Siregar | **Visual :** Kirana Yunita

MENEPIS KETIDAKADILAN MELALUI KEHARMONISAN

Kepentingan pemilik modal dengan kaum pekerja atau buruh memang berbeda. Namun harmonisasi antarkeduanya penting untuk diimplentasikan.

Dalam kajian mengenai hubungan industrial setidaknya tiga pihak bermain di sana. Pemilik modal, buruh dan negara. Idealnya negara merupakan pihak yang tidak bersengketa atau netral. Akan tetapi, dalam tradisi marxisme, negara cenderung lebih berpihak kepada pemilik modal. Oleh karena itu, buruh selalu berada dalam posisi yang lemah.

Buruh hanyalah pihak yang menawarkan jasa berupa tenaga dalam proses produksi. Sehingga setelah memberikan upah, pemilik modal menganggap dirinya telah memenuhi kewajibannya kepada buruh. Namun, seringkali para pemodal mengingkari hak-hak buruh dan terus-menerus mengeksploitasi tenaga mereka demi mengejar keuntungan perusahaan. Kondisi semacam itu hampir terjadi di seluruh industri, tak terkecuali di industri rokok.

Industri rokok di Indonesia merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM). SDM

dibutuhkan mulai dari penanaman tembakau dan cengkeh di perkebunan, pengeringan tembakau dan cengkeh, perajangan tembakau, pelintingan tembakau di pabrik-pabrik, hingga pedagang asongan yang memasarkan rokok di jalanan. Menurut data jurnal *Swasembada* (1994), industri rokok di Indonesia menyerap sekitar 500 ribu karyawan yang bekerja langsung pada pabrik, dan pada seluruh level struktur organisasi.

Penyerapan tenaga kerja tidak hanya di pabrik rokok. Akan tetapi, ditambah dengan orang yang terlibat dari hulu ke hilir yang diawali dari petani tembakau dan cengkeh, karyawan produksi pembungkus kertas rokok, sampai karyawan dalam jalur distribusi (pengecer, *outlet*, pedagang asongan). Menurut sumber dari majalah *Gatra* (2000), jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri ini sekitar 18 juta jiwa.

Pada mulanya, industri rokok terkonsentrasi di Jawa Timur dan sebagian daerah Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan berdirinya beberapa industri rokok besar seperti PT Gudang Garam, Tbk. yang berpusat di Kediri, PT Djarum yang berpusat di Kudus, PT HM Sampoerna, Tbk. yang berpusat di Surabaya, dan PT Bentoel yang berada di Malang. Namun, pada '90-an, industri rokok mulai merambah ke wilayah Yogyakarta.

Perkembangan industri rokok di Yogyakarta cukup menjanjikan. Ini terlihat dengan semakin banyaknya industri rokok yang berproduksi di Kota Gudeg. Industrinya pun cukup variatif, ada yang berskala kecil, menengah dan berskala besar. Klasifikasi ini mengacu pada kategori yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY.

Menurut Dinas yang berkantor di seputaran *Ring Road* Timur Yogyakarta ini, klasifikasi industri didasarkan pada besarnya jumlah pekerja yang dapat ditampung. Jumlah pekerja di bawah 100 orang dikategorikan sebagai industri kecil, jumlah pekerja antara 100 sampai 500 orang dikategorikan sebagai industri menengah, dan jumlah tenaga kerja lebih dari 500 orang dikategorikan sebagai industri besar.

Ada beberapa pabrik rokok baik berskala besar, menengah, dan kecil di provinsi ini. Industri rokok berskala besar adalah PT Cahaya Mulia Persada Nusa (PT CMPN) dan industri rokok berskala menengah ialah PT Merapi Agung Lestari, dan PD Tarumartani. Sementara yang berskala kecil, salah satunya yaitu PT Yogyakarta Tembakau.

Sore itu gerombolan orang berkaos oranye sambil bercanda tawa sedang keluar dari sebuah pabrik. Itulah yang menjadi pemandangan setiap sore di PT CMPN, sebuah pabrik rokok yang baru berumur sekitar lima tahun. PT CMPN merupakan mitra dari PT HM Sampoerna ,Tbk., sebuah pabrik rokok yang didirikan oleh almarhum Liem Seng Tee pada 1913. Pada awal berdiri, pabrik rokok yang berpusat di Surabaya ini memproduksi merek "Dji Sam Soe". Merek ini berarti angka "234" dengan filosofi apabila dijumlahkan akan menghasilkan angka sembilan, yang menurut kepercayaan orang Cina dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Sedangkan produk yang dimiliki PT HM Sampoerna, Tbk. saat ini antara lain "Dji Sam Soe" dan "Sampoerna Hijau".

Untuk menopang roda produksi dan kualitas mutu produk, perusahaan cabang melakukan kerjasama atau bermitra dengan perusahaan induk. Seperti yang dilakukan PT CMPN yang merupakan mitra PT HM Sampoerna, Tbk. Surabaya. Pengawasan

mutu, perekrutan pegawai, manajemen perusahaan, dan peraturan perusahaan (PP) disamakan dengan induk perusahaannya.

Seperti perusahaan pada umumnya, PT CMPN memberlakukan jam kerja normal, yaitu delapan jam. Tetapi, para pekerja sering bekerja sampai sepuluh jam. Berbeda dengan pegawai perusahaan pada umumnya, para buruh di sana biasa memulai aktivitas di pabrik mulai pukul enam pagi. Rutinitas semacam ini sudah menjadi hal biasa bagi para buruh. Asmawati (27), salah satu buruh PT CMPN mengaku pada awalnya dia merasa berat memulai bekerja terlalu pagi. Jarak rumah dengan pabrik yang relatif jauh menjadi alasannya. "Rumah saya di Pajangan, jadi jam lima pagi saya sudah berangkat," keluh perempuan itu. Akan tetapi, perempuan yang sehari-hari bersepeda itu mengaku lama-kelamaan terbiasa berangkat kerja bersama terbitnya matahari.

Dalam industri rokok mengenal adanya pembagian kerja berdasarkan tingkat kemahiran. Yaitu, pemula, pemula lanjutan, mahir, dan mahir lanjutan. Hal itu digunakan sebagai patokan dalam keefektifan kerja. Biasanya pekerja yang telah mahir lanjutan mampu melinting lebih dari tiga ribu batang per hari. Untuk itu, mereka yang telah mahir tersebut memilih bekerja dengan sistem borongan. Sehingga hasil atau upah yang diterima akan semakin banyak tergantung jumlah rokok yang dihasilkan.

PT CMPN pun memberlakukan pembagian kerja semacam itu. Pada awalnya, perusahaan ini mempekerjakan masyarakat setempat dengan memprioritaskan warga Bantul. Namun, seiring berjalannya waktu dan kebutuhan tenaga terampil di bidang rokok yang terbatas, maka perusahaan ini juga mempekerjakan orang-orang dari luar Yogyakarta. Biasanya mereka berasal dari Temanggung, Klaten, Magelang, dan Wonosobo.

Demi terpenuhinya target produksi dan efisiensi kerja maka perusahaan yang memiliki sekitar 1.500 pekerja ini, memberlakukan pembagian kerja berdasarkan kemahiran. Pertama, bagian merajang dan memilah tembakau. Para pekerja di bagian ini bertugas memilih dan memilah tembakau mana yang berkualitas atau tidak. Kemudian, bagian menggiling hanya melakukan proses penggilingan tembakau.

Kedua, bagian melinting. Bagian ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Karena di dalam proses produki semacam ini, semuanya dikerjakan dengan tangan. Sehingga membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak, terampil, ulet, serta bekerja dengan cepat. Karena itu, perusahaan lebih memilih mempekerjakan kaum hawa di bagian ini. Di bagian melinting, para pekerja lebih memilih sistem borongan. Sehari mereka mampu melinting hampir tiga ribu batang rokok. Upah mereka pun dihitung berdasarkan rokok yang mereka linting. "Kalau bisa melinting banyak, ya, upahnya besar," tukas Asmawati.

Ketiga, bagian pengepakan. Lagi-lagi bagian ini juga dikerjakan oleh kaum hawa. Para pekerja dikhususkan untuk membungkus rokok yang telah dilinting ke dalam kemasan-kemasan kecil dan kardus. Terakhir, bagian membandrol. Bagian ini merupakan bagian khusus untuk menempel harga dan cukai di dalam bungkus rokok. Hampir seluruh pekerja di bagian ini adalah perempuan. Meskipun demikian, perusahaan yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1 Kabupaten Bantul ini juga mempekerjakan

laki-laki. Biasanya mereka dipekerjakan sebagai sopir pabrik, satpam, dan staf tetap.

Mengenai upah, para pekerja menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu diatas Rp585.000 per bulan. Baik untuk pekerja di bagian produksi maupun nonproduksi. Yang dimaksud bagian nonproduksi yaitu seperti staf tetap, keamanan, dan lainnya. Banyak pekerja yang sudah merasa bahwa upah yang diterima dari perusahaan yang berlokasi tepat di jantung Kota Bantul itu sesuai dengan harapan mereka. Namun, bagi sebagian yang lain merasa bahwa upah yang mereka terima masih kurang untuk hari yang akan datang dimana kebutuhan semakin banyak. "Gaji yang saya terima dari perusahaan sudah mencukupi saya. Tapi tidak tahu besok di kemudian hari," ungkap Asmawati. Sebagian besar buruh di PT CMPN masih lajang, sehingga wajar bila gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Akan tetapi, kelak ketika mereka berumah tangga, gaji yang mereka terima itu tentu belumlah cukup. Sebab, di perusahaan itu tidak ada perbedaan tingkat upah baik pekerja yang masih lajang ataupun sudah menikah. Hal inilah yang seringkali menimbulkan persoalan mengenai kesejahteraan buruh.

Kerja lembur kerap kali dijalani oleh para pekerja, tak lain juga di industri rokok. Kerja lembur tersebut harus berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dan majikan atau pengusaha. Di PT CMPN sendiri rata-rata tiap hari para pekerja melakukan kerja lembur sampai dua jam. Jadi kalau dihitung waktunya, mereka rata-rata bekerja sepuluh jam. Dimulai dari pukul enam pagi sampai pukul empat sore. Kerja lembur yang dilakukan para pekerja tentu menuai hasil. Upah yang diterima bertambah banyak tetapi tenaga terkuras. "Kadang kala sampai mendapat upah satu juta per bulan," ungkap Eni.

Sesungguhnya, kerja lembur yang diberlakukan oleh perusahaan merupakan strategi untuk mengeruk keuntungan yang lebih banyak. Seperti diungkapkan oleh Karl Marx bahwa para pemilik modal mendapatkan surplus *values*, yaitu keuntungan yang didapatkan perusahaan atau majikan dari apa yang dilakukan oleh para pekerja yang sesungguhnya upah sehari satu pekerja sama nilainya dengan biaya produksi satu jam kerja. Berarti jika para pekerja melakukan sepuluh jam kerja per hari, maka majikan untung sembilan jam kerja. Dalam waktu sembilan jam itu kita bisa bayangkan berapa keuntungan yang didapat pemilik modal.

Selain itu, cuti kehamilan juga diberikan oleh PT CMPN bagi para pekerja perempuan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 82 ayat 1 berbunyi "Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan". Eni menambahkan, "Ada cuti hamil tiga bulan, mas, di sini (PT CMPN)."

Jika para pekerja melakukan sepuluh jam kerja per hari, maka majikan untung sembilan jam kerja. Dalam waktu sembilan jam itu kita bisa bayangkan berapa keuntungan yang didapat pemilik modal.

Untuk menunjang keselamatan para pekerja, PT CMPN juga memberikan jaminan asuransi. Perusahaan itu menggandeng PT JAMSOSTEK sebagai mitra asuransi keselamatan kerja. Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Hal itu berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 87 ayat 1.

Seperti perusahaan lainnya, berdasarkan UU ketenagakerjaan, para buruh atau pekerja berhak mendirikan serikat pekerja. PT CMPN pun menamainya Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT CMPN Bantul (SPTP PT CMPN Bantul). Serikat pekerja yang diketuai oleh Sukono (periode 2007-2009) ini disahkan pada 27 Agustus 2007. Untuk menjalankan fungsinya, bentuk organisasi ini adalah organisasi anggota yang berbentuk serikat. Serikat pekerja ini bertujuan mengakomodasi kepentingan pekerja jika berselisih dengan pihak manajemen perusahaan.

Anggota serikat pekerja ini adalah seluruh pekerja yang berada di PT CPMN Bantul, kecuali pekerja yang menduduki jabatan tertentu yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di perusahaan. Misalnya, manajer personalia atau manajer keuangan. SPTP PT CPMN Bantul berdiri atas dasar kesadaran para anggotanya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan siapapun. Sementara itu, Prof. Dr. Susetyawan, SU., berpandangan bahwa adanya serikat pekerja itu bukan kemauan dari para pekerja, namun kemauan dari undang-undang. Akibatnya, serikat pekerja tersebut mudah didikte oleh perusahaan. "Solusinya, buruh harus memiliki basis material yang cukup. Misalnya, melalui koperasi," saran Susetiawan.

Pada awal berdiri, organisasi ini baru beranggotakan 25 orang. Kegiatan SPTP PT CPMN bersifat internal, artinya ia hanya bergerak di level intern perusahaan. Organisasi ini bersifat independen, tidak berafiliasi dengan asosiasi buruh yang lain. Sehingga, bisa dikatakan serikat pekerja ini masih berada dalam pengawasan perusahaan.

PT CMPN yang memiliki buruh yang mencapai 1.500 orang menyebabkan saling tidak kenal antarburuh. Beberapa buruh tidak mengetahui adanya serikat pekerja di perusahaan tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan ketidaktahuan Eni bahwa ada serikat pekerja di pabrik tempat dia telah bekerja selama tiga tahun. "Wah, aku tidak tahu-menahu tentang serikat pekerja di sini, apalagi ketuanya," paparnya. Menurut Eni lagi, yang penting dia bekerja dibayar dan tidak penting siapa bosnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakefektifan SP di perusahaan yang berdiri kurang lebih lima tahun itu.

Mengenai hubungan pekerja dengan pihak manajemen juga terjadi jarak yang cukup jauh antara buruh dan atasan. Di PT CMPN jarang terjadi sarasehan ataupun tatap muka dengan pihak manajemen kecuali waktu gajian. Komunikasi antara majikan dan buruh pun pada akhirnya jarang terjadi. Memang, bagi sebagian pekerja, hal itu tidak jadi masalah. Namun, untuk membangun hubungan yang baik antara majikan dan buruh dalam suatu perusahaan, kiranya komunikasi perlu dimassifkan agar terjalin hubungan yang harmonis di antara mereka.
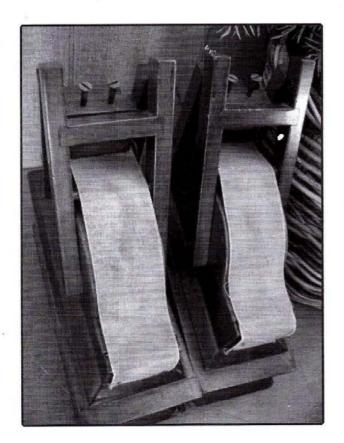
Perusahaan rokok yang berskala menengah di Yogyakarta, yaitu PT Merapi Agung Lestari (PT MAL). Perusahaan ini juga berlokasi di Kabupaten Bantul, tepatnya di Jalan Parangtritis Kilometer 8 Yogyakarta. Lokasi pabrik yang tepat berada di pinggir jalan membuatnya mudah diakses oleh siapa saja termasuk para buruh. Umur dari perusahaan ini pun masih terbilang muda, yaitu tiga tahun.

PT MAL merupakan perusahaan mitra dari sebuah perusahaan rokok skala besar di Malang, Jawa Timur. Bahan baku tembakau yang digunakan untuk dijadikan rokok didatangkan dari Malang. Dengan nilai investasi awal yang cukup besar, maka perusahaan ini mencoba bersaing dengan perusahaan-perusahaan rokok besar di Indonesia.

Dalam menjalankan roda produksi agar berjalan lancar, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 400 pekerja dan ditargetkan menjadi 3000 pekerja pada periode mendatang. Pekerja itu terdiri dari perempuan dan laki-laki yang terbagi ke dalam beberapa divisi.

Divisi-divisi yang ada di dalam PT MAL hampir sama dengan perusahaan rokok lainnya. Pembagian divisi di PT MAL juga didasarkan pada tingkat kemahiran pekerja sehingga proses produksi berjalan lancar. Divisi-divisi tersebut meliputi produksi penggilingan, linting, pengemasan, distribusi , serta pemasaran. Namun, para pekerja dibagi menjadi beberapa kelas mulai A sampai E.

Pengklasifikasian kelas berdasarkan seberapa bal (1 bal=20 slok, 1 slok=10 bungkus) yang mampu diproduksi oleh para pekerja. Jika hanya mampu menghasilkan satu bal maka dikategorikan kelas A, dua bal kelas B, tiga bal kelas C, dan seterusnya. Pengklasifikasian itu juga memengaruhi tingkat upah yang diterima oleh buruh. Jika mampu menghasilkan banyak bal, maka upahnya juga akan banyak. Upah per bal sama dengan Rp6.000. Menurut informasi Lilik (21), salah satu buruh kemas resmi di PT MAL, para pekerja biasanya mampu menghasilkan 42 bal per minggu. Jadi, upah yang diterima para pekerja rata-rata 200 ribu rupiah per minggu.

Seperti halnya di PT CMPN, mayoritas pekerja di PT MAL merupakan pekerja lokal (Bantul) dan perempuan. Namun, cukup banyak juga pekerja laki-laki, terutama di divisi pemasaran. Jam kerja yang harus dilakukan oleh para pekerja pun juga tidak jauh berbeda dengan perusahaan rokok lainnya, yaitu minimum delapan jam kerja per hari dan enam hari kerja mulai 06.00 sampai 16.00 termasuk dua jam lembur.

Tidak mudah untuk mendapatkan status sebagai pegawai resmi atau tetap. Seorang pekerja harus mampu menghasilkan mini

mal dua ribu batang rokok per hari (kelas E). Sebelum diangkat menjadi pekerja resmi, status mereka masih sebagai buruh kontrak. Selama kurun waktu enam bulan, para pekerja kontrak diharapkan mampu beradaptasi untuk bekerja keras sehingga mampu menghasilkan jumlah rokok dalam jumlah banyak. "Kalau selama enam bulan belum bisa mencapai kelas E, kontraknya bisa diperpanjang. Tapi, bisa juga tidak diperpanjang bila tidak bisa melampaui target dua ribu batang per hari," jelas Fitri Nur Hayati (19), buruh linting (Kelas B) Pabrik Rokok PT MAL.

Walaupun dalam UU No. 13 Tahun 2003 para pekerja/buruh berhak mendirikan serikat pekerja, namun para pekerja di PT. MAL belum mendirikan serikat pekerja. Alasannya, serikat pekerja sebenarnya ada, tapi berpusat di Malang. Selain itu, jumlah pekerja di PT. MAL belum mencapai target. "Sampai sekarang kami masih membuka lowongan untuk mengatasi kekurangan pekerja," ujar Pribadi, manajer personalia PT MAL. Ia pun mengaku lebih memprioritaskan warga sekitar daripada pekerja dari luar kota.

Untuk memenuhi kepuasan para konsumen, PT MAL memproduksi tiga merek rokok unggulan. Produk pertama bermerek ONCE. Merek ini dikhususkan untuk rokok kretek. Kedua, bermerek MERAPI, juga produk rokok kretek. Sementara itu, produk yang dikhususkan untuk rokok *mild* bermerek NESS.

Namun, dalam implementasinya, para pekerja terutama buruh produksi bekerja minimal delapan jam sehari dari pukul 06.00 sampai 14.00.
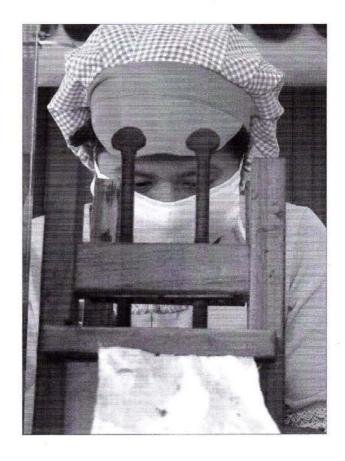
Bergeser ke perusahaan rokok berskala kecil, PT Yogyakarta Tembakau (PT YTI). Perusahaan ini berlokasi di Jalan Imogiri Timur kilometer 12, tepatnya di Dusun Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul.

Dari luar gedung, perusahaan ini tidak terlihat seperti sebuah perusahaan rokok. Namun, lebih mirp gudang penyimpanan milik Kraton Yogyakarta. Gedung itu dipagari tembok tinggi serta di luarnya terdapat lambang Kraton Yogyakarta. Suasananya pun sepi.

PT YTI didirikan oleh tiga putri Kraton Yogyakarta, mereka adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, Gusti Raden Ayu Nurmagupita dan Gusti Kanjeng Nurkamnari Dewi pada awal 2003. Putri-putri kraton itu memiliki tujuan mulia mendirikan industri rokok, yakni mengurangi angka pengangguran di Bantul yang relatif tinggi. Maka, sistem industri yang dipakai pun

menggunakan sistem padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam meningkatkan mutu produk dan menjalankan bisnisnya, PT YTI menggandeng pihak ketiga, yaitu PT HM Sampoerna, Tbk. sebagai konsultan teknisi atau supervisi. Perusahaan besar yang berpusat di Surabaya itu menjadi "kawan" dalam pengawasan mutu serta memberikan pelatihan kepada para pegawai dan buruh PT YTI. PT HM Sampoerna, Tbk. turun tangan dalam proses perekrutan pekerja di PT YTI. "Saya dulu seleksi di Sampoerna Bantul (PT CMPN) terus dipindah di sini," terang Yuli (28), salah satu pekerja di PT YTI.

PT YTI memproduksi rokok bermerek "Kraton Dalem" yang pertama kali diluncurkan pada 9 September 2003. Rokok "Kraton Dalem" tersebut merupakan jenis rokok sigaret kretek tangan (SKT) yang diperuntukkan bagi pribadi yang mewarisi nilai-nilai kraton dan tradisi Jawa. Selain itu, keinginan untuk mempekerjakan banyak pekerja merupakan salah satu alasan PT YTI tidak memproduksi rokok jenis filter. "Gusti Pembayun ingin turut serta dalam mengurangi pengangguran di Bantul, nah, industri rokok kretek bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja," jelas Totok Subroto, SE., manajer personalia PT YTI.

Dalam membangun jaringan pemasaran produknya, PT YTI juga menjalin kerja sama dengan perusahaan dagang dan industri sebagai distributornya. Dan hasilnya, walaupun masih berumur 4,5 tahun pemasaran rokok "Kraton Dalem" telah meraih pangsa pasar yang cukup luas yakni di daerah Yogyakarta, Solo, Magelang, Temanggung, bahkan telah dipasarkan sampai Lampung.

Pengklasifikasian PT YTI sedikit membingungkan. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat Dinas Tenaga Kerja, PT YTI seharusnya tergolong industri menengah sebab memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 134 pekerja. Akan tetapi, pada akta pendirian yang melekat pada tembok pabrik, PT YTI adalah industri kecil. Jika mengacu pada kategori besarnya nilai investasi yang ditetapkan Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian, dan Perkoperasian Provinsi DIY, memang benar PT YTI merupakan industri kecil dengan nilai investasi di bawah dua ratus juta rupiah.

Pekerja PT YTI terbagi ke dalam beberapa divisi kerja, yaitu divisi produksi; divisi *finance and accounting*; serta divisi *marketing*. Supaya terkontrol, setiap divisi dipimpin oleh masing-masing koordinator yang membawahi setiap pekerja. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Perusahaan pasal 7, PT YTI menggolongkan karyawannya menjadi tiga bagian. Pertama, karyawan manajemen, yaitu karyawan yang menerima gaji tetap setiap bulan namun tidak mendapatkan upah lembur. Biasanya, yang menjabat sebagai karyawan manajemen adalah para manajer dan *supervisor*.

Kedua, karyawan nonmanajemen, yaitu karyawan yang mendapatkan gaji berdasarkan perhitungan gaji bulanan dan diperhitungkan mungkin mendapat upah lembur. Termasuk di dalamnya adalah koordinator, staf, dan pegawai keamanan (satpam). Ketiga, karyawan berstatus kontrak, yaitu karyawan yang bekerja pada perusahaan yang dibatasi oleh waktu tertentu, disepakati oleh perusahaan dan karyawan yang diwujudkan dalam suatu surat perjanjian.

Untuk meningkatkan mutu, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan tugas

dan pekerjaan bagi para pekerjanya, PT YTI juga melakukan beberapa kegiatan yang menunjang pengetahuan sumber daya manusianya. Kegiatan-kegiatan itu, antara lain berupa pengiriman pekerja untuk mengikuti kursus komputer, pelatihan-pelatihan kerja, serta mengikutsertakan para pekerja dalam seminar. "Bulan lalu, saya baru saja mengikuti pelatihan K3 (Keselamatan dan KesehatanKerja) di Jakarta," ungkap Totok.

Sebagai perusahaan yang mempekerjakan pegawai dan buruh, PT YTI diharuskan mematuhi UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan. Oleh karenanya, PT YTI juga membuat peraturan kerja yang menggambarkan hubungan pihak manajemen dengan pekerjanya. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 pasal dua, peraturan kerja itu dibuat untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan dan karyawan dalam mengadakan dan menjalankan hubungan kerja sesuai dengan hubungan industrial Pancasila.

Sesuai peraturan perusahaan pasal empat, kewajiban perusahaan dalam hubungan kerja dengan para pekerja adalah memberikan upah atau gaji kepada pekerja, memperhatikan kesejahteraan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan tentang ketenagakerjaan. Sedangkan, kewajiban para pekerja dalam hubungan kerja dengan perusahaan adalah menaati segala peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan.

Sementara itu, untuk mematuhi peraturan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 87 tentang keselamatan kerja serta UU No. 3 Tahun 1992, perusahaan memberikan jaminan asuransi bagi para pekerjanya. Sama halnya dengan PT CMPN, PT YTI pun menggandeng PT JAMSOSTEK sebagai penyedia jasa asuransinya. Pekerja juga mendapatkan jaminan sosial berupa cuti hamil bagi pekerja perempuan dan tunjangan hari raya.

Proses produksi akan lancar jika memiliki pekerja dan buruh yang memadai serta kerja yang efisien. Dari 134 pekerja yang kebanyakan merupakan warga Bantul, PT YTI memberlakukan peraturan mengenai hari dan jam kerja yang telah disepakati. Hari dan jam kerja yang berlaku di PT YTI disesuaikan dengan divisi masing-masing. Divisi *Finance and Accounting* dan Staf *Marketing* memulai jam kerja pada pukul 08.00 sampai 17.00, divisi produksi disesuaikan dengan situasi jumlah produksi, sedangkan divisi keamanan dibagi menjadi tiga *shift*, yakni pagi, siang, dan malam.

Namun, dalam implementasinya, para pekerja terutama buruh produksi bekerja minimal delapan jam sehari dari pukul 06.00 sampai 14.00. Akan tetapi, para pekerja sudah terbiasa bekerja sampai jam 16.30. Waktu tambahan dua setengah jam tersebut dihitung sebagai lembur.

Di perusahaan manapun, divisi produksi menjadi divisi yang memiliki peran cukup vital, tak terkecuali di PT YTI. Dikarenakan, divisi ini yang bertanggung jawab menghasilkan barang produksi, yaitu rokok "Kraton Dalem". Di PT YTI, sekitar 110 pekerja terlibat dalam divisi produksi yang kemudian terbagi menjadi dua bagian, yakni staf produksi dan pekerja produksi. Dari 110 pekerja tersebut, 90 persen didominasi oleh pekerja perempuan. Berdasarkan data perusahaan tahun 2007, yakni 6 orang menjadi mandor, 45 orang bagian penggilingan, 18 orang bagian pengguntingan, 16 orang bagian pengepakan, dan 5 orang bagian pembandrolan.

Dari sekian banyak pekerja perempuan yang berkecimpung dalam divisi produksi

tersebut, status mereka adalah sebagai pekerja borongan resmi. Mengenai gaji atau upah, mereka menerima upah pada hari Jumat setiap minggunya. Dan, tingkat pengupahan yang diperoleh oleh para pekerja berbeda-beda, yakni berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan yang meliputi tiga hal. Pertama, seberapa banyak batang rokok yang mampu mereka hasilkan. Kedua, tingkat kesulitan dan risiko pada pekerjaannya, dan yang ketiga ialah kualitas dari barang yang dihasilkan.

Keberadaan sebuah industri atau perusahaan selalu dinantkan masyarakat karena mampu menciptakan pekerjaan. Hal itu mengindikasikan bahwa para pemilik modal dan penguasa alat produksi menjadi "dewa penolong" bagi masyarakat . Apalagi di Indonesia, begitu terbatasnya jumlah lahan atau lowongan pekerjaan, persaingan mendapatkan pekerjaan pun semakin sengit.

Begitu melimpahnya tenaga kerja membuat harga pekerja pun jadi murah. Seperti laiknya hukum ekonomi, banyak penawaran maka harga semakin murah. Mereka kebanyakan dibayar dengan murah dan dieksploitasi tenaganya untuk mengakumulasi kapital. Kerja lembur kerap kali diberlakukan oleh perusahaan dengan alasan permintaan pesanan yang meningkat. Sehingga, surplus *values* hanya diperoleh perusahaan sebagai pemilik modal.

Pemandangan seperti itu juga berlaku di industri rokok. Kebanyakan industri rokok bersifat padat karya sehingga kehadirannya diasumsikan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dalam industri rokok, pekerja atau buruh perempuan tidak bisa dianggap remeh. Kita bisa melihat bahwa mayoritas buruh di industri rokok merupakan kaum hawa. Karena begitu vital fungsi dan perannya dalam menjalankan roda produksi, maka perempuan mendapat perlindungan dari undang-undang dan semestinya juga mendapat perlakuan khusus dari perusahaan.

Perlindungan dari undang-undang tersebut salah satunya ialah bahwa para pekerja diberi hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Hal itu dimaksudkan untuk menjalin komunikasi antarpekerja. Tetapi, karena para pekerja kadangkala telah merasa puas dengan upah yang diterima dari perusahaan, mereka merasa tidak memerlukan adanya serikat pekerja. "Saya bekerja di sini yang penting mendapatkan uang," gurau Eni, pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja di PT CMPN.

Eksploitasi tenaga sebenarnya juga menjadi faktor mengapa para pekerja tidak terlalu memikirkan adanya serikat pekerja. Karena telah bekerja kurang lebih sepuluh jam per-

hari, hal itu tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk melakukan diskusi dan sarasehan bersama yang menyebabkan komunikasi antarburuh tidak terbangun. Sehingga, seperti yang dikatakan oleh Susetiawan bahwa serikat pekerja seringkali dibentuk sebagai pesanan dari undang-undang. Sejauh ini, baru sedikit perusahaan rokok di Yogyakarta yang memiliki serikat pekerja, salah satunya serikat pekerja di PT CMPN.

Namun, serikat pekerja yang ada bukan terbentuk dari kesadaran para pekerjanya melainkan bentukan perusahaan. Akibatnya, serikat pekerja yang ada hanya menjadi "alat" bagi perusahaan untuk mengontrol para pekerjanya. Serikat pekerja seolah kehilangan semangat untuk melawan ketidakadilan.

Ia mulai bergeser orientasi. Seperti yang terjadi pada serikat pekerja di PT CMPN, yang memfungsikan serikat pekerja sebatas sebagai wadah perkumpulan anggota daripada menyoal ketimpangan hubungan industrial yang mereka alami.

Apalagi buruh di industri rokok hampir seluruhnya perempuan. Tentu bukan tanpa alasan pihak perusahaan lebih memililih pekerja perempuan dibanding laki-laki dalam proses produksi rokok. Perempuan dinilai lebih patuh dan *nrimo.* Karakter mereka yang demikian akan menguntungkan perusahaan, sebab buruh perempuan tidak akan berani melawan kebijakan-kebijakan yang dibuat pengusaha sekalipun merugikan mereka. Ketika buruh perempuan mengalami ketidakadilan, mereka akan lebih memilih diam daripada melawan. Akibatnya, buruh selalu berada dalam posisi yang lemah.
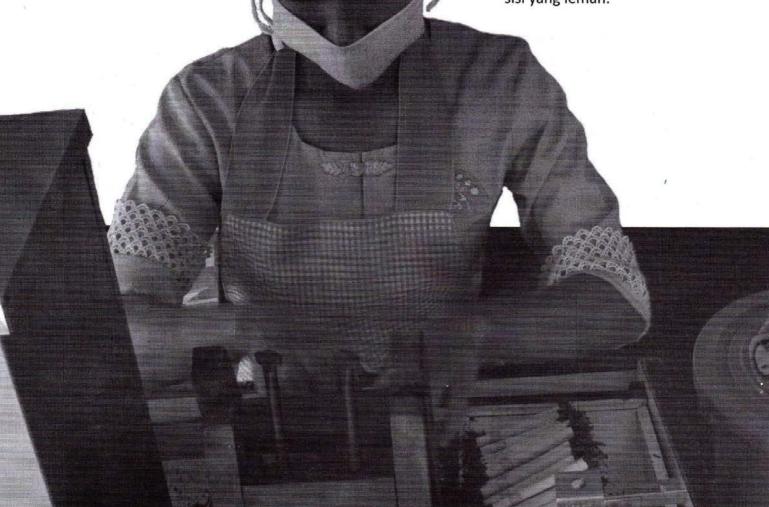
Dalam tradisi marxisme klasik, posisi lemah buruh dilihat dari soal kepemilikan alat-alat produksi. Oleh karena itu, menurut Eric Hiariej, S.IP., M.Phil., Dosen Hubungan Internasional UGM, salah satu jalan keluarnya adalah pemilikan bersama alat-alat produksi, yang seringkali diinterpretasi menjadi kepemilikan publik melalui perusahaan-perusahaan negara. "Di negara dengan tradisi sosial demokrat, kepemilikan bersama diterjemahkan melalui koorporatisme. Cara ini memungkinkan buruh untuk ikut menentukan kebijakan nasional yang menyangkut ekonomi dan sektor industri, " jelas Eric.

Anggapan yang selalu diyakini bahwa yang memiliki hak penuh atas perusahaan adalah pemilik modal. Sementara, buruh adalah pekerja yang tidak mempunyai hak atas perusahaan. "Labour" yang dimiliki buruh tidak pernah dihitung sama sekali karena buruh telah mendapat gaji dari pengusaha. "Upah buruh hanyalah sebagai jaminan atas 'tubuhnya' tetapi *reward* atas 'labour'-nya dikuasai sepenuhnya oleh pemilik modal," tambahnya.

Penguasaan alat-alat produksi oleh buruh bukanlah perkara mudah. Menurut pandangan Eric, buruh dengan modal "labour" yang dimilikinya dalam memproduksi barang, harus dipertimbangkan sebagai salah satu "pemegang saham" perusahaan. Dalam hal ini, saham sama artinya dengan "kekuasaan politik" dalam perusahaan. Karena "labour" yang menghasilkan barang sama pentingnya dengan uang yang diinvestasikan oleh pengusaha, maka besar saham buruh dalam sebuah industri mestinya setengah dari total jumlah saham yang dimiliki perusahaan.

Untuk membangun hubungan kerja yang bagus di dalam sebuah perusahaan dibutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif antara pekerja dan majikan (pengusaha). Karena pengusaha memiliki *capital power*, sementara pekerja pun memiliki *labour power* yang notabene keduanya saling membutuhkan. Untuk itu, harmonisasi kepentingan antara buruh dan majikan semestinya dijalankan secara nyata. Negara sebagai pihak yang juga terlibat dalam hubungan industrial selayaknya memberikan kontribusi yang jelas dalam mencapai harmonisasi tersebut. Sehingga, cita-cita ideal untuk memberikan rasa keadilan di kedua pihak bisa terwujud. []

Setiawan, Sri Zuliari

Editor: Indra Hari P | **Reporter** : Retno Indriani, Attiroqul, Nur Kumala Hapsari | **Fotografer** : M. Rizal Abdi, **Info Grafis** : Monika Windriya S

Kala Citra Tanjung

LIPUTAN

ROKOK ALTERNATIF, SAMA RASA BEDA HARGA

Di balik gemerlap produk industri rokok besar, terdapat tembakau linting dan rokok lokal. Dua produk tersebut, bisa menjadi pilihan di tengah harga-harga rokok yang kian mahal. Meski keberadaan rokok lokal semakin sulit terlacak, alternatif rokok murah tersebut masih dapat dinikmati.

Sore itu, Endi Maryadi (23) dengan lancar meramu racikan rokok lintingan. Endi, warga kelurahan Mergangsan, Yogyakarta lebih memilih menikmati rokok lintingan ketimbang mengonsumsi produk rokok industri besar. "Tak selamanya rokok enak harus mahal," ujarnya. Di tengah melonjaknya harga barang-barang akibat kenaikan harga BBM, kebutuhan rokok semakin sulit terpenuhi. Para penikmat rokok pun menyiasati kesulitan itu. Berbeda dengan Endi, Azwar Anas (20), mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, lebih suka membeli rokok kemasan berharga murah. Kisaran harga rokok yang sering ia beli, antara Rp2.000 sampai Rp4.000.

Rokok lintingan menjadi salah satu alternatif bagi penikmat rokok kala harga rokok melambung. Dengan sedikit berlatih meracik tembakau dan cengkeh, seseorang sudah bisa menikmati rokok. Tembakau pun tak sulit dicari. Hampir di setiap pasar tradisional terdapat penjual tembakau. Di Daerah

Istimewa Yogyakarta banyak tersebar pasar jenis tersebut, seperti Pasar Beringharjo. Di pasar ini terdapat lebih dari sepuluh penjual tembakau, mulai dari penjual grosir sampai eceran. Biasanya mereka mulai menjajakan barang dagangannya sejak 09.30 hingga sekitar 17.00. Tiap kios pun menawarkan beragam jenis tembakau. "Ada sekitar lima belas jenis tembakau," ungkap Indro Jatmiko (36), warga Wonosari, Yogyakarta, yang sudah enam tahun bekerja sebagai karyawan penjual tembakau.

Menurut Indro, tiap jenis tembakau berasal dari daerah yang berbeda-beda. Meski hanya ada tiga jenis tanaman tembakau yang ada di Indonesia, yakni; Virginia, Jawa, dan Vorstelanden. Namun, nama daerah penghasil tembakau lebih banyak digunakan penjual untuk membedakan tembakau ketimbang nama jenisnya. Mereka menyepakati nama tersebut karena daerah penanaman menentukan rasa tembakau. "Tembakau Jawa dari Prambanan rasanya lebih berat, biasanya *simbah-simbah* yang pakai," ungkap Sukarti (60), salah satu pedagang tembakau di Prambanan. Daerah asal penanaman juga menentukan harga jual tembakau di pasar. "Selama ini tembakau terbaik dengan harga paling tinggi dipegang tembakau asal Temanggung, Jawa Tengah," ujar Indro.

Tembakau asal Temanggung sulit ditemui di pasar-pasar tradisional. Sebabnya, sebagian besar hasil panen tembakau Temanggung masuk ke gudang industri-industri rokok besar, seperti perusahaan PT Djarum, PT H.M. Sampoerna Tbk., dan PT Gudang Garam. Meski tergolong pasar besar, sulit menemukan tembakau Temanggung di Pasar Beringharjo. Selama ini, tembakau yang dijual di sana berasal dari daerah Trowono, Gunung Kidul; Pakem, Sleman; Kalituri, Bojonegoro; Boyolali; Siluk, Imogiri, Bantul; Garut; Mantup, Lamongan; Madura; Lombok; Ngiri, Semarang; dan Kalitidu, Tulungagung.

Meski tidak semua jenis tembakau tersedia, Pasar Beringharjo tidak sepi dari proses jual beli antara tengkulak dan penjual tembakau. Tengkulak yang datang tiap hari tak lantas tembakaunya dibeli."Kami akan membeli kalau barang dan harganya sesuai," ujar Sriyadi (35), salah satu penjual tembakau yang berdagang di Beringharjo sejak 1998. Setiap transaksi jual beli, sekitar 40 juta rupiah harus dikeluarkan penjual tembakau untuk membeli satu ton tembakau. "Itu baru satu jenis," ujar Sriyadi. Kemudian, mereka menjualnya dengan beragam ukuran. Mulai dari partai besar yang berkisar satu sampai tiga kuintal, partai kecil sekitar satu sampai lima kilogram, dan eceran dengan ukuran per ons. Pembeli partai besar umumnya penjual tembakau di pasar-pasar kecil di daerah. Penjual tembakau di pasar Beringharjo biasanya kulak dua kali dalam satu bulan dari para tengkulak. Melalui Pasar Beringharjo, tembakau tersebut menyebar ke Bantul, Sleman, Wates, Wonosari, dan Magelang. Dari beberapa daerah tersebut, penjual tembakau asal Wates yang intensitas kulaknya paling tinggi.

Dalam dekade terakhir, tingkat penjualan tembakau di Beringharjo relatif stabil. "Rata-rata penjualan tembakau sekitar satu juta rupiah per hari," ujar Tuwul Muji Lestari (43), penjual tembakau di Pasar Beringharjo. Ia telah berprofesi sebagai penjual tembakau sejak 1985. Menurutnya, tingkat penjualan tertinggi terjadi pada 1998. Suyadi (36), penjual tembakau grosir di Pasar Beringharjo, mengatakan dalam satu minggu bisa menjual sekitar satu sampai dua kuintal tembakau untuk ukuran pembelian kiloan. Sementara untuk tembakau yang

dibungkus, seminggu ia dapat menjual 100 sampai 200 pak. Tak hanya dari Pulau Jawa, pembeli tembakau di Kios Yadi ada yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan.

Tak seperti kebanyakan penjual tembakau di Beringharjo yang menjual secara grosir, Ida Ratnaningsih (40) juga menjual dagangannya secara eceran. "Kalau grosir biasanya per pak atau per kilo, tapi ada juga yang eceran, biasanya tukang parkir yang beli, per ons," tuturnya. Wanita yang mewarisi kios dari nenek mertuanya ini menjual tembakau dengan harga sekitar Rp5.000 per ons. Meski demikian harga jual tetap tergantung rasa tembakau. Namun, kisaran harga tak lebih dari Rp6.000. Pembeli tembakau di pasar Beringharjo berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tukang parkir, mahasiswa, hingga penjual yang nantinya untuk dijual eceran. "Yang paling sering membeli adalah mahasiswa," tambah Ida. Faktor harga murah menjadi daya tarik yang paling besar bagi para pembeli eceran.

Pasar tradisional lain di luar daerah Yogyakarta yang menjual tembakau adalah Pasar Prambanan. Namun, biasanya para pedagang di sana tidak khusus menjual tembakau. Mereka juga menjual barang dagangan lain seperti kembang kuburan, gula, jamu, atau barang lain. Sukarti menyebutkan bahwa tembakau yang dijual di Pasar Prambanan biasanya berasal dari Boyolali, Prambanan, Siluk, dan Imogiri. Ia biasanya membeli tembakau dari para tengkulak yang datang ke Pasar Prambanan di hari Legi, salah satu hari di penanggalan Jawa. Tidak setiap Legi Sukarti membeli jika tembakau dagangannya masih banyak. Sebagian besar kios yang menjual tembakau di pasar ini tergolong besar. Karenanya, disamping pembeli rumahan, banyak orang yang kulak untuk dijual kembali.

Penjual tembakau tak hanya ditemukan di pasar tradisional. Di beberapa sudut kota Yogyakarta, juga terdapat beberapa toko yang menjual tembakau. Namun, sedikit berbeda dengan pasar tradisonal yang sebagian besar pedagang menjual tembakau asli atau belum diolah. Di toko-toko tersebut tembakau telah diracik dengan cengkeh serta telah dibumbui dengan saus tembakau. Sehingga, saat melinting pembeli tak perlu kesulitan mengukur komposisi campuran tembakau dan cengkeh.

Produk tembakau siap linting semacam itu bisa didapat di "Warung Tingwe". Tempat ini melayani transaksi tembakau, *oslok* atau alat melinting, dan beberapa pernak-pernik alat merokok seperti dompet rokok, *cangklong* alias pipa rokok, filter, dan kertas rokok. Layaknya warung, sang pemilik, Panji Indralesmana (27) pun menyediakan bangku dan meja panjang untuk tempat para pelanggan bersantai dan menikmati rokok lintingannya. Oleh karenanya, banyak pelanggan yang saling bercengkerama di tempat itu. Panji pun tak mempermasalahkan bila ada orang yang hanya mengobrol tanpa membeli tembakau.

Bagi masyarakat Yogyakarta, tak sulit menemukan warung *tingwe*. Di depan warung yang terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 26 Yogyakarta terpampang papan nama bertuliskan "Warung Mbako Tingwe". Warung ini pun selalu ramai terlebih pada malam minggu. Banyak pelanggan yang duduk bertengger di bangku atau duduk bergerombol di trotoar dengan beralaskan tikar. Warung *Tingwe* memang kerap menjadi tempat bersantai para pelanggan. Khusus malam Minggu, Panji juga menjual kopi. Tak heran bila pelataran di pertokoan Wirobrajan itu dipenuhi oleh kerumunan orang. Mereka datang dari berbagai golo-

ngan. Panji mengatakan, "Hampir semua golongan bisa membaur, mulai dari kaum cerdik mahasiswa, pegawai negeri, tukang becak, seniman, sampai remaja masjid."

Di "Warung Mbako Tingwe", beragam rasa dan aroma tembakau disediakan oleh Panji. Mulai dari rasa rokok mentol, rasa Sampoerna Hijau, Djarum Super, sampai rasa Dji Sam Soe Refill yang terkenal mahal pun tersedia. Namun bedanya, Panji menyediakan tembakau rasa rokok yang harganya mahal dengan harga yang jauh lebih murah. Ia menyematkan nama yang berbeda untuk masing-masing jenis produk tembakaunya. Diantaranya, tembakau rasa Dji Sam Soe dengan nama Samsuri singkatan dari "samsu sehari-hari", Sampoerna mentol dengan nama Saminul, Marlboro namanya Margono, Sampoerna hijau dengan nama Samsi, Djarum Super dengan Sukri, dan Gudang Garam dengan nama tembakau Gofur. Bagi mereka yang tidak sempat melinting sendiri, Panji menyediakan jasa melinting dengan ongkos Rp100 per batang.

Meski baru berdiri 21 Februari 2008, jumlah pelanggannya sudah relatif banyak. Tiap hari sekitar 20 sampai 30 pelanggan datang. Panji menambahkan, "Selama ini grafik pengunjung selalu meningkat." Kesimpulan itu berdasarkan data hasil penjualan dan jumlah pelanggan baru yang datang. Padahal, ia sebatas mengandalkan pamflet untuk mengiklankan produknya pada bulan-bulan awal pendirian. Karena itu, rata-rata pelanggan tembakau *tingwe* Panji mendapatkan informasi dari sesama teman. "Saya mendapat informasi alamat warung ini dari seorang kawan," ujar Endi, salah satu pengunjung. Bagi mereka yang baru pertama datang, Panji menyediakan berbagai rokok hasil lintingannya untuk dicoba. Meski gratis, tak setiap pengunjung bersedia mencobanya. "Mungkin karena malu, atau khawatir dipaksa membeli," ungkap Panji. Padahal bagi mereka yang bersedia, berapa batangpun disediakan oleh Panji.

Asal-usul istilah *tingwe* yang dipakai untuk warung ini berasal dari kata dalam bahasa jawa *nglinting dhewe*, artinya melinting sendiri. Konsep toko bernuansa warung dan istilah *tingwe* yang Panji gunakan untuk menamai warungnya digagas oleh Anton Prihardiyanto (50). Jauh sebelum Panji membuka warungnya, Anton menggunakan konsep *tingwe* di Jakarta. Ia mendirikannya sejak 6 Juni 2006. Sebagaimana Panji, saat awal mendirikan warungnya, Anton mendapat apresiasi dari warga. Alhasil, banyak pelanggan berdatangan. Bahkan, kini sudah bermunculan warung serupa di Bali, Semarang, Bandung, Sumedang, Makassar, Manado, Sampit, hingga Bengkulu. Tak heran bila di Jakarta sudah ada komunitas pelanggan *tingwe*.

Asal-usul istilah *tingwe* yang dipakai untuk warung ini berasal dari kata dalam Bahasa Jawa *nglinting dhewe*, artinya melinting sendiri.

Di samping untuk usaha, awalnya Anton mendirikan warung tembakau *tingwe* lantaran ingin memperkenalkan rokok alternatif kepada masyarakat. Oleh karenanya, harga tembakau-tembakau yang ia produksi tergolong murah dan bisa dijangkau oleh semua golongan. Keterampilan meracik tembakau didapatnya saat menjadi karyawan di salah satu pabrik rokok. Untuk mendapatkan rasa yang diharapkan, Anton juga mengadakan penelitian tehadap semua jenis tembakau. Setelah banyak mengalami kesalahan dalam percobaan meracik beragam tembakau, akhirnya ia menemukan komposisi yang dianggapnya tepat. Alhasil, ia bisa memproduksi racikan tembakau yang memiliki rasa dan aroma persis dengan rokok-rokok kemasan.

Kini, usaha Anton berjalan lancar dan produksinya semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, Anton memasok tembakau mentah dari para petani di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di daerah Jawa Tengah, ia biasa membeli tembakau dari petani Temanggung dan Boyolali. Sedang dari Jawa Timur, ia peroleh di daerah Malang. Tembakau *tingwe* bisa dijual dengan harga yang relatif murah karena menghemat banyak biaya. Anton tidak terbebani dengan biaya yang memerlukan alokasi pengeluaran besar seperti promosi, iklan, dan gaji karyawan. Tak ayal, perbedaan harga antara tembakau *tingwe* dengan rokok kemasan cukup jauh. Dengan uang Rp7.000, pembeli bisa membeli tembakau yang mampu menghasilkan 55 batang rokok.

Selama ini, Antonlah yang memasok kebutuhan tembakau untuk warung Panji. Meskipun demikian, bukan berarti toko Panji adalah anak perusahaannya atau cabang dari warung Anton. Keduanya adalah warung yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak bernaung dalam satu ikatan perusahaan. Anton yang dihubungi via telepon menuturkan, sistem penjualan dan identitas warung di masing-masing kota sama. Secara umum, identitas warung tembakau *tingwe* ditunjukkan dengan motif warna dominan hitam dan sedikit jingga. Dua warna itulah yang digunakan untuk mewarnai perabot warung, mulai dari dinding, meja, papan nama, dan sebagainya.

Kebanyakan pelanggan datang karena warung ini menyediakan tembakau enak dengan harga murah. "Rasa dan aroma tembakau

tingwe pun tak kalah nikmat dengan rokok kemasan produk industri besar," ujar Endi. Tak hanya itu, bahkan ada pelanggan yang suka tembakau *tingwe* karena senang dengan kreasi melinting dan suka mencampur-campur jenis tembakau. Dengan semakin banyaknya warung *tingwe*, Anton berharap nama *tingwe* akan lebih akrab dikenal masyarakat untuk menyebut berbagai jenis rokok lintingan. Sebagaimana nama "aqua" yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut air minum kemasan.

Warung tembakau *tingwe* hanyalah salah satu warung maupun toko yang menjual tembakau di seantero kota Yogyakarta. Di sudut kota yang lain, penjualan tembakau murah terdapat di perempatan Tugu Yogyakarta. Sejak berdiri 1935, "Toko Tembakau dan Cerutu" sudah menyediakan tembakau murah bagi masyarakat. Sebagai toko tembakau yang sudah lama berdiri, tak heran bila toko ini menjadi toko tembakau yang paling akrab di telinga masyarakat Yogyakarta. "Toko inilah yang paling terkenal," ungkap Endi, salah satu pelanggan "Toko Tembakau dan Cerutu". "Tiap hari hampir 50 pelanggan yang datang," ujar Gino (88), pengelola toko ini.

Sama halnya dengan "Warung Mbako Tingwe", "Toko Tembakau dan Cerutu" juga menyediakan beragam jenis tembakau. Beberapa diantaranya tembakau rasa Dji Sam Soe, Sampoerna Mild, Sampoerna mentol, Sampoerna Hijau, Djarum Super, Gudang Garam, Marlboro, Marlboro Mentol, Wismilak, Trowono, Boyolali, dan tembakau Mole. Tembakau-tembakau tersebut didapatkan dari distributor asal Boyolali dan Kotagede (Yogyakarta). Bedanya dengan warung *tingwe*, selain menjual tembakau, toko ini menjual beberapa rokok kemasan. Beragam rokok tersedia, mulai dari rokok paling mahal sampai paling murah, dari rokok berbatang paling kecil sampai cerutu.

Diantara toko penjual rokok lintingan di Yogyakarta, "Toko Arum" adalah satu-satunya toko yang mengolah tembakaunya secara mandiri. Toko yang berdiri di Jalan Nyai A. Dahlan No 1B ini dirintis oleh almarhum Hilal sejak 1954. Kelik Danang Andrianto (25), pengelola toko ini menuturkan, bahwa keterampilan mengolah tembakau diajarkan secara turun-temurun. Untuk meracik dan menciptakan rasa yang bermacam-macam, Kelik membutuhkan 15 jenis tembakau dan bahan lain seperti cengkeh dan saus. Ia mendapatkan tembakau mentah dari Pasar Beringharjo. Sedangkan, saus yang ia pakai dijual bebas di toko kimia. Untuk menjaga kekhasan, ia enggan menjelaskan komposisi racikan tembakaunya.

"Toko Arum" melayani pembelian secara grosir. Beberapa toko daerah yang kulak di toko ini diantaranya berasal dari Muntilan, Kebumen, Purworejo, dan Bantul. Menurut Kelik, kini pejualan tembakau di toko ini telah banyak mengalami penurunan. Pada 2003, toko yang ia kelola bersama bapaknya ini bisa meraup uang 4 juta rupiah per hari. "Saat itu kami mampu mengunduh 150 juta rupiah per bulan," kenangnya. Namun, kini ia hanya mampu mendapatkan uang sekitar 800 ribu rupiah per hari. Penurunan itu terjadi akibat bermunculannya pesaing baru, baik toko-toko tembakau maupun pengolah tembakau. Untuk itu, ia hanya meracik dua kali dalam satu minggu di luar pesanan. Sekali meracik biasanya menghasilkan enam kilogram tembakau siap linting.

Dari beberapa penjual tembakau siap pakai, terdapat banyak variasi harga yang ditawarkan terhadap tiap jenis tembakaunya

(Lihat Tabel Harga). "Satu ons tembakau bisa untuk melinting 50 sampai 70 batang rokok," ujar Endi. Apabila dihitung, harga tersebut lebih murah dibanding dengan rokok produk industri besar. Tak heran jika model rokok lintingan menjadi salah satu pilihan bagi penikmat asap tembakau.

Di samping tembakau, beberapa konsumen rokok ada yang memilih membeli rokok lokal. Rokok semacam ini biasanya menawarkan harga yang relatif lebih murah dibanding rokok kemasan yang lain. Eksistensi industri rokok lokal menjadi fenomena yang menarik di tengah terus bertumbuhnya industri rokok besar di Indonesia. Banyak perusahaan rokok-rokok lokal yang kesulitan untuk memperkuat keberadaan produknya di tengah masyarakat. Hal ini tak lepas dari intervensi pemerintah yang selalu ada dalam berbagai sektor kehidupan. Bentuk campur tangan pemerintah pada produksi rokok, salah satunya dalam hal kebijakan cukai. Pasalnya, selain ditujukan pada produk hasil olahan etil alkohol dan produk yang mengandung kadar alkohol, cukai juga tertuju pada produk yang berbahan baku tembakau atau disebut juga Industri Hasil Tembakau (IHT). Konsekuensinya, setiap industri rokok harus mendaftarkan produknya pada lembaga cukai, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan kebijakan cukai, harapannya pemerintah dapat memantau keberadaan industri rokok. Namun realitas berbicara lain, tak semua industri rokok mendaftarkan industrinya ke pemerintah. Mereka adalah industri rokok lokal yang seringkali hanya berupa industri rumahan. Model rokok ini biasanya berbasis pada industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara umum, karakteristik industri UMKM memiliki permasalahan pada keterbatasan modal dan juga omzet yang tak terlalu besar. Menurut Marsiyamto, SE selaku konsultan di *Small and Medium Enterprises Development Centre* (SMEDC) UGM, industri jenis UMKM memiliki model produksi yang berbeda dengan jenis industri besar. Jika indutri besar melakukan produksi didasarkan atas *mass product* atau dijual umum ke masyarakat, jenis UMKM hanya melakukan produksi kecil berdasarkan pesanan. Perbedaan model produksi inilah yang kemudian turut memengaruhi pangsa pasar mereka. Dengan cara itulah UMKM mencoba tetap bersaing ditengah gempuran industri-industri besar.

Tabel Kodifikasi Harga Tembakau Olahan per Ons (dalam Rupiah)

Merek	Harga	Merek	Harga
Dji Sam Soe	5.200	Marlboro	8.400
Sampoerna Mild	6.000	Marlboro Mentol	9.400
Sampoerna Mentol	6.400	Wismilak	7.000
Sampoerna Hijau	6.500	Trowono	8.000
Djarum Super	4.500	Boyolali	5.000
Gudang Garam	4.800	Mole	8.000

Begitu pula dengan gambaran industri rokok lokal, dengan modal kecil yang pas-pasan, tak sedikit dari mereka kesulitan untuk mendaftarkan cukai untuk produknya. Apalagi jika dihadapkan dengan birokrasi perizinan yang rumit dan sarat akan biaya. Mereka akan menghadapi kesulitan yang tak mudah diselesaikan. Faktor yang membuat aspek legalitas ini cenderung diabaikan karena tingginya biaya administrasi. "Bagi pengusaha kecil jumlah biaya untuk mengurus izin gangguan yang pada 2006 saja mencapai 100 juta rupiah, itu sudah amat besar bagi mereka," ujar Marsiyamto.

Bentuk penyiasatan pengusaha industri rokok lokal terhadap cukai tentu sangat beralasan jika keterbatasan modal menjadi problem usaha mereka sehari-hari. "Keputusan industri rokok kecil ternyata harus dibayar mahal," ujar Sumbo Tinarbuko seorang kolektor rokok yang juga staf pengajar tetap pada prodi Desain Komunikasi Visual pada Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Disamping dituduh tidak mematuhi kebijakan cukai dan keberadaaanya selalu dikejar-kejar oleh pemerintah, mereka juga terpaksa menerima sematan ilegal. Indikator yang paling kentara dari rokok-rokok semacam ini adalah tidak adanya label bukti cukai pada bungkus rokok.

Seakan tak kalah ulet, beragam strategi digunakan oleh para pengusaha rokok *home industry*. "Untuk menyiasati label cukai, tak sedikit *home industry* rokok yang menggunakan label tiruan," ujar Butet Kartaredjasa, salah satu kolektor rokok. Informasi tersebut ia peroleh saat mendatangi industri rokok lokal di Kudus. Disamping itu, modus lain yang biasa digunakan adalah dengan bergonta-ganti nama produk. Sebab, umumnya para pelanggan rokok murah sering mencoba rokok-rokok dengan label dan nama yang baru ia kenal.

Dihadapkan pada situasi demikian, mereka akhirnya terpaksa bergerak dengan jalur yang sulit. Justru dengan tidak mendaftarkan cukai pada produknya malah menjadi pilihan bagi mereka untuk dapat bertahan hidup. Kondisi rokok *home industry* semakin diperburuk dengan terus melonjaknya beban cukai terhadap IHT. Selagi mereka mengumpulkan modal untuk mendaftarkan produknya, ternyata harga cukai malah naik.
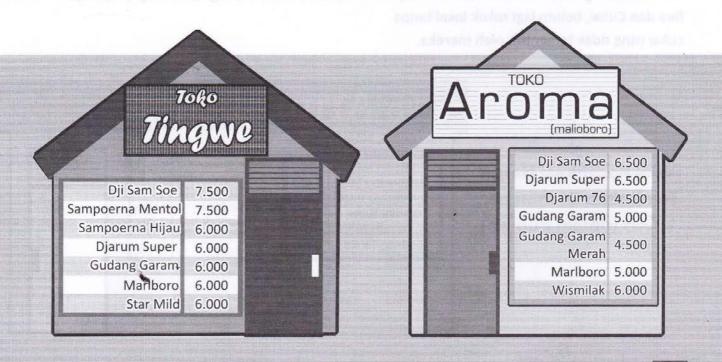
Kenaikan bea cukai rokok yang tinggi pada 2000-2005 rata-rata sebesar 22,89 persen. Hal ini semakin menjauhkan kemampuan mereka dari harga pendaftaran cukai. Tak heran kalau masih banyak ditemui industri rokok memilih jalur ilegal. Fenomena itu dilatarbelakangi juga dengan anggapan para pengusaha UMKM bahwa tidak perlu izin untuk membuat usaha tetap jalan. "Menurut mereka yang penting bisa jalan, asal ada izin gangguan, dan usaha sudah lancar itu sudah cukup," ujar Marsiyamto.

Kini, tak heran bila fenomena rokok lokal tanpa cukai terus marak dalam persaingan industri rokok di Indonesia. Berdasar data yang diberitakan *Warta Bea Cukai* bulan Februari 2008, menyebutkan bahwa pada 2005 saja terdapat 202 kasus rokok ilegal. Dari kasus yang diungkap pada 2005, 148 kasus diantaranya kasus penggunaan pita yang bukan haknya dan 32 kasus rokok polos, sedangkan lainnya kasus penggunaan pita cukai palsu, kasus pabrik tanpa izin atau mengantongi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak (NPPBKP) serta tidak melaporkan kegiatan usahanya. Jumlah tersebut baru data yang berhasil ditelusuri oleh Dirjen Bea dan Cukai, belum lagi rokok lokal tanpa cukai yang tidak tersentuh oleh mereka.

Konsekuensi dari pilihan yang diambil, pengusaha rokok ilegal harus bermain petak umpet di bawah ancaman pemerintah. Pemerintah pun tak kalah aktif, usaha penggrebekan gencar dilakukan. Alasan peraturan cukai menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk menggerus keberadaan mereka. Tak ayal, para pemilik industri ilegal selalu dirundung ancaman denda maupun sanksi dan penutupan.

Meskipun mendapat ancaman penutupan dan denda dengan jumlah nominal yang tak kecil, keberadaan industri kecil ini tetap bisa dilihat. Mudahnya ditemukan produk tersebut menjadi salah satu indikasinya. Sumbo menyebut rokok tersebut dengan nama "rokok indie". Sebutan definitif tersebut mensyaratkan beberapa hal. Pertama, rokok tersebut adalah rokok hasil produksi *home industry* atau rokok rumahan. Kedua, harga rokok tidak melebihi atau sama dengan lima ribu rupiah. Menurut penuturan Sumbo, rokok jenis ini biasanya ditemukan di daerah Prambanan, Tempel, dan Godean. "Rokok seperti ini gampang ditemukan di pasar-pasar tradisional yang menggunakan hari Jawa, seperti Pasar Pon, Legi atau Wage," ujarnya.

Tabel Kodifikasi Harga Tembakau Olahan per Ons (dalam Rupiah)

Merek	Harga	Merek	Harga
Dji Sam Soe	7.000	Gudang Garam Merah	6.000
Sampoerna Mild	5.600	Marlboro Mentol	8.000
Sampoerna Hijau	6.000	Star Mild	5.600
Djarum Super	6.400	Wismilak	7.200
Djarum 76	6.000	Boyolali	8.000
Gudang Garam	6.400	Kedu	12.000

Ketertarikan Sumbo untuk mengoleksi "rokok indie" berawal dari pengalamannya melihat kemasan rokok yang memiliki corak unik. Karena banyak bergumul dengan "rokok indie", akhirnya ia juga tertarik untuk mengetahui seluk-beluk dari rokok jenis itu. Ia menuturkan, tak banyak yang menggunakan nama label dan desain kemasannya sendiri, kebanyakan rokok-rokok tersebut menggunakan nama atau gambar dari produk yang sudah memiliki merek terkenal. Misalnya, corak kemasannya mirip bungkus rokok Dji Sam Soe, Djarum 76, Sampoerna Hijau, dan sebagainya. "Rokok indie" kebanyakan berjenis rokok kretek, dan hanya sedikit yang berjenis filter.

Mudahnya mendapati jenis produk lokal alias *indie* lantas tak membuat industri rokok semacam ini gampang dijumpai. Pasalnya, ketika dikonfirmasi ke beberapa Kepolisian di daerah Yogyakarta, mereka mengaku tak tahu-menahu tentang keberadaan industri rokok ilegal. Menurut penuturan Aiptu Heru Purwanto, tak ada kasus di kantor kepolisannya yang berkaitan dengan rokok ilegal. "*Nggak* ada kasus tentang rokok ilegal, karena sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat atau produsen yang melapor tentang hal tersebut," ungkap Kepala Minreskrim Kepolisian Resor Bantul ini.

Akibat adanya cukai dan keleluasaan rokok-rokok besar, industri-industri kecil kesulitan untuk bertahan. Hal inilah yang dialami Panji saat menjadi distributor rokok lokal. Sebagai seorang distributor rokok lokal, banyak kendala yang sering ia temui. Menurutnya, rokok lokal sudah terlanjur mendapatkan stigma negatif. Sehingga, tidak mudah untuk bisa masuk di tengah masyarakat. Kesulitan itu tak bisa diselesaikan dengan menawarkan produk yang berharga murah. "Ternyata harga murah saja tak cukup untuk merayu pembeli agar tertarik membeli," ungkapnya. Kesulitan distribusi rokok menjadi permasalahan para pengusaha rokok-rokok lokal.

Di samping harus menghindar dari incaran pemerintah karena tak bercukai, mereka masih harus menghadapi persoalan pada proses penjualan yang tidak menguntungkan. "Seringkali kami harus menerapkan sistem transaksi konsinyasi," ujar Sastoro (42), salah satu distributor rokok lokal produksi Solo. Dengan sistem transaksi ini, distributor harus menitipkan terlebih dahulu rokok pada pemilik toko kemudian uang hasil penjualan diserahkan beberapa hari sesudahnya. Biasanya, setelah dua minggu uang tersebut baru diambil. Akibatnya, uang hasil penjualan tak bisa mereka peroleh secara langsung. Sistem transaksi ini juga turut menjadi permasalahan pada aliran uang. Karena penjual rokok eceran terkadang molor dan pernah tak dibayar. Dengan demikian, distributorlah yang harus aktif memeriksa produknya di toko tersebut.

Setiap harinya para distributor harus mampu memasarkan minimal sesuai target perusa-

Dji Sam Soe	6.000
Djarum Super	7.000
Djarum 76	6.000
Gudang Garam	6.000
Trowono	6.000
Boyolali	7.000
Silok	8.000
Ngirik	5.000

haan. Target yang diterapkan perusahaan biasanya tergantung produk dan daerah pemasaran. Untuk produk yang sudah dikenal masyarakat, perusahaan menerapkan target minimal untuk distributor sebanyak dua setengah sampai tiga bal, satu bal terdiri dari 10 slop, dan satu slop berisi 10 kemasan rokok. Distributor akan banyak menemui kendala apabila produk atau daerah pemasarannya masih baru. Menurutnya, intensitas kunjungan distributor juga turut memengaruhi hasil pemasaran dan ketergantungan daerah. Ketergantungan daerah yang ia maksud adalah kadar diterimanya produk rokok di daerah tertentu. "Misalnya rokok X yang laris di daerah A, tapi tidak laku di daerah B. Berarti ketergantungan daerah A terhadap rokok X cukup tinggi," ujar Sastoro. Ia menambahkan, kebanyakan rokok lokal yang banyak menyebar di daerah Yogyakarta adalah produk *home industry* luar Yogyakarta, seperti Kudus, Malang, dan Kediri.

Biasanya, produk rokok-rokok lokal jarang yang dipajang di etalase. Seringkali hanya mendekam di bawah rak. Jika ada yang menanyakan, rokok itu baru dikeluarkan oleh pemilik toko. "Sebetulnya kami sudah senang kalau rokok kami dipajang di etalase," demikian ungkap Panji beromantisme. Tantangan penjualan rokok ilegal tak hanya itu, jangkauan yang terbatas dan jumlah distributor yang bisa dihitung dengan satu tangan, membuat rokok ini kian terpuruk.

Harga rokok-rokok lokal jauh lebih murah dibanding rokok besar karena perbedaan biaya yang harus dikeluarkan oleh keduanya. Sebagaimana rokok lintingan, industri rokok lokal juga bisa menghemat pada biaya iklan dan buruh. Produksi rokok-rokok lokal biasanya dikerjakan oleh satu keluarga. "Kalaupun ada buruh, jumlahnya kurang dari sepuluh karyawan," ujar Butet. Sehingga, praktis ia tidak mengeluarkan biaya untuk tuntutan besar tersebut. Menurut Panji, biasanya para pengusaha memberi upah buruhnya dengan harga Rp50 per batang.

Di tengah maraknya industri besar produksi rokok, ternyata ada model produksi lain yang menjadi alternatif bagi masyarakat. Dari model rokok linting hingga rokok lokal bisa menjadi alternatif masyarakat untuk menikmati hisapan rokok. Dominasi kapital pada pasar tak membuat eksistensi model produksi seperti ini berhenti. Masyarakat perlu mulai melirik jenis rokok ini karena mampu menawarkan harga lebih murah. Bahkan, konsumen memiliki keleluasaan untuk meramu rokok lintingan, sesuai dengan seleranya dengan rokok.[]

Rifqi Muhammad, Henry Krisbudi

Editor: Eka Suryana Saputra| **Reporter**: Lucia Febriarlita | **Fotografer** : Eka Wahyu S, **Info Grafis** : Monika Windriya S

NAIKKAN UMP

BURUH

SERIKAT BURUH ROKOK JOGJA MANDUL

Tim Riset : Muhammad Ghofur (koordinator), Tuti Elfrida, Pratiwi, Ant. M. Z Galih, Farid Fatahillah, Kahai Atit Toiri, Manggala Ismanto, Rendy, Rhea Febriani Tritami, Yuliyanti Retno Wibowo, Ahmad Musthofa Harun, Eka Yuliyanti Wijaya, Hesti Pratiwi, Nurul Azizah Zayzda, Ginanjar Tamimy, Noor Alifa | **Editor** : m. rizal | **Visual** : abdi

Muhammad Ghofur

Workers All Countries, Unite
(Fredrich Engels)

Ketidakadilan seolah akrab dengan kehidupan kaum pekerja. Segelintir saja dari mereka yang dapat menikmati hasil jerih payah dengan layak. Jeritan kaum pekerja yang kerap dipeyorasikan dengan buruh acapkali terdengar. Kurangnya pemenuhan hak buruh oleh perusahaan selalu menjadi pemantik. Lapangan kerja semakin terbatas sementara angkatan kerja membeludak. Nilai tawar buruh kian terbenam.

Masalah upah biasanya menjadi primadona tuntutan. Saat buruh merasa imbalan yang diterima tak sesuai, mereka bersuara lantang. Bagaimana tidak, buruh bekerja untuk tujuan utama, pendapatan. Penghasilan buruh tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Mereka harus memeras keringat lebih banyak demi upah yang terbatas.

Hak pekerja, meski tegas tercantum dalam peraturan perburuhan, juga kerap dilanggar perusahaan. Misal, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Tingkat keselamatan kerja di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data organisasi buruh interna-

sional (International Labour Organization) 2003, Indonesia menduduki peringkat ke 26 dari 27 negara dalam hal keselamatan kerja (*Presiden: keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia rendah*, Tempo, 13 Januari 2003).

Buruh pun tak tinggal diam. Mogok kerja jadi pilihan. Kalau seluruh 'isi' pabrik tumpah ke jalan, kegiatan produksi mau tidak mau mandek. Jika dibiarkan, pabrik akan mengalami kerugian. Kekuatan komunal inilah potensi yang dimiliki kaum buruh untuk meneriakkan suara mereka.

Namun, saat keran demokrasi terbuka lebar, gerakan buruh kehilangan orientasi. Teriak lantang tuntutan tersisa saat hari buruh saja. Pada 'hari raya buruh' tersebut, mereka berkonsolidasi lewat aksi massa. Selebihnya, buruh bersatu ketika ada isu insidental. Semisal ketika perusahaan melakukan pemecatan sepihak atas rekan kerja mereka. Ironis, ia mati suri kala tekanan negara kian longgar.

Inkonsistensi gerakan juga dialami buruh rokok. Perusahaan rokok memiliki tingkat perputaran uang yang besar. Cukai tembakau yang dibebankan kepada pabrik rokok menyuplai penerimaan negara sebesar Rp 29,17 triliun (2004) atau 1,20 % dari produk domestik bruto (PDB). (*Rokok Ilegal dan Dampaknya*, Kompas, Sabtu, 21 Januari 2006). Di Indonesia, 600 ribu pekerja, yang tersebar di 3.217 perusahaan, terlibat langsung dalam industri rokok. Pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp 38,53 triliun (*Rokok dan Kemiskinan* , Tempo, 4 Maret 2007). Tak adil jika buruh sebagai ujung tombak produksi rokok hanya dijatah tak sampai sepersatu juta bagian keuntungan perusahaan tiap bulannya.

Selain ketidakadilan pendapatan, sistem kerja buruh rokok juga merupakan masalah krusial. Salah satunya sistem kejar target batang pada buruh linting. Umumnya, sistem tersebut berlaku pada perusahaan rokok kretek. Para peracik rokok kretek mengolah tembakau, cengkeh dan campuran lainnya secara manual (linting). Buruh linting tidak bekerja dalam patokan jam per hari tetapi batang rokok per hari. Data Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) 2008 menyebutkan, perusahaan rokok di Jogja mewajibkan setiap buruh memproduksi rata-rata 3500 batang rokok per hari.

Masalahnya, buruh linting didominasi kaum hawa. Kesepakatan kerja target batang memberatkan buruh perempuan. Di ranah domestik, mereka disibukkan urusan rumah tangga. Tak manusiawi jika buruh perempuan harus pulang larut malam untuk memenuhi target batang.

Dengan latar tersebut, patut rasanya buruh memiliki kesadaran untuk mengorganisasi diri. Lewat serikat, mereka dapat mendongkrak nilai tawar yang kerap dipandang sebelah mata. Idealnya, organisasi buruh menjadi jembatan antara buruh dan dua unsur lain dalam hubungan industrial, perusahaan dan negara.

Di hadapan perusahaan, serikat buruh menjadi penyampai gagasan maupun keluhan para pekerja. Komunikasi dua arah antara perusahaan dan buruh dapat terjalin. Pun ketika buruh berurusan dengan negara. Serikat buruh selayaknya mengadvokasi lewat jalur birokrasi legal kala terjadi diskriminasi. Tanpa keberadaan serikat yang legal, buruh akan kesulitan memperjuangkan haknya.

Menyoal Hubungan Industrial

Diskursus mengenai pengertian hubungan industrial hingga kini belum final. Susetyawan, dalam *Konflik Sosial*, (2000:10) menyebutkan, hubungan industrial, yang juga sering disebut hubungan produksi, sebagai hubungan-hubungan yang melibatkan semua pihak dalam aktifitas produksi. Hubungan industrial tak lepas dari ketiga unsur (*tripartheid*) yang terlibat, yakni negara, perusahaan, dan buruh. Hubungan tersebut terbentuk dari kepemilikan ekonomis atas kekuatan produksi. Para pemodal memiliki alat produksi sementara kaum buruh memunyai tenaga kerja. Pemerintah menempati posisi di antara keduanya sebagai lembaga pembuat regulasi.

Tapi tampaknya kondisi ideal hanya sebatas utopia. Buruh selalu menempati posisi yang tidak menguntungkan. Jumlah angkatan kerja tinggi. Nilai tawar buruh rendah. Pemilik kapital seolah tinggal memetik buah yang berserakan dan tanpa tuan. Kuantitas yang besar tak cukup membuat buruh berani bicara lantang. Mereka tak mampu melawan ketika terjadi pemecatan sepihak. Kaum buruh tak ubahnya sapi perahan. Begitu habis potensinya, tinggal menunggu disembelih saja.

Indonesia adalah negara hukum. Sudah semestinya peraturan yang berlaku menjadi alat utama mencapai hubungan industrial yang ideal. Tanpa hukum legal, hukum rimba meraja. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Mekanisme alam semacam ini membikin buruh kian tertekan. Di situlah peran peraturan dalam negara hukum. Ia dibuat untuk melindungi mereka yang lemah.

Indonesia punya seperangkat UU perburuhan demi hubungan industrial yang ideal. UU tersebut sejatinya masuk wilayah perdata murni. Segala substansi UU dikembalikan pada kedua pihak terkait, buruh dan majikan. Negara hadir sebagai pihak ketiga setelah kondisi keduanya tak seimbang.

Sayang kondisi ini masih jauh panggang dari api. Korporasi antara pemodal dan pemerintah seringkali menindas buruh. "Masalah materi atau modal selalu menjadi alasan utama kenapa aturan yang berlaku cenderung memihak para pemodal", ungkap Ari Hernawan, dosen hukum perburuhan UGM.

Buruh perlu membangun kekuatan komunal untuk memantapkan posisinya. Kesadaran senasib dan sependeritaan merupakan materi dasar untuk membangun organisasi di kalangan rakyat pekerja (Willy Aditya, "Lapak Politik Kelas Dalam Sejarah Indonesia" dalam *Jurnal Analisis Sosial Akatiga* 2005:32). Hak-hak buruh didiskriminasi pemerintah. Tenaga buruh dieksploitasi perusahaan. Sudah semestinya kolektivitas sosial buruh muncul.

Latar belakang tersebut menyulut Divisi Riset BPPM Balairung UGM melakukan penelitian bertajuk eksistensi serikat buruh dan kesejahteraan buruh rokok di DIY. Batasan pengertian buruh rokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah golongan pekerja yang menempati struktur kerja terbawah dan terlibat langsung dengan proses produksi. UU no 6 tahun 1974 tentang kesejahteraan, merumuskan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan, baik materiil atau spirituil, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Ukuran terpenuhi kebutuhan tersebut dihitung dari penghasilan sebagai pekerja di perusahaan rokok. Pemenuhan hak-hak pekerja juga mutlak dipenuhi perusahaan. Definisi operasional serikat buruh adalah organisasi pekerja yang berdiri resmi di tingkat perusahaan.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Survei merupakan salah satu varian dari penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data pokok. Setelah terkumpul, data akan diuji deskripsi dan korelasi. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui korelasi dari beberapa variabel. Sedangkan, uji deskripsi digunakan untuk generalisasi keadaan populasi. Penelitian dengan cara ini menggunakan analisis statistik, baik secara manual maupun menggunakan bantuan program komputer.

Para buruh di enam perusahaan rokok di DIY menjadi subjek populasi penelitian ini. Enam perusahaan tersebut antara lain, Perusahaan Daerah (PD) Tarumartani, Perseroan Terbatas (PT) Mitra Adi Jaya, PT Jogja Tembakau, PT Merapi Agung Lestari, PT Cahaya Mulya Persada, serta PT Putra Patria Adi Karsa.

Penarikan sampel menggunakan simple random sampling. Jumlah populasi sebesar 5371 pekerja. Data tahun 2007 ini didapat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) DIY. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 94 orang dengan presisi sampling error 10 %. Selanjutnya, jumlah sampel tersebut dibagi proposional terhadap keenam perusahaan. Semakin banyak buruh terdaftar di perusahaan tersebut, semakin banyak pula sampel yang harus diambil.

Seluruh sampel penelitian penelitian yang dilakukan pada bulan mei hingga juni 2008 ini adalah buruh rokok berjenis kelamin perempuan. Dari 94 responden, 3 orang buruh berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Sejumlah 17 responden mengaku lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sisanya atau 74 responden merupakan lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.

USIA RESPONDEN

JAM KERJA

9 jam 17 %
8 jam 7,5 %
12 jam 5,3 %
11 jam 12,7 %
10 jam 56,4 %
missing 1%

PENDIDIKAN TERAKHIR

PENDAPATAN

[DALAM RUPIAH]
missing 2,1 %

PENGELUARAN

[DALAM RUPIAH]
missing 1,1 %
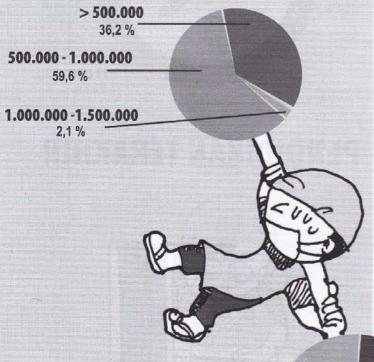
Kesejahteraan, antara Pendapatan dan Perlindungan

Sebanyak 38,3 % responden merasa gaji yang diperoleh mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan 3,2 % responden sangat setuju dengan pernyataan gaji pokoknya telah mencukupi kebutuhan. Sebaliknya 21,3 % responden tidak setuju dan 9,6 % menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara 11,7 % masih membutuhkan penghasilan tambahan di luar gaji pokok.

Upah minimum provinsi (UMP) DIY saat ini sebesar Rp 564 ribu. Upah tersebut dirumuskan oleh dewan pengupahan. Dewan pengupahan berada di bawah komando Depnakertrans. Dalam dewan tersebut, terdapat unsur *tripartheid*. Komposisi dari ketiga pihak tersebut yakni, 6 orang wakil
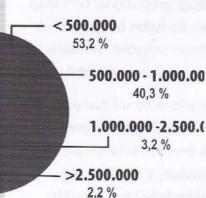
perusahaan, 6 orang dari perwakilan buruh serta 12 orang wakil pemerintah.

Sayang besaran gaji minimum itu tak lepas dari polemik. Detkri Badirun sekretaris divisi rokok, tembakau, makanan,dan minuman ABY mengungkapkan, upah minimum provinsi DIY saat ini tak layak. "Kami dari konfederasi serikat pekerja sebenarnya memiliki hitungan UMP yakni Rp 700 ribu. Namun, tawaran batas besaran upah tersebut tak disetujui Dewan Pengupahan DIY", tukasnya. ABY merumuskan UMP ideal sebesar Rp 700 ribu itu setelah melakukan survei terhadap nominal kebutuhan minimal seorang pekerja yang disesuaikan dengan harga kebutuhan.

Masalah kesehatan buruh rokok

Buruh rokok memiliki resiko tak jauh beda dengan perokok aktif. Keduanya mempertaruhkan kesehatannya. Perokok aktif melawan racun asap tembakau. Sementara, buruh rokok bertarung dengan bau tembakau kering yang menyengat. Bau tembakau merupakan contoh masalah kesehatan yang dihadapi buruh rokok. Bau menyengat tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan.

Kurangnya pemenuhan hak kesehatan buruh seolah diamini hasil penelitian. Mayoritas responden yaitu 76,6 % tidak setuju dengan pernyataan, perusahaan telah memenuhi jaminan kesehatan. Sementara 7,4 % lainnya menyatakan ragu-ragu perusahaan telah memenuhi jaminan kesehatan. Pasal 86 UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak dasar buruh dianggap angin lalu oleh perusahaan.

Proporsi jam kerja bagi pegawai rokok DIY juga layak disorot. Hasil penelitian menunjukkan, 56,4 % responden bekerja rata-rata 10 jam sehari. Sebesar 17 % bekerja 9 jam sehari, 12,7 % bekerja 11 jam sehari dan 7,5 % responden bekerja 8 jam sehari. Bahkan, masih ada 5,3 % responden yang bekerja 12 jam sehari.

Padahal, menurut Depnakertrans DIY, jam kerja normal seorang pegawai dalam satu hari adalah 8 jam. Ketika buruh bekerja lebih dari batas waktu itu, berarti pekerja tersebut berstatus pekerja lembur. 83 % buruh rokok masih memilih bekerja lembur demi memperoleh insentif tambahan. Terlepas dari parameter kebutuhan pokok tiap buruh yang relatif, buruh merasa gaji pokok yang diterima belum memenuhi kebutuhan. Perusahaan rokok memang memiliki sistem kerja target batang, tapi tak berarti mereka berhak mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja normal.

Meski begitu, tak dapat dipungkiri bahwa perusahaan masih memiliki iktikad baik terhadap kesejahteraan buruh. 72,3 % buruh setuju dengan pernyataan bahwa perusahaan memberika tunjangan diluar gaji pokok, seperti tunjangan hari raya. 23,4 % lainnya bahkan memberikan pernyataan sangat setuju perusahaan memberi tunjangan.

Kemandulan Serikat Pekerja

Keberadaan serikat buruh seharusnya dapat menutup celah itu. Ini tertuang dalam UU No. 21 Th 2000 tentang serikat pekerja, "serikat pekerja berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya." Sayang, fakta keterlibatan buruh rokok dalam serikat masih rendah.

Sebanyak 48,9 % responden mengaku tahu tentang peraturan yang menjamin kebebasan bagi buruh untuk berserikat. Hampir separuh atau 45,8 % responden juga mengetahui keberadaan serikat buruh di tempat mereka bekerja. Namun, pernyataan tersebut tak sangggup mendongkrak keterlibatan buruh dalam serikat pekerja. Hanya 24,5 % sampel yang terlibat dalam serikat buruh.

Padahal, 60,6 % responden mengamini pernyataan, buruh membutuhkan keberadaan serikat pekerja. Bahkan 8,5 % diantaranya sangat setuju. Sungguh aneh, buruh mengaku membutuhkan keberadaan serikat tetapi keterlibatan buruh akan serikat masih rendah.

Fakta ini tentu perlu ditelisik lebih cermat. Buruh bekerja minimal delapan jam sehari dan libur pada Minggu saja. Kepadatan kerja tersebut membuat serikat buruh kurang masif. Tak cukup waktu bagi buruh untuk mengorganisasi diri. Keberadaan serikat juga belum menjamin kemandirian buruh. Lebih dari 25 % responden menyatakan belum mendapatkan kebebasan untuk berserikat.

Tingkat kepercayaan buruh kepada serikat belum menunjukkan tren positif. 13,8 % responden menyangsikan serikat buruh mampu mewadahi suara mereka. Bahkan 2,1 % responden sangat tidak setuju dengan pernyataan, serikat buruh mampu menyalurkan aspirasi buruh. Sebanyak 33,0 % responden ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Tingginya angka keragu-raguan tersebut menunjukkan, buruh belum percaya sepenuhnya kepada serikat pekerja untuk menyalurkan aspirasi pekerja.

Latar belakang pembentukan serikat buruh pada enam perusahaan yang menjadi sampel juga perlu disimak. PT Jogja Tembakau, yang berada di Jalan Imogiri Km.11 Bantul, merupakan perusahaan rekanan PT Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna. Perusahaan rokok ini memproduksi rokok kretek bermerek dagang Kraton Dalem. Pabrik rokok yang mempekerjakan 127 buruh tersebut tak punya serikat buruh pada tingkat perusahaan.

Pun dengan PT Merapi Agung Lestari. Perusahaan yang berkantor pusat di Malang ini baru membuka cabang di DIY pada 2006. "Di sini belum ada serikat karena memang baru berdiri dua tahun yang lalu", tutur Pribadi, kepala bagian personalia pabrik rokok tersebut.

Tiga perusahaan lain, PT Mitra Adi jaya, PT Cahaya Mulya Persada, dan PT Putra Patria Adi Karsa telah memiliki serikat pekerja pada tingkat perusahaan. Ketiga pabrik rokok tersebut merupakan mitra kerja sekaligus

penyuplai produk rokok Sampoerna. Ikatan kerja tersebut memengaruhi latar belakang pendirian serikat pekerja pada tiap-tiap perusahaan. "HM Sampoerna mewajibkan seluruh anak perusahaannya untuk memiliki serikat buruh tingkat perusahaan," ungkap Fajar, bagian personalia PT Cahaya Mulya Persada. Padahal, UU no.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja pada bab 1 ayat 1 menyebutkan,

"Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya."

Serikat buruh yang 'berdiri' atas nama formalitas, cenderung tertutup. Ketika diwawancarai, salah seorang ketua serikat pekerja dari tiga perusahaan tersebut menolak. Ia sempat menghindar sembari berdalih harus melapor dulu kepada perusahaan. Ketergantungan terhadap perusahaan menunjukkan kemandirian serikat buruh belum terjamin. Intervensi perusahaan mengurangi otonomi serikat.

Fenomena berbeda ditemukan pada serikat buruh PD Tarumartani yang berdiri sejak 1972. Serikat tersebut lahir dari inisiatif buruh dengan persetujuan perusahaan. Serikat buruh Tarumartani kerap mengadvokasi masalah buruh di tingkat perusahaan. "Terakhir terjadi pemogokan akibat permohonan buruh terhadap perusahaan untuk menambah gaji mereka pada tahun 2000", tutur Riyanto, ketua serikat buruh PD Tarumartani. Serikat pekerja di Tarumartani melakukan reorganisasi dua tahun sekali.

STATUS TEMPAT TINGGAL

IKUT ORANG TUA 11,7 %
IKUT ORANG LAIN 3,2 %
MILIK PRIBADI 17 %
KONTRAK/KOS 67 %
1,1 % LAIN-LAIN

500rb-1 juta 29,8 %
1 juta -2,5 juta 4,3 %
> 2,5 juta 2,1 %
>500.000 63,8 %

JUMLAH TANGGUNGAN

Pilihan Jawaban	STTS*	TS*	R*	S*	SS*
Gaji pokok yang saya terima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (seperti makan, transportasi, dll)	9,6	21,3	27,6	38,3	3,2
Saya memiliki penghasilan lain di luar pekerjaan saya di perusahaan rokok	35,1	48,9	4,3	9,6	2,1
Proporsi jam kerja saya seimbang dengan gaji yang saya terima	8,5	26,6	27,7	31,9	5,3
Saat kerja lembur saya mendapatkan insentif tambahan dari perusahaan **(missing 4,3)**	3,2	4,2	5,3	68,1	14,9
Perusahaan memberikan tunjangan di luar gaji pokok seperti tunjangan hari raya **(missing 1,1)**	3,2			72,3	23,4

* dalam persen

Penghasilan

Pilihan Jawaban

Jaminan kesehatan dipenuhi oleh perusahaan tempat saya bekerja **(missing 1,1)**

Jaminan keselamatan kerja dipenuhi oleh perusahaan tempat saya bekerja **(missing 2,1)**

Jaminan kesehatan saya manfaatkan dengan maksimal **(missing 1,1)**

Jaminan keselamatan kerja saya gunakan secara maksimal **(missing 1,1)**

* dalam persen

Jaminan Kesel

Keberadaan Serikat Pekerja

	STS*	TS*	R*	S*	SS*
Saya mengetahui UU yang menjamin kebebasan untuk berserikat (missing 1,1)	9,6	17	23,4	45,7	3,2
Saya mengetahui keberadaan serikat pekerja di tempat saya bekerja (missing 1,1)	6,4	15,9	30,8	42,6	3,2
Saya terlibat langsung dengan kegiatan di serikat pekerja (missing 2,1)	13,8	26,6	33	24,5	
Saya sangat membutuhkan keberadaan serikat pekerja (missing 1,1)		3,2	26,6	60,6	8,5
Serikat pekerja dapat menampung aspirasi saya (missing 1,1)	2,1	13,8	33	39,4	10,6
Perusahaan memberikan kebebasan kepada saya untuk berserikat (missing 1,1)	13,8	13,8	31,9	36,2	3,2

*: dalam persen

STS*	TS*	R*	S*	SS*
	76,6	7,4		14,9
2,1	1,1	7,4	71,3	16
3,2	7,4	9,6	63,8	14,9
	6,4	10,6	73,4	8,5

...tan dan Kesejahteraan

Korelasi

Uji korelasi dilakukan demi mengetahui hubungan antar beberapa variabel yang menjadi turunan utama dalam penelitian. Dua variabel dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansinya (*p-value*) kurang dari 0,05. penghitungan tersebut didapatkan lewat parameter *pearsons*. Korelasi atau hubungan antar turunan tersebut terbagi menjadi dua macam, positif dan negatif.

Korelasi positif berarti dua variabel memunyai hubungan dan kecenderungan yang searah. Kenaikan nilai salah satu variabel akan diikuti dengan kenaikan pada variabel lain, begitu pula sebaliknya. Sedangkan korelasi negatif berarti kedua variabel memiliki hubungan atau keterkaitan tetapi sifatnya berkebalikan. Artinya, saat satu variabel naik, variabel lainnya akan mengalami penurunan, atau sebaliknya.

Dua variabel utama dalam penelitian ini ialah kesejahteraan dan serikat pekerja. Keduanya diturunkan ke beberapa pertanyaan tersurat dalam kuesioner. Tujuan utama pencarian korelasi turunan kedua variabel yakni mengetahui keterkaitan antara serikat pekerja dan kesejahteraan buruh rokok DIY.

Setelah melakukan uji korelasi didapat simpulan, ada hubungan antara gaji yang diterima buruh dengan pernyataan bahwa buruh membutuhkan keberadaan serikat pekerja. Hubungan antar keduanya negatif. Hal ini dibuktikan dari angka -0,024. Berarti, semakin mencukupi gaji buruh, semakin buruh tidak membutuhkan keberadaan serikat pekerja. Sebaliknya, saat gaji buruh semakin tidak mencukupi, mereka akan menyatakan membutuhkan keberadaan serikat pekerja.

Namun, variabel keterlibatan buruh di serikat pekerja dengan gaji pokok yang diterima pekerja tidak korelatif. Pada penghitungan, keduanya menunjuk pada angka -0,146 alias lebih dari ambang batas 0,05. Berarti, gaji sebagai indikator utama penghasilan sebagai buruh rokok tak berpengaruh sama sekali dengan keterlibatan di serikat pekerja.

Epilog

Buruh adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi...kecuali tenaga untuk bekerja (Sandbrook, dalam Aditya, 2005:27). Kekuatan komunal merupakan peluang untuk menutupi kelemahan tersebut. Serikat buruh hadir sebagai sarana untuk menyatukan persepsi demi arah gerakan yang lebih jelas. Dengan catatan, organisasi tersebut muncul atas kesadaran buruh.

Akan tetapi, selama serikat buruh masih ditunggangi kepentingan tertentu, belum layak buruh bersenang hati. Pun ketika serikat buruh 'didirikan' pihak perusahaan. Hasil penelitian di 6 perusahaan rokok skala besar di DIY menunjukkan, 3 serikat buruh merupakan bentukan perusahaan. Malah, 2 perusahaan lain tak punya serikat buruh.

Menurut Karl Marx, dalam Sunyoto Usman, *Sosiologi : sejarah, teori dan metodologi* (2004:34), buruh mengalami kesadaran palsu (*false consciousness*). Kelompok borjuis ditempatkan pada posisi yang tinggi karena telah memberikan nafkah kepada buruh. Akibatnya, buruh merasa bahwa dirinya telah diperlakukan adil oleh perusahaan. Meski, buruh harus bekerja dua belas jam

dalam sehari. Kondisi itu mengonstruksikan buruh sebagai pihak yang selalu menerima nasib dan kehilangan daya untuk melawan.

Kesadaran yang muncul dari kaum buruh merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan serikat buruh yang ideal. Ketika posisi serikat buruh tak lagi dipandang sebelah mata, mereka dapat memperjuangkan hak-haknya. Saat nilai tawar buruh sudah mantap, persoalan klasik semacam kontroversi UMP dapat dihindari.

Kalau serikat buruh kehilangan orientasi, jangan harap kebijakan yang memihak kepentingan buruh lahir. Lagu lama mogok kerja saat hari buruh akan terus terulang. Hari Buruh sekedar selebrasi tahunan tanpa arti. Tanpa konsolidasi yang kuat, teriakan buruh akan tergerus. Organisasi diri menjadi keniscayaan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan! [ ]

KEBERADAAN SERIKAT BURUH DI 6 PERUSAHAAN SAMPEL

PT TARUMARTANI
Serikat Buruh didirikan atas inisiatif buruh
Jumlah Pekerja : 355 orang

PT Cahaya Mulya Persada (mitra HM Sampoerna)
Sampoerna mewajibkan anak perusahaan untuk mendirikan serikat buruh
Jumlah Pekerja : 1600 orang

PT Mitra Adi Jaya (mitra HM Sampoerna)
Sampoerna mewajibkan anak perusahaan untuk mendirikan serikat buruh
Jumlah Pekerja : 1475 orang

PT Putra Patria Adi Karsa (mitra HM Sampoerna)
Sampoerna mewajibkan anak perusahaan untuk mendirikan serikat buruh
Jumlah Pekerja : 1514 orang

PT Jogja Tembakau
Tidak ada serikat buruh. Jumlah Pekerja :127 orang

PT Merapi Agung Lestari
Tidak ada serikat buruh. Jumlah Pekerja :300 orang

TIDAK ADA
Makan Siang Gratis dari CSR

Peran perusahaan rokok di dunia pendidikan memunculkan kontroversi di kalangan akademisi. Rokok diakui sebagai pengganggu kesehatan. Sementara Coorporate Social Responsibility *(CSR) perusahaan rokok didukung karena kontribusinya terhadap kegiatan akademis. CSR kemudian dijadikan alat legitimasi oleh perusahaan.*
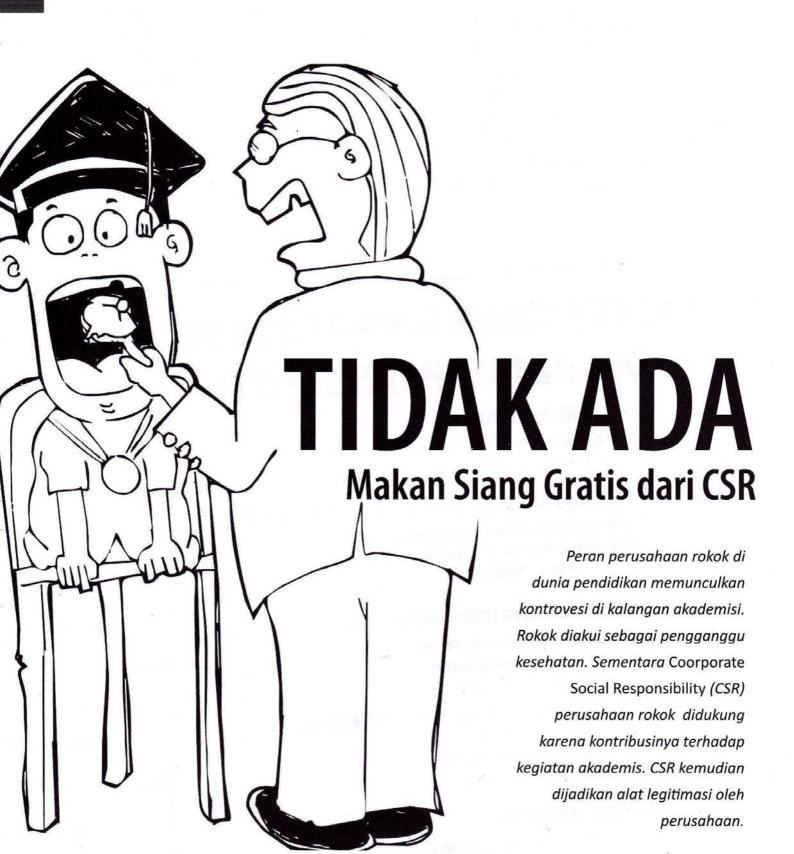
Tim Riset: Tuti Elfrida (koordinator), Pratiwi, Ant. M. Z Galih, Farid Fatahilah, Kahai Atit Toiri, Muhammad Ghofur, Manggala Ismanto, Rendy, Rhea Febriani Tritami, Yuliyanti Retno Wibowo, Adilia Rosa Hastarini, Ahmad Musthofa Harun, Eka Yuliyanti Wijaya, Hesti Pratiwi, Niken Ayu Pratiwi, Nurul Azizah Zayzda, Jems Arison Zacharias, Olivia Elfatma.| **Editor** : Pratiwi | **Visual** : abdi

Tuti Elfrida

Eksistensi rokok menuai pertentangan dari ranah kesehatan. Rokok berbahaya tidak hanya bagi konsumen tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan, peringatan kesehatan "Merokok dapat mengakibatkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin" wajib dicantumkan di setiap produk dan iklan rokok. Menurut penelitian World Health Organization (2007), setiap tahunnya diperkirakan 200.000—400.000 penduduk Indonesia meninggal akibat merokok. Sementara itu, jutaan jiwa terkena penyakit yang diakibatkan kebiasaan merokok.[1]

Bahaya rokok disebabkan kadar nikotin yang dikandungnya. Nikotin (*β-pyridil-α-N-methyl pyrrolidine*) adalah senyawa organik spesifik yang terkandung dalam daun tembakau. Apabila dihisap, senyawa ini menimbulkan rangsangan psikologis dan mengakibatkan ketagihan.[2] Nikotin merupakan racun yang menyerang langsung ke otak, merusak pikiran, dan tubuh. Nikotin yang menempel di paru-paru beresiko menumbuhkan kanker. Selain itu, lapisan paru-paru yang tertutup nikotin mengurangi daya serap paru-paru terhadap oksigen.

Perusahaan rokok kemudian memberikan perhatiannya pada aspek-aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan melalui CSR. Konsep CSR perusahaan rokok lahir sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat karena efek-efek buruk produk rokok.

Di bidang pendidikan, CSR perusahaan rokok mulai gencar menunjukkan perhatiannya. Misalnya, beasiswa dari PT. Djarum Kudus Tbk., PT. Gudang Garam, dan PT. Hanjaya Mandala (H.M.) Sampoerna Tbk. Selain itu, CSR perusahaan rokok juga menyumbang fasilitas fisik seperti, sepeda hijau dari PT. Wismilak Inti Makmur dan perpustakaan Sampoerna Corner dari PT. H.M. Sampoerna Tbk.

Kehadiran CSR perusahaan rokok menyulut pelbagai respon dari akademisi. Terkait hal tersebut, Divisi Riset BPPM Balairung UGM ingin mengetahui respon mahasiswa sebagai pihak yang sering bersinggungan dengan CSR perusahaan rokok. Rumusan masalah yang hendak dijawab, bagaimana respon akademisi tentang produk rokok dan CSR perusahaan rokok di UGM?

Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan yakni survei. Analisis data memakai uji deskripsi dan tabulasi silang. Uji deskripsi untuk menggambarkan hasil dan presentasi respon jenis responden. Sedangkan uji tabulasi silang untuk mengetahui korelasi atau pengaruh antarvariabel.

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 (S1) UGM yang diklasifikasikan menjadi mahasiswa penerima beasiswa dari perusahaan rokok dan mahasiswa umum.[3] *Sampling* untuk penerima beasiswa memakai *sampling error* 10% sehingga diperoleh 28 sampel dari populasi sebanyak 122.[4] Untuk mahasiswa umum, populasinya adalah mahasiswa aktif angkatan 2005—2007 di 18 fakultas. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *proporsional random sampling* (sampel acak proporsional). Dari populasi sebanyak 17052 mahasiswa didapat sampel minimal sejumlah 361 mahasiswa. Mahasiswa angkatan 2005 sebanyak 115, angkatan 2006 sejumlah 118 ,dan angkatan 2007 sebesar 128 responden. Sampling untuk mahasiswa umum diperoleh dengan tingkat kepercayaan (95%). Penelitian bertajuk *Preferensi Akademisi terhadap CSR Pendidikan dari Perusahaan Rokok di UGM* ini dilaksanakan mulai awal Mei hingga akhir Juni 2008.
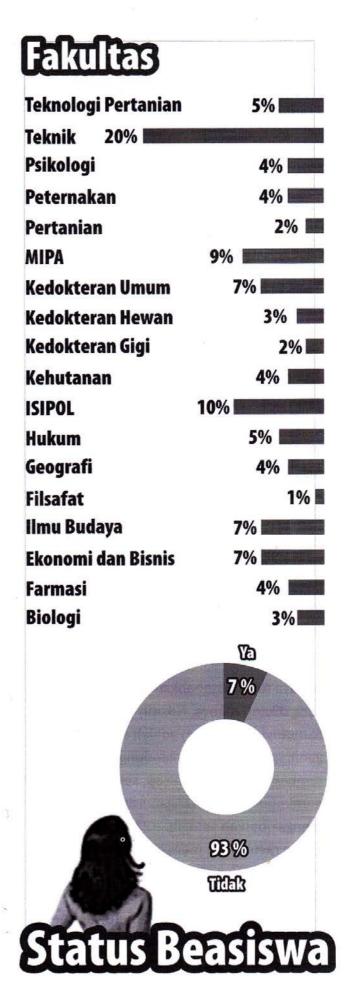
Pengetahuan tentang CSR

Berbagai macam bentuk CSR perusahaan rokok masuk ke UGM. Namun, beberapa mahasiswa tidak mengetahui keberadaannya. Lebih dari separuh responden atau 56% mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk CSR perusahaan rokok di UGM; 18% menyatakan ragu-ragu; 13% sangat mengetahui bentuk-bentuk CSR perusahaan rokok. Namun, 9% responden mengaku tidak mengetahui bentuk-bentuk CSR perusahaan rokok. Bahkan 4% diantaranya benar-benar tidak mengetahui. Ketidaktahuan tersebut memunculkan dua argumen. Pertama, bentuk CSR tidak dapat dirasakan semua mahasiswa. Kedua, mahasiswa tidak peka terhadap bentuk CSR di sekitarnya. Ketiga, bentuk CSR tidak gamblang ditunjukkan.

Rupanya, ketidakterangan bentuk CSR perusahaan rokok ini justru merupakan suatu bentuk CSR ideal. "CSR yang ideal itu adalah CSR yang tidak terang-terangan memberikan sumbangan ke bidang pendidikan. Seperti beasiswa, bentuk CSR tersebut diketahui beberapa orang saja," ujar Hanif Kusuma, mahasiswa Teknik Sipil 2007 penerima beasiswa. Dengan demikian, perusahaan rokok dianggap cukup sopan dan tidak terkesan sedang beriklan.

Meskipun beberapa mengaku tak tahu bentuk CSR perusahaan rokok, mayoritas mahasiswa sepakat fasilitas yang didanai CSR tersebut bermanfaat bagi kegiatan akademis. 53% responden menyatakan setuju dengan pernyataan, CSR sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan akademis; 22% ragu-ragu; 15% menyatakan sangat setuju; 7% tidak setuju; dan 3% sangat tidak setuju. Fakta ini bisa menjadi pemicu perusahaan rokok untuk terus 'berinvestasi' di dunia pendidikan.

Sayangnya pemanfaatan fasilitas CSR perusahaan rokok kurang maksimal. Sebagian kecil saja mahasiswa yang mengakses fasilitas-fasilitas CSR tersebut. Sebanyak 38% mahasiswa tidak pernah menggunakan fasilitas CSR perusahaan rokok. Bahkan, 21% menyatakan sama sekali tidak pernah menggunakannya.

Sampoerna Corner (SC) salah satunya. Hingga Mei 2008, perpustakaan mini yang terletak di lantai 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) II Perpustakaan ini telah diakses 4257 pengunjung dan 4091 pengguna internet. Menurut buku daftar pengunjung, mayoritas pengunjung adalah mahasiswa yang letak kampusnya dekat dengan UPT II Perpustakaan, seperti mahasiswa MIPA dan Teknik. Selain itu, tak banyak mahasiswa tahu SC karena letaknya relatif 'tersembunyi'.

Pencitraan

Aplikasi CSR rokok di bidang pendidikan rupanya mengandung berbagai tujuan. Salah satunya pencitraan. Philip Kotler dan Nancy Lee, dalam bukunya *Corporate Social Responsibility,* menjelaskan, sejatinya CSR merupakan instrumen penting dalam menunjang strategi perusahaan.[5] Ketika citra perusahaan bagus maka masyarakat cenderung loyal terhadap perusahaan.

Ternyata konsep ini juga berlaku di kalangan akademisi UGM. Sejumlah 31% responden menyatakan setuju dengan pernyataan, CSR perusahaan rokok di bidang pendidikan akan memengaruhi pencitraan saya terhadap perusahaan rokok. Namun, 31% juga yang menyatakan ragu-ragu. Sementara itu, 23% responden tidak setuju; 8% sangat setuju; dan 6% sangat tidak setuju.

Kecenderungan tersebut diamini Drs. Hendrie Adjie Kusworo, M. Sc, dosen Ilmu Sosiatri UGM. Sisi altruisme perusahaan dapat memengaruhi tingkat konsumsi.[6] "Misalnya, ada dua produk dengan kualitas sama. Akan tetapi yang satu diproduksi entitas yang jelas-jelas membagi keuntungannya pada rakyat miskin, pasti kita cenderung memilih yang kedua kan?" tutur ketua Forum Sepeda Hijau Jogja ini.

Lewat konsep altruisme, David C. Korten menerjemahkan kembali pemikiran Adam Smith tentang *the invisible hand.*[7] Adam Smith dalam Korten (2002: 182-184) berasumsi,

> "Orang yang perdagangannya memberikan kepedulian kepada masyarakat tak ubahnya tetangga yang baik. Dengan menjadi tetangga (baca: perusahaan) yang baik maka masyarakat tidak berusaha merugikan pihak perusahaan. Keseimbangan pasar akan berjalan dengan sendirinya. Korten akhirnya mempersembahkan sepuluh kaidah untuk pasar yang peduli.[8]"

Inti dari sepuluh kaidah tersebut yaitu kepedulian atau kemanusiaan di dalam bisnis.

Penerapan CSR merupakan salah satu usaha perusahaan untuk menjadi tetangga yang baik. CSR memang tidak memberikan keuntungan finansial dalam jangka pendek. Apabila perusahaan melakukan program-program CSR, keberlanjutan perusahaan terjamin. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat digolongkan sebagai investasi, laba berkelanjutan dan strategi bisnis perusahaan.[9] Keberlanjutan laba tak dapat dijamin tanpa ada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Legitimasi

Pencitraan lewat CSR berbuah dukungan. Mayoritas responden atau 79 % mengharapkan kontribusi berkelanjutan bagi kegiatan akademik melalui CSR tersebut. Hanya 6 % yang menolak kontribusi berkelanjutan dari CSR perusahaan rokok. Dukungan yang diberikan mahasiswa ini menguatkan legitimasi akademisi UGM terhadap perusahaan rokok.

Upaya perusahaan untuk mendapat legitimasi semacam ini dimulai pada era pascakorporasi.[10] Istilah ini muncul sebagai reaksi atas fenomena kapitalisme yang mengakumulasi modal. Menurut analisis Karl Marx, dalam sistem kapitalis terjadi dua proses yang berlawanan. M. Dawam Raharjo , dalam *Esei-Esei Ekonomi Politik Jakarta*, mengungkapkan,

> "Di satu sisi, proses peningkatan *surplus value* (nilai lebih) akan berlanjut dengan proses akumulasi modal, monopoli dan konsentrasi industri. Di sisi lain, proses peningkatan nilai lebih akan berlanjut dengan proses penurunan tingkat upah, makin kecilnya tingkat laba yang selanjutnya mengakibatkan proses pemiskinan, menurunnya data beli, pengangguran dan runtuhnya perusahaan-perusahaan kecil yang tak mampu bersaing.[11]"

Akibatnya, muncul tuntutan masyarakat untuk mewujudkan sistem yang lebih adil. Jika tuntutan ini tak diperhatikan maka legitimasi perusahaan dari masyarakat berkurang. Pun dengan laba perusahaan.

Joko Guntoro menyatakan, CSR merupakan alat untuk mendapat legitimasi sosial.[12] Legitimasi menurut Suchman, dalam Guntoro (2007;20) , merupakan generalisasi persepsi bahwa suatu tindakan dari sebuah entitas disebut layak menurut sistem norma, nilai, kepercayaan, dan pengertian.[13] Sejumlah sistem tersebut dikonstruksikan secara sosial. Legitimasi dapat dicapai lewat tindakan yang bermanfaat langsung bagi publik.

Ada tiga cara untuk mencapai sebuah legitimasi, yaitu konsensus elit, analisis rasional, dan partisipasi warga.[14] CSR perusahaan rokok di ranah pendidikan termasuk dalam konsensus elit. Cara mencapai legitimasi lewat konsensus elit melibatkan institusi utama di komunitas sehingga mendapat dukungan darinya. UGM merupakan salah satu institusi utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Legitimasi dari institusi utama akan memperkecil kemungkinan penolakan masyarakat. Saat perusahaan mendapat legitimasi berarti juga mendapat pembenaran secara sosial.

PREFERENSI TERHADAP CSR
SAYA TAHU BENTUK-BENTUK CSR DARI PERUSAHAAN ROKOK YANG MASUK KE UGM, MISALNYA SAMPOERNA CORNER, SEPEDA HIJAU, BEASISWA DJARUM
SANGAT TIDAK SETUJU 4 %
TIDAK SETUJU 9 %
SETUJU 56 %
RAGU-RAGU 18 %
SANGAT SETUJU 13 %
CSR ROKOK SANGAT BERMANFAAT UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIS
15% SANGAT SETUJU
53% SETUJU
22% RAGU-RAGU
7% TIDAK SETUJU
3% SANGAT TIDAK SETUJU
SAYA PERNAH MENGGUNAKAN FASILITAS DARI CSR PERUSAHAAN ROKOK
TIDAK SETUJU 38%
SANGAT TIDAK SETUJU 21%
SANGAT SETUJU 8%
SETUJU 22 %
RAGU-RAGU 11%
PARKIR
CSR SEHARUSNYA MEMBERIKAN KONTRIBUSI BERKELANJUTAN
SANGAT SETUJU 33%
SETUJU 46%
RAGU-RAGU 15%
TIDAK SETUJU 4%
SANGAT TIDAK SETUJU 2%
CSR PERUSAHAAN ROKOK DI BIDANG PENDIDIKAN AKAN MEMENGARUHI PENCITRAAN SAYA TERHADAP PERUSAHAAN ROKOK
SANGAT SETUJU 8%
SETUJU 31%
RAGU-RAGU 31%
TIDAK SETUJU 23%
SANGAT TIDAK SETUJU 6%
MISSING 1%

Pembatasan Asap Rokok

Merokok merupakan hak setiap individu. Namun, asap rokok membahayakan tak hanya bagi si perokok tetapi juga orang di sekitarnya. Pemerintah pun lantas merancang regulasi pembatasan asap rokok.

Sejumlah 38% responden mengaku tahu perda pembatasan asap rokok di beberapa daerah. Bahkan, 40 orang (10%) memiliki pengetahuan lebih tentang perda tersebut. Sebanyak 23% tidak mengetahui. Hanya 7% yang benar-benar awam dengan perda tersebut dan sisanya ragu-ragu.

Tak tahu bukan berarti tak setuju. Meski beberapa belum mengetahui perda pembatasan asap rokok, mayoritas responden atau 88 % mendukung peraturan tersebut. Hanya 5 % yang tidak mendukung. Sisanya ragu-ragu.

Penelitian lain juga menemukan kecenderungan serupa. Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM melakukan *quick survey* tentang regulasi pembatasan asap rokok terhadap 300 responden.[15] Hasilnya, 82% responden mengharapkan peraturan pembatasan asap rokok. Namun, mereka meminta peraturan itu ditetapkan terpisah dengan Perda Pengendalian Pencemaran Udara.

Hasil penelitian tersebut juga mencatat , 83 responden meminta dilakukan pembatasan asap rokok di tempat umum. Di antaranya kantor pemerintah, mal, dan kampus. "Pembatasan asap rokok bukan berarti merokok itu dilarang. Hanya jangan sampai mengganggu orang lain," tutur Direktur PSKK Prof Dr Muhadjir Darwin.

Hingga saat ini belum ada larangan merokok di area universitas. Akan tetapi, tak semua mahasiswa sepakat dengan perilaku merokok tersebut. Sejumlah 30% responden tidak setuju dengan perilaku merokok di area universitas dan 27% sangat tidak setuju. Sedangkan 25% menganggap merokok di area universitas merupakan tindakan yang sah-sah saja.

Asap rokok mengandung ribuan zat berbahaya yang merusak kesehatan. Tak heran, 83 % responden merasa tak nyaman dengan asap bakaran tembakau tersebut. Hal ini menunjukkan peraturan pembatasan konsumsi rokok perlu diberlakukan di area universitas. Di UGM, 77 % responden mendukung pemberlakuan peraturan tersebut. Sementara 10% ragu-ragu; 7% tidak setuju; dan 5% sisanya menyatakan sangat tidak setuju dengan peraturan tersebut.

Merokok memang hak tiap individu. Namun, tak semua orang nyaman dengan asap rokok. Tak terkecuali akademisi UGM. Mahasiswa pun mendukung pemberlakuan regulasi pembatasan asap rokok. Dukungan akademisi terhadap regulasi tersebut membuktikan mereka menolak rokok masuk kampus.

PREFERENSI
TERHADAP PRODUK ROKOK
SAYA MENGETAHUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PEMBATASAN ASAP ROKOK DI YOGYAKARTA ATAU DI DAERAH LAIN
SANGAT SETUJU 10 %
SANGAT TIDAK SETUJU 7 %
TIDAK SETUJU 23 %
SETUJU 38 %
RAGU-RAGU 21 %
missing 1%
SAYA TERGANGGU ASAP ROKOK
SANGAT SETUJU 56 %
SETUJU 27 %
RAGU-RAGU 8 %
TIDAK SETUJU 5 %
SANGAT TIDAK SETUJU 3 %
missing 1%
PERATURAN DAERAH PEMBATASAN ASAP ROKOK SANGAT DIPERLUKAN
missing 1%
SANGAT SETUJU 52 %
SETUJU 36 %
RAGU-RAGU 6 %
TIDAK SETUJU 3 %
SANGAT TIDAK SETUJU 2 %
MEROKOK DI AREA UNIVERSITAS MERUPAKAN TINDAKAN YANG SAH-SAH SAJA
SANGAT SETUJU 6 %
SETUJU 19 %
RAGU-RAGU 17 %
TIDAK SETUJU 30 %
SANGAT TIDAK SETUJU 27 %
missing 1%
KONSUMSI ROKOK DI AREA UNIVERSITAS HARUS DIBATASI
SANGAT SETUJU 42 %
SETUJU 35 %
RAGU-RAGU 10 %
TIDAK SETUJU 7 %
SANGAT TIDAK SETUJU 5 %
missing 1%

Korelasi

Pada bagian ini dipaparkan hubungan antara status penerima beasiswa, jenis kelamin, status perokok, dan pencitraan, dukungan atas pembatasan asap rokok, ketergangguan. Uji korelasi bertujuan menemukan hubungan antarvariabel. Dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi suatu variabel.[16]

Tidak ada korelasi antara status penerima beasiswa dan semua variabel. Nilai signifikansi antara status beasiswa dan semua variabel kurang dari 0,05. Ini berarti status beasiswa responden tidak berpengaruh pada pencitraan terhadap perusahaan rokok. Begitu juga dengan pendapat pembatasan asap rokok di universitas dan ketergangguan terhadap asap rokok.

Lain halnya dengan jenis kelamin. Status identitas ini berkorelasi dengan ketergangguan terhadap asap rokok. Perempuan cenderung terganggu asap rokok. Sebaliknya, laki-laki relatif bersahabat dengan asap rokok. Nilai korelasi antara kedua variabel sebesar 0,241.[17] Namun, hasil berbeda didapatkan ketika jenis kelamin dikorelasikan dengan pencitraan terhadap perusahan rokok. Jenis kelamin tidak berpengaruh pada pencitraan terhadap perusahaan rokok.

Status perokok responden berkorelasi dengan semua variabel. Responden perokok cenderung bersahabat dengan asap rokok dan menolak pembatasan asap rokok. Akan tetapi, mereka tidak terpengaruh pencitraan perusahaan rokok. Hubungan antara dua variabel tersebut sebanyak -0,184.[18]

Kesimpulan

Lain produk lain CSR. Akademisi menentang keberadaan produk rokok. Penolakan itu terbukti dengan dukungan mereka terhadap peraturan pembatasan asap rokok di universitas. Di sisi lain, akademisi juga berpendapat, perusahaan rokok seharusnya memberikan sumbangan terhadap lingkungan sosial. Salah satunya lewat CSR berkelanjutan di bidang pendidikan. Fenomena ini menunjukkan inkonsistensi sikap akademisi terhadap perusahaan rokok.

Dualisme sikap ini membuktikan teori pilihan rasional yang dicetuskan James E. Coleman.[19] Teori tersebut menjelaskan, perilaku atau tindakan manusia mengarah pada suatu tujuan, keuntungan atau hadiah, serta rugi atau biaya. Tujuan serta tindakan tersebut ditentukan nilai atau pilihan (preferensi).

Dua unsur utama dalam teori Coleman ini adalah sumber daya dan aktor. Sumber daya dalam konteks ini merupakan kekuatan atau sesuatu yang menarik perhatian. Sumber daya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang dapat dikontrol aktor. Sedangkan, aktor merupakan individu yang mempunyai tujuan dan memakai sumber dayanya untuk mencapai tujuan itu. CSR dan akademisi merupakan aktor. Sedangkan, faktor material yang diberikan CSR serta ilmu yang dimiliki akademisi merupakan sumber daya.

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor. Masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain membuat keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan dan sistem tindakan.

Perusahaan rokok sebagai pemberi CSR berinteraksi dengan akademisi. Interaksi merepresentasikan pertukaran kepentingan dan pencapaian tujuan. Universitas berkepentingan untuk menunjang kegiatan akademik. Sedangkan, perusahaan rokok berkepentingan mendapatkan legitimasi akademisi. Pada akhirnya, bagi perusahaan , proses interaksi tersebut menjadi alat keberlangsungan laba berkelanjutan. Bagaimanapun juga, CSR diberikan tidak secara cuma-cuma. Seperti apa yang pernah diungkapkan Adam Smith, *"There's no free lunch.* [20]*"* [ ]

catatan akhir

[1]Seperti yang dilansir selebaran terbitan Majelis Guru Besar UGM, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM, dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tentang Publikasi Diskusi Kontroversi Kebijakan Rokok: antara Pencegahan Penyakit dan Pertumbuhan Ekonomi, Sabtu. 31 Mei 2008.

[2]*http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/?p=opini.11* diakses pada 18 Mei 2008

[3]Mahasiswa yang menjalani program S1 non penerima beasiswa di tingkat universitas

[4]Sumber data populasi: direktorat kemahasiswaan UGM. Responden penerima beasiswa tersebut terbagi menjadi 4 responden penerima beasiswa dari PT. Djarum, Putera Sampoerna Foundation dan PT. Gudang Garam.

[5]*http://vlisa.com/2008/04/07/mengintip-csr-di-indonesia/* diakses pada 13 Juni 2008

[6]Altruisme merupakan kecenderungan sikap mementingkan kepentingan bersama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ketiga.2000. Balai Pustaka

[7]Adam Smith mengemukakan ketika pasar mengalami ketidakseimbangan, konsumen cenderung akan lari dari pasar. Maka akan ada tangan tak terlihat yang akan menyeimbangkannya. Proses penyeimbangan bisa jadi mendorong masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan untuk menyeimbangkan minat konsumen lagi. Baca : David C. Korten. 2002. *The Post-Corporate World*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm.182)

[8]*ibid.*. Korten. 2002. Hlm. 182-184. Sepuluh kidah tersebut yakni pertama, jadikan kehidupan sebagai ukuran. Kedua, bebankan biaya pada pembuat putusan. Ketiga, dahulukan perusahaan yang berskala manusia dan kepemilikan oleh stakeholder.Keempat, perjuangkan keadilan. Kelima, utamakan keterbukaan penuh. Keenam, dorong untuk berbagi pengetahuan dan teknologi. Ketujuh, cari keberagaman dan swasembada. Kedelapan, perhatikan tapal batas. Kesembilan, hormati peranan pemerintah yang penting. Terakhir, pertahankan budaya etika

[9]*http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/program-corporate-social-responsibility-yang-berkelanjutan/* diakses pada 23 Juni 2008

[10]Kondisi masyarakat ini tercipta sebagai reaksi atas sistem kapitalis yang menindas. Istilah ini didengungkan David C. Korten, pengajar fakultas Pascasarjana Bisnis Universitas Harvard. Pascakorporasi merupakan suatu era terciptanya masyarakat yang benar-benar demokratis, berbasiskan pasar, berpusat pada kehidupan. Kebebasan pada era ini bukan berarti bebas untuk memuaskan diri sendiri atau mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan keseluruhan, melainkan suatu kesempatan untuk mengabdi dengan bebas dan bertanggung jawab sebagai masyarakat yang padu. Korporasi pada era ini akan sadar bahwa semboyan "waktu adalah uang" telah berubah menjadi "waktu adalah kehidupan". Prakteknya kemudian berupa meningkatkan kesadaran keseluruhan hubungan manusia dengan planet hidup, belajar bekerja dan hidup dalam cara yang tidak menimbulkan dampak negatif berjangka panjang terhadap lingkungan. Pertanggungjawaban etis sektor korporasi akan menimbulkan dukungan lebih besar terhadap reformasi struktural yang diperlukan. Upaya itu akan menguntungkan secara ekonomi bagi perusahaan yang bertanggung jawab. (David C. Korten. 2002. *The Post-Corporate World*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 164-178)

[11]M. Dawam Rahardjo. 1983. *Esei-esei Ekonomi Politik. Jakarta*. LP3ES. Hlm. 104-105 (Kritik terhadap Marxisme dan Marxisme sebagai Kritik terhadap Pembangunan Kapitalis).

[12]Joko Guntoro. Dalam skripisinya *Corporate Social Responsibility: Antara Kepedulian Membangun Masyarakat dan Mendapat Legitimasi Sosial*, (Studi Kasus pada Eksplorasi Dodo-Rinti PT. Newmont Nusa Tenggara, Kec. Ropang, Kab. Sumbawa). UGM. Yogyakarta. Ilmu Sosiatri 2007. hlm. 21

[13]*ibid.* Hlm 20

[14]*ibid*. Hlm. 21

[15]*http://duniatanparokok.wordpress.com/* diakses pada 13 Juni 2008

[16]Dua variabel dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansinya (p-value) kurang dari 0,05. Baca, *Serikat Buruh Rokok Jogja Mandul.*

[17]Semakin nilai korelasi menjauhi nol, semakin besar hubungan antarvariabel.

[18]Nilai korelasi negatif berarti semakin tinggi nilai A maka semakin rendah nilai B.

[19]George Ritzer-Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern* edisi keenam. Jakarta. Prenada Media. Hlm.394

[20]*op cit* Guntoro. 2007. Hlm. 23

Anda tentu tahu Jakarta, pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Deretan perkantoran multinasional, mal-mal sampai monumen nasional menjadi magnet bagi siapa saja yang gemar wisata kota.

NAMUN, SUDAHKAH ANDA BENAR-BENAR BERKUNJUNG KE JAKARTA?

TEMUKAN JAWABANNYA DI HALAMAN **141**

UPAYA MONOPOLI INDUSTRI ROKOK BESAR:

IMPLEMENTASI REGULASI PUBLIK MELALUI HEGEMONI INTELEKTUA
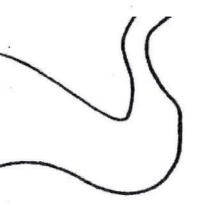
Editor: Indra Hari P | **Infografis:** Warsini Handayani **Ilustrasi:** M. Rizal Abdi

Arif Kurniarrahman

Mahasiswa Sastra Indonesia UGM. Saat ini sedang bertarung dengan problem "psikologisnya", baik itu berbentuk skripsi maupun hati. Baginya, segala hal perlu dinikmati bukan ditegaskan dengan bahasa, sehingga setiap interaksi harus dimaknai sebagai "manfaat." Bukan "terikat."

Kaum Intelektual merupakan "deputi" dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintahan sosial

(Antonio Gramsci)

Dalam daya kekuatan refleksi diri, pengetahuan dan kepentingan adalah satu

(Jurgen Habermas)

Berbicara rokok, maka imajinasi kita tidak bisa lepas dari fakta sosial sejarah yang membuatnya menjadi penting. Selain legitimasi kultural yang menjadi asumsi, relevansi sosial–ekonomi–politik yang melingkupinya pun menjadi sederet kajian yang pantas untuk digali. Pantas, jika Kuntowijoyo mengatakan bahwa sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang luas dan beraneka ragam karena mempunyai relevansi dengan sejarah ekonomi sehingga, menjadi semacam sejarah sosial–ekonomi.[2] Salah satu hal yang perlu disorot adalah regulasi yang dibuat pemerintah terkait rokok, PP No. 81 tanggal 5 Oktober 1999 dan PP No. 19 Tahun 2003. Muncul asumsi telah terjadi korporasi yang dominan antara negara dan industri besar melalui legitimasi moral "intelektual kampus". Tujuannya memonopoli pasar agar konsumen mengarah pada produk industri besar sehingga melahirkan cukai yang melimpah kepada negara. Benarkah demikian?

Rokok: Produk Industri yang Dilematis

Sebelum mengupas lebih jauh, mari menyimak proses dialektika sejarah rokok. Menurut Barthes, kajian sejarah penting untuk melakukan demistifikasi ideologi dari sebuah kebudayaan dengan membeberkan asumsi-asumsinya sebagai ideologi.[3] Tembakau sebagai bahan baku rokok berasal dari Amerika, sebelum dipopulerkan orang Eropa pada bangsa-bangsa jajahannya. Di Indonesia, tembakau pertama kali dibawa pelaut Portugis yang melakukan penetrasi dagang. Menurut data, sudah sejak 1624 tembakau dihisap raja-raja Jawa di Mataram, tetapi dipastikan belum menjadi barang konsumen bagi rakyat jelata.[4] Selama masa politik liberal kolonial Belanda, yaitu pada akhir abad ke-19, tembakau menjadi hasil perkebunan terpenting di Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagian Jawa Timur, dan Deli Sumatera. Produksi jenis ini, khususnya cerutu menjadi langganan ekspor ke luar negeri. Pada waktu yang sama, produsen Indonesia banyak yang menanam tembakau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di Jawa Barat, tembakau keras digulung menjadi rokok yang tipis dengan menggunakan daun enau. Di Jawa Tengah, tembakau dicampur dengan bermacam rempah dan getah, termasuk pala, kayu manis, dan kemenyan menurut selera perokok.[5]

Pasar untuk industri rokok yang diproduksi oleh orang Indonesia, yaitu jenis rokok gulung banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia sendiri. Produksi ini dianggap menjadi simbol perlawanan dominasi rokok putih yang banyak diekspor. Perlahan-lahan proses perubahan rasa pun dilakukan dalam proses meramu. Ada campuran cengkeh dalam tembakau, tujuannya untuk menyesuaikan lidah orang Indonesia. Selanjutnya, rokok baru ini dikatakan kretek karena ada suara merintik yang terdengar ketika rokok dibakar.[6] Produk ini menjadi komersial ketika penjaja duduk di tepi jalan menggulung kretek untuk konsumen yang sedang melintas. Selera kretek kemudian meluas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada permulaan abad ke-20, industri ini menjadi sumber pendapatan untuk wilayah tersebut.

Sekarang, lebih dari 20 juta penduduk Indonesia bergantung pada industri rokok. Industri rokok diperkirakan mampu memberikan masukan 90 persen dari total cukai pada 1998 yang mencapai nominal 7,5 triliun rupiah. Kondisi di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Industri rokok juga mendorong peningkatan surplus perdagangan komoditas tembakau dan hasil olahannya yang mencapai 147,79 juta dollar AS.[7]

Sumbangan yang sangat besar terhadap negara ini, tidak selaras dengan kondisi daerah penghasil rokok. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pengaturan Cukai Rokok untuk Pusat dan Daerah. Isinya menyebutkan cukai rokok

masih masuk ke kas pemerintah pusat. Akibatnya, beberapa daerah belum menikmati hasil cukai rokok di kotanya sendiri. Dari data Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) disebutkan bahwa pada 1999/2000, nilai hasil cukai rokok di seluruh Indonesia berjumlah 9 triliun rupiah. Tentu saja, seluruh cukai rokok itu masuk ke kas pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya mendapat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak daerah (pajak reklame, air bawah tanah, sampah, dan penerangan jalan) dari pabrik itu.

Sebagai contoh, pada 1999 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri mencapai 7,14 miliar rupiah. Realisasi PAD tahun anggaran 2000 mencapai 6,17 miliar rupiah. Sementara, realisasi PBB di kota itu pada 1999 dan 2000 masing-masing telah mencapai 5,46 miliar rupiah dan 5,95 miliar rupiah. Dari sisi PAD, PT Gudang Garam, Tbk. memang menjadi kontributor terpenting. Pada 1999, kontribusi PAD dari PT Gudang Garam, Tbk. untuk Kota Kediri mencapai 28,47 persen, sementara pada 2000 kontribusinya meningkat menjadi 42,5 persen. Kontribusi PT Gudang Garam, Tbk. itu diberikan melalui PBB (985,6 juta rupiah pada 1999 dan 995,48 juta rupiah pada 2000) dan melalui pajak daerah (1,05 miliar rupiah pada 1999; 1,63 miliar rupiah pada 2000).[8] Kudus pun sebagai salah satu produsen rokok mengalami kondisi serupa. Penerimaan cukai rokok dari PT Djarum selalu mengalami peningkatan antara 15-53 persen tiap tahun. Penerimaan cukai rokok tahun anggaran 1999-2000 mencapai 1,7 triliun rupiah atau meningkat 52 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Namun, Pemerintah Kabupaten Kudus masih mengeluhkan tidak adanya kontribusi langsung industri rokok terhadap PAD. Padahal, pada 1998/1999 industri rokok PT Djarum memberikan cukai sebesar 6 miliar rupiah. Anehnya lagi, realisasi PAD Kabupaten Kudus pada 2000 tidak mencapai 10 miliar rupiah, sebuah anggaran yang relatif kecil dibanding cukai yang diberikan PT Djarum Kudus kepada Pusat.[9]

Industri hasil olahan tembakau dengan produksi utama rokok juga berperan dalam sektor lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk penyerapan tenaga kerja, diperkirakan industri ini menyerap 6,5 juta pekerja, antara lain: 250 ribu bekerja di pabrik, 2,5 juta bekerja di sektor pertanian tembakau, 1,9 juta bekerja di perkebunan cengkeh, 1.150 berprofesi sebagai pedagang asongan, dan 585 ribu orang bekerja di sektor distribusi.[10] Industri rokok juga mendorong berkembangnya industri dan jasa lain seperti percetakan, periklanan, perdagangan, transportasi, dan penelitian. Walaupun begitu, kampanye antirokok demi kesehatan, meningkatkan kesejahteraan buruh dan petani tembakau, merupakan tantangan yang harus dijawab dalam kerangka pengembangan industri nasional.

Tentu saja, seluruh cukai rokok itu masuk ke kas pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya mendapat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak daerah (pajak reklame, air bawah tanah, sampah, dan penerangan jalan) dari pabrik itu.

Korporasi Negara dan Industri: Implementasi Regulasi yang Tidak Berpihak

Bagi Weber, munculnya kapitalisme modern berjalan seiring dengan berkembangnya hubungan dominasi yang impersonal.[11] Artinya, perkembangan kapitalisme dipengaruhi oleh proses interaksi manusia, dan sebaliknya proses interaksi juga dipengaruhi kapitalisme. Konsep ini sedikit bertolak belakang dengan George Simmel yang memosisikan masyarakat dan individu sebagai sesuatu yang abstrak, mengingat individu dan masyarakat kurang memadai dalam mengungkap gejala sosiologis.[12] Fakta yang terungkap dari kedua pemahaman ini adalah pengaruh sosiologis masyarakat–dengan interaksi menjadi contohnya–yang luar biasa. Industri kemudian diyakini sebagai "anak emas" dalam perkembangan sosiologis masyarakat.

Sebelum diungkap efek yang dimunculkan dari pengaruh industri, perlu dikaji perkembangannya di beberapa negara. Ada tiga negara besar Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) yang menarik untuk dikaji karena dalam proses industrialisasinya memiliki perkembangan yang berbeda. Berikut akan coba dijelaskan studi terhadap tiga negara tersebut sebagai fondasi analisis untuk menjelaskan fenomena industri, khususnya industri rokok di Indonesia. Kajian tiga negara tersebut juga diharapkan mampu membongkar hubungan industrial antara negara dan industri besar, terutama dikaitkan dengan regulasi publik terkait rokok.

Pertama, Inggris. Di negara ini perjuangan politik berlangsung mulai awal abad 17. Titik kulminasinya adalah revolusi yang dimulai pada 1640. Akibat revolusi, pola struktur politik lama berganti menjadi pola struktur yang baru, yaitu dengan berpindahnya kekuasaan politik ke tangan kaum kapitalis dan borjuis yang kemudian beraliansi dengan seksi aristokrasi yang lebih progresif.[13] Akibatnya, perkembangan ekonomi di Inggris maju pesat. Inovasi teknologi mendorong metamorfosis dalam industri manufaktur. Inovasi ini berpengaruh terhadap penyebaran mesin-mesin dan hasil industri pabrik. Industri ma-

nufaktur kapas menjadikan Inggris sebagai negara maju dalam perkembangan industrial.

Kedua, Prancis. Bagi Marcuse, tujuan revolusi Prancis adalah menemukan tempat istirahatnya dalam proses kapitalisme industrial.[14] Wajar bila kemudian produk industri yang semakin meluas mampu menyediakan sarana penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbeda dengan Inggris, revolusi Prancis pada 1789 merupakan usaha kaum borjuis Prancis untuk menggulingkan tata aristokratik rezim lama dan untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta kebebasan.[15] Revolusi berhasil menginstitusionalisasikan perubahan politik sebagai sebuah kelengkapan organisasi masyarakat. Revolusi di Prancis membutuhkan waktu lama. Rasionalisme sekuler sebagai prinsip berpikir dan bertingkah laku sebetulnya telah berkembang sejak abad ke-16, tetapi kondisi ini belum membuahkan revolusi. Abad ke-19 situasi politik Prancis berubah, posisi kuat pemerintah yang dipegang oleh kaum borjuis liberal merosot akibat menguatnya kekuasaan otokratis yang ditandai dengan munculnya Napoleon Bonaparte. Akibatnya, negara kuat mampu mengontrol seluruh aktivitas politik dan ekonomi masyarakat. Negara menghalangi aksi bersatunya kaum borjuis dengan cara mengooptasinya ke dalam rezim yang berkuasa. Semangat republik di Prancis bangkit kembali pada 1830, 1848, dan 1871, sebelum kembali dihancurkan oleh pemerintahan yang berdiri pada periode berikutnya. Beberapa hal yang berhasil dicapai dalam revolusi Prancis, yaitu kontrol harga, partisipasi dalam pemerintahan lokal, dan kemerdekaan para budak Afrika. Perubahan-perubahan konstitusional yang menjadi hasil revolusi Prancis pada 1789 secara kuat memengaruhi pemerintahan monarkis, imperial, serta republik yang mengikutinya di abad ke-19.[16]

Logika perkembangan ekonomi pun bergeser dari 'pemerataan' menjadi 'pertumbuhan'. Makna kebebasan menjadi sangat sempit sesuai kepentingan borjuasi, yaitu totaliterisme. Artinya, satu organisasi monopolistik borjuasi berpura-pura membagi kekuasaannya kepada semua pihak.

Ketiga, Jerman. Perkembangan ekonomi di Jerman tertinggal dengan Inggris dan Prancis. Kelas menengah Jerman yang lemah dipastikan tidak bisa memikirkan revolusi. Memang muncul perusahaan industri di beberapa wilayah, tetapi masih berada dalam mekanisme feodal. Jerman diidentifikasi mengambil bagian restorasi Eropa modern tanpa pernah melakukan revolusi. Abad ke-19, Jerman terkomposisi atas negara-negara berdaulat yang terikat dalam agregasi. Kondisi ini berakhir ketika Prusia mampu mencapai persatuan Jerman di bawah kepemimpinan Bismarck. Industrialisasi Jerman dimulai sebelum terjadinya unifikasi politis, tetapi momentum besarnya baru berlangsung setelah 1871. Proses industrialisasi Jerman dimulai dari perkembangan segala sektor ekonomi, kemudian migrasi berskala besar, radikalisme sosial (dianggap ancaman terhadap wakil rezim aristokrasi lama), hingga kebijakan sosial dan ekonomi kekaisaran Prusia yang lebih responsif terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Kebijakan ekonomi

modern Monarki Prusia awalnya berlangsung di bawah pemerintahan Frederick *The Great*. Jerman diidentifikasi belum pernah mengalami revolusi borjuis yang berhasil. Sebuah tata otokratis yang kuat, beroperasi melalui kontrol birokrasi negara serta angkatan-angkatan bersenjata. Institusi tersebut mampu menjaga kaum borjuasi yang sedang bangkit agar tetap berposisi tersubordinasi. Negara memberikan peluang, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol, sehingga kaum borjuis tidak memiliki kesempatan untuk menumbangkan kekuasaan.[17]

Walaupun terdapat hubungan historis yang berbeda antarnegara dalam pengertian hubungan industrial, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa aristokratis-monarki, borjuis-kapitalis, dan populasi pekerja industrial masih relevan untuk mengungkap fenomena hubungan industrial kontemporer. Dalam perkembangan industrialisasi, industri manufaktur telah berubah menjadi sektor utama perekonomian. Akibatnya, sumbangan sektor pertanian dalam produksi ekonomis menurun. Lowongan pekerjaan bergeser dari sektor agrikultur ke sektor manufaktur. Logika perkembangan ekonomi pun bergeser dari 'pemerataan' menjadi 'pertumbuhan'. Makna kebebasan menjadi sangat sempit sesuai kepentingan borjuasi, yaitu totaliterisme. Artinya, satu organisasi monopolistik borjuasi berpura-pura membagi kekuasaannya kepada semua pihak.[18]

Bagaimana di Indonesia? Proses perkembangan industri di Indonesia selalu dikarakterisasikan institusionalisasi nilai-nilai budaya tradisional demi kepentingan penguasa. Kelahiran kapitalisme pada masa kolonial tidak memengaruhi struktur feodal Jawa. Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya menggunakan aristokrasi Jawa sebagai instrumen untuk mengekploitasi tenaga kerja untuk menanam produk-produk ekspor, rokok bisa menjadi contoh. Pun dengan periode Orde Lama dan Orde Baru, pola hubungan ini tetap dipertahankan. Kondisi yang berlarut ini diakibatkan konsep masyarakat Jawa dalam memaknai kekuasaan.[19] Anderson mengungkapkan bahwa upacara adalah salah satu simbol kuasa. Semakin luas upacara itu menjangkau kelompok politik, semakin besarlah kuasa yang nyata yang dipersepsikan.[20]

Persepsi tentang upacara di Jawa sangatlah kompleks. Selain sebagai salah satu bentuk ritual, upacara juga dipahami sebagai instrumen kontrol pusat ke pinggiran. Kontrol terhadap lingkungan tidak bisa dilakukan secara individual, namun perlu adanya kesadaran kolektif antarelemen yang dianggap berpengaruh. Muncul pemahaman bahwa seorang penguasa harus menghimpun benda dan orang di sekitarnya untuk menjamin kekuasannya. Hal inilah yang kemudian memunculkan konsep korporasi. Dalam perkembangannya, muncullah dua kekuatan besar yang dominan, yaitu kekuatan negara dan industri. Korporasi antara industri dan negara mampu menjadi kekuatan dominan dalam laju pasar. Dalam hal ini industri mampu berdiplomasi dengan negara dalam membuat regulasi yang menguntungkan mereka. Negara pun diidentifikasi mendapatkan kontribusi berupa cukai yang menggiurkan dari regulasi yang dibuat.
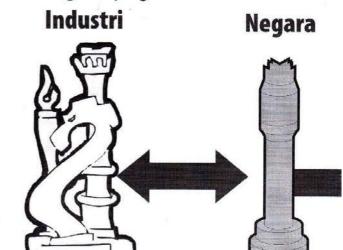
Regulasi yang dimaknai sebagai produk korporasi pun berjalan dinamis sesuai kebutuhan. Kondisi ini sejalan lurus dengan tradisi korporatisme yang merupakan kontinuitas historis dari masa kolononialisme hingga pascakolononialisme.[21] Dikaitkan dengan industri rokok, pola regulasi tersebut dapat dilihat. Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan industri rokok, antara lain PP No. 81 tanggal 5 Oktober 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. PP tersebut dikeluarkan pada saat-saat terakhir pemerintahan B.J. Habibie yang mulai berlaku tahun 2001. PP tersebut menyebutkan sanksi bagi pelanggarnya, yaitu bila tidak dapat memenuhi kandungan nikotin maksimal 1,5 mg dan tar 20 mg, akan terkena penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Konsekuensi dari PP tersebut, banyak industri rokok besar yang memproduksi rokok berjenis *mild* karena diidentifikasi se-suai dengan peraturan. Ironisnya, peraturan tersebut berimbas bagi industri kecil, terutama terkait dengan produksi karena tidak memiliki alat untuk membuat jenis tembakau halus. Akhirnya, pola monopoli pasar terjadi sebagai konsekuensi dari peraturan negara yang tidak berpihak pada usaha kecil.

Dalam perkembangannya, isu tentang kesehatan mengalami stagnasi karena banyaknya produk yang memiliki kondisi yang sama dengan rokok. Jika rokok identik dengan kerusakan paru-paru, bagaimana dengan minyak goreng yang memiliki korelasi dengan kolestrol? Bagaimana nasib minuman instan yang jelas mengandung kandungan gula hingga mengakibatkan diabetes? Kondisi ini membuat PP No. 81 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan tidak lagi memiliki argumentasi yang relevan. Muncullah isu baru sebagai wacana. HAM dibidik untuk menguatkan regulasi. Hal ini terkait dengan hak orang lain yang tidak menghisap rokok, tetapi ikut menghirupnya.

Korporasi antara industri dan negara mampu menjadi kekuatan dominan dalam laju pasar. Dalam hal ini industri mampu berdiplomasi dengan negara dalam membuat regulasi yang menguntungkan mereka.

Diberlakukanlah beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan merokok di depan umum maupun sejenisnya. DKI Jakarta yang telah memberlakukan Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Larangan Merokok di Tempat Umum. Bagi yang melanggar akan dikenai denda sebesar 50 juta rupiah dan kurungan penjara selama 6 bulan. Selain itu, ada Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan K3 di Bandung dan Perda Ketertiban Umum yang dikeluarkan Pemda Bogor.[22] Di Yogyakarta, perda tentang dilarangnya merokok di depan umum pun mulai dicanangkan. Perda

Masyarakat

Regulasi

tersebut memuat pasal mengenai larangan merokok di tempat umum. Alasan diberlakukan perda tersebut karena Kota Pelajar ini diidentifikasi merupakan daerah tertinggi atau nomor satu dalam persentase perokok.[23] Merokok kemudian diklaim merugikan kesehatan dengan didasarkan data setiap tahun tentang kematian akibat merokok yang mencapai angka kematian 2,7 juta orang per tahun. Jumlah tersebut diperkirakan bakal mendekati angka 4,5 juta pada tahun 2020.[24]

Alasan diberlakukannya perda larangan merokok di depan umum di setiap daerah juga terkait dengan PP No. 19 Tahun 2003. Salah satu isinya memuat kawasan bebas rokok di tempat umum yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau instansi terkait. Argumentasi lain yang melatarbelakangi adalah merokok merupakan hak asasi yang perlu dihormati, tetapi masyarakat yang bukan perokok juga mempunyai hak asasi untuk menghirup udara segar yang tidak tercemar asap rokok. Menjadi tidak adil ketika seseorang bukan perokok menderita risiko yang sama seperti halnya terjadi pada perokok.

Upaya menghormati HAM dengan membiarkan perokok aktif meracuni perokok pasif menjadi sebuah "pernyataaan" yang perlu disikapi.[25] Sekilas, memang industri besar dirugikan dengan kondisi tersebut. Namun, jika disimak lebih lanjut, laju pasar berpihak kepada industri besar. Jika ada identifikasi regulasi yang mengarah pada industri rokok kelas I[26], industri rokok kelas II[27], dan industri rokok kelas III[28], maka regulasi yang dibuat pemerintah jelas menguntungkan industri kelas I dan kelas II. Perilaku yang dimunculkan mengarah pada stereotip negatif terhadap rokok. Di tingkat kebijakan, situasi ini semakin melegitimasi

Cukai menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi distribusi rokok. Menariknya, kebijakan ini tidak beraplikasi negatif terhadap industri rokok besar dan menengah, tetapi lebih pada industri rokok kecil yang tidak memiliki modal besar.

negara untuk menaikkan cukai. Sikap dari negara ini sebenarnya terletak pada posisi industri yang sangat strategis di masyarakat, mulai dari ketenagakerjaan, hingga pada pemasukan cukai. Sangat tidak mungkin bagi negara untuk menutup industri ini melihat pengaruhnya yang begitu besar. Opsi kebijakan yang mengarah pada kehendak pasar dengan mengaplikasi kenaikan cukai pun dilakukan. Cukai menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi distribusi rokok. Menariknya, kebijakan ini tidak beraplikasi negatif terhadap industri rokok besar dan menengah, tetapi lebih pada industri rokok kecil yang tidak memiliki modal besar. Akhirnya, monopoli industri pun kembali muncul, walaupun tidak secara tegas diberlakukan.

Dalam rekomendasi Apeksi pada Semiloka Penyusunan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok oleh Pemerintahan Kota di Jakarta pada 17-19 Januari 2007, terdapat penetapan kawasan yang kemudian dibagi menjadi dua kategori. Pertama, Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, termasuk tempat terbuka yang berada pada batas terluar tempat tersebut. Adapun KTR tersebut meliputi fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat kegiatan anak-anak, termasuk fasilitas belajar-mengajar untuk yang berusia di bawah 18 tahun, sarana transportasi umum, dan lokasi

yang rentan terhadap bahaya kebakaran. Kedua, Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Adapun kawasannya meliputi semua tempat umum, seperti: tempat kerja yang tertutup, stasiun kereta api, hotel, mal, bandara, dan terminal bus. Di tempat tersebut pemilik, pengelola atau penanggungjawab wajib menyediakan ruangan untuk merokok.[29]

Studi di beberapa daerah mengambarkan bahwa aplikasi peraturan tersebut tidak mampu dijalankan secara maksimal. Andriano Chaniago mengatakan bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dianggap masih belum memberikan contoh yang baik. Menurutnya, Perda Rokok termasuk perda yang tidak berwibawa.[30] Semua ruangan yang. semula disediakan untuk perokok perlahan hilang, akibatnya banyak pegawai merokok di ruangan kerja yang sebenarnya terlarang untuk merokok, banyak orang yang merokok di rumah sakit dan angkutan umum tanpa ditegur, apalagi dikenakan sanksi. Ketentuan sanksi yang berat ternyata tidak mendapatkan respon yang positif bagi masyarakat, bahkan menuai protes. Wajar bila sanksi peraturan tersebut diturunkan, dari hukuman kurungan 6 bulan menjadi 3 bulan, dari denda 50 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah.

Kondisi ini menjadi sebuah evaluasi, bukan pada kondisi ketegasan regulasinya, tetapi lebih mengarah pada objek yang memiliki ruang sosial kebudayaan tersendiri. Artinya, kadang kondisi sosial kebudayaan tersebut berlawanan dengan model regulasi. Beberapa daerah, seperti Yogyakarta masih menganggap bahwa implementasi larangan merokok yang termuat dalam perda tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Yogyakarta akan menghadapi tantangan budaya yang masih menempatkan rokok sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Yogyakarta memiliki tingkat kesungkanan yang tinggi, termasuk enggan menolak rokok yang ditawarkan ketika berkumpul bersama komunitasnya. Rokok merupakan salah satu suguhan wajib dalam pertemuan-pertemuan di masyarakat setiap kali ada upacara pernikahan, kematian, rapat warga, ataupun kumpul-kumpul santai.

Kondisi ini tentu sangat dilematis. Di satu sisi, kebudayaan merupakan aktivitas yang sudah mengental dalam masyarakat–meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat–[31] yang perlu dilestarikan melawan dominasi modernitas sebagai imbas global. Di lain sisi, hal ini menyangkut persoalan HAM yang kesadarannya perlu disosialisasikan ke masyarakat. Kondisi ini tentu memunculkan kontradiksi psikologis dalam masyarakat yang berefek pada perilaku. Terkait dengan persoalan tersebut, apa yang diungkap Kurt Lewin mungkin benar bahwa penggambaran fakta-fakta sosiopsikologis dengan konsepsi yang dinamis memungkinkan derivasi kondisi yang memengaruhi perilaku.[32] Bila pada awalnya tercipta komunikasi yang harmonis dengan mementingkan kebutuhan kolektif, bisa jadi pascaregulasi ini dilegalkan, masyarakat menjadi lebih individual. Rokok sebagai alat tata kelakuan individual untuk berinteraksi menjadi lenyap. Padahal, tata kelakuan masyarakat berefek pada solidaritas antara anggota sosial masyarakat.[33]

Dalam konteks lain, adanya sanksi yang represif di era modern memosisikan hukuman hanya sebagai alat penangkal. Hukuman yang diinstitusikan membuat ukuran moralitas dihomogenkan. Akibat pola ini, bentuk solidaritas yang dibangun pun mengarah pada ketergantungan fungsional, bukan hanya berasal dari penerimaan suatu perangkat bersama dari kepercayaan. Durkheim

menyebut konsep ini sebagai solidaritas organis.[34] Pertumbuhan solidaritas organis dengan memunculkan pembagian kerja, diasumsikan memiliki keterkaitan dengan mental individualisme yang semakin meningkat.

Akhirnya, implikasi yang dimunculkan tetaplah menguntungkan dua elemen besar, yaitu negara dan industri besar. Negara diuntungkan karena diamanatkan mengatur interaksi masyarakat yang semakin individual lewat regulasinya. Sedangkan, industri besar diuntungkan karena mampu mendapatkan suplai tenaga kerja murah akibat perluasan tenaga kerja. Dalam konteks ini, institusi politik (diwakili negara) dan ekonomi (diwakili industri besar) telah bergabung menjadi kekuatan ekonomi politik yang menyatu membentuk basis ekonomi.[35] Kondisi ini menggiring perspektif negara yang tidak lagi murni berbicara politik, tetapi mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi. Regulasi yang dibuat kemudian tidak hanya dimaknai sebagai produk politik, tetapi memiliki korelasi dengan ekonomi.

Pun demikian dengan regulasi tentang rokok. Industri besar mungkin sedikit digoyang karena dapat mengganggu stabilitas produksi. Namun, dengan kebijakan tersebut tentulah membuat mereka semakin memonopoli pasar. Industri skala kecil tidak mampu lagi bersaing karena sejak awal dikondisikan kalah. Jika kemudian banyak bermunculan industri ilegal karena tidak mampu membeli cukai, maka hal ini merupakan konsekuensi logis ketidakberpihakan negara terhadap industri kecil.

Intelektual Sebagai *Agent of Power*

Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu sama lain berdasarkan posisi dan fungsinya dalam proses produksi. Basis struktur pada formasi sosial menentukan sekali bangunan atasnya. Dengan kata lain, bangunan atas adalah cermin dari keadaan struktur bawah. Negara diidentifikasi sebagai alat untuk menjamin kedudukan kelas atas yang fungsinya secara politis meredam usaha-usaha kelas bawah. Suprastruktur ideologis–istilah Marxis untuk mengidentifikasi pandangan moral, filsafat hukum, agama, estetika, dan lain sebagainya–berfungsi memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu.[36] Kondisi ini disebut sebagai determinisme ekonomis sebagai pandangan marxis klasik yang mengungkap bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi sosial, tetapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran. Pola inilah yang kemudian memunculkan hegemoni. Bagi Gramsci, hegemoni diidentifikasi sebagai sesuatu yang kompleks, bersifat ekonomi, dan etis–politis. Di sini hubungan-hubungan antara massa dan kelompok-kelompok pemimpin masyarakat

ditafsirkan sebagai suatu hubungan yang tidak hanya politis dalam pengertian sempit, tetapi juga persoalan mengenai gagasan atau kesadaran.[37]

Hegemoni yang dibangun oleh suatu kelas dominan sebetulnya didasarkan pada mekanisme konsensus. Melalui konsensus muncul komitmen aktif dari seluruh kelas sosial yang secara historis lahir dari hubungan produksi. Kondisi inilah yang memunculkan pandangan terhadap legitimasi. Kelas minor pada dasarnya menerima konsesus ini secara pasif. Hal itu terkondisi karena mereka kekurangan basis konseptual pembentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.

Terdapat dua hal mendasar yang dianggap Gramsci sebagai biang keladinya, yaitu pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Untuk pendidikan sebagai mesin pencetak intelektual, Gramsci mengatakan pendidikan yang ada tidak pernah mungkin membangkitkan kemampuan secara kritis.[38] Di lain pihak, mekanisme kelembagaan menjadi tangan dari kelompok orang yang berkuasa. Konflik sosial dibatasi karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan harapan menurut sistem yang ditentukan.

Intelektual sebagai produk pendidikan menempati posisi yang penting. Gramsci menguji persoalan kaum intelektual ketika intelektual memahami kesatuan nyata dari basis-struktur dan suprastruktur. Kerangka analisis ini dimaksudkan untuk menolak pengertian intelektual yang berkiblat pada filosof beraliran idealis. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah intelektual merupakan suatu kelompok yang otonom dan independen? Kemudian, apakah setiap kelompok mempunyai kategori khusus intelektual? Terkait dengan itu, Gramsci memandang intelektual bukan dari hakikat intrinsik, melainkan posisi kegiatan itu yang masuk dalam suatu hubungan-hubungan sosial yang kompleks.[39]

Agar lebih memudahkan melakukan kategorisasi, maka Gramsci membagi Intelektual menjadi dua, yaitu intelektual organik dan intelektual tradisional. Intelektual organik dimaknai sebagai intelektual yang berasal dari kelas tertentu, bisa berasal dari kelas borjuis, kelas buruh dan berpihak kepada perjuangan buruh. Kelompok ini berpenetrasi ke massa dengan memberikan pandangan dunia baru. Sedangkan intelektual tradi-

sional dimaknai sebagai intelektual otonom. Kelompok ini memisahkan inteligensia dengan tatanan sosial. Intelektual jenis ini terbungkus dalam karakter mereka sendiri.[40]

Kompleksitas inilah yang membedakan posisi intelektual. Hubungan intelektual tidak bisa dimaknai *vis a vis*, dalam pengertian seperti hubungan antara kapitalis dan proletar. Dalam dunia suprastruktur kaum intelektual berkembang sebagai agen moral. Kenyataan ini membuat kaum intelektual diasumsikan sebagai pelegitimasi produk negara, terutama dikaitkan dengan peraturan pemerintah pusat atau daerah. Bila dominasi negara lemah, maka intelektual selalu menjadi perisai untuk menggodok model kebijakan baru atas nama dunia akademik, untuk menguatkan hegemoninya. Biasanya, masyarakat akan menerima kondisi tersebut karena kelompok intelektual mampu memberikan argumentasi yang rasional. Simak kasus Asian Agri yang menjadikan dunia kampus sebagai senjata untuk menyerang *Tempo* karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya.[41] Terkait rokok, regulasi yang berkenaan dengan pengurangan kadar nikotin rokok dan pelarangan merokok di depan umum adalah sederet regulasi yang muncul dari wacana dunia intektual, lebih spesifik lagi dunia universitas. Atas nama moral, akademisi kampus ini menyerukan agar regulasi itu segera dilakukan, mengingat banyak efek negatif yang dimunculkan bila regulasi ini terlambat diputuskan.

Menariknya, justru seruan moralitas dari intelektual inilah yang dijadikan argumentasi atas pola monopoli rokok. Monopoli ini berujung pada kenaikan cukai oleh negara karena justifikasi produk rokok. Lihat fenomena regulasi yang dibuat, diberlakukannya PP No. 81 tanggal 5 Oktober 1999 selain berdampak positif terhadap industri besar karena industri kecil tidak dapat membuat rokok *mild*, ternyata berdampak pula pada loyalitas konsumen. Industri besar pun takut kehilangan segmentasi konsumennya yang sudah "cinta" dengan produk sebelum *mild*. Berdasarkan data Gapri, dari 2000 hingga 2003 produksi rokok mengalami penurunan. Jika pada 2000 produksi rokok mencapai 232,5 miliar batang, maka pada 2001 turun menjadi 227,1 miliar batang. Pada 2002, produksi rokok terus turun dibanding tahun sebelumnya menjadi 215 miliar batang. Terakhir, produksi rokok mencapai titik terendah sejak krisis ekonomi pada 2003, yaitu hanya 194 miliar batang.[42] Kondisi ini membuat negara banyak kehilangan cukainya.

Konsep baru pun dirumuskan. PP No. 81 tanggal 5 Oktober 1999 seakan tidak terdengar lagi. Berbekal legitimasi moral dari intelektual, terutama akademisi kampus dikeluarkanlah PP No. 19 Tahun 2003 yang salah satu isinya memuat kawasan bebas rokok di tempat umum yang diserahkan sepenuhnya kepada pemda atau instansi terkait. Merespon hal tersebut, DKI Jakarta membuat Perda No. 2 Tahun 2005, Bandung membuat Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan K3, dan Bogor mengeluarkan Perda Ketertiban Umum.

Setelah diberlakukannya beberapa perda tersebut sebagai respon dari PP No. 19 Tahun 2003, maka cukai rokok pun dinaikkan. Mulai dari kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar 15-20 persen terhitung 1 Juli 2005, kenaikan HJE 10 persen yang diberlakukan 1 April 2006 dan Permenkeu No. 134/PMK.04/2007. Kondisi ini membuat negara kembali diuntungkan. Industri besar kembali bernafas lega mengingat industri kecil tidak akan mampu membeli cukai.

Kondisi ini semakin menguatkan bahwa peran emansipatoris dunia universitas dan intelektual organik sudah digilas. Praktis emansipatoris pada level makna sebenarnya sudah tidak ada karena para pendidik secara langsung berkaitan secara organis dengan efek hubungan sosial kapitalis. Situasi tersebut muncul karena kegagalan institusi universitas untuk menolak bahaya kapitalisme secara tegas. Terkait dengan hal itu, Gramsci menyebutkan bahwa kaum intelektual merupakan deputi dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintahan sosial.[43]

Regulasi Publik Tentang Rokok

	Kesehatan	HAM
Isu	**Kesehatan**	**HAM**
Regulasi	PP No. 81 tanggal 5 Oktober 1999	PP No. 19/2003 → Perda Jakarta No. 2 tahun 2005, Perda Bandung No. 11 tahun 2005 dan Perda → Kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar 15%-20% terhitung1 Juli 2005, kenaikan HJE 10% yang diberlakukan 1 April 2006 dan Permenkeu No 134/PMK.04/2007 tentang kenaikan cukai rokok
Tujuan	Memonopoli pasar dengan Produk Mild	Memonopoli pasar dengan cukai besar
Efek	Industri kecil yang tidak memiliki alat penggiling tembakau halus terpaksa tidak bisa mempertahankan produksi. Bagi industri besar, kondisi ini membuat segmentasi pasar menurun.	Industri kecil tidak mampu membeli cukai sehingga produksi tidak stabil. Sementara, industri besar untung karena memonopoli pasar
	NEGARA RUGI karena cukai rendah	NEGARA UNTUNG karena cukai besar

Dekontruksi Konsep: Pandangan Tentang Emansipasi Keadilan

Keadilan harus dilandasi sikap bahwa tidak ada manusia yang berhak begitu saja menguasai manusia lain.[44] Artinya, masyarakat sendiri yang berhak menentukan sejauh mana partisipasi dirinya dalam mekanisme sosial. Ironisnya, masa sekarang muncul penyeragaman produksi yang khas, yaitu industri. Imbasnya terjadi kemiskinan global yang terstruktur. Golongan-golongan masyarakat miskin bukan tidak memiliki kemampuan untuk hidup dengan wajar, melainkan karena mereka tidak menguasai sarana hidup. Mereka tergantung dengan golongan-golongan yang memegang kekuasaan.

Bagaimana efek industrialisasi di Indonesia? Boeke, menjelaskan bahwa kapitalisme membuat masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua. Sebagian kecil penduduk Indonesia bisa langsung beradaptasi, tetapi sebagian besar tidak. Bahkan, mereka melakukan kegiatan ekonomi bermobilitas rendah dan terlokalisasi. Boeke menambahkan bahwa hampir semua masyarakat di daerah kolonial memiliki nilai dan harapan yang jauh bertentangan dengan apa yang dibutuhkan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi.[45]

Cukai sebagai representasi pertumbuhan ekonomi tentu menjadi sebuah kajian yang

menarik. Adanya penerimaan cukai rokok dalam APBN 2006 sebesar 37,52 triliun rupiah dari 31,44 triliun rupiah berimbas pada banyak hal. Diperkirakan kenaikan HJE 10 persen yang diberlakukan 1 April 2006 telah menurunkan produksi rokok menjadi sekitar 219 miliar batang pada tahun ini. Padahal, tanpa kenaikan HJE 10 persen, tingkat produksi rokok sepanjang 2006 diperkirakan hanya mencapai 224 miliar batang atau turun lima miliar batang. Dengan demikian, dampak kenaikan HJE sebesar 10 persen pada 1 April 2006 telah menghilangkan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 12.500 tenaga kerja.

Sesungguhnya, produsen rokok yang paling menanggung beban akibat kenaikan cukai ini adalah produsen rokok golongan kecil yang produksinya di bawah dua miliar batang per tahun karena persaingan di sektor ini sangat ketat. Selain harus bermain di segmentasi kelas menengah ke bawah, rokok jenis ini juga berkompetisi dengan rokok ilegal atau tanpa cukai yang bebas berkeliaran. Sementara untuk produsen rokok golongan besar (dengan produksi di atas enam miliar batang per tahun) yang pemainnya hanya beberapa perusahaan besar, seperti PT Djarum, PT Gudang Garam, TBk., dan PT HM Sampoerna, Tbk., persaingannya tidak seketat di level bawah. Ketidakgoyahan industri rokok golongan besar dan golongan menengah karena disokong citra lewat iklan. Iklan menjadi kekuatan signifikan yang mampu membuat wacana tentang realitas yang menggambarkan, menstimulasi dan memproyeksikan dunia mimpi yang hiperealistik bagi konsumen.[46] Akibatnya, kenaikan cukai tidak sampai membuat volume penjualannya industri rokok golongan besar anjlok. Untuk produsen golongan kecil dengan konsumen segmentasi bawah, kenaikan cukai membuat kondisi serba sulit. Saat ini mereka menjual produk rokoknya Rp2.000 per bungkus. Maka, dengan adanya HJE baru akan memaksa mereka menaikkan harga rokok hasil produksinya. Padahal, rokok ilegal dijual dalam kisaran Rp1.000 – Rp1.500 per bungkusnya. Bisa dikatakan, kurva permintaan rokok golongan kecil lebih elastis dibanding kurva permintaan produsen rokok golongan menengah dan golongan besar. Sehingga, rokok golongan kecil tersebut sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sedikit kenaikan harga saja, akan direspons dengan penurunan permintaan. Konsumen akan beralih pada rokok ilegal, sebagai barang subsitusinya. Kondisi tersebut relatif tidak terjadi pada produsen rokok golongan menengah dan besar karena konsumen memiliki loyalitas. Bagi konsumennya, merokok jenis bermerek merupakan kebutuhan yang susah dicari subtitusinya.

Adanya pengidentifikasian kelompok dalam produsen rokok, masyarakat konsumen, dan negara memaksa kita menggunakan logika 'oposisi biner' sebagai kajian. Artinya, kita menarik garis batas yang tegas diantara oposisi konseptual, seperti kebenaran dan kekeliruan, baik dan buruk, bagus dan jelek, pusat dan pinggiran, dan lain sebagainya. Pemahaman inilah yang menurut Derrida melahirkan konsep oposisi yang

Jangan sampai intelektual dijadikan "cap stempel" untuk melegitimasi regulasi yang justru menghancurkan masyarakat kecil.

hierarkis.[47] Imbasnya adalah semakin terasingnya pengertian yang lebih rendah.

Untuk menjembatani kondisi tersebut, perlu memunculkan kehidupan bersama yang dicirikan adanya fakta individu yang hanya dapat disatukan oleh keanggotaan bersama, yaitu kebutuhan bersama untuk kelangsungan hidup. Dalam kehidupan yang demikian, orang-orang yang berkepentingan diharapkan berkompromi. Jika dikaitkan dengan regulasi, diharapkan seluruh komponen dapat berpartisipasi dengan tidak memosisikan negara sebagai "pusat" atau "penentu", sehingga regulasi yang dimunculkan tidak bersifat elitis.

Dalam konteks rokok, bentuk partisipasi ini dapat dilakukan dengan bermacam bentuk. Keterlibatan para produsen rokok kecil dan masyarakat dalam pembuatan regulasi bisa menjadi salah satu bentuk konkretnya. Selain itu, adanya kebijakan "subsidi silang" bagi produsen rokok golongan kecil bisa menjadi bentuk lain partisipasi. Mekanismenya bisa berupa sebagian cukai industri rokok golongan kecil dibebankan pada industri rokok golongan besar dan menengah sebagai konsekuensi dari gaya monopoli industri rokok tersebut di tingkat konsumen. Konsep ini minimal sebagai apresiasi negara kepada usaha kecil yang memang sering dirugikan akibat regulasi yang dibuat.

Solusi jangka panjang atas kondisi tersebut adalah ikut menempatkan intelektual sebagai kelompok yang ikut bertanggung jawab atas terbentuknya korporasi, tidak lagi sebagai subjek yang otonom, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Artinya, perlu dirumuskan landasan epistemologis yang mendorong sesuatu yang praktis dengan mengalamatkannya kepada golongan intelektual, khususnya dunia universitas.

Jika teori Marx memosisikan kaum proletar sebagai pengawal revolusi, golongan teori kritis periode pertama memosisikan kaum intelektual sebagai lokomotifnya, maka Habermas sebagai tokoh teori kritis kedua menawarkan konsep yang sangat umum sebagai agen, yaitu rasio manusia. Habermas memaknai rasio sangat dekat dengan aspek bahasa yang mengacu pada paradigma komunikasi. Implikasi praktis dari paradigma baru tersebut adalah memahami emansipatoris sebagai bagian dari dialog dan tindakan komunikasi. Perjuangan kelas dalam pandangan klasik diganti dengan pembicaraan rasional, dalam hal ini argumen berperan sebagai unsur emansipatoris. Habermas memang terkesan netral dengan tidak memihak kepada kepentingan manapun, tetapi secara implisit kita bisa menafsirkan bahwa konsep ini berpihak kepada kepentingan emansipatoris.[48]

Integritas intelektual dan moral dunia universitas tergantung tanggung jawabnya dalam mempertahankan suasana kritis dan bebas bagi kemajuan intelektual. Artinya, konsep kritis saja tidaklah cukup. Jika Paulo Freire mengonsepkan 'bahasa alternatif' yang berpangkal pada visi filosofis, yakni manusia yang terbebaskan. Kemudian, memaknai dominasi telah dipraktikkan lewat kekuasaan, teknologi, dan ideologi dengan bersama-sama menghasilkan ilmu pengetahuan, hubungan sosial dan ekspresi budaya yang berfungsi membuat masyarakat diam.[49] Maka, konsep "bebas" pun perlu diaplikasikan. Jangan sampai intelektual dijadikan "cap stempel" untuk melegitimasi regulasi yang justru menghancurkan masyarakat kecil.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengenalkan keberpihakan kepentingan emansipatoris kepada intelektual. Artinya,

kebebasan intelektual harus dipertanggungjawabkan kepada kelompok yang termarjinalisasi secara akses. Tidak lagi memaknai intelektual sebagai agen perubahan secara otonom yang selalu mengarah pada isu elit, tetapi memahami intelektual sebagai seorang pekerja yang hidup, bekerja dan beremansipasi di tengah masyarakat. Konkretnya, seorang intelektual tidak lagi muncul di kampus tetapi muncul di tengah masyarakat, bisa sebagai petani, buruh, pelaku industri kecil, dan lain sebagainya. Kemunculan sekolah-sekolah tandingan dengan mendesain kurikulum yang berpihak kepada buruh, tani, dan pelaku industri kecil bisa menjadi alternatif. Dengan kemunculannya di tengah masyarakat, keberpihakan intelektual pun diasumsikan jelas.[]

catatan akhir

[1] Judul ini terinspirasi dari semangat kawan-kawan penggagas tema "rokok". Tamimy, Azi, Ifa, Iya, Ima, dan Nuri, bersama kalian harapan itu menggumpal menjadi kerja. Ofa dan Udin, kalian adalah harapan baru bagi proses dialektika B21, terima kasih atas kesungguhan kalian dalam berdiskusi dan mencari data. Aku bangga menjadi bagian "yang tidak tertulis" dari kalian.

[2] Baca Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 35.

[3] Baca Jonathan Culler [terj] Ruslani. 2003. *Serial Pengantar Singkat Barthes*. Yogyakarta: Jendela, hlm. 29.

[4] Baca Lance Castles [terj] J. Sirait, S.Th. 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 59.

[5] Tan Kiem Nio. 1961. *Industri Rokok di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 17, 21, dan 63.

[6] Baca Lance Castles. *Op.cit.*, hlm. 61.

[7] Data diambil dari *http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/31/ekonomi/indu15.htm*. [1April 2008].

[8] Data diambil dari *http://pilkada.golkar.or.id/index.php?action=view&pid=kota&idk=350* [16 April 2008].

[9] *http://pilkada.golkar.or.id/index.php?action=view&pid=kota&idk=183* [25 April 2008].

[10] Data tahun 2000. Sutedjo B. 2-2-2007. Berita Indonesia, hlm. 11.

[11] Ralph Schroeder [terj] Ratna Noviani. 2002. *Max Weber: Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 143.

[12] AB. Widyanta. 2002. *Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel*. Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, hlm. 82-83.

[13] Susetiawan [terj] Watie Suhanto. 2000. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 1.

[14] Harbert Marcuse [terj] Imam Baehaqie . 2004. *Rasio dan Revolusi: Menyuguhkan kembali Doktrin Hegel Untuk Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3.

[15] Susetiawan, *Op.cit*, hlm. 2.

[16] *Ibid*, hlm. 4.

[17] *Ibid*, hlm. 4-5.

[18] Baca Raymond Aron [terj] Rahayu S Hidayat dkk. 1993. *Kebebasan dan Martabat Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 156.

[19] Logika Jawa dibangun mengingat wilayah inilah yang selalu dikaitkan dengan Indonesia. Model budaya Jawa-lah yang kemudian diintrepetasi oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kajian literatur klasik Jawa dan perilaku politik menunjukan penafsiran tradisional dalam memahami kekuasaan.

[20] Benedict R.O'G Anderson [terj] Revianto Budi Santoso. 2000. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa, hlm. 57.

[21] Nur Iman Subono. 2003. *Taktik Negara Menguasai Rakyat: Sebuah Studi Teori Bentuk Pemerintahan Koorporatisme*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, hlm. 31.

[22] Baca Sarimun Hadisaputra. dalam malakahnya "Arti Penting Perda Pengaturan Kawasan Bebas Rokok Bagi Pemerintahan Daerah", disampaikan dalam Workshop Studi Kelayakan Penyusunan Perda Pembatasan Asap Rokok di Wilayah Kartamantul pada tanggal 13 Desember 2007 di hotel Novotel Yogyakarta, hlm. 5.

[23] Data diambil dari *http://www.bppijogja.org* [1April 2008].

[24] *Ibid*.

[25] *Baca Kedaulatan Rakyat* 10 Juli 2007, hlm. 2.

[26] Industri kelas I adalah industri rokok dengan modal besar, memiliki skala distribusi nasional dan berpengaruh bagi pendapatan cukai nasional. Perusahaan-perusahaan rokok besar seperti PT Djarum, PT Gudang Garam,Tbk., PT H. M. Sampurna, Tbk., dan PT Bentoel dapat diidentifikasi bagian dari kelas ini.

[27] Industri kelas II adalah industri rokok dengan modal menengah dan biasanya hanya berada pada level daerah. Aristokrasi lokal didentifikasi

banyak membuka jenis industri rokok ini. Di Yogyakarta, kita dapat mengenal rokok keraton sebagai contohnya.

[28] Industri kelas III adalah industri rokok dengan modal kecil dan memiliki skala distribusi yang terbatas.

[29] Baca Sarimun Hadisaputra. *Op.cit,* hlm 7-8.

[30] Baca Muhajir Darwin dalam makalahnya "Hasil Studi Kelayakan Penyusunan Perda pembatasan Asap Rokok", disampaikan dalam Workshop Studi Kelayakan Penyusunan Perda Pembatasan Asap Rokok di Wilayah Kartamantul pada tanggal 13 Desember 2007 di hotel Novotel Yogyakarta, hlm. 6.

[31] Baca Nyoman Kutha Ratna. 2007. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5.

[32] Baca Kurt Lewis [ed] Mulyadi Guntur Waseno. 1986. *"Teori Medan dan Eksperimen Dalam Psikologi Sosial: Konsep dan Metode" dalam Dimensi-Dimensi Psikologi Sosial.* Yogyakarta: PT Hanindita, hlm. 44.

[33] Baca Abu Ahmadi. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.

[34] Baca Anthony Giddens [terj] Soehera Kramadibrata. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya-Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Yogyakarta: UI-Pers, hlm. 95.

[35] Baca C. Wright Milis [terj] Imam Muttaqien. 2003. *Kaum Marxis: Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 123.

[36] Baca Frans Magnis-Suseno. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 266.

[37] Baca Faruk. 2005. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 70.

[38] Baca Heru Hendarto. 1993. *Mengenai Konsep Hegemoni Gramsci: Dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.* Jakarta: Gramedia, hlm. 82.

[39] Baca Nezer Patria dan Andi Arif. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156-157.

[40] *Ibid*, hlm. 161-163.

[41] Asian Agri adalah induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto, orang terkaya di Indonesia pada 2006 versi majalah *Forbes*. Majalah *Tempo* kemudian memberitakan bahwa Perusahaan ini dituding menggelembungkan biaya perusahaan sebesar Rp1,5 triliun, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor sebesar Rp232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp889 miliar. Kerugian negara untuk sementara diperkirakan mencapai Rp794 miliar. Merespon hal tersebut, Asian Agri menggandeng peneliti dari kalangan akademisi Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk melakukan penelitian terhadap pemberitaan *Tempo*. Hasilnya, ada justifikasi negatif terhadap pemberitaan *Tempo* karena dianggap menyalahi konsep jurnalistik. Data di ambil dari *http://masalahpajak.blogspot.com/2007/10/asian-agri-cuci-uang.html* [2 Mei 2008].

[42] *http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=5818&coid=2&caid=30* [15 April 2008].

[43] Baca Antonio Gramsci [ed] Quintin Hoare dan Nowell Smith. 1976. *Selections From The Prison Notebooks*. New York: Internasional Publisher, hlm. 12.

[44] Baca Frans Magnis Suseno. 1999. *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

[45] Baca William J. O'Melley [ed] Helen Hugles. 1992. *"Budaya dan Masalah Industrialisasi" dalam Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 466-468.

[46] Baca Bedjo Riyanto [ed] Budi Susanto, S.J. 2003. *"Mempermainkan Realitas Dalam realitas Main-main: Wong Cilik dalam Ruang Imajiner Iklan" dalam Identitas dan Postkolonialisme di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 23.

[47] Baca Madan Sarup [terj] Medhy Aginta Hidayat. 2004. *Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis*. Yogyakarta: Jendela, hlm. 62.

[48] Baca Fransisco Budi Hardiman. 2003. *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, hlm. 93.

[49] Baca Paulo Freire [terj] Agung Prihantoro & Fuad Arif Fudiyartanto. 2002. *Politik Pendidikan, kebudayaan, Kekuasaan, dan pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 12-17.

Rokok dan Tindakan Merokok:

Antara Aksiologi, Kemanusiaan, dan Industri

Editor: Rifky Firmana | **Infografis:** Warsini Handayani **Ilustrasi:** Ade Chandra

Qusthan Abqary[1]

Ia baru saja menyelesaikan studi di Fakultas Filsafat UGM. Saat ini ia sedang berusaha agar di kemudian hari tidak menjadi salah seorang dari satu miliar orang yang diprediksikan akan meninggal karena rokok. Ia dapat ditemui di *kelindankata.wordpress.com*

Apakah rokok dan tindakan menghisap rokok (berikut industri yang menyertainya) netral, bebas, atau tidak bebas terhadap nilai (*value*)? Sebelum beranjak lebih jauh, maka perlu ditegaskan di sini bahwa saya tidak membedakan antara rokok dan tindakan merokok sebagai dua hal yang terpisah secara tegas. Penyempitan ruang dan waktu melalui proses globalisasi telah membuat keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Rokok telah dibungkus sedemikian rupa sehingga menjadi lebur dengan tindakan merokok yang dicitrakan banyak periklanan sebagai bagian dari gaya hidup, citra seseorang, hingga menjadi semacam stimulus bagi peningkatan kualitas hidup.[2] Dengan demikian, rokok dan tindakan merokok pada masa sekarang tidak bisa dipisahkan secara tegas.

Sebagian orang percaya bahwa tindakan tersebut netral nilai[3] sebagai "jalan tengah" bagi dikotomi antara tidak bebas nilai dan bebas nilai. Saya percaya bahwa kita perlu

membedakan antara (1) 'netral terhadap nilai' dengan (2) 'bebas terhadap nilai', meskipun pembedaan tersebut tidak harus selalu dilakukan; sedangkan 'tidak bebas nilai' akan dibahas kemudian. Yang pertama, berarti memosisikan rokok hanya sebagai objek potensial pada dirinya sendiri yang dapat didayagunakan oleh manusia sesuai dengan kepentingan masing-masing. Apabila subjek menggunakannya secara negatif, maka potensi yang terkandung di dalamnya akan berubah menjadi negatif dan demikian sebaliknya. Semisal, tindakan merokok bagi orang yang tinggal di daerah pedesaan dan berada di ketinggian mengandung makna yang relatif berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan relatif panas.

Yang kedua ialah kepercayaan bahwa rokok pada hakikatnya tidak mengandung pretensi nilai apapun. Yang terakhir ini menghadirkan perdebatan seputar relasi antara nilai dan fakta. Sebagian orang percaya bahwa nilai selalu mendahului fakta sehingga nilai menjadi semacam *driver* bagi gerak realitas. Ajaran agama, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan bagi setiap orang untuk memilih antara merokok atau tidak. Fakta bahwa merokok dalam ajaran agama bersifat makruh[4] berdiri di wilayah "abu-abu" sehingga umat beragama bebas untuk memilih cara menyikapinya.

Akan tetapi, isu kebebasan tidak sekadar persoalan mewujudkan aspirasi kejiwaan seseorang untuk merokok, atau sebaliknya, berupaya untuk menangguk pahala sebesar-besarnya dengan tidak merokok

Akan tetapi, isu kebebasan tidak sekadar persoalan mewujudkan aspirasi kejiwaan seseorang untuk merokok, atau sebaliknya, berupaya untuk menangguk pahala sebesar-besarnya dengan tidak merokok. Alih-alih guna menenangkan diri, pilihan untuk merokok justru kerapkali menciderai hak dan kebebasan orang lain untuk menghirup udara segar, bersih, dan tidak terkontaminasi asap tembakau. Kebebasan untuk merokok merupakan bagian dari kategori kebebasan negatif yang bersifat semu dan cenderung merugikan. Kebebasan negatif bersifat semu karena ia hanyalah gagasan mengenai absensi atau ketiadaan paksaan dalam melakukan sesuatu. Dalam batas tertentu, ada orang yang menganalogikan bahwa kebebasan negatif serupa dengan menghilangkan seperangkat aturan dan hukum yang eksis di dalam realitas, atau dalam terminologi Hobbesian ialah menghilangkan hukum.[5] Seorang perokok, dalam konteks ini hanya melakukan sebentuk kebebasan negatif karena ia hanya merasa melakukan tindakan yang leluasa bagi kesehatan dirinya. Kontrol atas diri sendiri kerapkali melupakan tanggungjawab untuk menjamin tercapainya kesehatan bagi tubuh. Perokok juga kerapkali mengabaikan perasaan terganggu orang yang tidak merokok untuk menghirup udara yang tidak terkontaminasi asap rokok. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana bisa sebuah tindakan dapat dikategorisasikan sebagai bagian dari kebebasan positif ketika seorang individu perokok tidak bertanggungjawab terhadap kesehatannya masing-masing, ataupun terhadap upaya menjamin kebebasan orang lain dalam mengakses udara yang tidak terkontaminasi asap rokok. Dalam bentuk yang paling sederhana, rumusan dari kebebasan positif selalu menuntut

hadirnya tanggungjawab sebagai ambang batas (minimal) dalam menjamin terselenggaranya kebebasan positif bagi setiap orang.

Di sisi lain, pilihan untuk tidak merokok dapat digolongkan sebagai bagian dari kebebasan positif yang membatasi dirinya sebagai "kondisi terbebas dari kekuatan kultural dan sosial yang diterima sebagai halangan bagi realisasi diri secara penuh (*full self-realization*)".[6] Dengan kata lain, seorang yang tidak merokok menyadari secara penuh bahwa pilihannya dapat membantu untuk meningkatkan aktualisasi diri karena didukung oleh kondisi kesehatan diri yang relatif lebih sehat ketimbang perokok. Apabila sebuah masyarakat pedesaan di ketinggian tertentu percaya bahwa tindakan merokok adalah sebuah "keharusan" dalam menyiasati cuaca, maka di sisi lain, seorang yang tidak merokok dalam komunitas tersebut justru sedang membebaskan diri dari kekuatan sosial dan kultural yang dominan. Hal tersebut tentu akan terdengar sumbang di telinga perokok akan tetapi orang memang sering tidak berkenan untuk mengakui penilaian objektif atas pilihannya; dan reaksi sumbang tersebut tidak menegasikan kategorisasi pilihan merokok dalam bentuk kebebasan negatif.

Seratus juta kematian tercatat akibat tembakau pada abad ke-20 lalu. Jika tren ini terus berlanjut, akan ada kenaikan hingga satu miliar kematian pada abad ke-21.

Mesin Pembunuh

Saya percaya, reaksi sumbang tersebut akan semakin berkurang ketika dihadapkan pada argumen bahwa tindakan merokok, dalam konteks global, merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan. Alasannya sederhana. Sebuah laporan yang dirilis *World Health Organization* (WHO) pada Kamis, 7 Februari 2008 lalu memperkirakan bahwa 1 miliar orang di seluruh dunia akan meninggal akibat rokok apabila pemerintah di berbagai negara tidak serius dalam mengatasi kondisi epidemik terhadap penggunaan tembakau. Margaret Chan, Direktur Umum WHO, dalam jumpa pers bersama dengan Michael Bloomberg, Walikota New York, mengatakan demikian:

"Seratus juta kematian tercatat akibat tembakau pada abad ke-20 lalu. Jika tren ini terus berlanjut, akan ada kenaikan hingga satu miliar kematian pada abad ke-21. Bila tidak dikendalikan, kematian yang berkaitan dengan tembakau akan meningkat lebih dari delapan juta per tahunnya pada 2030, dan 80 persen dari kematian tersebut akan terjadi di negara-negara berkembang".[7]

Hal tersebut memang cukup mengejutkan dan seketika saya teringat pada laporan riset Susan George mengenai sebuah sistem

ekonomi yang mendominasi dunia pada saat ini. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan sistem kapitalisme di abad ke-21, jumlah penduduk dunia harus dikurangi sedikitnya 2 miliar.[8] Dengan hati-hati, maka dapat dikatakan bahwa industri rokok akan menyumbang setengah dari upaya untuk mempertahankan sistem kapitalisme dan pemusnahan manusia terbesar dalam abad ini. Angka 2 miliar tentu jauh melampaui jumlah korban Holocaust maupun Zionisme.[9] Perhitungan tersebut belum termasuk ancaman kemiskinan global, HIV/Aids, pemanasan global, serta "tsunami diam" berjudul krisis pangan. Jumlah terbesar penyumbang eliminasi nyawa manusia adalah negara-negara yang sedang berkembang dan miskin. Indonesia tentu salah satu di antaranya. Kualitas tembakau serta kuantitas lahan perkebunan yang memadai merupakan kekayaan yang cukup besar, namun tidak berarti apapun karena hasil dari pengolahan tembakau lari ke negara-negara maju. Sedangkan, kaum agamawan masih berjalan di tempat sambil berkhotbah dengan dalil bahwa tindakan merokok adalah makruh. Idealnya, fakta global tersebut direspon oleh seluruh sektor kehidupan bernegara di Indonesia (khususnya sektor agama dan kesehatan), namun hal tersebut hanya akan menjadi mimpi di siang bolong ketika masih terdapat sebagian orang masih larut dalam belenggu kenikmatan tembakau.

Antisipasi beberapa negara mengenai tindakan merokok justru muncul secara mengejutkan dari Irlandia yang melarang keberadaan tembakau di seluruh tempat kerja. Bergeser sedikit ke kontinen, pada awal 2008, seluruh kafe di Prancis dilarang mengizinkan pelanggannya merokok di dalam ruangan. Pemerintah Inggris bahkan memberi bonus tambahan kepada dokter yang berhasil menyugesti pasiennya hingga berhenti merokok.[10] WHO merekomendasikan agar setiap negara untuk melakukan enam tindakan guna menekan angka perokok dan tindakan merokok di masing-masing wilayahnya. Pertama, memperbaiki kualitas data penggunaan tembakau di wilayahnya. Kedua, meniru pelarangan keberadaan tembakau seperti di Irlandia. Ketiga, mengintensifkan upaya untuk membujuk dan membimbing para perokok untuk meninggalkan kebiasaan merokok. Sedangkan, ketiga tindakan lainnya mengenai upaya agar para perokok tidak merokok di tempat umum.[11]

Di luar keenam hal tersebut, rekomendasi yang paling ampuh yang ditawarkan oleh WHO ialah agar setiap negara memberlakukan pajak yang sangat tinggi untuk tembakau. Hasil studi yang dilakukan WHO merekomendasikan agar pajak tembakau dinaikkan hingga sepuluh kali lipat, dengan demikian diharapkan akan menurunkan 4 persen konsumsi rokok di negara-negara kaya dan 8 persen di negara-negara miskin. Keduanya dapat meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak tembakau, namun dengan mengecualikan penurunan angka penjualan rokok di setiap perusahaan. Dalam hal ini, WHO menginginkan agar setiap negara menerapkan kenaikan harga ritel rokok hingga 70 persen guna menghindari lebih dari seperempat kematian di seluruh dunia yang disebabkan oleh rokok.[12] Sebagian orang akan berpendapat secara serentak bahwa perusahaan rokok (berikut para pekerja yang terlibat) akan menjadi tumbal utama dari upaya penyelamatan kuantitas umat manusia di muka bumi ini dalam jangka waktu seratus tahun ke depan.

Namun, pihak industri rokok di Indonesia selalu bereaksi berlebihan atas rencana pengaturan rokok yang ketat. Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Ismanu Soemiran pada 2007 pernah menyatakan bahwa jika cukai yang pada tahun tersebut sebesar 31,5 persen dinaikkan, maka sektor industri akan terpukul. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh seorang anggota Komisi IX DPR-RI Hakim Sorimuda Pohan. Menurut Hakim, pengendalian terhadap rokok secara ketat tidak pernah menurunkan tingkat konsumsi, bahkan di negara maju sekalipun. Hakim juga melansir bahwa di negara maju yang memiliki pengendalian rokok secara ketat hanya mampu untuk menurunkan tingkat konsumsi sebesar 1 persen, sedangkan di Indonesia jumlah perokok meningkat sebesar 1,32 persen per tahun. "Industri yang terpukul jika ada regulasi itu hanya mitos," ungkap Hakim.[13] Tegangan antara Ismanu dan Hakim tersebut memberikan ruang bagi hadirnya rekomendasi WHO di Indonesia. Selama terdapat komitmen yang kuat dari para legislator maupun eksekutif, untuk memberikan jaminan bagi setiap orang agar tidak dirugikan dalam proses perumusan sistem legal yang akan digunakan. Bahkan, bagi warga negara yang tidak merokok sekalipun.

Akan tetapi, aplikasi dari rekomendasi WHO tersebut masih dapat dibenturkan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia. Bahwa pola konsumsi rokok masyarakat Indonesia, khususnya antara tingkat konsumsi dan harga rokok di pasaran memiliki hubungan yang negatif. Hal tersebut dikarenakan sifat adiksi dan selera perokok. Laporan penelitian tersebut memberikan perbedaan pola antara Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berupa:

(1) "Konsumsi rokok SKM dipengaruhi harga rokok SKM secara negatif, yaitu kenaikan harga SKM akan direspon dengan penurunan konsumsi rokok SKM. Dengan elastisitas konsumsi rokok SKM terhadap harga SKM *inelastic*, maka kenaikan harga SKM sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan konsumsi rokok SKM sebesar 0,475 persen. (2) Terhadap harga SKT, konsumsi rokok SKM tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan faktor selera yang sangat dominan bagi perokok dalam mengonsumsi suatu jenis rokok maupun berganti jenis rokok. Sama halnya dengan harga SKT. (3) Harga SPM tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok SKM. (4) Karena faktor selera, tidak mudah bagi perokok SKM untuk melakukan substitusi kepada jenis rokok yang lain (SKT maupun SPM). Selain masalah selera terhadap satu jenis rokok, serta faktor *addiction* terhadap rokok dapat menyebabkan konsumsi rokok SKM tidak dipengaruhi oleh pendapatan dari konsumennya".[14]

Hasil studi yang dilakukan WHO merekomendasikan agar pajak tembakau dinaikkan hingga sepuluh kali lipat, dengan demikian diharapkan akan menurunkan 4 persen konsumsi rokok di negara-negara kaya dan 8 persen di negara-negara miskin.

Dalam bagian selanjutnya dinyatakan, "Pola konsumsi rokok menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi rokok dengan harganya adalah negatif, ...".[15] Dengan demikian, secara umum (tanpa membedakan ketiga jenis rokok), tidak ada hubungan yang signifikan antara pola konsumsi rokok dan tingkat konsumsi, karena faktor selera dan pendapatan perokok menjadi determinan yang unik. Di sinilah pentingnya untuk membahas persoalan selera dalam mendiskusikan rokok dan tindakan merokok sebelum kembali mencermati rekomendasi WHO tersebut.

Persoalan selera selalu mengundang hadirnya pertanyaan seperti: (a) apakah setiap orang berhak untuk menyalurkan hasratnya?; (b) sejauh mana seseorang dapat menyalurkan hasratnya secara bebas?; (c) apa saja batasan bagi seseorang dalam menyalurkan hasratnya secara bebas tersebut?; (d) bagaimana apabila terjadi benturan kepentingan dan kebebasan dalam menyalurkan hasrat setiap orang? Keempat pertanyaan tersebut beririsan dengan isu kebebasan. Pertanyaan (a) tentu tidak akan banyak ditentang orang apabila jawabannya berupa "ya", namun tidak demikian nasibnya dengan pertanyaan (b), (c), dan (d). Setiap orang dapat menyalurkan hasratnya secara bebas (serta memaksimalkan manfaatnya) selama tidak mengganggu upaya orang lain dalam menyalurkan hasratnya (pun memaksimalkan kegunaannya) dan tidak merugikan kepentingan umum yang jauh lebih besar (serta hasrat publik untuk memaksimalkan utilitasnya). Benturan kepentingan, antarindividu maupun antara yang-individu dan yang-publik harus selalu mengesampingkan selera dan mengutamakan kebaikan bersama yang berdasar pada kebutuhan dasar setiap warga negara. Mode kebebasan libertarian sekalipun tidak pernah menjadikan selera sebagai prioritas utama dalam konstelasi kehidupan bersama.

Pihak industri juga harus jujur dan akuntabel dalam mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan usahanya. Ungkapan Ismanu sebelumnya tidak pernah terjadi, bahkan dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis sekalipun. Sebuah riset lain yang dilansir oleh Depkeu menyebut bahwa:

"Produksi industri rokok Indonesia mengalami masa kejayaan pada 1998, dengan produksi hampir mendekati 270 miliar batang, tetapi terus mengalami penurunan, dan 2002 diperkirakan hanya mencapai 207 miliar batang, atau mengalami penurunan sekitar 5 persen per tahun".[16]

Artinya, industri rokok justru tidak mendapat pukulan yang berarti dari hantaman badai krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak sebelas tahun silam, karena mereka berhasil melakukan penyesuaian antara ongkos produksi dengan harga jual di pasaran. Apabila krisis ekonomi tidak sepenuhnya dapat meremuk industri rokok, maka kecil kemungkinan regulasi ketat (yang seandainya dikeluarkan pemerintah) akan meremuk eksistensi bisnis mereka, sekurangnya di wilayah tingkat produksi.

Regulasi ketat mengenai tembakau harus segera dibuat dengan menjamin kebebasan orang yang tidak merokok untuk menghirup udara yang tidak terkontaminasi asap rokok (maupun polutan lainnya) di ruang publik dan dengan memerhatikan rekomendasi WHO tersebut. Ruang publik merupakan panggung bagi interaksi sosial secara sehat dan bertanggungjawab. Ruang publik bukan "hutan liar nan tak bertuan" yang mana setiap perusahaan rokok dapat melakukan promosi secara arbitrer melalui pelbagai macam cara,

yaitu dari pemasangan *banner* yang mahal hingga penggunaan jasa *sales promotion girl/ boy* (SPG/B) yang tidak menyumbang apapun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berarti apapun. Terlebih, jika hanya berkutat pada pembangunan pojok internet di dalam perpustakaan sebuah universitas, terhadap ancaman bencana kepunahan manusia.

Waris

Penemuan bahwa tindakan merokok dapat menurun melalui gen dapat dimaknai sebagai penguat bagi pendapat yang mengatakan bahwa tindakan tersebut memang merupakan ancaman bagi kemanusiaan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh deCODE, dari 13.945 perokok di Islandia, mereka menemukan bahwa kromosom 15 pada manusia berperan mewariskan kebiasaan merokok orang tua.[17] Hal tersebut berarti kita tidak bisa menyelamatkan nyawa satu miliar orang dalam abad ke-21 ini dengan hanya melakukan salah satu dari mengurangi jumlah perokok, atau menaikkan pajak tembakau, atau menaikkan harga ritel rokok hingga sekurangnya 70 persen seperti yang disarankan oleh WHO[18] karena kebiasaan merokok tersebut diam-diam terwariskan secara alamiah melalui gen. Sedangkan, WHO melansir bahwa jumlah rokok yang dihisap setiap harinya tidak kurang dari 15 miliar batang rokok di seluruh dunia pada tahun ini.[19] Dengan kata lain, kebiasaan merokok juga sedang diwariskan melalui 15 miliar batang rokok setiap harinya di seluruh penjuru muka bumi.

Meski akan selalu muncul keraguan publik terhadap kesuksesan menekan angka kematian yang disebabkan oleh rokok, namun bukan berarti kampanye WHO guna menaikkan harga ritel rokok hingga mencapai 70 persen tidak bermakna. Akan tetapi, makna dari rekomendasi WHO tersebut terbentur pada relasi antara 'angka kematian karena rokok' dan 'kenaikan harga ritel rokok' yang dipisahkan dua "jurang", di antaranya: (1a) daya beli perokok dan (2a) asumsi bahwa tindakan merokok sebagai budaya.

Dengan kata lain, kita tidak perlu terburu-buru mengumbar pesimisme mengenai ketidaksuksesan usulan penaikan harga ritel rokok di seluruh dunia. Kedua poin tersebut berkelindan satu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk memisahkannya. Namun, kita harus selalu insaf bahwa term 'sulit' selalu memberikan kemungkinan bagi hadirnya proposisi 'bukan berarti tidak mungkin'. Data Depkeu yang dihadirkan sebelumnya menunjukkan bahwa daya beli perokok masih tetap tinggi, meski harga rokok naik. Hal tersebut disebabkan perokok jenis tertentu (semisal SKP) dapat beralih ke jenis lain (semisal SKT) apabila harga rokok favoritnya naik sekian persen dari harga ritel sebelumnya.[20] Dengan demikian, apabila pemerintah berniat secara serius untuk menekan angka konsumsi rokok, maka opsi menaikkan harga ritel rokok hingga 70 persen perlu dipertimbangkan lebih serius. Asumsi bahwa merokok merupakan bagian dari budaya juga menguatkan keinginan perokok untuk terus melangsungkan kebiasaan tersebut. Di sinilah persoalan kembali mengemuka, yaitu mengenai kriteria budaya.

Tindakan merokok pada era kekinian tidak lagi dapat diposisikan menjadi bagian dari budaya.[21] Apakah sesuatu yang mengancam eksistensi satu miliar manusia (sebagai kreator kebudayaan) dan kebudayaannya, dapat dimasukkan sebagai bagian dari kebudayaan? Apakah tindakan merokok (yang dibungkus proses industrialisasi) yang kini mengancam eksistensi kebudayaan, masih dapat digolongkan sebagai bagian dari kebudayaan? Kedua pertanyaan retoris tersebut sengaja diungkap karena saya tidak bisa mencerna kelindan pendapat yang percaya, bahwa tindakan merokok pada saat ini masih dapat dikatakan sebagai bentuk dari budaya. Kedua jurang yang memisahkan antara 'angka kematian karena rokok' dan 'kenaikan harga ritel rokok' justru meyakinkan kita bahwa: angka kematian karena rokok secara a priori[22] memiliki hubungan yang kuat dengan kenaikan harga ritel rokok. Maka dari itu, pesimisme mengenai relasi keduanya sedikit demi sedikit dapat dikikis demi menyelamatkan eksistensi kemanusiaan serta kebudayaan yang telah dihasilkannya.

Tindakan merokok pada era kekinian tidak lagi dapat diposisikan menjadi bagian dari budaya. Apakah sesuatu yang mengancam eksistensi satu miliar manusia (sebagai kreator kebudayaan) dan kebudayaannya, dapat dimasukkan sebagai bagian dari kebudayaan?

Properti Bersama

Udara sebagai salah satu unsur kehidupan di planet bumi merupakan komoditas bersama yang harus dimiliki dan juga dikelola secara komunal. Tidak ada seorang perokok pun yang secara arbitrer dapat mengklaim bahwa udara di sekelilingnya adalah murni properti pribadi miliknya sehingga orang lain yang tidak merokok dapat memilih antara: (1b) tetap berdiam diri di sekitar perokok dengan risiko menjadi perokok pasif; atau (2b) harus menjauh dan atau mengambil jarak dari tempat tersebut.

Kita tahu bahwa komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk sosial, sedangkan pilihan (1b) tentu akan selalu membuat seorang yang tidak merokok menjadi dilematis dalam melakukan komunikasi interpersonal. Dalam konteks ini, tindakan merokok secara tidak langsung mengganggu upaya seseorang yang tidak merokok untuk menjalankan proses interaksi secara nyaman dengan perokok. Dikatakan tidak langsung karena hal tersebut memang tidak berhubungan langsung dengan pilihan seorang yang tidak merokok dalam merespon seorang perokok di sekitarnya.

Pilihan (2b) secara langsung menjegal upaya seorang perokok maupun yang bukan perokok untuk berkomunikasi secara nyaman. Pilihan (2b) diterima secara mudah oleh banyak perokok dan yang tidak merokok, namun kerapkali hanya diposisikan sebagai fenomen yang "dapat ditoleransi". Padahal, toleransi sejatinya menuntut kerelaan setiap pihak yang terlibat tanpa perlu mendapat kerugian yang mendasar, semisal menghirup udara bersih secara bebas. Toleransi juga tidak sama dengan membiarkan segala sesuatu yang buruk terus dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa hadirnya *check and balance* di antara sesama.

Larangan merokok di tempat umum seperti Jakarta, misalnya, patut diapresiasi sebagai regulasi yang positif. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu menjamin setiap orang akan mendapatkan udara yang bersih untuk dihirup. Apabila *The Economist*, media yang mengklaim sebagai moncong kapitalisme liberal, dalam sebuah laporannya mengatakan bahwa sebuah negeri yang memiliki cuaca mengerikan seperti Inggris melarang penduduknya untuk merokok di dalam ruangan sebagai suatu kebijakan yang kejam.[23] Demikian pula sebaliknya dengan Indonesia, yang notabene sebuah negeri tropis dengan perolehan cahaya matahari berlimpah, namun tidak melarang penduduknya untuk merokok di luar ruangan secara serampangan adalah bentuk kekejaman yang secara diam dilakukan negara terhadap penduduknya yang tidak merokok. Pemberian ruangan khusus merokok di bandara internasional Soekarno-Hatta dan beberapa fasilitas publik lainnya patut digalakkan. Dengan demikian, lokalisasi ruang bagi perokok dapat menjadi jalan tengah untuk sementara waktu.

Udara, laiknya air, merupakan properti yang dimiliki bersama dan harus dikelola secara memadai untuk kepentingan bersama. Argumen fundamental mengenai kedua sumber daya tersebut berpangkal dari asumsi dasar mengenai kehidupan manusia dan kepemilikan atas segala sesuatu di muka bumi. Sebagian orang percaya bahwa hak kepemilikan seseorang atas sumber daya paling tepat jika ditentukan oleh siapa pun yang pertama kali mengelola dan mengolahnya. Sedangkan sebagian orang yang lain, percaya bahwa segala sumber daya alam sedari awal didedikasikan untuk kepentingan bersama kemanusiaan. Yang terakhir ini lebih meyakinkan ketimbang yang sebelumnya karena beberapa hal.

Pertama, asal-muasal setiap orang berbeda secara arbitrer antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut sedikit-banyak akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang sejatinya dapat diatasi. Semisal, orang yang terlahir di tengah keluarga yang salah satu anggotanya menjadi perokok, di kemudian hari akan menerima risiko menjadi perokok (aktif maupun pasif) lebih besar ketimbang mereka yang terlahir di dalam keluarga yang anggotanya sama sekali tidak merokok. Hal tersebut senada dengan hasil riset deCODE

yang sudah diungkapkan sebelumnya. Perbedaan kualitas udara di dalam rumah tersebut disebabkan oleh sesuatu yang berlangsung secara acak berupa proses kelahiran yang mana setiap orang tidak dapat memilihnya.

Di sinilah peran regulasi pemerintah dibutuhkan apabila memang memiliki *political will* dalam menjaga kualitas hidup dan kesehatan warga negara. Kita tidak bisa menyalahkan ketimpangan yang diakibatkan mortalitas, namun kita bisa tetap menjamin kesetaraan untuk mengakses udara yang bersih apabila pemerintah berkenan untuk mengeluarkan regulasi yang bersifat futuristik. Demi menjaga kualitas hidup warganya di kemudian hari dari ancaman terbunuhnya satu miliar orang dalam abad ini. Apabila ketimpangan dalam kehidupan bersama dibiarkan, ia akan menjadi ancaman bagi stabilitas sosial, politik, serta kebudayaan. Sayangnya, pengetahuan publik mengenai ancaman polutan rokok terhadap kemanusiaan tidak sebesar ancaman polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor; dan tidak cukup besar untuk menggerus pemahaman klise bahwa tindakan merokok adalah pilihan atau bahkan budaya. Saya percaya bahwa setiap perokok berkewarganegaraan Indonesia apabila mendapat kesempatan bertandang ke negara-negara maju, akan berpikir dua kali untuk merokok meski mengalami musim dingin sekalipun. Hal tersebut dikarenakan keinsafan atas regulasi yang berlaku di negeri asing itu. Sekurangnya, WNI tersebut akan bertanya kepada orang lain mengenai izin merokok di ruang publik terkecuali ia sudah melihat bahwa di tempat tertentu terdapat warga negara setempat yang sedang merokok atau terdapat pengumuman mengenai area bebas atau tidak bebas rokok. Dengan kata lain, untuk konteks Indonesia persoalannya memang bukan pada wilayah kepatuhan warga negara, namun mengenai konsistensi dalam menerapkan regulasi serta konsekuensi atau hukumannya.

Kedua, penentuan status kepemilikan yang berdasar pada orang pertama yang mengelola dan mengolah sumber daya adalah lemah secara historis karena kita tidak bisa melakukan verifikasi historis secara tepat dan memadai atas orang tersebut. Kita tahu bahwa peradaban manusia termasuk pengelolaan serta pengolahan atas sumber daya sudah berlangsung sejak sebelum zaman prasejarah; sedangkan, kita sejauh ini tidak mungkin untuk melakukan verifikasi secara positivistik[24] siapa orang pertama yang mengelola dan mengolah sumber daya tertentu. Kalaupun di kemudian hari, manusia melalui bantuan teknologi bisa merekonstruksi zaman prasejarah dan menentukan orang pertama secara jitu, kita pun juga tidak mungkin mengubah konstelasi kepemilikan atas sumber daya yang berlaku pada saat ini. Laiknya kita tidak bisa memaksakan situasi dan kondisi nurtural (apalagi alamiah) setiap orang secara sama dimulai dari titik nol.

Apabila kita memang dapat memverifikasi dan merunut orang pertama, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa perjalanan sejarah kepemilikan atas sumber daya (termasuk transfer kepemilikan) telah berlangsung secara adil. Kolonialisme misalnya, merupakan satu fakta historis bahwa transfer kepemilikan atas sumber daya telah berlangsung secara tidak *fair*. Jhr. Dr. Sandberg pernah mengatakan, *"Indië verloren, rampspoed geboren"*. Soekarno menerjemahkan pernyataan tersebut menjadi, "Tak terhinggalah bencana yang menimpa Eropa bila Asia bisa menurunkan beban imperialisme asing daripada pundaknya".[25]

Sebagian orang melalui basis penilaian Sandberg, dapat melegitimasi bahwa kolonialisme dan imperialisme dapat diterima selama diletakkan dalam bingkai hukum rimba, "siapa yang kuat dia yang berkuasa"; dan dengan demikian segala transfer sumber daya yang berlangsung di dalamnya dengan sendirinya menjadi adil. Akan tetapi, saya menolak hal tersebut karena kekuasaan tidak selalu hanya dibangun melulu dengan kekuatan, namun melibatkan pengetahuan, informasi, kecerdikan, dan kecerdasan. Sejarah mencatat, beberapa perang telah menunjukkan kekuatan pasukan yang besar misalnya, tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Dengan kata lain, mendasarkan penerimaan terhadap kolonialisme dan imperialisme hanya pada hukum rimba sama saja dengan melarikan persoalan.

Argumen mengenai orang pertama tidak akan memadai apabila diterapkan pada udara. Siapakah yang dapat menerima bahwa seseorang dapat mengklaim bahwa udara di wilayah tertentu adalah properti pribadi miliknya (terkecuali pemerintahan suatu negara) layaknya tanah? Baik tanah maupun udara sama-sama sumber daya yang sejatinya dikelola secara bersama sedari awal. Perbedaan perlakuan manusia terhadap kedua sumber daya tersebut menunjukkan ketimpangan argumen mengenai orang pertama dalam membingkai sejarah kepemilikan di muka bumi. Tepat di sini keunggulan argumen bahwa segala sumber daya sedari awal didedikasikan guna kemanusiaan.

Dengan kata lain, untuk konteks Indonesia persoalannya memang bukan pada wilayah kepatuhan warga negara, namun mengenai konsistensi dalam menerapkan regulasi serta konsekuensi atau hukumannya.

Nasionalisasi perusahaan rokok bukan sesuatu yang "haram", tidak pernah, serta tidak dapat dilakukan negara lain.

Rokok dalam Sejarah

Begitu pula halnya dengan sejarah panjang perjalanan rokok. Sejak 6000 SM, tembakau dipanen di Amerika untuk yang pertama kalinya. Kira-kira 1 SM, suku Indian di Amerika mulai memanfaatkan tembakau untuk merokok. Baru pada 1492, Cuba Columbus membawa tembakau ke Eropa. Kisaran tahun 1500, tembakau menyebar ke Afrika via Mesir dan ke Timur Tengah melalui orang-orang Turki. Pada 1558 tembakau mulai dicoba ditanam di Eropa namun gagal. Di saat yang hampir bersamaan, tepatnya tahun 1560, tembakau masuk Afrika melalui orang-orang Afrika keturunan Portugis. Di sebelah Timur, tepatnya antara tahun 1530-1600, tembakau Cina diperkenalkan melalui Jepang dan Filipina. Baru pada 1769, James Cook membawa tembakau ke Australia.[26]

Globalisasi tembakau sampai membuat diplomat ulung yang menguasai hingga sembilan bahasa; sekaligus Duta Besar Indonesia yang pertama untuk Inggris Raya; memanfaatkannya untuk berdiplomasi. Alkisah, dalam sebuah perjamuan ia berdialog dengan diplomat lainnya ketika sedang menghisap tembakau dari sebuah wilayah Nusantara. Diplomat bule bertanya, "Apakah gerangan rokok yang sedang Tuan hisap itu?" tanyanya. "Inilah Yang Mulia," tutur lelaki itu, "yang menjadi alasan mengapa Barat menjajah dunia."[27] Diplomat Indonesia tersebut adalah Haji Agus Salim. Dalam sekejap, saya langsung tergelitik untuk berangan seandainya di masa kini Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berani untuk mengatakan, "Industri rokok asing harus dinasionalisasikan tiada terkecuali angkat kaki dari negeri ini karena ia merupakan bagian dari neokolonialisme!" Pada dekade '50-an, Pemerintah Cina berhasil mengusir perusahaan rokok asing dari negerinya dan memonopoli industri rokok.[28] Hal tersebut menunjukkan bahwa nasionalisasi perusahaan rokok bukan sesuatu yang "haram", tidak pernah, serta tidak dapat dilakukan negara lain.

Fakta sejarah hadirnya kolonialisme merupakan bukti penguat bahwa gagasan kepemilikan yang berdasar atas orang pertama telah batal dengan sendirinya karena transfer atas properti tidak pernah berjalan secara *fair* dalam masa kolonial. Hal tersebut juga diakui oleh kaum libertarian bahwa proses transfer yang berlangsung melalui ekstraksi atau pemaksaan tidak dapat diterima secara moral. Pernyataan tegas Haji Agus Salim mengenai rokok mencerminkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme, sekaligus menegaskan bahwa rokok sejatinya merupakan ancaman terhadap kemanusiaan: baik secara langsung melalui sektor kesehatan, maupun tidak langsung yaitu melalui hasrat besar Barat untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Timur. Saya percaya, Haji Agus Salim tidak sedang mengampanyekan bahwa tindakan merokok bersifat makruh dalam ajaran Islam. Namun, lebih kepada keinginan untuk menunjukkan kepada diplomat lainnya bahwa Indonesia memiliki kualitas tembakau yang sangat

bagus dan ia merasa lebih berhak untuk mengelolanya ketimbang Barat yang berhasrat mengeksploitasinya. Namun, pada era sekarang ini, upaya untuk menikmati tembakau tidak harus selalu dengan menghisapnya.

Pendapat tersebut juga tidak sedang menyiratkan bahwa pribumi dapat disamakan dengan orang pertama yang mengelola dan mengolah kemudian dapat memilikinya secara berlebihan. Gagasan mengenai pribumi berdiri di wilayah yang berbeda dengan gagasan mengenai orang pertama sehingga membandingkan keduanya sama sekali tidak memadai. Pribumi adalah salah satu konsep dalam bingkai nasionalisme dan lebih sering mengacu kepada bentuk resistensi masyarakat lokal terhadap eksistensi pihak asing. Sedangkan, orang pertama ialah gagasan mengenai kepemilikan atas properti (salah satunya sumber daya alam yang terdapat di bumi) dalam ranah global. Haji Agus Salim sebagai pribumi merasa 'berhak' namun 'tidak lebih berhak' ketimbang Barat untuk mengelola dan mengolah potensi tembakau yang terdapat di Nusantara. Perasaan 'berhak' tersebut dapat meningkat menjadi 'lebih berhak' ketika kolonialisme hadir. Dengan kata lain, apabila kolonialisme tidak eksis di Nusantara, bukan tidak mungkin akan terjadi perdagangan tembakau yang *fair* antara pihak Nusantara[29] dengan Barat.

Rokok adalah properti yang tidak bebas nilai terutama mengenai ancamannya terhadap eksistensi kemanusiaan dalam abad ke-21. Ancaman tersebut berkait dengan proses industrialisasi yang membungkus rokok dan kemudian terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, apabila rokok menjadi komoditas industri maka berbagai kepentingan ekonomi akan menjadi prioritas dan tak tertutup kemungkinan untuk menggunakan segala cara dalam menghasilkan keuntungan terbesar bagi pemilik modal. Kedua, industri rokok selama ini selalu berupaya untuk mengukuhkan asumsi bahwa tindakan merokok adalah pilihan yang bersifat bebas bagi setiap orang. Inilah argumen terakhir yang masih relatif imun terhadap kritik dari empat argumen historis industri rokok yang dibangun sejak abad ke-17. Keempat argumen tersebut adalah (1c) perusahaan rokok mengklaim, tidak ada bukti konklusif bahwa merokok dapat menyebabkan kanker atau penyakit hati; (2c) perusahaan rokok mengklaim bahwa merokok tidak menyebabkan kecanduan; (3c) tindakan merokok adalah bentuk manifestasi daripada tindakan bebas; dan (4c) perusahaan rokok mengklaim bahwa mereka telah berbuat sesuatu untuk menyikapi hasil penelitian ilmiah, salah satunya dengan cara melakukan riset internal dan membiayai riset yang dikerjakan oleh pihak luar.[30] Argumen (1c) dan (2c) sudah terpatahkan sejak dekade' 50-an dengan ditemukannya fakta bahwa tindakan merokok dapat menimbulkan kanker dan kecanduan. Jauh hari sebelumnya sudah terdapat penelitian sejenis, namun tidak cukup kuat untuk menggoyahkan industri dan bisnis rokok. Bahkan jauh abad sebelumnya, filosof Cina bernama Fang Yizhi pada 1600-an sudah mengingatkan kita bahwa tindakan merokok dalam waktu menahun dapat "menghanguskan paru-paru".[31]

Namun, pada era sekarang ini, upaya untuk menikmati tembakau tidak harus selalu dengan menghisapnya.

Adalah Samuel Pepys yang menjadi saksi bagi eksperimen yang dilakukan oleh *Royal Society* terhadap kucing yang diberi minuman berupa air sulingan tembakau; dan seketika kucing tersebut mati. Eksperimen tersebut merupakan catatan medis pertama mengenai sakit yang diakibatkan oleh tembakau yang berlangsung pada 1665. Kita tahu bahwa pada masa itu revolusi industri sedang menyingsing sehingga sangat sulit untuk menahan gelombang industrialisasi dan perdagangan rokok. Lebih dari satu abad kemudian, tepatnya pada 1791, fisikawan dari London bernama John Hill melaporkan bahwa penggunaan bubuk tembakau yang disedot melalui hidung[32] dapat mengakibatkan kanker hidung. Akan tetapi, dua fakta historis tersebut tidak cukup besar untuk mengurung niat dan perbuatan perusahaan rokok untuk terus melakukan manipulasi hingga saat ini.

Ketika argumen (1c) dan (2c) terpatahkan, maka (3c) dan (4c) menjadi benteng bagi eksistensi industri rokok di ranah global. Argumen (3c) dan (4c) tidak mudah untuk dipatahkan karena (4c) juga berkaitan dengan isu CSR yang kini sedang gencar dimassifkan oleh banyak korporasi transnasional maupun multinasional, sedangkan (3c) berjalin erat dengan isu kebebasan yang merupakan salah satu hak dasar bagi setiap orang.

Persoalannya tidak sesederhana antara mendukung atau melarang tindakan merokok, namun juga berkait dengan persoalan tradisi kultural tertentu yang sudah lama mengakar di masyarakat serta kepungan kekuatan modal dan periklanan. Hasil evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa iklan rokok di Indonesia sedikitnya berjumlah 14.249 pada 2006 yang tersebar di seluruh media elektronik, media luar ruang, dan media cetak.[33]

Meskipun setiap iklan rokok sudah dilengkapi dengan pesan bahwa merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan impotensi, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat berpikir berulang kali untuk merokok. Barangkali penyebabnya adalah kuantitas dan kualitas periklanan tersebut yang bermasalah. Apabila pada 2006 terdapat sekurangnya 14.249 iklan rokok, maka setiap orang di Indonesia yang mengakses media (elektronik, luar ruang, dan cetak) akan disuguhi rata-rata 39 kali iklan rokok setiap harinya. Kuantitas iklan rokok yang berlebih tersebut dapat membuat pikiran orang menjadi imun terhadap fakta objektif mengenai efek dari merokok terhadap kesehatan maupun kemanusiaan. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan kondisi di era '50-an di mana untuk pertama kalinya dilansir bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. Publikasi pada masa tersebut tentu tidak akan semassif kampanye merokok yang digalang industri rokok pada masa sekarang, meskipun keduanya berada di dua tempat dan waktu yang berbeda. Kualitasnya pun dapat dipertanyakan, yaitu apakah memadai apabila pesan kesehatan hanya mendapat proporsi yang terlalu sedikit ketimbang citra, gaya hidup, dan rasa yang dibangun sebagai "efek positif" dari menghisap rokok merek tertentu. Di sinilah sulitnya mengelola dan mengolah periklanan rokok.

Massifnya kampanye untuk merokok di media massa tidak terlepas dari peran industri yang tidak sepenuhnya jujur dalam memutar roda bisnis. Sejarah menunjukkan, sekurangnya dua perusahaan rokok terbesar di Inggris dan Amerika Serikat, yaitu *Brown and Williamson Tobacco Corporation* (B&W) dengan induknya *BAT Industries* (sebelumnya bernama *British American Tobacco*), telah melaku-

...ebohongan publik sekurangnya selama ...uluh tahun sejak 1968. Penipuan be... dari kecemasan masyarakat terhadap ...watiran kanker pada dekade '50-an dan ...dian disusul dengan hasil penelitian ...n *General* pada 1964 yang melegiti... penelitian sebelumnya.[34] Oleh kare..., sejak 1968, B&W dan *BAT Industries* ...buat riset tandingan yang dilakukan ... pihak internal dan eksternal perusahaan ... menghapus kekhawatiran masyarakat.[35]

... palsu tersebut sukses mendorong ...mbuhan konsumsi rokok di seluruh ... dalam rentang dekade '60-an hingga ... Indikator kesuksesan tersebut ter... dari meningkatnya konsumsi batang ... hingga dua setengah kali lipat dalam ...ng dekade '60-an hingga '90-an. ...mbuhan konsumsi rokok tersebut ... dilihat dalam tabel berikut.[36]

Kuantitas iklan rokok yang berlebih dapat membuat pikiran orang menjadi imun terhadap fakta objektif mengenai efek dari merokok terhadap kesehatan maupun kemanusiaan.

Konsumsi
Batang Rokok Per Hari (dalam hitungan Miliar)

Dekade	
50an	1.686
60an	2.150
70an	3.112
80an	4.388
90an	5.419
Tahun 2000	5.500

Sumber: Diolah dari WHO, *The Tobacco Atlas*.

kan kebohongan publik sekurangnya selama tiga puluh tahun sejak 1968. Penipuan berawal dari kecemasan masyarakat terhadap kekhawatiran kanker pada dekade '50-an dan kemudian disusul dengan hasil penelitian *Surgeon General* pada 1964 yang melegitimasi penelitian sebelumnya.[34] Oleh karenanya, sejak 1968, B&W dan *BAT Industries* membuat riset tandingan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan guna menghapus kekhawatiran masyarakat.[35]

Riset palsu tersebut sukses mendorong pertumbuhan konsumsi rokok di seluruh dunia dalam rentang dekade '60-an hingga '90-an. Indikator kesuksesan tersebut terlihat dari meningkatnya konsumsi batang rokok hingga dua setengah kali lipat dalam rentang dekade '60-an hingga '90-an. Pertumbuhan konsumsi rokok tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.[36]

Kuantitas iklan rokok yang berlebih dapat membuat pikiran orang menjadi imun terhadap fakta objektif mengenai efek dari merokok terhadap kesehatan maupun kemanusiaan.

Konsumsi
Batang Rokok Per Hari (dalam hitungan Miliar)

Dekade	
50an	1.686
60an	2.150
70an	3.112
80an	4.388
90an	5.419
Tahun 2000	5.500

Sumber: Diolah dari WHO, *The Tobacco Atlas*.

kan kebohongan publik sekurangnya selama tiga puluh tahun sejak 1968. Penipuan berawal dari kecemasan masyarakat terhadap kekhawatiran kanker pada dekade '50-an dan kemudian disusul dengan hasil penelitian *Surgeon General* pada 1964 yang melegitimasi penelitian sebelumnya.[34] Oleh karenanya, sejak 1968, B&W dan *BAT Industries* membuat riset tandingan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan guna menghapus kekhawatiran masyarakat.[35]

Riset palsu tersebut sukses mendorong pertumbuhan konsumsi rokok di seluruh dunia dalam rentang dekade '60-an hingga '90-an. Indikator kesuksesan tersebut terlihat dari meningkatnya konsumsi batang rokok hingga dua setengah kali lipat dalam rentang dekade '60-an hingga '90-an. Pertumbuhan konsumsi rokok tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.[36]

Kuantitas iklan rokok yang berlebih dapat membuat pikiran orang menjadi imun terhadap fakta objektif mengenai efek dari merokok terhadap kesehatan maupun kemanusiaan.

Konsumsi Batang Rokok Per Hari (dalam hitungan Miliar)

Dekade	Konsumsi
50an	1.686
60an	2.150
70an	3.112
80an	4.388
90an	5.419
Tahun 2000	5.500

Sumber: Diolah dari WHO, *The Tobacco Atlas*.

Apabila tiap menit jumlah penduduk dunia bertambah 24 orang[37], maka kalkulasi kasar yang dapat dihadirkan di sini ialah 24 bayi yang lahir setiap menitnya mewariskan selera merokok jika dan hanya jika sekurangnya ayah atau ibu dari masing-masing bayi merokok. Dengan kata lain, dalam kalkulasi tersebut, angka maksimal penambahan jumlah perokok di seluruh dunia dalam hitungan menit ialah 24 bayi yang terjadi melalui proses pewarisan gen dari orangtua. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam setiap menit, penduduk Indonesia bertambah empat orang.[38] Apabila ayah atau ibu dari empat bayi yang dilahirkan setiap menitnya di Indonesia merokok, Indonesia memiliki kemampuan maksimal memproduksi empat perokok dalam setiap menitnya.

Persoalannya tidak sesederhana antara mendukung atau melarang tindakan merokok, namun juga berkait dengan persoalan tradisi kultural tertentu yang sudah lama mengakar di masyarakat serta kepungan kekuatan modal dan periklanan

Gerilya Industri Rokok

Data lain yang dipublikasi WHO menunjukkan, Indonesia berada dalam jenjang konsumsi rokok yang sama dengan Amerika Serikat, Rusia, Cina, *United Kingdom* (UK), dan Jerman, yaitu pada rentang angka 1.500-2.499 batang per orang setiap tahunnya.[39] Besarnya tingkat konsumsi rokok di negara maju tidak lepas dari lobi tingkat tinggi industri rokok dengan pemerintah masing-masing negara maju. Raksasa perusahaan rokok seperti Philip Morris sukses melobi Helmut Kohl[40] sebagai Kanselir Jerman dari koalisi partai konservatif seperti CDU/CSU[41] dalam dekade '70-an dan sebagian anggota *Bundestag*.[42]

Tidak hanya Pemerintahan Jerman, Pemerintah UK juga mendapat perhatian khusus dari Philip Morris. Philip Morris selalu membangun komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher, bahkan setelah ia turun dari masa jabatannya direkrut sebagai konsultan selama tiga tahun dengan bayaran per tahun mencapai $250,000 kepada dirinya dan $250,000 lainnya untuk Margaret Thatcher Foundation.[43] Menurut laporan *The Sunday Times*, Philip Morris percaya bahwa Thatcher masih tetap berpengaruh di Eropa untuk mencegah munculnya resistensi minoritas di masing-masing negara anggota Uni Eropa.[44] Tidak hanya Thatcher, Philip Morris juga mendekati Kenneth Clarke yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Negara untuk Bidang Pendidikan dan Sains. Uniknya, Philip Morris mengetahui bahwa Kenneth Clarke hobi menonton *Formula One Grand Prix* dan kemudian mengajaknya menonton bersama sembari melakukan lobi agar Pemerintah UK tetap konsisten melawan pelarangan periklanan serta *sponsorship* perusahaan rokok di Uni Eropa. Setelah itu, koneksi Philip Morris dengan Clarke semakin intens hingga yang terakhir ini dipekerjakan sebagai *Deputy Chairman* dengan bayaran £100,000 per tahun sejak 1998 sembari masih duduk di kursi birokrasi UK.[45]

Kesimpulan

Pengalaman Jerman dan UK di atas menunjukkan bahwa industri rokok sangat gencar dan mahir dalam melakukan lobi bisnis hingga sukses memengaruhi sekurangnya dua nama berpengaruh di Eropa dalam paruh akhir abad yang lalu. Kesesuaian kepentingan antara politisi, birokrat, dan industri rokok telah terbukti meminggirkan "kebaikan bersama" yang merupakan nilai sekaligus tujuan dalam tata kehidupan bersama kemanusiaan. Asumsi bahwa tindakan merokok merupakan sebentuk budaya dan salah satu manifestasi dari kebebasan sudah tidak relevan pada masa sekarang. Perokok tidak dapat secara egois mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak untuk mengontaminasi udara karena yang terakhir ini merupakan properti bersama yang harus dikelola secara kolektif. Meski demikian, sejarah panjang perjalanan rokok tidak selamanya menciderai manusia. Industrialisasi adalah proses yang paling bertanggungjawab dalam menyulap status aksiologis rokok dan tindakan merokok menjadi ancaman bagi kemanusiaan.

Sebagai pemungkas tulisan ini, perlu ditegaskan bahwa rokok dan tindakan merokok tidak bersifat netral terhadap nilai dan juga tidak bersifat bebas terhadap nilai. Namun, keduanya mengandung nilai yang mengancam eksistensi kemanusiaan, terlebih ketika sudah menjadi komoditas bagi industri. Pertanyaan bagi industri rokok adalah kebebasan yang bagaimana lagi yang masih dapat dipertahankan, sekaligus berkait dengan tindakan merokok? Citra bebas yang dibangun industri rokok bersifat semu atau negatif seperti yang telah ditunjukkan dalam bagian sebelumnya. Kebebasan negatif tersebut justru mengancam eksistensi kemanusian dalam abad ke-21. Sedangkan pertanyaan retoris lainnya yang dapat diajukan adalah: bagaimana bisa industri rokok mengklaim bahwa merek tertentu dengan kadar nikotin dan tar yang rendah tidak akan adiktif dan membahayakan seseorang, sedangkan di sisi lain kebiasaan merokok dapat terwariskan melalui gen? Agaknya industri rokok sedang menyembunyikan fakta bahwa pewarisan kebiasaan merokok melalui gen jauh lebih berbahaya ketimbang konstruk periklanan bahwa kadar nikotin dan tar yang rendah tidak akan adiktif. Sekelumit fakta dan data di atas lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa rokok, tindakan merokok, dan industrinya pada masa sekarang ini dan di masa yang akan datang, tidak akan bebas dari nilai yang mengancam eksistensi kemanusiaan di muka bumi. []

PENGENDALIAN TEMBAKAU MELALUI KAWASAN TANPA ROKOK: Perlu dan Efektifkah?
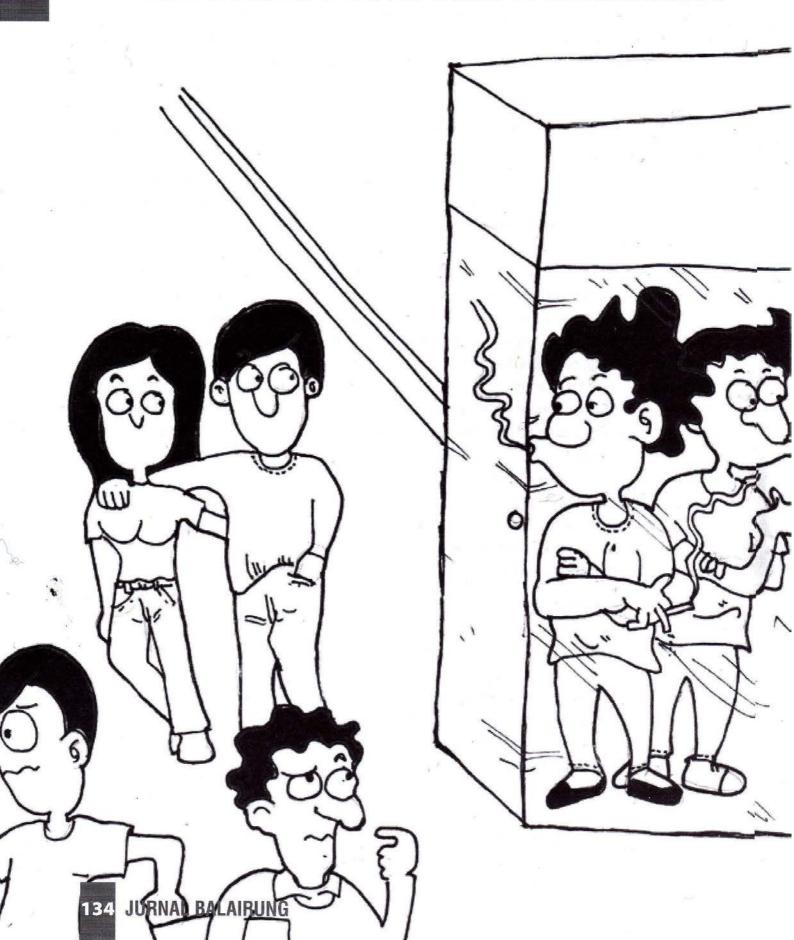
Editor: Rifky Firmana | **Infografis:** Warsini Handayani **Ilustrasi:** Ade Chandra
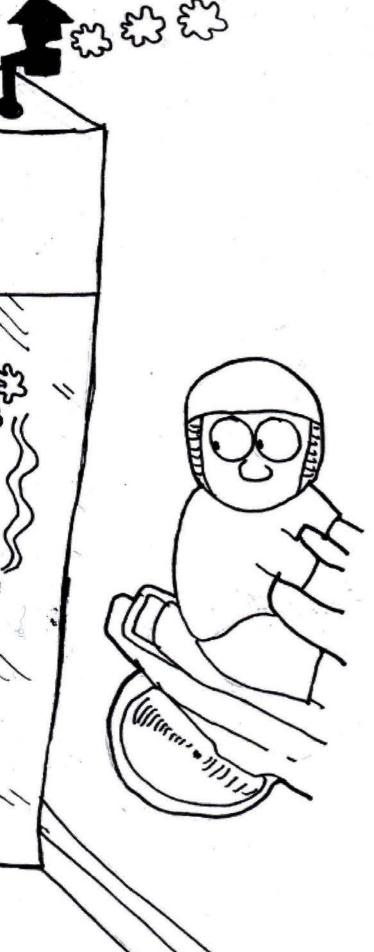
ari, PhD

lmu Kesehatan Masyarakat FK
, Program Studi Ilmu Kesehatan
ter for Health Behavior & Pro-
ordinator Quit Tobacco Indonesia

Meskipun kampanye antirokok telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan, beberapa LSM, dan perguruan tinggi, kebiasaan merokok di Indonesia masih dianggap hal yang "biasa". Berdasar Survei Kesehatan Nasional (Susenas) diperoleh gambaran bahwa sebanyak 63 persen laki-laki dan 4,5 persen perempuan di Indonesia berumur 15 tahun ke atas mempunyai kebiasaan merokok.[1] Tingginya jumlah perokok di Indonesia dan meningkatnya angka kejadian penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok memicu pemerintah Indonesia untuk mulai menerapkan beberapa kebijakan pengendalian tembakau.[2]

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia masih menimbulkan perdebatan panjang. Mulai dari hak asasi seorang perokok sampai dengan dampak antirokok terhadap perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia. Padahal, hasil kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa ke

bijakan merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. TCSS-IAKMI bekerjasama dengan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia melaporkan 4 alternatif kebijakan terbaik untuk pengendalian tembakau, yaitu: 1) Menaikkan pajak (65 persen dari harga eceran); 2) Melarang semua bentuk iklan rokok; 3) Mengimplementasikan 100 persen Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum, tempat kerja, tempat pendidikan; dan 4) Memperbesar peringatan merokok di bungkus rokok dan menambahkan gambar akibat kebiasaan merokok pada bungkus rokok.[3]

Salah satu alternatif yang cukup layak diterapkan di Indonesia dengan menimbang bahwa kebijakan tersebut dapat dimulai dari institusi atau pemerintah lokal adalah melaksanakan KTR.

Salah satu alternatif yang cukup layak diterapkan di Indonesia dengan menimbang bahwa kebijakan tersebut dapat dimulai dari institusi atau pemerintah lokal adalah melaksanakan KTR. Tulisan ini akan menjelaskan efektivitas KTR, setelah sebelumnya memaparkan kebiasaan merokok dan akibatnya serta pola perokok pasif di Indonesia. Uraian akan diakhiri dengan aplikasi KTR di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM).

Kebiasaan Merokok dan Akibatnya

Kebiasaan merokok dan akibatnya terhadap kesehatan sudah mulai dipublikasikan sejak tahun '50-an.[4] Menyusul hasil kajian tersebut, pada tahun 1964, Surgeon General Departemen Kesehatan Amerika menerbitkan laporan resmi yang menyimpulkan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan.[5] Semenjak itu, penelitian yang mengkaji akibat rokok atau hubungan kebiasaan merokok dengan berbagai penyakit semakin banyak, hingga pada tahun 1986 terbit publikasi yang melaporkan bahwa perokok pasif (mereka yang tidak merokok namun terpapar asap rokok) juga menerima risiko yang setara dengan para perokok. Puncak hasil kajian tersebut adalah laporan di tahun 2004 yang menyatakan bahwa merokok merusak hampir seluruh organ tubuh manusia, menyebabkan berbagai penyakit, dan berpengaruh pada kesehatan seseorang secara menyeluruh.

Menurut WHO dan World Bank, tembakau membunuh 8 orang setiap menit dan lebih dari 4 juta orang setiap tahun.6 Pada 2008 kematian akibat tembakau adalah 5,4 juta per tahun, dan diprediksikan pada tahun 2030 sebanyak 8 juta orang terbunuh karena tembakau setiap tahunnya. Sebesar 80 persen kematian terjadi di negara berkembang.[7]

Di Indonesia pada 2001, angka yang dilaporkan cukup fantastis, sebanyak 22,6 persen atau 427.948 kematian disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan rokok, sebanyak 5.160.075 kasus penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok (laki-laki: 2.951.239 dan

perempuan: 2.208.839) dan setiap hari ada kematian sebanyak 1.172 yang berhubungan dengan kebiasaan merokok.[8]

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh tembakau, muncullah Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), pada 2002 yang di dalamnya terdapat beberapa strategi untuk melakukan pengendalian tembakau. Pertama, adalah pengurangan permintaan (reducing demand) melalui kenaikan harga dan pajak, pengaturan dan pelarangan iklan, promosi, sponsorship rokok serta edukasi, pelatihan, peningkatan kesadaran, dan bantuan untuk berhenti merokok. Strategi kedua adalah melalui regulasi terhadap kandungan, pengemasan dan label rokok, pengurangan perdagangan, pembatasan penjualan pada anak-anak, serta perlindungan perokok pasif. Strategi berikutnya, proteksi lingkungan dan kesehatan pekerja tembakau, dukungan terhadap alternatif ekonomi yang memungkinkan, riset, survei dan pertukaran informasi, serta dukungan terhadap aktivitas legislatif. Negara yang menandatangani dan meratifikasi FCTC diharuskan melaksanakan strategi tersebut.

Selain itu, pada 2005 WHO mengampanyekan berhenti merokok sebagai salah satu dari tiga perilaku sehat untuk mencegah berbagai penyakit kronis, selain melakukan aktivitas fisik dan mengatur pola makan.[9] Sayang sekali, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum menandatangani FCTC, di luar 167 negara yang telah menandatangani. Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan beberapa hal yang merupakan bagian FCTC, yaitu menaikkan pajak, meskipun kenaikannya tidak bermakna dan dampaknya tidak terasa, serta melindungi perokok pasif melalui implementasi KTR di beberapa tempat.[10]

Pola Perokok Pasif dan Dampak Kesehatan pada Perokok Pasif

Data yang menunjukkan jumlah perokok pasif di Indonesia belum banyak ditemukan. Laporan Susenas 2001 menunjukkan proporsi perokok pasif di Indonesia untuk semua kelompok umur adalah 66 persen wanita dan 31,8 persen laki-laki. Angka ini berubah pada Susenas 2004, sebanyak 84,2 persen perokok di Indonesia merokok di dalam rumah bersama dengan keluarga lainnya.[11]

Sementara data yang dikeluarkan dalam Tobacco Atlas menunjukkan sebanyak 67,9 persen remaja Indonesia terpapar asap rokok di rumah. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan remaja Singapura yang terpapar asap rokok di rumah yang hampir separuhnya, 36 persen.[12]

Dampak perokok pasif ini pada orang dewasa adalah stroke, kanker paru, memperburuk masalah paru seperti emphysema, serangan jantung, angina, dan berpengaruh pada arteri. Pada ibu hamil, paparan rokok menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan kelahiran sebelum waktunya. Sementara itu, perokok pasif usia anak-anak mendapatkan dampak kesehatan berupa infeksi telinga, infeksi pernafasan dan pneumonia, asma, gejala pernafasan kronik (batuk, "mengi", dan kesulitan nafas), dan mengurangi fungsi paru. Selain itu, asap rokok juga menyebabkan sindrom kematian tiba-tiba pada bayi (Sudden Infant Death Syndrome/SIDS).[13]

Data kematian pada perokok pasif cukup tinggi. Di Amerika sebanyak 38.000 perokok pasif meninggal setiap tahunnya akibat kanker paru dan penyakit jantung. Sementara, data di Inggris pada 2003

menunjukkan kematian perokok pasif per tahun sebanyak 1.372 karena kanker paru, 5.329 akibat penyakit jantung koroner, dan 4.074 akibat stroke.[14] Sampai saat ini penulis belum menemukan data pola penyakit pada perokok pasif di Indonesia.

Efektivitas KTR

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Tempat yang merupakan KTR adalah tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat proses belajar mengajar, dan tempat pelayanan kesehatan.[15]

Dasar hukum KTR ini di Indonesia cukup banyak, yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Instruksi Menteri Kesehatan No. 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok, dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah bebas rokok.[16]

Beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan KTR ini adalah Jakarta, Bogor, Palembang, dan disusul Yogyakarta, meskipun terdapat pula beberapa pelaksanaan KTR di beberapa kota dan institusi selain di kota-kota tersebut. Institusi yang telah melaksanakan KTR adalah institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, apotek dan klinik, institusi pendidikan mulai dari TK sampai tingkat universitas. Beberapa mal di kota besar juga telah menerapkan KTR. Sementara itu, alat transportasi yang secara menyeluruh menerapkan KTR adalah pesawat udara.[17]

Pelaksanaan KTR yang sporadis dan belum menyeluruh merupakan gambaran bahwa kebijakan KTR ini masih dipertanyakan efektivitasnya. Meskipun, regulasi KTR merupakan salah satu cara yang ditetapkan sebagai provisi FCTC. Beberapa kajian tentang KTR membuktikan bahwa KTR merupakan salah satu cara yang cukup efektif di dalam mengendalikan kebiasaan merokok atau memengaruhi dampak rokok terhadap kesehatan. Levy dan Friends pada 2003 melaporkan bahwa KTR memberikan efek terhadap penurunan jumlah perokok sebesar 10 persen. Selanjutnya, tingkat partikel yang dihisap oleh perokok pasif berkurang sebesar 84 persen.[18] Sementara itu, Sargent, Shepard, dan Glantz pada 2004 melaporkan penurunan signifikan pada admisi rumah sakit karena Myocard Infark (MI) di Montana setelah pemberlakuan pelarangan merokok di tempat-tempat umum.

Salah satu studi yang dilakukan oleh Pizacani, dkk[19] di Oregon, Amerika Serikat yang melibatkan responden sebanyak 1.133 perokok dari 1997 sampai 1999 menunjukkan bahwa larangan merokok di rumah yang diberlakukan terhadap mereka meningkatkan penghentian kebiasaan merokok. Mereka yang melakukan usaha berhenti merokok sebesar 67 persen, dan larangan merokok di seluruh rumah meningkatkan kemungkinan untuk berhenti merokok

sebesar dua kali dibandingkan dengan larangan merokok di sebagian rumah atau tidak ada larangan merokok sama sekali.

Dampak negatif KTR untuk perekonomian rupanya tidak seperti yang dikhawatirkan. Communicable Disease Center (CDC) melaporkan bahwa KTR tidak menurunkan penghasilan restoran maupun bar yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.[20] Laporan dari California menunjukkan bahwa implementasi KTR di restoran dan bar justru menaikkan penghasilan restoran dan bar tersebut dari 1,8 milyar dolar menjadi 3 milyar dolar dalam kurun waktu 1992-2004.[21]

Dampak negatif KTR untuk perekonomian rupanya tidak seperti yang dikhawatirkan. Communicable Disease Center (CDC) melaporkan bahwa KTR tidak menurunkan penghasilan restoran maupun bar yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.[20]

Aplikasi KTR di FK UGM

Sebagai salah satu institusi pendidikan yang mendidik calon dokter, FK UGM pada 2004 menetapkan kampus FK UGM sebagai Kampus Bebas Rokok atau sebagai KTR. Penetapan kampus bebas rokok ini dilakukan untuk mendukung "Indonesia Sehat 2010" dan "Yogyakarta Sehat 2005". Penetapan Kampus Bebas Rokok FK UGM disahkan dengan SK Dekan UGM/KU/4078/UM/01/39. Penetapan kampus bebas rokok ini ditindaklanjuti pada 2005 dengan kebijakan bahwa mahasiswa FK UGM harus menandatangani kontrak perilaku profesional, yang salah satunya adalah tidak boleh merokok selama masa studi. Melalui adanya dua kebijakan, KTR dan pemberlakukan larangan merokok bagi mahasiswa, dampak yang dirasakan positif. Udara di kampus terasa segar, jarang sekali ditemukan sampah puntung rokok, dan mahasiswa belajar untuk menerapkan perilaku profesional sebagai calon dokter. Seorang dokter diharapkan menjadi tokoh panutan untuk tidak merokok.

Efektivitas pemberlakuan kebijakan KTR terlihat dari penurunan jumlah perokok di kalangan mahasiswa FK UGM. Survei yang dilakukan terhadap mahasiswa FK UGM pada 2003 yang melibatkan 311 mahasiswa, menunjukkan jumlah perokok laki-laki 10,9 persen, angka tersebut menurun menjadi 8,5 persen di 2007 dengan responden sebesar 189 mahasiswa, 3 tahun setelah pemberlakukan KTR. Sementara jumlah perokok eksperimen (tidak selalu merokok setiap hari) menurun dari 36 persen di 2003 menjadi 21 persen pada 2007. Selanjutnya, jumlah mahasiswi yang merokok menurun dari 0,7 persen pada 2003 menjadi 0,4 persen di 2007. Sementara

itu, jumlah responden mahasiswi perokok eksperimen turun dari 9,2 persen menjadi 7,3 persen. Survei ini melibatkan 423 responden pada 2003 dan 274 responden di 2007.[22]

Berdasar survei tersebut tampak KTR memberikan dampak positif terhadap perilaku merokok, meskipun penurunan tersebut kemungkinan tidak hanya diakibatkan oleh KTR tetapi gabungan antara KTR dan pemberlakuan larangan merokok bagi mahasiswa. Survei tersebut setidaknya memberikan penguatan terhadap efek pemberlakuan KTR terhadap perilaku merokok.

Penutup

Di tengah perdebatan perlunya pengendalian terhadap kebiasaan merokok di Indonesia atau tidak, tingginya jumlah penderita penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok menstimulasi pemikiran pencegahan tumbangnya korban yang lebih banyak. Tulisan ini berusaha memberikan pemaparan akibat kebiasaan merokok pada perokok aktif dan perokok pasif serta perlunya perlindungan perokok pasif.

KTR telah dibuktikan sebagai salah satu cara terbaik untuk mengendalikan perokok. Regulasinya telah diimplementasikan di Indonesia, meskipun belum secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi FCTC. Namun demikian, beberapa kajian telah membuktikan efektivitas KTR terhadap perilaku merokok. Sehingga, diharapkan implementasi KTR akan meluas, tidak hanya di beberapa institusi ataupun kota, tetapi di seluruh Indonesia dan semua tempat-tempat umum.

catatan akhir

[1]Susenas 2001 in Ng, N. Community medicine. Tobacco Curriculum Modules. Yogyakarta, Indonesia: Quit Tobacco Indonesia. 2008.
[2]WHO. Tobacco Free Initiative. Vol. 1999, Geneva: WHO (1999).
[3]TCSS-IAKMI dan SEATCA bekerja sama dengan WHO Indonesia. Profil Tembakau Indonesia. Jakarta, Indonesia: TCSS-AKMI bekerja sama dengan SEATCA dan WHO (2008).
[4]Ng, N. Community medicine, op.cit. 2008.
[5]US of Department of Health and Human Service/ USDHHS. The Health Consequences of Smoking: a Report of The Surgeon General. USA: USDHHS
[6]Gorin, SS., & Schnoll, RA. Smoking Cessation In Gorin, SS., & Arnold, J. Health Promotion in Practice. San Fransisco, USA: John Wiley & Sons.
[7]WHO. Tobacco Free Initiative. Geneva. WHO. 2008.
[8]TCSS-IAKMI dan SEATCA bekerja sama dengan WHO Indonesia, op.cit. 2008.
[9]WHO. Health Promotion. Geneva. WHO. 2005.
[10]Reynold, C. Worshipping Cancer Sticks. www.insideindonesia.org/edit56/reynld.htm diunduh pada 29/6/2004.
[11]Susenas, 2004 in Ng, Nawi. Community medicine, op.cit. 2008.
[12]Mackay, J., Eriksen, M., & Shafey, O. The Tobacco Atlas, second edition. Atlanta, USA: the American Cancer Society. 2006.

JANGAN MENGAKU DARI JAKARTA SEBELUM BERWISATA KE TAMAN IMPIAN ANCOL.

SEBAGAI KAWASAN WISATA TERPADU DAN IKON WISATA NASIONAL, ANCOL MENJADI TAWARAN YANG TERLALU SAYANG DILEWATKAN. BERANEKA WAHANA REKREASI MENJADI PILIHAN ANAK MUDA

ATLANTIS WATER ADVENTURE

Rekreasi air yang dikemas dalam petualangan seru seperti Kota Atlantis yang hilang, lengkap dengan tampilan reruntuhan bangunan dan kapal-kapal karam. Tersedia bermacam kolam renang yang mempunyai ciri khas masing-masing seperti kolam renang air terjun, kolam renang rain balls, kolam arus, kolom ombak, kolam pelangi, kolam riam jeram dan spiral. Di Atlantis Water Adventure kita dapat bermain air sepuasnya lengkap dengan semua fasilitas pendukungnya.

GELANGGANG SAMUDERA

Pariwisata dengan menghadirkan pertunjukan satwa seperti pertunjukan lumba-lumba dan arsitektur dengan konsep Negeri Seribu Satu Malam. Ditambah lagi wahana baru sinema 4 D yaitu pertunjukan film 3 Dimensi yang ditambah dengan berbagai efek yang memberi kejutan bagi anda seperti hembusan angin, cipratan air, getaran dan gerakan tempat duduk yang telah disesuaikan dengan jalan cerita. Pengunjungpun serasa ikut berpetualang dalam film di sinema 4 D.

TAMAN & PANTAI

Taman rekreasi dan pantai merupakan wahana hiburan yang memberikan kesegaran suasana pantai bagi semua kalangan dan usia. Taman danpantai Ancol dilengkapi dengan fasilitas berenang di pantai, fasilitas olah raga pantai, pentas musik serta dilengkapi dengan fasilitas kuliner antara lain Jimbaran Resto, Segarra, Le Bridge, Backstage, Planet Baso, Bandar Djakarta, dll.

DUNIA FANTASI

Dunia Fantasi hadir sebagai wahana yang menarik dengan tantangan dan adrenalin kita. Wahana yang cocok untuk remaja yang menghadirkan sensasi seru seperti Halilintar (Roller Coaster), Kincir-kincir, Tornado, Air Terjun Niagara-gara dan masih banyak lagi. Siapkan jantung anda dan kalahkan rasa takut anda ketika memulai menaiki berbagai permainan menantang di Dunia Fantasi. Sementara itu apabila anda ingin menikmati Dunia Fantasi dengan santai tanpa perlu banyak memacu adrenalin, anda bisa menikmati istana boneka atau balada kera. Dan masih banyak lagi wahana santai tapi seru. Dunia Fantasi terbagi dalam berbagai kawasan yang tersebut dibedakan berdasarkan ciri khas negara-negara di dunia seperti kawasan Asia, kawasan Eropa, kawasan Amerika, dll. Dunia Fantasi hadir untuk kesenangan dan pilihan anda. Lengkap dengan semua wahana serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga anda merasa aman dan nyaman di Dunia Fantasi.

KEBAYANGKAN BAGAIMANA SERUNYA?!
KALAU KE JAKARTA, JANGAN LUPA KE ANCOL

KALA CITRA TANDING
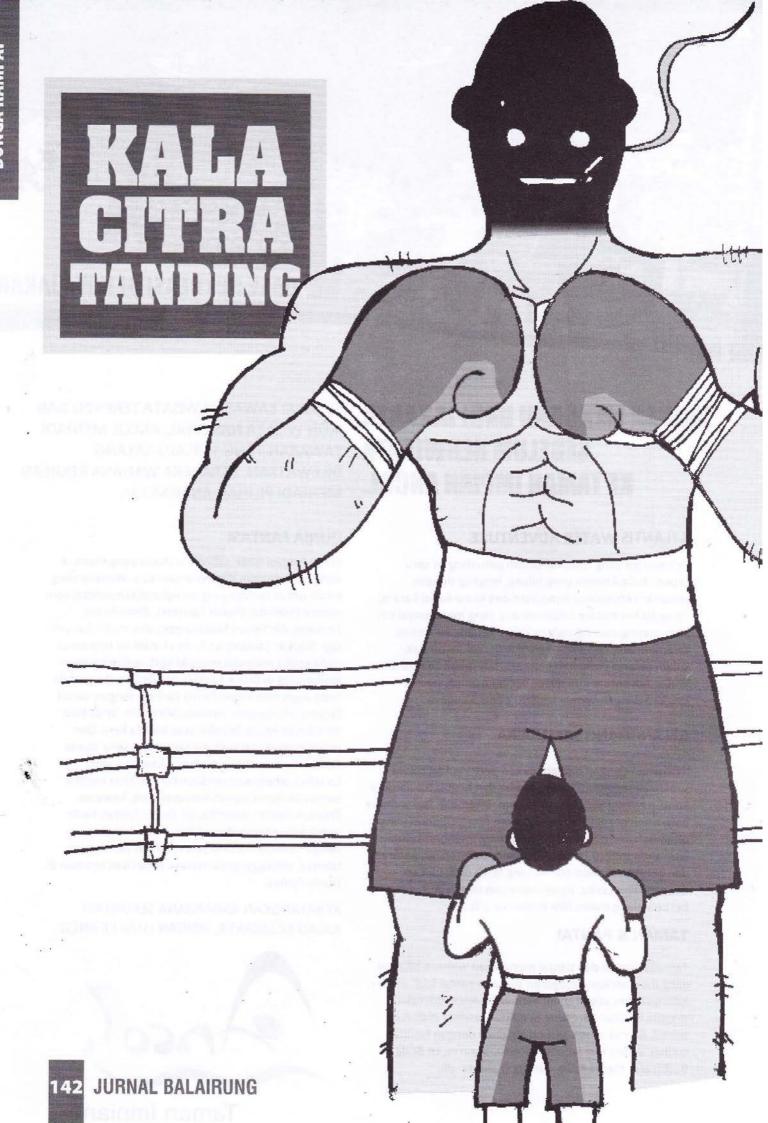
Editor: Nuraini| **Visual : M. Rizal Abdi**

muhammad r. abdi

Pegiat **b4**, bukan berita bergambar biasa. Wirausahawan media ini tengah meretas gelar akademis pertamanya di Komunikasi UGM. Bersama rekan seprofesi, ia getol merintis Sekolah Desain Gratis Indonesia.

Pratiwi

Penikmat musik genre *swing* dan *smoothjazz*, sempat pula menjadi penggembira di Balairung UGM. Bagi mahasiswa Sosiologi UGM 2005 ini, *jazz* menjadi pemuas kebutuhan akan inspirasi dan ketenanagan.
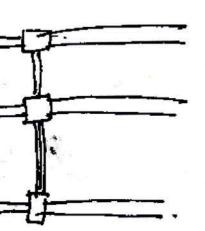
Lelaki itu agak gontai di tengah keramaian. Seorang wanita tergopoh menyusul. Sejurus, sang wanita menarik tangan si lelaki dari belakang. "Mau apa sih *lo*?" yang ditarik tangannya membalas sembari menepis tangan sang wanita. Mata mereka bertatap. "*Cut*!" Suara asing tiba-tiba memotong pertengkaran. "Mana ekspresinya?" Dengan gaya bak sutradara, lelaki tak dikenal coba mengarahkan ekspresi kedua pasangan tersebut. Yang diarahkan tentu saja bingung, lantaran mereka sedang berada di mal bukan di lokasi syuting. Beberapa detik berselang, sebuah tulisan dipampang, "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI, DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN."

...

"*Oh*, iklan rokok *toh*. *Kirain preview* film," tukas seorang anak pada suatu acara menonton televisi bersama keluarga.

Hampir tak satupun sendi kehidupan di negeri ini yang luput dari sentuhan rokok, sang 'Raja Midas'. Dari panggung politik sampai pen-
tas hiburan, dari ekonomi formal hingga
nformal, sang raja tak pernah absen
memberi sentuhan. Bahkan, ranah edu-
kasi dan religi tak suci dari jamahan.

Bagi pemerintah, rokok membantu per-
putaran roda pemerintahan. Menurut
data Lembaga Tembakau dalam Padmo
(1991:114), cukai rokok menyumbang 1,3
triliun rupiah pada 1988. Angka ini meng-
gelembung menjadi 50 trilliun pada 2006.[1]
Data tersebut mengukuhkan kedigdayaan
rokok sebagai penyumbang derma bagi be-
lanja negara. Ditambah lagi, industri rokok
menyediakan jutaan lapangan kerja bagi para
buruh dan ribuan bagi para pengecernya.
Jadilah rokok sang tuhan sembilan senti.[2]

Rokok memang bukan berasal dari Indonesia.
Akan tetapi, jalan panjang sejarah bangsa
ini kental kepulan asap tembakau. Sejarah
menggarisbawahi Sultan Agung sebagai
pelopor dan penyebar kebiasaan merokok di
Jawa.[3] Serat Centhini menggambarkan, Cebo-
lang, anak Syekh Akhadiyat, diajak merokok
oleh dua penjaga makam yakni Modin dan Bobin tatkala mengunjungi makam Sunan Bayat.[4] Tokoh-tokoh pergerakan nasional, seperti Agus Salim adalah perokok berat. Pun tradisi *cete*, menggambar batang rokok dengan ampas kopi, merupakan kebiasaan masyarakat daerah pesisir utara Jawa.

Kebiasaan merokok ini makin menggurita tatkala industri rokok bersanding dengan industri media. Regulasi pemerintah gagal menahan geliat iklan rokok. Malah, industri rokok kian menancapkan pengaruhnya. Permainan citra menjadi senjata andalan industri yang menghidupi jutaan tenaga kerja ini. Bak permainan Manchester United di era 1990-an[5], permainan citra rokok menjelajah dua sayap sekaligus. Pertama, lewat iklan di media massa. Kedua, lewat pengaruh pergaulan dalam komunitas. Ujung-ujungnya tak lain konsumsi rokok yang kian massif.

Citra, lewat dua sayapnya, laiknya ajian pamungkas industri rokok. Senjata ini mampu menyelinap ke sudut-sudut budaya. Begitu elok permainan citra industri rokok hingga kebiasan mengisap asap tembakau ini seolah lebur dalam laku masyarakat. Bahkan, asap rokok menggelitik ayat-ayat tuhan untuk ditafsir ulang agar bersahabat dengannya[6]. Lantas, apa kedigdayaan citra ini tak bisa dilawan?

Geliat Iklan di Tengah Gempuran

Maksud hati memeluk bulan, apa daya dikibuli praktisi iklan. "Pepatah" tersebut cocok disematkan pada pemerintah Indonesia. Konon, punggawa-punggawa Nusantara ingin mengenyahkan asap rokok dari bumi pertiwi. Asap tersebut, menurut tabib-tabib sakti negeri, menggerogoti paru-paru kawula. Padahal, asap bakaran tembakau itu salah satu penyumbang terbesar pundi-pundi negara. Agar tidak terjadi geger nagari, pemerintah pun mengeluarkan beragam kebijakan untuk membatasi produksi rokok. Dari pemberian cukai sampai pembatasan tata cara berjaja. Apa lacur, para cukong rokok punya seribu jurus mengakali kebijakan tersebut. Asap rokok pun kian bergeliat di tengah gempuran regulasi pemerintah.

Enam belas tahun silam, UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan digelontorkan. Undang-undang ini menyinggung masalah zat aditif[7] yang menjadi titik mula regulasi pengendalian tembakau di Indonesia. Lima tahun kemudian, UU Penyiaran No. 24 tahun 1997 dilempar untuk menghadang maraknya iklan rokok di media. Regulasi ini secara tegas melarang iklan yang menggambarkan penggunaan rokok.

Bukan industri rokok jika tak mampu berkelit. Pembatasan ini justru membuka jalan lempang hubungan mesra antara industri rokok dan periklanan. Meminjam tangan dingin dan otak kreatif praktisi iklan, para produsen rokok mencipta iklannya lewat permainan citra. Strategi ini untuk mengakali regulasi UU penyiaran No. 24 tahun 1997. Iklan-iklan rokok dengan atributif kejantanan dan keeksotisan pun berseliweran di media massa.

Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan bukan berarti perlawanan terhadap asap rokok surut. Pada masa Habibie, lewat UU Pers No. 40 tahun 1999, iklan rokok kian dibatasi. UU ini menyebutkan, "Perusahan Pers dilarang memuat iklan peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok." UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diusung untuk menandingi duet industri rokok dan periklanan. UU ini mensyaratkan setiap produk mencantumkan kandungan dan dampak produk.

Tak cukup dua, PP No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dipasang agar tak lagi kecolongan. Peraturan kali ini lebih detail meregulasi iklan dan pengonsumsian rokok. Dari kadar maksimum tar dan nikotin, regulasi iklan rokok, sampai kawasan tanpa asap rokok. Secara eksplisit, PP ini membatasi penayangan iklan rokok hanya pada media massa cetak dan media luar ruang. Aturan pencatuman peringatan pemerintah tentang kesehatan juga mulai diberlakukan.[8]

Tatkala PP ini disahkan, muncul tantangan keras dari produsen rokok, petani tembakau, dan media massa. Bahkan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan ikut "menolak" PP tersebut. Respon ini baru diakomodasi tatkala Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) naik menggantikan Habibie. PP yang berumur tak lebih dari setahun itu diganti dengan PP No. 38 tahun 2000 tentang Perubahan PP no. 81 tahun 1999. Isinya lebih permisif dibanding regulasi sebelumnya. Iklan rokok di media elektronik diperbolehkan pada jam tayang tertentu dan produsen rokok diberi kesempatan melakukan penyesuaian kadar nikotin dengan jangka 7-10 tahun.

Era Megawati merevisi dua regulasi tentang rokok. UU Penyiaran No.32 tahun 2002 diberlakukan sebagai revisi UU Penyiaran tahun 1997. Isinya tak jauh beda. Peraturan baru ini melarang siaran iklan niaga yang memperagakan wujud rokok. Pada era ini diberlakukan pula PP No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. PP ini merupakan penyempurnaan atas PP No.38. Regulasi ini mempertegas atribusi peringatan kesehatan, pencantuman kadar kandungan tar-nikotin dan kewajiban produsen rokok untuk mengakreditasi kadar tembakaunya.

Pembatasan ini justru membuka jalan lempang hubungan mesra antara industri rokok dan periklanan. Meminjam tangan dingin dan otak kreatif praktisi iklan, para produsen rokok mencipta iklannya lewat permainan citra.

Penghujung Mei 2007, Hakim S. Pohan berkunjung ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bersama Aisyah Hamid Baidlowi, Tuti Loekman, Alvin Lie, Elva Hartati dan Nidalia Djohansyah, kelima anggota Forum Legislasi Nasional ini hendak beraudiensi dengan Agung Laksono, ketua DPR 2004-2009, terkait RUU Pengendalian Tembakau. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersama DPR, tengah menggodok RUU kontroversial tersebut. Jika RUU ini gol menjadi program legislasi nasional, maka ini bisa menjadi penutup aib Indonesia di dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu pengusul aktif draf Konvensi Kerja Pengendalian Tembakau atau *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dan satu-satunya negara asia yang tidak meratifikasinya.

Gelitik Citra di Dua Dunia

Citra membentuk pengetahuan individu terhadap sebuah produk. Ia merupakan gambaran ideal yang coba ditanamkan pembuatnya kepada sasaran dengan maksud tertentu. Tak jarang, citra yang melekat pada sebuah produk saling tumpang tindih. Rokok salah satunya. Pelbagai macam citra melekat pada benda ini antara lain, berbahaya bagi kesehatan, mencerminkan maskulinitas, hingga faktor pelicin berkomunitas. Bahasa pencitraan terhadap rokok bermain di dua ranah. Pertama, media massa melalui iklan. Kedua, interaksi sosial, melalui pengaruh pergaulan dalam komunitas (lihat bagan). Kedua ranah ini bermuara pada konsumsi rokok.

Ada Udang di Balik Iklan

Iklan merupakan alat pemasaran sebuah produk. Pemasaran bertujuan memersuasi calon konsumen agar mengonsumsi suatu produk. Persuasi dapat dilakukan melalui permainan citra untuk mengonstruksi kesadaran konsumen. Salah satunya lewat bahasa iklan.

Bahasa merupakan salah satu kunci penting dalam membangun citra. Bahasa tak sekadar alat komunikasi tetapi juga menunjukkan keadaan komunitas pemakai bahasa. Ia menjadi penanda dan penunjuk bagi orang baru yang ingin masuk dalam sebuah komunitas.

Studi tentang bahasa dan tanda dapat ditelisik melalui kajian semiotika, studi mengenai tanda. Kajian ini mengupas cara bahasa digunakan untuk melahirkan makna yang kemudian dikomunikasikan dalam masyarakat.[9] Karya Ferdinand de Saussure merupakan salah satu yang menonjol dalam studi semiotik.[10]

Saussure berangkat dari sumber strukturalisme modern yakni linguistik. Strukturalisme ala Saussure bergeser pada pemusatan struktur bahasa. Berbeda dengan teoretikus fungsionalis struktural yang berpijak pada struktur sosial, strukturalisme beranggapan makna, pikiran dan akhirnya kehidupan sosial dibentuk lewat struktur bahasa. Konsentrasi strukturalisme kemudian berkembang dari bahasa ke studi sistem tanda. Lebih lanjut, Saussure mengungkapkan terdapat dua aspek dalam analisis semiotik, aspek penanda (*signifier*) dan pertanda (*signified*).[11] Penanda merujuk pada ungkapan dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik seperti bunyi, huruf, kata, gambar, warna, obyek. Pertanda terletak pada tingkatan isi atau gagasan dari apa yang diungkapkan. Hubungan antara kedua unsur melahirkan citra atau makna.

Buah pemikiran Saussure ini dapat dipinjam guna mengupas cara kerja permainan citra iklan-iklan rokok. *Tag line* atau bahasa iklan merupakan penanda karena ia dapat ditangkap oleh indra manusia yakni berupa bahasa dan kata-kata. Sedangkan gagasan dari *tag line* merupakan pertanda. *Tag line* rokok sengaja disajikan melenceng dari cara-cara persuasi langsung. Gagasan dalam *tag line* rokok memiliki kecenderungan mudah dicerna dan menghasilkan sebuah citra yang menarik, populer serta persuasif. Berikut ini beberapa *tag line* dalam iklan rokok dan penafsiran tanda serta citra tentangnya:

Enjoy aja! Versi orientasi siswa

Digambarkan melalui beberapa situasi yang tidak menguntungkan. Seorang pelajar harus mengenakan atribut memalukan saat orientasi siswa baru. Namun, pelajar tersebut tetap menyunggingkan senyumnya. Iklan tersebut memiliki pesan yakni dalam keadaan serugi apapun, calon konsumen akan merasa bahwa dirinya orang yang fleksibel, tak acuh, tetap santai, tak membesarkan masalah dan menikmati (*enjoy*) keadaan. Selain itu, iklan ini seperti melegitimasi kebiasaan merokok remaja sekolah menengah karena yang menjadi tokoh dalam iklan tersebut yakni seorang pelajar

My Life, My Adventure

Seorang petualang yang melalui medan berisiko seperti hutan rimba, dan tebing tinggi. Namun, ia tetap menganggap medan berisiko tersebut sebagai petualangan yang menyenangkan

Mau Pintar Kok Mahal, Tanya Kenapa?

Merupakan sebuah kritik bagi makin sulitnya akses pendidikan akibat mahalnya biaya akhir-akhir ini, *tag line* "Tanya kenapa?" merupakan salah satu pesan yang disampaikan pada calon konsumen untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan dan keadaan yang terjadi.

Pria Punya Selera versi harimau

Seorang pria sedang memotret seekor harimau. Sang harimau mengejar pria yang memotretnya seakan ingin memangsa. Pada akhirnya, pria dan harimau tersebut bertemu di sebuah rumah dengan adegan sang pria yang mengelus kepala harimau. Ternyata harimau tersebut telah jinak oleh sang pria. Gagasan yang ditekankan dalam iklan ini menunjukan bahwa ternyata pria dapat berteman dengan sesuatu yang buas.

Ga Ada Loe Ga Rame versi makan bersama

Sekelompok anak muda hendak makan di sebuah warung tetapi tak mempunyai cukup uang. Kemudian salah satu pemuda memperlihatkan cara makan murah ramai-ramai. Pemuda tersebut menyertakan kuah rendang tanpa menyertakan dagingnya. Dengan demikian membayarnya jadi lebih murah. Jika harus menanggung rasa malu, maka rasa itu akan ditanggung bersama. Pesan yang ingin disampaikan bahwasanya, melakukan hal beramai-ramai dapat meningkatkan solidaritas dan meringankan beban apapun.

Penciptaan citra dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat menjadikan bahasa iklan populer. Kekuatan citra dan bahasa iklan sejalan dengan konsumsi rokok. Pernyataan ini diamini iklan rokok Marlboro Man yang diluncurkan pada 90-an dengan ikon seorang koboi gagah yang merokok di alam bebas. Jenis rokok tersebut merupakan sigaret filter yang pada waktu itu dianggap feminin. Maka, sang citra pun bermain. Iklan rokok tersebut menanamkan pesan bahwa sigaret filter pantas dikonsumsi pria. Alhasil, penjualan merk rokok tersebut meningkat 5. 000 % sejak delapan bulan iklan diluncurkan.[12]

Data-data mencengangkan pengaruh iklan rokok pada perilaku merokok juga datang dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka (Uhamka), Jakarta.[13] Penelitian ini dilakukan terhadap 353 siswa SMP, SMA dan SMK. Dari hasil penelitian itu terungkap keberhasilan iklan rokok mempengaruhi remaja usia sekolah menjadi permisif terhadap rokok. Sebanyak 81 % responden mengaku pernah mengikuti kegiatan yang disponsori perusahaan rokok. Sejumlah 51,5 % setuju pentas kesenian dan olahraga di sekolah disponsori iklan rokok. Pembagian rokok gratis merupakan hal yang berkesan dari acara yang disponsori perusahaan rokok menurut 30,4 % responden. Sementara, 93,3 % dari sampel juga dapat menyebutkan slogan-slogan yang digunakan iklan rokok. Tak sekadar tahu, mereka bahkan akrab dengan jargon-jargon dalam bahasa iklan rokok dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari.

Sumber lain juga mencatat kecenderungan serupa. Banyaknya iklan rokok memberi kesempatan yang lebih pada remaja untuk terpengaruh persuasinya. Komnas Anak Jakarta menunjukan 99,7 % remaja Jakarta terpapar iklan rokok lewat televisi. Sementara, 36,7 % terpapar iklan baliho di jalan dan media cetak; dan 81 % pernah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan atau disponsori industri rokok.[14]

Gempuran citra lantas tak hanya berlangsung lewat iklan di media massa. Penelitian Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS) mengungkapkan, sebanyak 70 % remaja terpapar rokok dalam pelbagai kegiatan seperti olahraga, konser musik, hingga acara di sekolah.[15] Iklan rokok merambah acara musik dan olahraga yang identik dengan kaum muda. Ini menjadi sangat kontras. Rokok sebagai produk yang membahayakan kesehatan malah mensponsori kegiatan olahraga yang berfungsi menyehatkan badan. Iklan rokok seolah ingin berpesan, "Dengan merokok, anda menyumbang bagi kesehatan."

Rentetan angka dan data tersebut menunjukkan korelasi kuat antara citra iklan dan pola konsumsi rokok. Selain meningkatkan pola konsumsi, iklan rokok telah menciptakan kebutuhan baru. Dalam konsepsi *hyperealitas*, kebutuhan baru tercipta setelah produk dan citra dicipta melalui media. Jean Baudrillard, dedengkot posmodernisme, menyatakan, media bukan lagi mencerminan realitas, ia justru menjadi realitas itu sendiri melalui apa yang dicitrakannya.[16]

Citra yang diciptakan media bahkan melebihi apa yang menjadi realitas. Akhirnya, sulit membedakan antara yang nyata di masyarakat dan yang menjadi tontonan di media.

Citra yang ditanamkan dalam iklan rokok menjadi larut dengan konsumsi rokok. Kebutuhan merokok tak hanya didorong kenikmatan dalam tubuh, rasa asap yang cocok--awalnya sebagai realitas yang dapat dirasakan panca indra, tapi juga kebutuhan akan kepuasan citra-- melebihi realitas- - yang kemudian larut dalam realitas itu sendiri. Akibatnya, media iklan sebagai alat produksi citra akan terus berpola untuk memasok kebutuhan akan citra.

Budaya Minta Api

"Apinya *dong*, mas?" pinta seorang pelanggan sebuah café pada seseorang di meja sebelahnya. "*Oh*, silakan," jawab yang dimintai api sambil menyodorkan pemantik api. Si peminta api segera mengeluarkan rokok berlambang jarum gramafon dari sakunya. Perlahan, ia mulai menyalakan pemantik api sambil mendekatkan ujung rokok pada api.

"Terimakasih," si peminta api mengembalikan pemantik rokok sembari menghisap rokoknya dalam-dalam. "*Wah*, suka rokok itu juga ya?" ujar si pemilik pemantik rokok setelah melihat rokok yang dinikmati pelanggan kafe di sebelahnya.

Kemudian percakapan dua orang yang tak saling kenal itu pun berlanjut lantaran keduanya penikmat rokok dari merk yang sama. Kendati tak pernah mengenal dan tak saling menukar tanda sebelumnya, interaksi sosial terjadi. Masing-masing sadar akan pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam perasaan dan syaraf orang yang bersangkutan.[17] Budaya minta api tersebut menggambarkan bagaimana rokok berfungsi sebagai simbol atau tanda dalam interaksi sosial.

Dalam tinjauan sosiologis, kebiasaan merokok dibesarkan lewat lingkungan pergaulan. Kebiasaan merokok yang bermula dari dorongan orang peer group (teman sebaya) kemudian memunculkan motivasi untuk mencobanya. Selanjutnya, rokok menjadi alat sosialisai dan adaptasi yang efektif. Hasil jajak pendapat dalam jurnal *Balairung*

edisi 37 (2004:185) tentang fenomena konsumsi rokok pelajar SMU di Yogyakarta menunjukkan, sebanyak 85, 4 % responden mengakui bahwa pola konsumsi rokok mereka dipengaruhi oleh orang terdekat disekitranya. Jajak pendapat ini dilakukan terhadap 400 reponden di 10 SMU.

Data terkini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tentang fenomena merokok pada remaja menujukan kecenderungan serupa. Mereka melibatkan 400 responden dibawah 18 tahun sepanjang 25 titik jalur kereta api Jakarta-Bogor. Hasil penelitian menunjukan 61 % dari responden adalah perokok, sedangkan motivasi mereka salah satunya karena dorongan peer group anak jalanan. "Kalau kami tak merokok berarti bukan anak jalanan," ungkap salah satu responden.[18] Data tersebut menguatkan, kebiasaan merokok dilanggengkan melalui sistem pergaulan. Merokok menjadi simbol anak jalanan dan dikenalkan dari mulut ke mulut.

Tak hanya dari mulut ke mulut, budaya merokok berlangsung turun temurun. Budaya orang dewasa yang suka mengunyah dan menghisap sesuatu dalam mulut dipahami Sigmund Freud sebagai fase oral yang tidak sempurna di masa kecil.[19] Penyaluran kebiasaan merokok yang turun temurun merupakan proses yang bermula sejak masa anak-anak. Anak-anak yang melihat orang tuanya merokok dan orang-orang disekitarnya yang juga merokok dapat memberikan dampak pada cara anak tersebut mempersepsikan kebiasaan merokok.

Herbert Mead, teoretikus interaksionisme simbolik memaparkan latar belakang dan asal-usul kecenderungan sikap seseorang.[20] Teori interaksionisme simbolik merupakan

61 % anak berumur < 18 tahun di sepanjang 25 titik jalur kereta api Jakarta-Bogor adalah perokok, motivasi mereka karena dorongan *peer group* anak jalanan.

gagasan-gagasan, asumsi-asumsi tentang manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Awalnya kajian ini disebut psikologi sosial karena judul-judul referensi tentang teori ini banyak menggunakan istilah psikologi sosial.

Pertanyaan mendasar dalam kajian ini adalah bagaimana individu mempengaruhi yang lain lewat makna dan bagaimana pengaruh tersebut ditransformasikan dalam perubahan masyarakat. Penekanan terhadap dua istilah: 'simbol' dan 'interaksi' menjadi benang merah karya-karya filsuf, sosiolog dan psikolog sosial dalam interaksionisme simbolik. Para imam interaksionisme simbolik meyakini, simbol yang berupa benda, gagasan, isyarat memiliki makna-makna tertentu yang dapat menjadi salah satu unsur dalam interaksi sosial. Makna-makna itu dipahami dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu yang ia hadapi.

Mead melihat percakapan isyarat sebagai tahap awal latar belakang diri. Asal-usul diri dijelaskan dalam dua tahap masa anak-anak. Pertama bermain-main (*play*) dan permainan (*game*). Pada tahap pertama, anak cenderung mengambil sikap orang lain untuk dijadikan sikapnya sendiri. Misalnya, ketika anak melihat ayahnya yang merokok kemudian dapat memerankan 'mami' dan

> **Kebutuhan merokok tak hanya didorong kenikmatan dalam tubuh, rasa asap yang cocok--awalnya sebagai realitas yang dapat dirasakan panca indra, tapi juga kebutuhan akan kepuasan citra-- melebihi realitas-- yang kemudian larut dalam realitas itu sendiri.**

'papi' dalam proses mengembangkan kemampuan evaluasi diri sebagai orang tua.

Pada tahap kedua, kepribadian tertentu mulai muncul dari bentukan tahap pertama dan anak-anak mulai dapat memosisikan dirinya dalam kelompok yang terorganisasi. Misalnya, seorang anak laki-laki yang melihat ayahnya merokok dan melihat iklan-iklan rokok yang bercitra laki-laki pemberani. Lantas kecenderungan kepribadiannya terhadap rokok mulai terbentuk saat ia bergaul dengan teman lelaki sebayanya. Ketika anak mempersepsikan rokok merupakan kebiasaan, ia akan membagi pengalamannya dengan teman sebayanya. Secara sederhana, Mead menjelaskan, dalam pencapaian diri yang sempurna, seseorang harus menjadi anggota komunitas dan ditunjukkan kesamaan sikapnya terhadap komunitas.

Perkembangan tentang simbol dan makna dalam interaksionisme simbolik kemudian mencapai titik tatkala makna akan selalu mengalami perubahan. Dinamika interaksi berkorelasi dengan perubahan makna. Ketika seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, ia juga melalui proses internal dengan memilih lewat rasionalitasnya tentang makna yang akan terbentuk.

Bagan Citra dan Konsumsi Rokok

Kala Citra Tanding

Setiap senjata punya kelemahan, setiap digdaya bisa dilawan. Pun dengan citra. Genderang perang terhadap permainan iklan rokok sudah dimulai tatkala pemerintah menggelontorkan UU Penyiaran tahun 1997. Lembaga swadaya masyarakat dan institusi kesehatan juga tak tinggal diam. Lewat berbagai penyuluhan bahaya rokok, iklan rokok coba ditandingi keampuhannya. Namun, lagi-lagi, permainan citra industri rokok rupanya terlalu ampuh. Para "gerilyawan" anti-rokok ini pun mulai menggunakan permainan citra untuk balik menggempur keangkuhan industri rokok. Perang citra pun tak terelakkan, *clash of imagination*.[21]

Bila dipetakan, ada tiga strategi permainan citra yang dikembangkan gerilyawan anti rokok : konfrontasi, atribusi, dan parodi.

Konfrontasi : Adu Kuat Citra Tandingan

Bak sabung silat, strategi ini melakukan perlawanan frontal dengan membuat simbol atau citra tandingan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Salah-satunya lewat Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Kehadiran ILM dimaksudkan sebagai citra tandingan terhadap keberadaan iklan komersial (baca: rokok). Sumbo Tinarbuko dalam Semiotika Iklan Sosial (2006)[22] memaparkan,

> Sebagai sebuah citra tandingan, pada dasarnya ILM adalah alat untuk menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Media semacam ini sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyebarluaskan program-programnya. Sebagai media yang bergerak dalam bidang sosial, ILM pada umumnya berisi pesan tentang kesadaran nasional dan lingkungan.

Secara fisik dan perencanaan, bentuk ILM tak jauh beda dengan iklan komersial. Karena pada dasarnya, keduanya merupakan media komunikasi visual untuk mempengaruhi persepsi khalayak.

Strategi ini punya beberapa kelemahan. Repetisi merupakan unsur penting dalam permainan citra dalam lingkup massal. Gobbel, menteri propaganda Hittler, , dalam perang dunia II mengirim pesan berulang-ulang tentang kejayaan Jerman dan Nazi pada masyarakatnya. Perlahan tapi pasti, konsepsi yang dikoar Gobbel merasuk ke pikiran masyarakat Jerman. Tak heran, Hittler mendapat dukungan luas dari masyarakat Jerman kala itu.

Jurus repetisi ini juga dipakai industri rokok. Dengan modal melimpah, industri rokok mampu menayangkan iklannya secara massif dan kontinyu. Ini sulit ditandingi ILM. Menilik muasalnya, ILM merupakan iklan sosial dan didanai secara independen. Dengan kondisi semacam ini, frekeunsi penayangannya cenderung rendah. Tak heran, pesan-pesan sosial yang terkandung muskil diposisikan dalam benak khalayak

Kondisi ini diperparah dengan penggarapan ILM, terutama di Indonesia, yang tak seserius iklan komersial. Berbeda dengan iklan komersial, kucuran dana segar dalam penggarapan ILM sulit didapat. Penggarapan ILM pun cenderung seadanya. Pesan sosial yang hendak disampaikan pun hilang seiring tanggalnya poster dan riuh rendah keangkuhan iklan rokok komersial.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Alur Fotografi dan majalah Trust
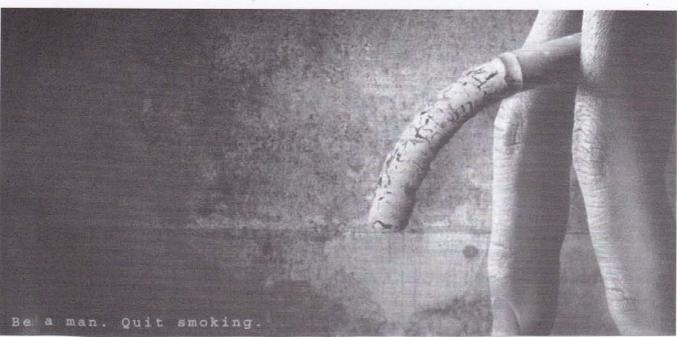
SMOKING KILLS

Beberapa contoh iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok.

Atribusi: menumpang lewat kemasan

Tatkala dana tak lagi kuat mengimbangi, pemerintah pun beralih dengan atribusi. PP No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan menjadi kuda-kuda pembuka perlawanan citra lewat atribusi. Peraturan ini mensyaratkan setiap produk rokok mencantumkan peringatan pemerintah tentang bahaya rokok dalam kemasannya. Strategi atribusi dapat menyiasati kelemahan pemerintah dalam pendanaan ILM anti-rokok. Dengan PP tersebut, pemerintah tak perlu mengeluarkan dana bejibun untuk menandingi iklan rokok. Dengan atribusi tersebut, pemerintah seolah ikut beriklan sembari menjalankan fungsi sosialnya mengingatkan masyarakat atas bahaya rokok. Berikut contoh atribusi dalam kemasan produk dan iklan rokok,

Meski cukup manjur, atribusi ini justru membuat iklan rokok makin mudah dikenali. Awalnya, PP No. 81 tahun 1999 bertujuan memutilasi kreativitas industri iklan rokok. Dalam PP tersebut, materi iklan rokok dilarang: Pertama, merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; Kedua, memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya rokok atau orang sedang merokok atau mengarahkan pada orang yang sedang merokok; Ketiga, mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.

Regulasi tersebut tak pelak membuat praktisi iklan rokok jungkir balik. Permainan citra, dari yang sederhana sampai yang paling absurd, menjadi jalan keluar. Kini, penempelan atribusi tersebut malah memudahkan praktisi iklan dalam memproduksi iklan rokok. Mereka tak perlu susah memutar otak agar permainan citra yang dibangun masih dikenali sebagai produk rokok. Pencantuman peringatan pemerintah justru membantu konsumen mengenali iklan produk rokok.

Awal Juni 2008, Pusat peneliti FKM UI mempublikasikan temuan mereka terkait efektivitas pencatuman peringatan kesehatan dalam kemasan rokok. Mayoritas responden (42,5 %) tak percaya akan kebenaran isi peringatan kesehatan, 20 % menyatakan tak jelas, dan 25 % responden tak peduli lantaran terlanjur ketagihan.[23] Ini menunjukkan strategi atribusi di Indonesia masih kalah taji dengan kesaktian citra iklan rokok.

Beberapa negara, seperti Thailand, Singapura, dan Brasil juga mengadopsi strategi atribusi ini. Hanya saja, visualisasi peringatan bahaya rokok mendapat porsi lebih besar. Selain itu gambar organ-organ yang rusak akibat rokok juga dicantumkan dalam kemasan rokok. (gambar 6)

Di Brasil, peringatan lewat gambar horor tersebut mampu menurunkan minat pembeli rokok sampai 65 %. Malah hampir tiga perempat dari responden memilih berhenti menghirup benda racun tersebut.[24]

Pencantuman peringatan pemerintah justru membantu konsumen mengenali iklan produk rokok.

Atas : Contoh pencantuman peringatan bahaya rokok pada kemasan produk di luar negeri.

Bawah : Contoh pencantuman peringatan bahaya rokok pada kemasan produk di Indonesia

Parodi : melawan dengan plesetan

Yasraf A. Piliang, menukil Linda Hutcheon dalam artikelnya *A Theory of Parody*, menjabarkan parodi sebagai sebuah relasi formal atau struktur antara dua teks. Sebuah teks baru dicipta sebagai hasil sebuah sindiran, plesetan, atau unsur lelucon dari bentuk, format atau rujukan teks.[25] Dengan demikian, meminjam pemikiran Tinarbuko[26], sebuah teks atau karya parodi biasanya lebih menekankan aspek penyimpangan atau plesetan dari teks atau karya rujukan yang biasanya serius.

Sebenarnya pendekatan ini banyak dipakai iklan rokok dalam memasarkan produknya. Efek *vocal point*, daya pikat, dan unsur kejut dalam parodi membuat iklan yang dibalut dengan pendekatan ini lebih mudah diingat dan diterima khalayak. A Mild, tercatat sebagai pelopor iklan rokok yang memakai pendekatan parodi. Strategi ini akhirnya menjadi tren baru dalam produksi iklan rokok terkini. Sebut saja LA Light dengan *Enjoy aja* versi *may*, Sampoerna Hijau versi rame-rame, dan U Mild versi *breakdance*.

Hutcheon juga menengarai parodi sebagai imitasi yang bersifat ironi. Dalam ranah posmodernisme, Parodi merupakan sebuah wacana yang berupaya mempertanyakan kembali subjek pencipta sebagai sumber makna. Ia menyiratkan satu upaya berdialog dengan masa lalu dan dengan sejarah.[27] Parodi menyediakan ruang kritik atas ketidakpuasan dengan rasa humor. Kritik, sindiran, olokan bahkan makian menjadi santapan khas pendekatan parodi.

Memarodikan iklan rokok menjadi salah satu cara untuk melawan kearogansiannya. Pendekatan model ini mendayagunakan efek atribusi, konfirmasi, dan daya kejut dalam iklan. Dengan membuat iklan yang mirip dengan asli, iklan parodi lebih mudah dikenali. Efek kejut setelah mengonsumsi iklan parodi membuat iklan tersebut mudah merasuk dalam benak khalayak.

Perlawanan citra lewat parodi salah satunya dimulai lewat jalur festival pariwara. Festival sebagai ajang apresiasi dan kompetisi praktisi iklan menelurkan ide-ide baru dalam perlawanan iklan. Pinasthika Award salah satunya. Festival iklan di Yogyakarta ini setiap tahunnya banyak menghasikan model iklan plesetan dari iklan rokok yang terlebih dahulu terkenal.

Sebenarnya pemarodian iklan rokok telah dimulai pada era 90-an. Kala itu, beberapa iklan rokok yang tengah kondang diplesetkan *tagline*-nya. Proses eksekusinya masih sederhana. Salah satunya lewat penimpalan teks iklan rokok asli dengan teks baru yang isinya persuasi anti-rokok. Perkembangan piranti lunak rekayasa digital membuat parodi iklan rokok semakin atraktif dan kreatif. Iklan parodi dibuat semirip dan semenarik iklan asli.

Taktik ini juga bukan tanpa kelemahan. Lantaran sifatnya yang berbau humor, iklan model parodi berpotensi terjerumus dalam jebakan lelucon abadi. Tanpa ada baku paham yang kuat mengenai pesan yang hendak disampaikan, iklan parodi hanya menjadi hiburan sesaat. Banyak dikutip di sana-sini tetapi kosong dalam isi.
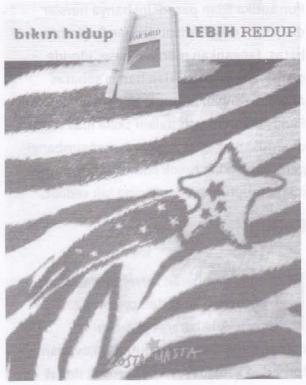
Atas dan Kiri Atas: Gambar parodi iklan rokok di era 90-an. Pada era ini pemarodian iklan rokok menggunakan gambar asli iklan tersebut kemudian ditindih dengan *tagline* yang diparodikan.

Kiri: Gambar parodi iklan era 2000-an. Parodi iklan tampak lebih kreatif, tak sekadar penindihan atau penggantian *tagline*. Iklan yang dibuat Indra Triwahyudy ini menjadi finalis Pinasthika ad festival 2006.

Pun ketika iklan parodi ini hanya bersiar di ajang-ajang festival dengan lingkup terbatas. Jangankan menjadi oase, ide-ide cemerlang praktisi iklan hanya sebatas onani di tengah permainan citra iklan rokok. Penayangan massif dalam skala luas tentu diperlukan agar, setidaknya, mengimbangi gempuran iklan rokok komersial. Tentunya ini membutuhkan dana yang tak sedikit.

Epilog

Ketiga gambaran tersebut merupakan potongan kecil dari peperangan citra. Ada banyak jalan dan medan yang bisa ditempuh. Perlawanan terhadap kedigdayaan citra rokok dapat dikembangkan lewat media lain seperti komik, permainan video dan lelucon.

Data-data terkini menunjukkan prevelensi perokok pemula kian muda umurnya. Data Tobacco Control Network menunjukkan persentase perokok pemula usia 59 tahun meningkat menjadi 1,8% pada.[28] Perlu mengaji lebih lanjut media yang cocok untuk mengenalkan rokok dan bahayanya kepada anak-anak. Ide memberi pengetahuan bahaya rokok lebih dini perlu dikaji mendalam. Imaji tak bisa dibelenggu, tetapi imaji bisa ditandingkan. Pelarangan keras terhadap konsumsi rokok pada anak justru membuat rasa ingin tahu anak kian tangguh. Daripada melarang, lebih bijak mengenalkan anak pada rokok dan bahayanya.[29]

Citra sebagai jalan masuk ke alam pikiran dan tindakan menjadi medan sekaligus aktor pertempuran. Kepentingan yang beragam menyebabkan perang imaji menjadi tak terelakkan. Selama kepentingan belum sanding, selama itu pula citra tanding. [ ]

catatan akhir

[1] Tulus Abadi, Politik Cukai dan kedermawanan industri rokok, dalam *Koran Tempo*, 9 April 2007.

[2] Istilah ini dipinjam dari Taufik Ismail dalam sajaknya yang berjudul sama. Sajak ini menggambarkan dominasi industri rokok di nusantara.

[3] Amen Budiman dan Onghokham dalam *Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. 1987. PT Djarum Kudus.

[4] *Serat Centhini Minggatnya Cebolang*, Galang Press, 2005, hlm. 104.

[5] Pada era '90-an, Manchester United merajai sepakbola Eropa. Kesuksesan tim sepak bola asal Inggris ini tak lain berkat strategi Sir Alex Ferguson. Tak seperti pola penyerangan konvensional, pelatih asal Skotlandia ini mengembangkan sistem penyerangan lewat dua sayap. Sistem ini memanfaatkan lebar lapangan sebagai media penyerangan. Ketika salah seorang pemain sayap membawa bola, pemain sayap yang lain bertugas menyisir lapangan. Dengan begitu, penyerangan dapat dilakukan dari dua sisi sekaligus.

[6] Simak perdebatan fatwa rokok haram oleh MUI. Sebelum fatwa ini muncul, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar dan satu-satunya yang tidak mengharamkan rokok.

[7] Zat adiktif menurut UU ini adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Pengendalian terhadap zat ini ditujukan agar pengunaannya tidak mengganggu kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Konsep ini kemudian menjadi acuan UU tentang rokok selanjutnya.

[8] MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI, DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN. Pencatuman kalimat ini dalam bungkus dan iklan merupakan syarat bagi produsen rokok.

[9] Arie Setyaningrum, MA. dalam materi kuliah Jurusan Sosiologi UGM, *Semiotik: Suatu Pengantar*, 5 Desember 2005.

[10] George Ritzer dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern* Edisi 6 terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, hlm. 604.

[11] Donny Gahral Adian. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer, Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 41.

[12] Dalam artikel berjudul Faizal Motik: Sisi Gelap Rokok, dari *http://duniatanparokok.wordpress.com/category/tokoh-bicara/* diakses pada tanggal 18 April 2008.

[13] *http://www.tobacco-totalban.org/id/node/5* pada tanggal 18 April 2008.

[14] *http://r3dluv.wordpress.com/2008/05/08/identitas-sebatang-rokok/* diakses pada tanggal 18 April 2008

[15] Astari Yanuarti, Melepas Jerat Racun Rokok anak Indonesia, dalam *Gatra* 4 Juni 2008, hlm. 96. Fakta ini berkebalikan dengan pernyataan Martin King ketika diwawancarai Gatra. Direktur PT. Sampoerna ini mengaku target iklan mereka bukan anak-anak dibawah 18 tahun. Selengkapnya baca, Martin King :"Target kami bukan anak-anak" dalam *Gatra* edisi 4 Juni 2008, hlm.102.

[16] *op. cit., Ritzer*, hlm. 642.

[17] Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar* Edisi Kesatu. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 55.

[18] *op. cit., Astari.*

[19] *op. cit., Donny*, hlm. 9.

[20] *op. cit., Ritzer*, hlm. 282.

[21] Istilah ini merupakan plesetan dari judul buku Samuel Huntington, *clash of civilization*.

[22] Sumbo Tinarbuko, 2006. "Semiotika Iklan Sosial" dalam *www.desaingrafisindonesia.com.*

[23] Astari Yanuarti, Gambar Dampak Merokok Harus Ada di Kemasan dalam *Gatra* edisi 4 Juni 2008, hlm. 98.

[24] *ibid.*

[25] Yasraf A. Pilliang 1999. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS, hlm. 155.

[26] Sumbo Tinarbuko, 2006. "Semiotika Desain Oblong Dagadu Djokdja" dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya, Volume 3, Nomor 1, Juni 2006, hlm. 90.

[27] *ibid.*

[28] *Hidayatullah*, Selasa, 4 Maret 2008.

[29] Ada banyak cara mengenalkan cahaya rokok pada anak. Salah satunya seperti ditunjukkan komik *Calvin* () berikut. Tak seperti orang tua pada umumnya, di komik ini diceritakan sang ibu malah mengizinkan anaknya untuk mencoba rokok milik kakeknya.
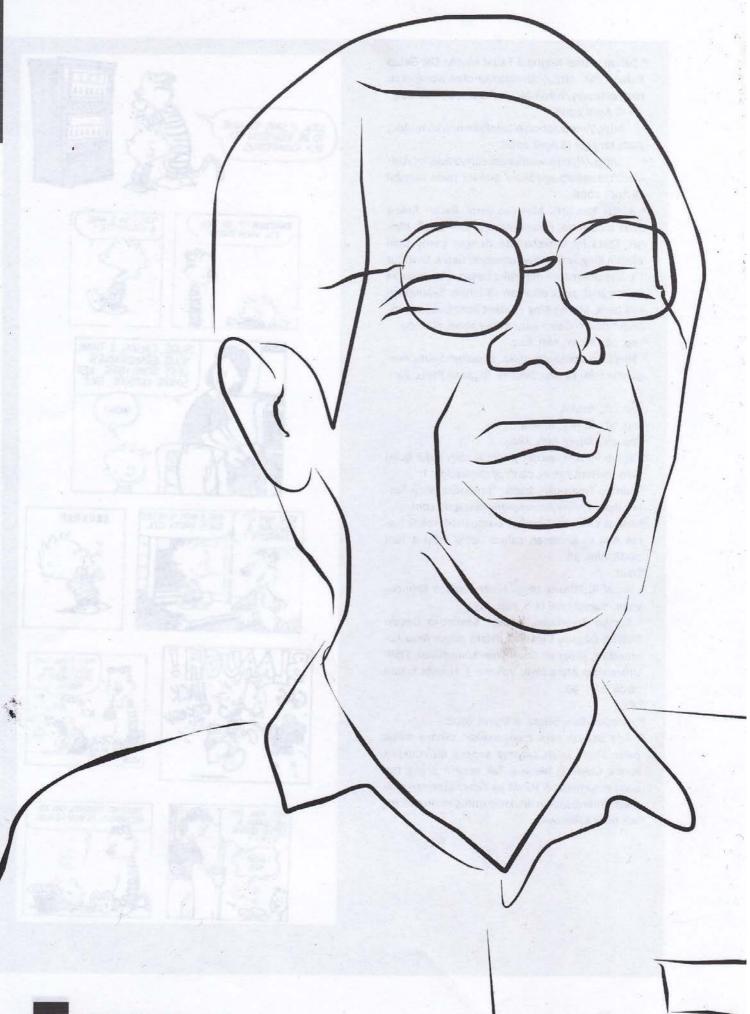
Tim Insan Wawasan | Penulis : Ciptaningrat Larastiti, Achmad Choirudin, Hellatsani Widya Ramadhani | **Editor :** Azizah Fitriyanti | **Visual :** M. Rizal Abdi, Estu Suryowati

Tembakau dalam Berbagai Takaran
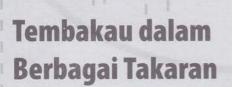
Ciptaningrat Larastiti

Bagi mereka pecinta seni, terutama seni rupa kontemporer, agaknya nama laki-laki berumur 69 tahun ini memang tidak asing. Oei Hong Djien, laki-laki Tionghoa yang akrab disapa Oei ini memang sering *wira-wiri* di berbagai perhelatan seni. Ia dikenal masyarakat luas sebagai kolektor lukisan, kurator, dan konsultan berbagai macam galeri, baik di dalam maupun luar negeri. Kiprahnya di bidang seni memang sudah tidak diragukan. "Dari tembakau saya berseni," ujarnya yang seolah menjadi motto hidup. Ya, penghasilannya sebagai *grader* (evaluator) tembakau PT Djarum yang membuatnya mampu mengoleksi berbagai benda seni bernilai tinggi. "Sebaliknya, seniman berseni untuk beli tembakau," selorohnya.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 1964 dan Magister Pathological Anatomy, Universitas Katholik Nijmegen, Belanda 1968 ini memang lahir dari latar belakang keluarga tembakau. Secara turun-temurun, ia mewarisi usaha jual beli tembakau. Sampai suatu ketika usaha keluarganya bangkrut. Ia pun beralih menjadi "pekerja pabrik" sebagai *grader* tembakau.

Pengalaman Oei dalam dunia tembakau selama lebih dari 40 tahun, membuatnya paham seluk-beluk tanaman itu sekaligus korelasinya dengan industri. Lebih dari itu, hidup dengan tembakau sedari kecil telah menumbuhkan kesadarannya mengenai kondisi pertanian tembakau. Setelah melewati pelbagai zaman, ia pun merasakan beragam romantisme di tiap masanya. Dari masa ketika petani memanggul tembakaunya turun gunung untuk dijual di tempat ayahnya, sampai ketika dia hanya menunggu sampel tembakau untuk kemudian dicicipi.

Oei menaruh perhatian besar pada bagaimana seharusnya petani itu merotasi cara mereka bertani dengan teknik modern. Selain itu, pentingnya pendidikan yang kadang dihiraukan oleh petani yang menjadikan mereka sebagai kaum marjinal.

Kedatangan BALAIRUNG ke kediaman Oei pun memulai perjalanan berpikir yang cukup panjang. Sambutan hangat kami terima. Dengan semangat ia memulai pembicaraan. Berikut cuplikannya:

Ketertarikan pada tembakau tentunya telah berhasil membuat Anda menikmati posisi sebagai seorang *grader*. Sebenarnya, bagaimana mekanisme kerja seorang *grader* tembakau?

Grader itu keahlian. *Grade* itu kelas kualitas. Jadi, *grader* tembakau merupakan kemampuan untuk menentukan kualitas dan kelas tembakau. Tiap pabrik sudah memiliki *grade*-nya sendiri. Jadi, tidak berlaku universal dalam kualitas dan kelas tembakau. Seorang *grader* harus tahu dan paham proses-proses produksi dan pengolahan tembakau terlebih dahulu. Sebagai contoh, mereka sudah tahu bahwa tembakau itu *kemendungan* (tidak terkena sinar matahari secara maksimal) dari warnanya. Tembakau yang *kayemen* (lembab) dari teksturnya. Mekanisme secara umum, tembakau datang dari atas (perkebunan tembakau). Ada orang-orang yang mengambilnya ke sana. Biasanya kalau tembakaunya banyak akan diambil satu sampel, kemudian kita lihat. Kalau tembakaunya sedikit, ya, kita lihat semuanya. Cara memberikan *grade*, dengan membau sudah cukup. Tapi, karena lika-likunya penggarap yang sering mencampurkan bermacam jenis tembakau, baunya jadi aneh. Ini yang membuat sulit. Maka, tembakau perlu dirasakan dengan menghisapnya. Secara umum cukup dibau, dilihat, dan dipegang.

Motivasi apa yang mendorong Anda untuk bekerja dalam dunia tembakau, menjadi seorang *grader*?

Semua itu kebetulan. Tahun 1968, saat saya masih bersekolah di Belanda, mendadak ayah meninggal. Kami, anak-anaknya ditinggali tembakau. Ya, harus bagaimana lagi, saya harus mengambil alih tanggungjawab itu. Namun, usaha keluarga saya sekarang sudah mati. Dulu, kekuatan pabrik dan perantara pedagang itu sama. Tetapi, setelah Orde Baru, kebijakan pemerintah berubah. Kredit untuk pabrik rokok lebih besar. Pabrik rokok pun bisa berkembang pesat. Pedagang tembakau tidak bisa *survive* kalau tidak berafiliasi dengan pabrik. Karena pabrik membeli tembakau sendiri, harganya jadi lebih tinggi dan akhirnya pedagang tidak bisa menyainginya. Hal lain yang membuat saya tertarik, karena tembakau itu adalah seni. Pekerjaan *grader* tembakau itu mirip *grader* anggur, ahli batu, dan ahli barang-barang antik. Ada nilai seninya. Ada rasa senangnya. Kebetulan, saya senang dengan tembakau. Jadi, ketika musim tembakau saya belum puas kalau belum memegang dan mencium bau tembakau. Nah, hidup saya dibiayai dari profesi itu. Kalau tidak ada profesi *grader*, saya *nggak* bisa beli lukisan, ha ha ha.

Apa saja kendala ketika Anda menjalani pekerjaan tersebut?

Pada waktu permulaan, iya, ada kendala. Tapi karena sudah lama, sudah 40 tahun lebih, saya sudah bisa mengatasinya. Tapi, sekarang lebih rumit. Lika-likunya penggarap makin bervariasi dan lebih ribet karena dicampur dengan tembakau luar. *Cilaka*nya, jika penggarap mencampurkan tembakau dengan gula. Awalnya memang tidak ketahuan, tapi setelah dikirim ke pabrik dan disimpan dua atau tiga tahun, mulai kelihatan. Saat musim hujan, tembakau jadi *lonyot* (lembek) dan menggumpal. Jadi bongkokan seperti batu. Kalau dikembalikan, ya, kita yang menanggung rugi. Salah itu manusiawi, tapi ketepatan kita menaksir *grade* tembakau menentukan kepercayaan pabrik.

Sekarang zaman sudah berubah. Keadaan pun menentukan motivasi orang dalam melakukan suatu pekerjaan, demikian pula dengan *grader*. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal itu? Apakah secara pribadi Anda menerapkan nilai-nilai khusus dalam menjalankan profesi itu?

Lain, motivasi *grader* sekarang jelas berbeda. Sekarang lebih mementingkan otomatisasi, efisiensi, dan *pure* bisnis. Kalau dulu, ayah saya sangat senang rembukan dengan petani. Ada kebahagiaan tersendiri ketika mengambil sampel, bertemu petani, berunding dengan petani sampai larut malam. Itu merupakan kesibukan yang menyenangkan. Namun, nilai-nilai tersebut sekarang sudah pudar. Sudah tidak ada daya tarik pribadi. Kalau saya, karena ada unsur hobinya dan ada kepuasan pribadi. Di (pabrik rokok) Djarum sendiri posisi ini dilakukan turun-temurun. Hubungan sudah tidak murni bisnis, tetapi ada hubungan kekeluargaan. Ini sebenarnya masalah kepercayaan. Daripada mempekerjakan orang asing yang sama sekali kita belum tahu. Kepercayaan itu penting.

Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas tembakau di Indonesia? dan tembakau daerah mana yang berkualitas unggul?

Ada kebahagiaan tersendiri ketika mengambil sampel, bertemu petani, berunding dengan petani sampai larut malam.

Dulu tembakau Temanggung dianggap paling mahal, tapi sekarang tidak lagi. Harganya mahal dan kebutuhan pabrik terhadap tembakau ini cukup tinggi, tapi produksi tidak mencukupi. Akibatnya, penggarap-penggarap itu mendatangkan daun dari luar daerah yang lebih murah, kemudian dicampur. Keasliannya sudah hilang, tapi mereka masih menghendaki harga Temanggung. Soal kualitas, masing-masing tembakau punya fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya, tembakau Temanggung 20 persen untuk berat dan Muntilan 5 persen untuk menyatukan rasa.

Faktor apa saja yang memengaruhi kualitas tembakau?

Banyak faktor yang memengaruhi. Kelasnya dibagi menurut tingkatan daun. Kalau daun dipetik sekaligus, hasilnya kurang baik. Daun yang masih muda juga jelek jika dijadikan tembakau. Curah hujan terlalu banyak, pemupukan tidak baik, pencangkulan tanah yang kurang dalam, dan cuaca mendung, berpengaruh juga pada kualitas daun. Masa pengeraman yang terlalu lama juga tidak baik. Perajangan yang tidak rapi, maupun tembakau *kayemen* ketika masuk keranjang juga tidak baik. Faktor lain yang tak kalah penting adalah faktor *mongso*. Tergantung letak tumbuhnya terhadap sinar matahari dan ketinggian tanah. Kalau tempatnya tinggi, *mongso*-nya lebih dulu, daripada yang di bawah. Ada *mongso siji* dan *mongso loro*. Tembakau *mongso siji* disebut tembakau ulu. *Mongso loro* disebut tembakau kawulon, biasanya enteng dan wangi. Tapi kalau sudah *kliwat* (melewati) *mongso*, maka sedapnya kurang, harumnya juga berkurang. *Mongso* itu adalah hitungan jawa, misal *mongso* satu hitungannya satu sampai dua minggu, tapi kurang jelas parameternya. Parameter yang biasa digunakan, ya, parameter pengalaman.

Apakah keaslian rasa tembakau akan berubah setelah masuk pabrik?

Ya, berubah. Pabrik rokok itu seperti koki. Komposisi tiap pabrik juga bermacam-macam. Seperti gado-gado, *kan* ada sayuran ini, sayuran itu. Kalau tembakau ditambah cengkeh, saus, maka hasilnya rasa rokok yang mereknya bermacam-macam itu. Masing-masing rasanya akan lain, karena kokinya juga lain.

Pabrik-pabrik rokok besar di Indonesia paling banyak mengambil tembakau dari daerah mana?

Semua pabrik itu biasanya menggunakan tembakau Madura, sebagai "nasinya" (bahan pokok). Kalau Sampoerna terkadang memakai tembakau Temanggung.

Bagaimana mekanisme distribusi tembakau? Siapa yang paling "memegang kendali" dalam proses itu?

Grader tidak sampai taraf pendistribusian. Kita hanya *nge-grade* (memberi kelas). Untuk distribusi, kendali jelas dipegang pabrik. Tapi, untuk harga tergantung pada *supply and demand* (permintaan dan penawaran). Jika *supply over*, maka harga tidak bisa diatur. Walaupun begitu, yang punya kekuatan tetap pabrik. Jika pabrik tidak membutuhkan, ya, mereka tidak mau beli. Seharusnya, ada keseimbangan antara *supply and demand*, dan yang mengatur itu pemerintah. Entah itu Departemen Pertanian atau siapalah.

Mengambil contoh kestabilan harga gabah yang ditetapkan pemerintah dengan Harga Pokok Pembelian (HPP),

apakah untuk tembakau juga berlaku kontrol harga seperti itu?

Tembakau bukan makanan pokok, jadi tidak ada HPP dari pemerintah. Tapi, sistem kemitraan tetap dilakukan oleh anak saya (yang meneruskan profesi Oei sebagai *grader*). HPP pupuk dan tanah dihargai sesuai standar yang berlaku di pasar.

Sistem kemitraan itu seperti apa?

Petani dipinjami modal oleh pabrik atau *grader* untuk penanaman tembakau. Kelak, hasil produksinya pasti dibeli pemberi modal. Untuk kemitraan, meski dengan standar harga yang lebih murah, jika hasil tembakau kurang baik, kami tetap akan membelinya.

Apakah harga yang ditetapkan untuk petani dalam pembelian tembakau sudah sesuai dengan kualitas tembakau? Karena banyak terdengar suara kalau petani tembakau selalu dipermainkan oleh industri rokok.

Mereka bukannya dipermainkan, itu kembali lagi pada *supply and demand* tadi. Disamping itu, pabrik memiliki kalkulasinya sendiri-sendiri.

Jika kita lihat harga pokok rokok-rokok bermerek populer yang cukup tinggi, apakah bahan bakunya (tembakau) sudah seimbang dengan harga jual rokok tersebut?

Pabrik yang menentukan menurut harga pokoknya, sudah ada kalkulasinya sendiri. Untuk rokok kelas tinggi, tentu harga bahan bakunya akan mahal. Namun, yang dominan membuat harga jual rokok tinggi adalah kebijakan pemerintah mengenai cukai. Ketika daya beli masyarakat berkurang dan pemerintah "berkenan" menaikkan cukainya, pabrik akan salah tingkah. Saingan pabrik rokok itu *kan* banyak. Tidak mungkin pabrik akan menaikkan harga secara drastis, kadang justru rokok itu dijual dengan harga dibawah cukai. *Lha* ini *kan* repot! Peraturan cukai yang lebih tinggi akan mematikan pabrik rokok kecil.

Industri rokok di Indonesia berkembang cukup pesat. Apa implikasi bagi pabrik rokok kecil? terutama rokok-rokok ilegal yang tidak bercukai?

Pabrik rokok yang masih bisa bertahan sampai sekarang hanya pabrik rokok besar. Pabrik kecil bisa dikatakan hidup *enggak*

Namun, yang dominan membuat harga jual rokok tinggi adalah kebijakan pemerintah mengenai cukai. Ketika daya beli masyarakat berkurang dan pemerintah "berkenan" menaikkan cukainya, pabrik akan salah tingkah....Tidak mungkin pabrik akan menaikkan harga secara drastis, kadang justru rokok itu dijual dengan harga dibawah cukai. *Lha* ini *kan* repot! Peraturan cukai yang lebih tinggi akan mematikan pabrik rokok kecil.

mati juga *enggak*. Apalagi, pemerintah sendiri lebih suka dengan pabrik besar karena lebih mudah diatur, misalnya, 'saya (negara) butuh uang sekian, kamu (pabrik rokok besar) *nutupi*, ya!' kalau pabrik kecil *kan* tidak bisa begitu. Kebijakan pemerintah memang tidak menguntungkan pabrik kecil karena mungkin menurut pemerintah, mereka merepotkan. Selain itu, cukai rokok itu paling mudah dikontrol. Karena, jika cukai tidak dibayar, rokok tidak bisa beredar. Ini kadang menguntungkan rokok ilegal yang tidak membayar cukai.

Setelah melalangbuana sebagai *grader* di kawasan Jawa Tengah, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi pertanian di kawasan itu dan di Indonesia pada umumnya?

Kualitasnya menurun. Karena tanahnya tidak pernah istirahat, ditanami terus. Kalau di Amerika, masa penanamannya bergiliran. Berbeda dengan di Indonesia. Ini juga karena pemerintah jarang mengadakan penyuluhan sehingga cara yang digunakan petani mengikuti tradisi. Ketika semua harga naik, harga hasil produksi tidak ikut naik. Padahal, biaya produksi naik. Namun, akhir-akhir ini pihak pabrik sudah mulai melakukan penyuluhan, walau tidak ke semua daerah. Pabrik tetap melakukan riset lebih dulu. Apakah daerah itu akan menguntungkan pabrik atau tidak. Ya, masih lumayan, daripada pemerintah yang kurang bertindak dalam pertanian. Pemerintah hanya mengoptimalkan industrialisasi dengan bahan baku impor.

Berkaitan dengan optimalisasi industrialisasi tadi, apakah pabrik-pabrik rokok di Indonesia mengimpor tembakau dari luar?

Ya, mereka kadang mengimpor, karena impor lebih simpel. Tembakau di sini (Indonesia) banyak yang hancur. Biasanya kita mengimpor dari Cina, Turki, atau Zimbabwe. Namun, produsen tembakau paling besar adalah Cina.

Seberapa jauh kontribusi pabrik rokok besar pada pertanian tembakau di Indonesia?

Kontribusi pabrik rokok paling besar, *ya*, membeli hasil produksi itu (tembakau). Siapa coba yang dapat menyerap hasil produksi petani tembakau selain pabrik? Kalau pabrik tidak membeli hasil produksi, petani tembakau akan hancur. Karena,

yang mampu membeli tembakau dengan harga standar hanya pabrik-pabrik besar. Pabrik-pabrik kecil hanya membeli sedikit. Nafas mereka *kan* kembang-kempis. Beli tembakau *aja* yang apkiran (cacat di antara lainnya). Rokok yang diproduksi juga murah.

Adakah kebijakan khusus dari industri rokok besar dalam upaya pemberdayaan petani tembakau?

Ya, dengan sistem kemitraan itu. Petani juga harus lebih efisien, kualitas produksi dan hasilnya ditingkatkan. Dengan biaya produksi yang sama harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas.

Pedagang tembakau tak bisa bertahan lagi. Pabrik kecil tambah kecil. Yang besar semakin besar. Akhirnya, kapitalisme juga yang mengubah kultur melinting

Menurut Anda, siapakah yang paling berpengaruh terhadap kemajuan pertanian tembakau di Indonesia? Petani, pabrik rokok atau pemerintah?

Semuanya. Petani harus meng-*upgrade* diri, agar tidak terjadi *generation gap*. Teknologi merupakan bagian paling penting yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan pemerintah. Mereka harus memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang sistem pertanian baru kepada para petani. Kasusnya, hal ini susah dilakukan untuk petani-petani tua. Mereka merasa lebih berpengalaman dan menganggap caranya lebih baik sehingga enggan menggunakan teknologi baru. Akhirnya, terjadi *generation gap*. Saya kira, hal ini terjadi dimana-mana, tidak hanya pertanian tembakau saja. Seni pun juga begitu. Sekarang yang lagi *booming* adalah seniman muda. Gurunya, *ya*, cuma melongo. Yang muda pun menganggap dunia tua sudah ketinggalan, tidak bisa kembali lagi. Terakhir industri rokok sendiri. Harga beli tembakau harus sesuai dengan biaya produksi dan seimbang dengan cukai.

Dari pendapat Anda yang mengedepankan teknologi sebagai jalan menuju efisiensi. Menurut Anda, apakah pemerintah akan mengalihkan kebijakan industri rokok, misalnya dengan diversifikasi? Mengingat teknologi kita yang belum secanggih Amerika, misalnya.

Wah, kurang tahu juga. Kalau pemerintah, maunya ambil gampangnya saja. Pokoknya cukai naik, biar lebih gampang. Kalau mau sedikit susah, pemerintah seharusnya menciptakan lapangan kerja baru. Menciptakan alternatif-alternatif lain. Ambil contoh, mereka yang tidak memiliki lahan pertanian, akhirnya akan lari ke sektor jasa. Seperti di Amerika, tiap pabrik membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak. Apalagi dalam bidang komputer dan teknologi informasi, mereka sampai melakukan *outsourcing*. Mencari SDM dari negara lain yang harganya lebih murah, misalnya orang India. Sedangkan, Indonesia malah mengekspor TKW, tenaga kasar paling murah. *Cilaka to*. Kalau zaman dulu, ekspor ke Malaysia adalah guru. Sekarang ekspornya TKW, apa tidak merosot itu?

Dari sejarahnya, aktivitas merokok sudah ada sebelum ada industri rokok. Dulu orang merokok dengan melinting. Setelah adanya industrialisasi, merokok bergeser dari kultur lintingan ke rokok pabrikan. Menurut Anda, kekuatan apa yang mengubahnya?

Kekuatan kapital yang mengubahanya. *Tingwe* (*linting dhewe*-melinting sendiri) merupakan cara merokok yang sangat tradisional. Tidak ada promosi. Tidak ada *brand*. Tapi kemudian, perkembangan ekonomi mulai mengenalkan *brand*. Akhirnya, jadi seperti Amerika. Tak cuma melinting yang punah, pabrik-pabrik rokok kecil juga tergusur. Cuma pabrik besar yang hidup, seperti Phillip Morris, BAT, Samavac. Pabrik-pabrik kecil tak ada lagi. Tidak ada! Mati semua dikalahkan yang besar. Mungkin di Indonesia lama-lama juga akan seperti itu. Pedagang tembakau tak bisa bertahan lagi. Pabrik kecil tambah kecil. Yang besar semakin besar. Akhirnya, kapitalisme juga yang mengubah kultur melinting.

Menurut Anda, apa motivasi orang beralih dari melinting ke konsumsi rokok pabrikan?

Saya kira begini, orang sekarang maunya yang praktis. Semuanya seperti di-*mild*. Contoh lain, sekarang ini orang bekerja serba cepat. Apalagi setelah adanya *handphone*. Lama-lama telepon rumah tidak laku. Inilah perubahan budaya. Orang maunya makin enak. Perkembangan teknologi sangat berperan di sini. Karena pergeseran kebiasaan dan pergeseran cara hidup, badan kita ikut menyesuaikan. Itu evolusi biologis. Mungkin, lama-lama kalau orang ingin kenyang sudah *ndak* usah makan. Cukup dengan makan tablet. Jadi *cepet kan* makannya. Tak usah repot-repot masak. Merokok juga begitu. Tak usah repot-repot melinting. Langsung beli yang sudah jadi bikinan pabrik biar cepat.

Walaupun terjadi industrialisasi besar-besaran, aktivitas melinting masih dilakukan sebagian orang, terutama orang tua. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?

Orang-orang tua yang masih melinting itu *kan* kebanyakan pemikirannya masih primitif. Mereka itu orang-orang *lawas* (lama). Belum sempat berpikir maju. Selain itu, biasanya mereka tak merasa *mantep* kalau menghisap rokok pabrikan. Mereka sudah terlanjur terbiasa dengan melinting. Kalau tidak melinting, tak bisa merasakan nikmatnya tembakau asli. Dan, rokok pabrikan itu *kan* tembakaunya sudah di-*blending* (diramu dengan komposisi cengkeh dan saus). Ya, *biarin aja*, kalau mereka masih mempertahankan melinting.

Kultur melinting semakin punah di era globalisasi ini. Menurut Anda, apakah kultur melinting masih pantas dipertahankan di tengah derasnya arus industrialisasi?

Pantas atau tidak ya? sekarang ini sulit kalau mau melinting. Melinting itu *kan* membutuhkan *klobot* (kulit jagung). Padahal, sekarang ini sulit untuk mendapatkan *klobot*. Petani sudah jarang menanam jagung. *Wong*, harganya murah. Siapa yang mau menanam? Lahan pertanian juga semakin sempit. Padahal, selain kulitnya, jagung dapat digunakan sebagai bahan energi alternatif *biofuel*. Apalagi, sekarang minyak langka. Tapi, pemerintah tak pernah memedulikan pertanian jagung. Maka, semakin jarang pula orang melinting. Sebenarnya melinting, ya, pantas-pantas *aja*. *Malahan* di desa, melinting sudah menjadi kultur kearifan lokal. []

Paradoks Oei dalam Harmoni

Achmad Choirudin

Tak semua orang dapat menjalani dua profesi yang eksistensinya saling bertentangan. Oei Hong Djien adalah salah satu dari mereka. Selain sebagai pakar penakar kualitas tembakau, pria ini juga seorang praktisi medis. Ya, inilah dua profesi yang kontradiktif tersebut *grader* dan dokter. Melihat profesi *grader*, orang kebanyakan pasti beranggapan bahwa mereka perokok aktif. Ini tak berlaku pada seorang Oei Hong Djien. Ia bukanlah perokok aktif. Ini tentunya berkaitan dengan profesinya di sisi lain, yaitu sebagai dokter.

Dari perspektif medis, merokok adalah suatu aktivitas yang dipandang negatif. Itu pun ditegaskan dalam label peringatan di setiap bungkus rokok: "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin". Sebagai seorang yang berlatarbelakang akademis medis, wacana itu pasti tak asing baginya. Khalayak umum beranggapan bahwa seorang dokter mengasingkan diri dari rokok. Pantang bagi dokter untuk merokok. Dunia medis senantiasa digambarkan sebagai ranah yang terhormat dan otoritatif di masyarakat. Dan, seorang dokter kerap diposisikan sebagai teladan

Kontradiksi paradoksal tersebut tak berlaku bagi Oei. Grader dan dokter dapat didamaikan dan berjalan serasi.

dalam pelbagai hal. Namun, bagaimana jika dokter tersebut menduakan naluri untuk dunia tembakau dan rokok yang dipandang serba negatif oleh dunia medisnya?

Grader adalah profesi yang tak dapat dipisahkan dari tembakau dan rokok, bak api dengan panasnya, atau samudra dengan ombaknya. Aktivitasnya dalam menakar kualitas tembakau pun tak jarang menuntut sosok beretnis Tiong Hoa ini untuk menghisap tembakau demi mengecap cita rasanya. Walaupun tak selalu, cita rasa suatu tembakau menunjukkan kualitasnya. Lebih dari itu, setiap merek rokok pasti memiliki cita rasa khas tersendiri. Cita rasa khas inilah yang mengharuskan *grader* untuk tak sekadar memandang, memegang, dan membau tembakau. Menghisapnya adalah suatu tuntutan. Sekilas, hal ini adalah suatu kewajaran *grader* merokok. Namun, akan timbul suatu paradoks, ketika yang merokok tersebut adalah seorang dokter.

Kontradiksi paradoksal tersebut tak berlaku bagi Oei. Grader dan dokter dapat didamaikan dan berjalan serasi. Melihatnya merokok, sejenak kita akan beranggapan bahwa Oei mengingkari naluri sebagai dokter. Memandangnya sebagai dokter, seolah dia melanggar etika dunia medis karena aktif sebagai *grader*. Namun, naluri *grader* juga telah terkonstruksi di alam bawah sadarnya. Artinya, dua naluri yang kontradiktif dapat berkoeksistensi dalam diri Oei. Dan, ia menikmatinya.

Naluri *grader* tertanam dalam dirinya setelah lama bergelut dengan dunia medis. Jauh hari sebelum melangkahkan kakinya di dunia tembakau, Oei telah berprofesi sebagai dokter. Sedikit mengenang masa lalu Oei, setelah mendapatkan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ia segera mengabdikan ilmunya kepada masyarakat. Ia menjadi dokter relawan di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Satu hal lagi yang menarik dalam diri Oei. Ia memilih untuk mengamalkan ilmu kedokterannya secara sukarela melalui Layanan Kesehatan Katolik selama dua tahun di Magelang (1964-1966).

"Pada waktu itu Magelang dan Temanggung kekurangan tenaga medis dan dokter. Lantas saya ditarik oleh jaringan teman-teman Katolik yang ada di sini untuk jadi volunter," ungkapnya. Pilihannya ini diambil karena dokter baginya adalah panggilan kemanusiaan. "Apalagi dulu banyak penyakit yang diderita masyarakat desa, seperti malaria dan TBC," tegasnya. Kesadaran seperti ini jarang kita temui pada diri dokter pada umumnya. Kepekaannya terhadap kondisi realitas masyarakat desa yang mayoritas bergolongan ekonomi rendah telah terlatih sejak kecil.

Usaha tembakau ayahnya menjadikan rumahnya sering dipenuhi petani tembakau ketika musim panen. Mereka adalah petani yang menjual tembakau kepada ayahnya. Tak jarang, mereka menghabiskan beberapa hari untuk tinggal di rumahnya. "Dulu *kan* belum banyak kendaraan. Para petani sering menginap di sini karena rumahnya jauh," jelas Oei. Proses ini mengawali keakrabannya dalam bergaul dengan masyarakat desa dan petani. Karena itu, naluri keberpihakannya pada petani senantiasa terpelihara.

Setelah beberapa tahun mengabdikan dirinya kepada masyarakat, Oei berangkat ke Belanda untuk menempuh program magister ilmu anatomi di The Catholic University, Nijmegen. Ketika masih ingin belajar di sana, tiba-tiba ayahnya meninggal. Tak urung, takdir ini mengharuskan Oei meninggalkan Belanda. Ia menginjakkan kaki ke tanah air dengan membawa gelar ahli patologi anatomi dan kesedihan. Setibanya di rumah, ayahnya mewariskan beberapa gudang tembakau. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Oei meneruskan usaha almarhum ayahnya.

Latar belakang akademisnya terlihat jelas tak berkolerasi secara logis dengan usaha yang dilakoninya tersebut. Seorang dokter dan ahli patologi anatomi berbisnis tembakau. Sekilas, terasa lucu. Namun, Oei melakoni dua profesi yang tampak saling bermusuhan tersebut tanpa "kete-

gangan". Baginya, semua itu terjadi tanpa kesengajaan. "Hidup ini *kan* kebetulan. Saya mengalir saja," ujarnya. Hidup ini bak aliran sungai dan ombak di laut, senantiasa bergerak. Tak harus terpaku pada satu aras.

Naluri sebagai dokter tak menghalangi langkahnya di dunia tembakau. Bahkan, keduanya bisa saling mendukung. Eksistensi di jagad tembakau semakin meneguhkan jiwa sosialnya. Sukses berusaha dalam bidang tembakau tak menghentikan naluri sosialnya mengamalkan ilmu medis. Malah sebaliknya, Dokter Oei tetap melanjutkan aktivitas sebagai relawan. Kali ini di Temanggung. Setelah 23 tahun jadi relawan di daerah Temanggung (1968-1991), Oei melepaskan ikatan organisasionalnya dari Layanan Kesehatan Katolik Jawa Tengah. Namun, tak berarti ia berhenti beramal. Oei tetap melayani pasien yang membutuhkan uluran tangannya di rumah.

"Saya sudah mendapat rezeki 'cukup' dari tembakau. Saya gunakan ilmu kedokteran saya untuk *ngamal* saja," tuturnya. Walaupun Oei berasal dari kelas ekonomi mapan, namun dia tak pernah membatasi diri dalam pergaulan. Profesi sebagai dokter semakin mendekatkannya pada semua orang. Baginya, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. "Jadi orang yang penting bisa diterima di mana saja," tambahnya. Usaha tembakau turut menyemaikan epistemologi egaliternya. Inilah yang mengantarkan Oei dekat dengan petani.

Tentang naluri panggilan kemanusiaan dalam mengobati orang, Oei menceritakan kejadian-kejadian yang tak akan pernah ia lupakan. Tak jarang ketika hari telah larut malam, ada orang menggedor-gedor pintu rumahnya untuk berobat. Dengan penuh keikhlasan, Oei pun melayaninya. Apalagi dulu keberadaan dokter masih jarang di daerahnya. "Dokter di sini sudah tua-tua, *nggak* mungkin melayani malam-malam," kenangnya.

Meskipun seorang *grader*, tak berarti Oei mengizinkan begitu saja pasiennya merokok, apabila memang membahayakan kondisi kesehatannya. Anggapan bahwa merokok dapat merugikan kesehatan tak disalahkan oleh dokter lulusan UI ini. Ya, tembakau adalah tanaman yang mengandung nikotin, substansi adiktif yang selama ini ditengarai berdampak buruk bagi kesehatan seseorang.

Alasan ini juga turut menjaganya untuk tidak memilih menjadi perokok aktif. Merokok hanya dilakoninya ketika menakar kualitas tembakau. Ini pun tak selalu. Seringkali ketika menentukan *grade* tembakau, Oei tak perlu menghisapnya. Cukup dengan melihat, memegang, dan membau, kualitas tembakau dapat ditentukan oleh *grader* senior ini.
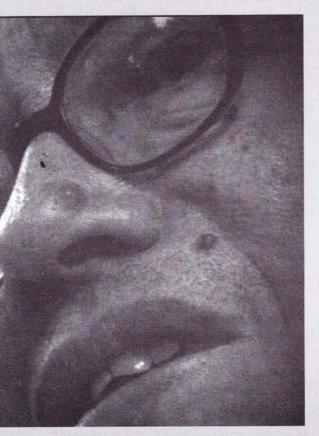
Namun, Oei mempunyai pendapat lain soal merokok selain untuk mengetahui kualitas dan cita rasa tembakau. Bagi Oei, merokok adalah aktivitas yang dapat mengakrabkan pergaulan. Hal ini dibuktikan ketika dia bercengkerama dengan teman-temannya. Di sini, merokok mempunyai nilai lebih dari sekadar "merokok". Rokok adalah benda yang mempunyai daya rekat tersendiri dalam interaksi antarsesama. Oei pun mengamininya, "Ketika kumpul sama teman-teman yang perokok aktif, saya juga mengimbangi mereka." Ketika merokok, dia membantah naluri praktisi medis dan etika medis. Oei juga mengungkapkan, tak semua dokter mengasingkan diri dari rokok. "Banyak juga *kok* dokter yang merokok," katanya. Lalu, bagaimana dengan wacana bahaya merokok tadi? Serta posisi teladan dokter di tengah masyarakat?

"Kalau pabrik rokok ditutup, berapa jumlah pengangguran bertambah di bangsa ini?"

Menurut Oei, ketika dokter merokok tak berarti mereka mengingkari naluri medisnya. "Memang benar merokok itu dapat merugikan kesehatan, tapi cuma salah satu faktor," imbuhnya. Merokok hanya salah satu dari sekian faktor yang memengaruhi kesehatan jasmani. Ada beberapa faktor lain yang lebih berbahaya dari merokok. Gen, gaya hidup, dan kondisi psikologis adalah faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam hal kesehatan.

Genetika adalah unsur terpenting. Begitu banyak orang tua yang telah merokok puluhan tahun, dari kecil hingga tua, namun tak mempunyai permasalahan kesehatan yang berarti. "Kakeknya teman saya itu merokoknya *nyepur* (merokok secara terus-menerus), padahal umurnya sudah '90-an. Tapi, beliau sehat-sehat saja," cerita Oei. Menarik ketika melihat pribadi-pribadi yang tetap "semangat" merokok, tapi kesehatannya baik-baik saja. "Kalau orang tidak mempunyai bibit kanker, jantung koroner, atau hipertensi, merokok sepuasnya, ya, tak masalah," tegasnya. Argumen ini tentunya dapat membantah perspektif medis populer tentang merokok. Perspektif yang telah tertanam pada pikiran kebanyakan orang ini menganggap bahwa merokok adalah penyebab utama tumbuhnya suatu penyakit dalam tubuh seseorang.

Kedua, gaya hidup adalah faktor yang tak kalah penting. Gaya hidup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola makan seseorang. Oei menjelaskan, pola makan sehari-hari berpotensi besar dalam menentukan seseorang sehat atau tidak. Zaman yang serba modern ini membawa manusia cenderung hidup instan. Pun dengan pola makan. "*Junk food* dan *fast food* menjadi kegemaran orang. Padahal, ini sangat berbahaya untuk kesehatan," tegas Oei. Oei menambahkan, perkembangan teknologi juga turut menggiring manusia untuk hidup instan. Seperti yang dikatakannya, "Sekarang ini, orang kalau mau apa-apa tinggal membuka lemari es. Naik mobil *aja* kalau tidak ada AC-nya juga tak mau."

Ketiga, kesehatan jasmani seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Padatnya aktivitas tak jarang menghantarkan seseorang memasuki fase stres. Stres mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kinerja organ tubuh dalam artian negatif.

Ketika kinerja organ tubuh tak normal, tentu berpotensi menyemaikan pelbagai kondisi patologis. Lalu, tak jarang orang berusaha mengurangi stres dengan merokok. "Merokok, *kok*, *nggak* boleh, kalau stres *kan* merokok malah jadi obatnya," gurau Oei.

Argumen-argumen di atas semakin menguatkan anggapan bahwa merokok bukanlah satu-satunya musuh dunia medis. Namun, wacana yang berkembang seakan menyatakan rokok adalah musuh utama kesehatan. Selama ini, pandangan yang terbangun seperti meniscayakan dampak buruk merokok terhadap kesehatan. Keniscayaan ini pun seolah menjadi mitos.

Menurut Oei, memang ada pihak yang sengaja melebih-lebihkan wacana ini. Pihak tersebut merasakan semacam ketakutan akan meraksasanya pabrik-pabrik rokok. Besarnya modal yang ada pada industri rokok menjadi alasan ketakutan ini. Semakin besar industri rokok mengisyaratkan berlakunya kapitalisme. Penguasaan modal oleh para pemilik pabrik rokoklah yang ditakuti pihak tersebut. "Pihak tersebut bisa saja adalah pemerintah," ungkap Oei.

"Kita tahu sendiri bagaimana kelakuan pejabat-pejabat pemerintah di atas. KKN merajalela," imbuhnya. Kiranya pemerintahan yang korup akan dapat mudah dibeli oleh mereka yang menguasai industri rokok. Begitulah Oei membaca hegemoni wacana negatif merokok. Pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang medis, dunia tembakau, dan industri rokok menjadi landasan analisisnya. Ketika wacana negatif rokok telah begitu kuat terbangun di masyarakat, industri rokok akan sulit berkembang. Maka, mereka tak dapat membeli para pejabat dalam hal-hal tertentu.

Meskipun wacana ini telah menghegemoni di masyarakat, sulit untuk menghentikan meraksasanya industri rokok. Masyarakat Indonesia yang mayoritas petani akan menjadi penghalang pertama. Ditambah besarnya tenaga kerja yang diserap industri ini. "Kalau pabrik rokok ditutup, berapa jumlah pengangguran bertambah di bangsa ini?" ujar Oei. Disamping itu, cukai rokok adalah salah satu sumber pendapatan utama negara.

Lantas, mengapa pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan merokok? Oei pun menjelaskan, "Itu *kan* strategi pemerintah untuk menaikkan cukai." Ketika *image* negatif rokok telah tersemaikan dalam opini publik, pemerintah akan dengan mudah melakukan pembatasan. Pabrik rokok yang ingin melangsungkan usahanya dengan penambahan produksi harus membayar cukai yang tinggi. "Ya, strategi yang cukup jitu dari pemerintah," tandasnya.

Regulasi tentang pembatasan aktivitas merokok di tempat umum telah diberlakukan di DKI Jakarta sejak 2008. Selang beberapa bulan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sama. Polemik di kalangan masyarakat pun tak tertahankan. Isu kesehatan menjadi premis utama diberlakukannya regulasi tersebut.

Oei pun angkat bicara tentang polemik itu. Menurut Oei, tak salah ketika regulasi ini diterapkan dengan alasan kesehatan. "Merokok memang dapat merugikan kesehatan. Tapi, ada faktor yang lebih berbahaya. Faktor genetika, gaya hidup, dan kondisi psikologis," ulangnya. Artinya, kita dituntut untuk bijaksana dan tidak menempatkan merokok pada faktor utama penyebab tumbuhnya penyakit.

Oei juga menjelaskan, makanan yang berbahan pengawet, mengandung boraks dan formalin mempunyai kedudukan setara dengan rokok ketika sama-sama dipandang dari perspektif medis. Tapi, pemerintah tak membatasi pengkonsumsian makanan-makanan tersebut. "Itu tak adil bagi rokok," tegasnya. Argumen ini semakin menguatkan adanya strategi pemerintah dalam menaikkan cukai rokok.

Wacana pun beralih. Legitimasi regulasi ini akhirnya digiring ke ranah Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa merokok dapat melanggar hak asasi orang lain. "Itu memang benar. Ketika ada orang merokok, maka orang lain disekitarnya akan terserang dampaknya, menjadi perokok pasif," ungkapnya. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Oei menganggap logis alasan ini.

Oei berpendapat, kalau merokok melanggar HAM, berarti aktivitas lain yang mengganggu orang lain melanggar HAM pula. "Suara adzan dari *speaker* masjid waktu subuh yang membangunkan orang tidur, melanggar HAM juga *dong*! Tidak hanya orang Islam *kan* yang mendengarnya?" ujarnya. Sampai di sini, rokok telah mendapatkan dua kali ketidakadilan dalam penempatannya di ruang publik.

Industri rokok tak tinggal diam menghadapi kebijakan diberlakukannya regulasi ini. Dengan penuh "semangat", industri rokok menjadi sponsor penggodokan RUU pembatasan merokok di DIY. Adalah PT HM Sampoerna, Tbk. yang menjadi sponsor dalam agenda Pemda DIY tersebut. Oei mengungkapkan, tindakan industri rokok mensponsori penggodokan RUU area bebas rokok adalah strategi untuk mempertahankan produksi. Dengan memfasilitasi kegiatan penggodokan RUU tersebut, secara tidak langsung pabrik rokok akan tetap memegang posisi tawar.

Itu kan strategi pemerintah untuk menaikkan cukai. Ketika *image* negatif rokok telah tersemaikan dalam opini publik, pemerintah akan dengan mudah melakukan pembatasan. Pabrik rokok yang ingin melangsungkan usahanya dengan penambahan produksi harus membayar cukai yang tinggi.

Oei juga menambahkan, regulasi semacam itu belum relevan diterapkan di Indonesia. Mengingat industri rokok adalah sumber kesejahteraan penting bagi masyarakat; penyerapan tenaga kerja serta penyerapan produk pertanian. Pun sebagai sumber pendapatan pemerintah dengan cukainya. "Pembatasan seperti itu *oke* diberlakukan di negara yang tak mempunyai lahan pertanian tembakau, seperti Singapura," ungkapnya. Pembatasan di negara-negara tersebut tak banyak menuai kontroversi karena tak banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri rokok dan pertanian tembakau.

Lain halnya di Indonesia. Ketika pemerintah ingin membatasi aktivitas merokok, harus dipertimbangkan matang-matang konsekuensinya. Peraturan itu akan berdampak negatif terhadap produktivitas industri rokok. Pabrik-pabrik rokok akan mengurangi jumlah produksinya. Konsekuensinya, pengurangan jumlah buruh dan pembatasan pembelian bahan baku menjadi harga mati. Oei mengatakan, pemerintah harus mengalihkan komoditi pertanian tembakau ke tanaman lain jika suatu hari nanti merokok harus benar-benar dibatasi. Dan, harus ada industri alternatif untuk menampung jutaan buruh dan karyawan pabrik rokok. "Tanpa kebijakan semacam ini, pembatasan merokok tak dapat diberlakukan di Indonesia," tegasnya.

Bicara tentang regulasi ini, Oei punya pandangan lain. Baginya, regulasi apa pun di Indonesia tak penting untuk diperdebatkan. Hal pertama yang harus ditegaskan adalah pemberlakuan regulasi yang konsisten. Lemahnya peradilan di Indonesia pun diungkapkan Oei. "Sebelum debat masalah Undang-Undang, pikirkan dulu, bakal ditaati atau tidak," katanya. Penekanan pada substansi menjadi amat penting dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Artinya, hukum dibuat untuk ditaati, bukan diperdebatkan atau diingkari. "Menyelesaikan peredaran narkoba saja tidak bisa, *kok* mau membatasi merokok. Coba lihat, di Jakarta itu kira-kira peraturan area bebas rokok ditaati atau tidak?" tambahnya.

Sebagai warga negara Indonesia, Oei telah merasakan manis-pahitnya pelbagai pemerintahan. Ayah dari dua anak ini telah mengalami pergantian pemerintahan beberapa kali. Mulai dari pemerintahan Soekarno hingga sekarang dibawah Susilo Bambang Yudhoyono. Baginya, pemerintahan yang paling tegas adalah zaman Soekarno. Oei menaruh kesan mendalam pada sosok presiden pertama bangsa ini. "Saya benar-benar merasakan kedisiplinan pelaksanaan peraturan perundang-undangan selama pemerintahan Presiden Soekarno," kenangnya.

Kesannya pada Soekarno bertambah ketika Oei berada dalam dunia seni. "Soekarno itu juga senang sama lukisan," ungkapnya. Jika sebagai dokter, Oei menduakan naluri instingnya ke dunia tembakau. Ternyata, ia juga berselingkuh dengan lukisan. Oei pun mendapat gelar maestro dalam aras kesenian Indonesia. Sebagai *grader*, ia menganggap *skill*-nya sebagai *masterpiece*. Sebagai dokter, ia menjalaninya sebagai tindakan beramal dan panggilan kemanusiaan. Nah, sebagai kolektor ternama, ia memaknainya sebagai hobi. Ketiganya berjalan beriringan tanpa ketegangan.

Sore itu 6 Mei 2008, dengan ditemani gemerincik hujan, Oei mengajak untuk menikmati keindahan koleksi lukisannya. Dua museum tak cukup untuk menampung jumlah koleksi sang maestro ini. Di sana terdapat beberapa lukisan yang menampilkan tembakau serta rokok. Di tembok depan museumnya yang berisi lukisan *old master*, tergambar tanaman andalan masyarakat petani Magelang dan Temanggung itu.

Di antara koleksi lukisan Oei, ada satu lukisan yang cukup menggelitik. Lukisan itu termatrakan dalam dimensi fisik yang tidak biasa, deret sekuensial lukisan tujuh batang rokok yang berturutan secara kronologis. Lukisan itu menggambarkan puntung rokok yang kian meniada dan menghadirkan kepulan partikel bebas berbentuk siluet tubuh wanita dalam lekuk-lekuk yang mendaraskan sensualitas. Ketika ditanya mengenai pendapatnya, Oei dengan ringan berujar, "kalau laki-laki sudah tidak membayangkan perempuan, ia pasti tidak normal! Ha ha ha."

Walau terkesan bermain-main, pernyataan ini sesungguhnya menjelaskan posisi seorang Oei. Posisi yang kiranya mengizinkan dirinya untuk menjalani kehidupan dalam ranah-ranah yang paradoksal, tanpa harus tersiksa oleh ketegangan. Sebagai seorang dokter, Oei bermesraan dengan ranah medis yang tentu bermusuhan dengan ranah tembakau. Namun, ranah tembakau juga digaulinya dengan penuh kemesraan saat ia sebagai *grader*. Ranah medis dan tembakau tak saling mengasingkan dalam pribadi Oei.

Betapa sering manusia jadi terasing dari pribadinya ketika membiarkan dirinya terikat pada konstruksi-konstruksi yang ia ciptakan. Feuerbach dalam *Menalar Tuhan* karya Franz Magnis Suseno pernah dengan masygul meratapi penghambaan manusia pada proyeksi-proyeksi mereka. Narasi negatif tentang rokok menuntut manusia untuk menistakan aktivitas merokok, betapapun dulu ia pernah begitu intim dengannya. Manusia berupaya mengingkari sensualitas atas nama ideal yang ia panggil sebagai "moral".

Oei bukanlah pribadi yang masuk dalam golongan manusia seperti itu. Ia bangkit sebagai pribadi yang tak mau diperhambakan oleh konstruksi-konstruksi itu. Ia lebih memilih jalan kejujuran. Ia jujur ketika mencintai profesinya sebagai seorang *grader*. Ia tulus ketika membaktikan ilmunya sebagai seorang dokter. Ia pun bergairah ketika bergumul dengan dunia seni sebagai seorang kurator. Oei tidak berupaya mengingkari yang satu atas yang lain. Dengan ini, Oei mengafirmasi *liyaning liyan* (keberadaan yang lain). Karena, hidup senantiasa adalah ayat-ayat yang menunda pemaknaan. Baginya, hidup senantiasa adalah aliran, bukan tujuan. Itulah mengapa Oei bisa berdamai dengan panggilan-panggilannya. Kita pun bisa belajar berdamai, baik dengan diri kita sendiri juga dengan sesama, ketika kita berkata "ya" pada keberagaman.[]

Kanvas Kehidupan Sang Grader

Hellatsani Widya Ramadhani

Di depan rumah berpagar batu-bata itu tak tampak sesuatu yang istimewa. Rumah di kawasan elit Kawasan Magelang itu tampak lengang, di teras hanya ada pria kekar berkumis dan satpam berperawakan sedang. Sesekali anjing hitam menyalak galak memecah sepi, seakan siaga menjaga bermacam benda seni berharga milik tuannya, seorang *grader*. Sesaat kemudian, pria berparas Tionghoa keluar dari pintu. Oei Hong Djien, sang empunya rumah keluar sambil berkacak pinggang.

Oei Hong Djien yang kerap disapa Oei ini melewati masa kecil dalam tenangnya kota Magelang. Oei kecil mengenyam pendidikan dasar di Chong Hoa Hsiao Siao, sekolah setaraf SD bentukan orang-orang keturunan Cina dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantarnya. Mutu pendidikan yang ala kadarnya memunculkan keprihatinan sang ayah, Oei Kok Hie. Maka, ia dipindahkan ke Semarang dan tinggal bersama Emi, bibinya, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bagi pria kelahiran 5 April 1939 ini, Emi adalah sosok pengganti ibu yang telah meninggal saat ia berumur tiga tahun. Ibunya, Tjan Marie Giam Nio, meninggal karena sakit.

Usaha sang ayah sebagai distributor tembakau (membeli tembakau dari para petani lalu menjualnya ke perusahaan rokok) mengakrabkan Oei dengan tumbuhan ini. Walau begitu, ia sempat tak menyukai tembakau. "Waktu kecil saya takut melihat tembakau. Aneh, warnanya *kok* cokelat," kenangnya. Dulu, para petani tembakau sering menginap di rumahnya untuk berunding tentang harga. Kedekatan Oei dengan mereka membuatnya terbiasa dengan tumbuhan ini. Rasa takutnya pun berangsur memudar.

Usai menyelesaikan pendidikan dasarnya di Semarang, anak kedua dari tiga bersaudara ini hijrah ke Jakarta dan bersekolah di SMP Katolik Aloysius. Ia tinggal bersama paman yang anak-anaknya sekolah di luar kota. Akhir kelas dua, Oei memutuskan pindah karena rumah itu penuh sesak dengan kepulangan semua sepupunya.

Satu-satunya jalan jika ia masih ingin bersekolah di Jakarta adalah tinggal di asrama. "Saya *nggak* mau tinggal di asrama. *Nggak* suka," ujarnya. Karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Bandung. Di sana, ia tinggal bersama salah seorang pamannya. Oei melewati masa remajanya hingga lulus SMA di kota ini.

Di Kota Kembang inilah kemampuan berorganisasinya berkembang, terutama di bidang kesenian. Setiap ada perkumpulan pemuda-pemudi, Oei muda menjabat ketua bagian kesenian. "Hidup pada waktu itu adalah masa yang paling saya sukai. Masih bebas, tidak ada pikiran," kisahnya.

Setamat SMA, hidupnya kian berwarna dengan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dosen yang dekat dengan Oei menawarinya untuk melanjutkan studi ke Universitas Katolik Nijmegen, Belanda, Bidang Patologi Anatomi. "Kata dosen, penglihatan saya bagus. Saya mempunyai bakat alam menjadi Patolog Anatomi," paparnya kala disinggung alasannya memilih bidang ini.

Ia menuturkan, masyarakat Indonesia tak begitu sadar akan pentingnya patologi anatomi. Sedangkan di luar negeri, bidang ini dianggap penting. Tidak ada bagian tubuh yang boleh dipotong ataupun dihilangkan tanpa diperiksa seorang patolog anatomi lebih dulu. Kanker atau tumor adalah contoh umumnya. "Ari-ari bayi yang baru lahir juga diperiksa," katanya. Semua klinik di sana bekerjasama dengan patolog anatomi untuk memberikan diagnosis yang tepat. Seseorang yang meninggal mendadak tanpa diketahui penyakitnya juga ditangani spesialis ini. Perbedaan bidang ini dengan forensik dijelaskan oleh Oei, "Forensik digunakan untuk memeriksa orang yang mati karena tindak kriminal."

Sepeninggal ayahnya pada 1968, Oei yang waktu itu tengah belajar di Belanda terpaksa pulang. "Kakak dan adik saya sudah menikah, karena saya masih bujangan maka saya yang mengambil alih usaha ini," kisahnya. Namun, usaha keluarga ini gulung tikar saat pabrik rokok mulai membeli tembakau langsung dari petani.

Hingga awal '90-an, suka-duka telah ia rasakan selama menggeluti usaha ini. Menjadi *grader* menorehkan kesan tersendiri bagi Oei, "Tembakau itu tidak ada duanya." Menurutnya, ada rasa senang saat bergumul dengan tembakau. Terdapat pula unsur seni di dalamnya. Ia menambahkan, orang yang sudah bekerja untuk tembakau biasanya malas untuk bekerja lainnya. Dukanya, jika tembakau yang rusak dikembalikan sehingga ia harus menanggung rugi.

Lama bergelut dengan tembakau membuat Oei mahir mencicipi dan memilah tembakau sesuai kualitasnya. Kemahirannya itu yang mengantarkan Oei menjadi *grader* PT Djarum, pada 1979. Meskipun begitu, ia tidak memungkiri adanya faktor kekeluargaan. "Yang punya Djarum itu adik ipar saya," ungkapnya.

Menjadi *grader* yang handal butuh proses. Awalnya, Oei sering melakukan kesalahan dalam mengevaluasi tembakau. Namun, ala bisa karena biasa. Lambat laun ia pun hafal dengan tembakau-tembakau yang harus diklasifikasikan. "Saya belajar menjadi *grader* dari tangan kanan ayah saya, Sumarmi," tuturnya.

Selain tembakau, Oei juga akrab dengan lukisan. Sejak kecil ia terbiasa melihat lukisan peninggalan Belanda milik ayahnya. Hal ini turut membentuk Oei sebagai pribadi yang mencintai seni. Oei tak pernah jauh dari benda seni. Kecintaan terhadap seni dibuktikan dengan usahanya yang tidak main-main untuk mendapatkan lukisan yang ia inginkan. Bahkan, ia acap kali memburunya hingga ke luar negeri.

Kala itu Yoseas Leao, Duta Besar Brazil yang bertugas di Indonesia, senang mengoleksi lukisan karya seniman ternama seperti Affandi, Widayat, dan Sudjojono. Setelah menyelesaikan tugas, ia kembali ke negara asalnya memboyong serta lukisan itu. Sayang, setelah ia meninggal lukisan-lukisan itu tidak terawat dan akan dilelang. Berita ini sampai juga ke telinga Oei. Ia langsung terbang ke Rio de Jeneiro, Brazil, untuk mengikuti pelelangan dan berhasil membawa pulang dua puluh lukisan.

Demi mendapatkan lukisan yang berkualitas, Oei tak sekadar mendatangi pameran. Ia bahkan mendatangi langsung rumah pelukis. Oei pernah menyambangi Affandi, sang maestro ekspresionisme, di sanggarnya. Ia rela menunggu berjam-jam mengamati seniman favoritnya itu melukis. Alhasil, Affandi tersentuh dengan kerelaan Oei. Ia memperbolehkan Oei mendapatkan karyanya dengan mencicil jika memang saat itu ia tidak punya uang.

Oei mengagumi pelukis senior seperti Affandi, Basoeki Abdullah, Hendra Gunawan, Lee Man Fong, S. Sudjojono, serta Widayat. Namun, karya pelukis muda seperti Dadang Christanto, Entang Wiharso, I Made Djirna,

Sebuah lukisan dikatakan menarik jika bisa membuat seluruh tubuhnya merinding dan enggan meninggalkan lukisan itu

Ivan Sagito serta Nasirun juga menjadi favoritnya. Oei tak mempermasalahkan senioritas pelukis. Sebuah lukisan dikatakan menarik jika bisa membuat seluruh tubuhnya merinding dan enggan meninggalkan lukisan itu.

Kegandrungannya akan seni tak sebatas lukisan, ia pun menyukai patung. Edi Sunarso, G. Sidharta, Nyoman Nuarta, dan Sunaryo adalah sederet nama perupa yang ia gemari. Karya-karya pematung muda seperti Rudi Mantovani, Syahrizal, serta Yusran Martunis juga ia miliki.

Sebagai kolektor, pengagum Soekarno ini memiliki lebih dari seribu lukisan yang 25 persennya disimpan di museum pribadi. Bangunan di belakang rumahnya ini memang sengaja dibuat untuk menampung koleksi benda seninya. Museum yang dibangun tahun 1997 di atas tanah seluas 200 m^2 ini tidak dibuka untuk umum. Namun, masyarakat umum tetap diperbolehkan berkunjung jika sudah membuat janji. Museum ini kerap menjadi rujukan para kolektor asing. Selain para kolektor, tetangga sekitar juga sering berkunjung ke museumnya.

"Jika Soekarno masih hidup, beliau pasti datang ke sini," kelakarnya. Oei memang mengagumi presiden Indonesia pertama ini. "Beliau pribadi yang mengesankan dan mempunyai jiwa seni," tegasnya. Selain "Sang Singa Podium", ia juga mengidolakan Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur adalah sosok yang orisinal.

Konsep museum ini bukan hanya hasil pikirannya, banyak orang terlibat. Mereka memberi usul untuk tata letak lukisan. "Banyak orang usul untuk museum ini, walaupun tetap saya yang memutuskan," ungkapnya. Sang arsitek adalah sepupunya sendiri. Bangunan itu terbagi dalam dua sayap. Sayap kanan untuk *old master*. Sayap kiri untuk seni kontemporer.

Sebelum masuk ke sayap kanan, tampak sepuluh patung terjajar rapi dan belasan artefak mungil menyambut. Artefak itu adalah favorit almarhum Wilowati Surjanto, istrinya, yang sama-sama menyukai seni. Bangunan dua lantai ini dipisahkan sekat-sekat papan beroda untuk mengelompokkan lukisan berdasarkan temanya. Gaya lukis kubisme, tema kekejaman Jepang pada masa pendudukan, kelas-kelas sosial, wanita, alam, dan surealisme adalah beberapa diantaranya.

Turun ke lantai satu, patung *fiberglass* wanita bugil berambut panjang hingga hampir menyentuh lantai mengejutkan mata. Patung itu buatan Edi Sunarso. "Dulu ini dipajang di ruang tamunya Edi. Setelah Edi dan istrinya naik haji, patung ini disimpan di gudang karena malu. Saya sangat menyayangkan hal ini dan mereka menawarkannya pada saya. Ya, saya mau *aja*," terangnya diiringi gelak tawa. Oei memang penyuka lukisan wanita telanjang. Di kamar tidurnya pun ia memajang tiga lukisan wanita telanjang karya Sudjojono.

Keluar dari pintu menuju arah luar, tampak karya Widayat di atas marmer berukuran besar dipajang vertikal menghadap ke luar. Karya itu menggambarkan kehidupan di udara, di darat, dan di air. Di darat ada gunung dengan tanaman tembakau, dari kecil hingga besar. Menunjukkan perjala-

nan tembakau dari mulai dipetik, dirajang, sampai masuk gudang. "Dari tembakau saya berseni. Karya seni yang saya punya ini dari uang tembakau," ujarnya.

Kediaman Widayat di Mungkid, Jawa Tengah, yang berdekatan dengan rumah Oei membuat Widayat lebih sering berkunjung ke museum Oei dibanding museum lain. Pun sebaliknya, Oei sering mengunjungi museum milik Widayat. Bahkan, Ia menjadi kurator museum itu sejak dibuka tahun 1994.

Pria yang kini tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya ini memang bersahabat dengan Widayat. Bahkan tahun 1992, Widayat bersedia melukis peti mati Wilowati yang meninggal di Jerman karena kanker, tanpa imbalan apapun. Peti mati yang amat sederhana itu menjadi terkesan sangat mahal dan indah.

Keluar dari museum sayap kanan, tampak hamparan tanah luas berumput. Batu-batu yang ditata apik sebagai pijakan menghubungkan museum sayap kanan dengan museum sayap kiri. Museum berisi karya-karya kontemporer ini dari segi tata ruang memang tampak lebih modern. Pintu tinggi dari kaca sebagai pintu utama memberi kesan luas dan bebas pada ruangan ini. Beragam patung dan pajangan memenuhi ruang lantai satu. Yang menarik, terdapat boneka favorit Oei yang kongruen dengan dirinya. "Ini hadiah dari teman-teman saat anak pertama saya, Igor, menikah tahun lalu," pamernya.

Naik ke lantai dua, tubuh tua Oei masih tampak kuat dan lincah meniti anak tangga. Di lantai ini ada gambar Oei bersanding dengan Angelina Jolie dalam pose dansa yang dikuasainya. Gambar itu memarodikan pria penggemar musik klasik ini sebagai Brad Pitt (Mr. Smith) dalam film *Mr. and Mrs. Smith.*

Beralih ke rumahnya yang ada di antara dua bangunan itu, terdapat ruang belakang yang terbuka tanpa dinding penutup. Di salah satu dinding ada delapan lukisan kecil yang ditata berdampingan, tiap dua lukisan dengan dua objek yang berbeda. Di situ terdapat rupa Bill Gates berdampingan dengan Che Guevara karya Dippo Andy. Tata letak lukisan ini seakan merukunkan dua hal yang bertentangan. "Lihat ini, *the capitalist and the communist*, mereka itu *kan* lawan, tapi saya satukan," terangnya bangga.

Menuju ke ruang tamu, dua lukisan besar seakan menantang dan sebuah lukisan berukuran sedang menarik perhatian. Tergambar seorang wanita yang bersiap mengeluarkan payudaranya untuk menyusui bayi mungil yang memegang I-Pod kamera dalam gendongannya. Bayi itu seakan hendak merekam apa yang akan dilakukan ibunya. Di ruangan ini banyak hiasan bernilai seni yang semakin menguatkan citra Oei sebagai kolektor.

Disamping menjadi kolektor dan kurator, lelaki pelahap buku-buku seni ini dikenal sebagai penasihat di beberapa museum dan galeri. Jogja Galery dan Museum H. Widayat adalah dua tempat di Indonesia. Di luar negeri, Oei menjadi kurator di Art Retreat Museum Singapura dan sebagai *honorary adviser* di Singapore Art Museum.

Sebagai kolektor yang mencintai seni, ia sangat menyayangkan sikap para kolekdol (kolektor dodol), sebutan bagi orang-orang yang hanya menganggap seni sebagai investasi. "Mereka tidak punya dasar untuk mencintai seni, hanya tergiur investasi," sesal kakek satu cucu ini. Memang, karya seni yang baik tak akan turun nilainya

meski termakan waktu. Namun, hal ini hendaknya tidak dijadikan tujuan utama.

Saat terjadi kerusuhan 1998, banyak kolektor "mengungsikan" koleksinya ke luar negeri. Tetapi, tidak dengan pria yang dulu senang bermain biola ini. Ia bergeming, walaupun ada tawaran gratis dari Singapore art Museum untuk menyimpan koleksinya. "Kalau saya bawa ke luar negeri lalu museum saya diisi apa? *Lha,* kalau ada yang mau melihat bagaimana?" tukasnya dengan logat Jawa yang kental, meski fasih berbahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis.

Oei acap kali meminjamkan lukisan dan patungnya untuk dipajang saat pameran di luar atau di dalam negeri. Delapan belas koleksinya pernah ia pinjamkan pada Singapore Art Museum saat pameran. "Sekarang saya dalam negosiasi dengan Singapura Management University (SMU)," akunya. SMU mempunyai gedung-gedung besar dan banyak tembok yang kosong. Pihak SMU mengajukan permintaan untuk memajang koleksi Oei di tembok gedung itu dalam kurun waktu lima tahun.

Tidak seperti orang Tionghoa lainnya yang pada 1966 ramai berganti nama, Oei tidak mengganti namanya menjadi nama Indonesia. Saat itu ia sedang di Belanda menengok kakaknya yang sakit kanker prostat. Oei bertutur, "Saat saya pulang, mengganti nama sudah *nggak* zaman. Lucu kalau tiba-tiba saya mengganti nama." Tak seperti kebanyakan orang Tionghoa yang menjadikan Konfusianisme sebagai falsafah hidup, penyuka olahraga tenis ini justru tidak ambil pusing dengan hal itu.

Oei juga menaruh perhatian pada dansa. Ia mulai tertarik pada dansa sejak kelas satu SMP dan menyempatkan ikut sekolah dansa, meskipun tak pernah mengikuti kompetisi. Namun, ia baru mulai menekuni dansa saat tua, sekitar tiga tahun yang lalu. Ia didapuk menjadi ketua *Magelang Dance Association* (MDA) yang baru terbentuk 31 Mei 2007, sekaligus menjabat ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) yang baru diembannya pada 2008.

Oei selalu menyempatkan berdansa dua kali seminggu. Bahkan, ia membentuk perkumpulan bersama para duda yang dinamai OHD. "OHD sebenarnya singkatan dari nama saya, Oei Hong Djien. Namun, sering diplesetkan menjadi Olahraga Harian Duda," jelasnya sembari tertawa. Kesukaannya pada dansa dapat dilihat 12 April lalu, saat Jogja Galery mempersembahkan pesta ulang tahunnya yang ke-69. Pesta ini bertemakan "Seksi Nian" (seksi sekali), plesetan dari *Sixty Nine*, dengan menampilkan 69 wanita seksi. Pesta dansa pun digelar malam itu. Juga terdapat 74 karya seni dari 69 perupa sebagai penghormatan terhadap Oei yang dipamerkan tanggal 8-12 April 2008.

Sebagai seorang ayah, ia menurunkan kesenangannya pada seni ke anak-anaknya. Dari kecil, Igor dan Oman memang sudah dibiasakan berdekatan dengan karya seni. "Mata mereka telah terbiasa dengan lukisan. Mereka juga menyukainya," ujarnya. Dalam mendidik kedua putranya, Oei memberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup. Tapi, apa mau dikata jika kedua putranya sama-sama mengikuti jejak Oei bekerja untuk PT Djarum.

Di sela-sela kesibukan, Oei tak melupakan perannya sebagai anggota masyarakat. Ia tak segan menyambangi rumah ketua RW, Lurah, dan Gereja guna mengurus surat-surat keperluan menikah anak keduanya, Oman.

Ia menekankan, "Bermasyarakat itu penting karena mereka yang mengurusi kita."

Meski seorang dokter, Oei tidak membuka praktik di rumahnya. "Saya kenal semua orang di sini, *nggak tegel* (tega) kalau harus minta bayaran ke mereka," ujarnya. Ia hanya praktik di sejumlah poliklinik dan balai pengobatan. Berdasar alasan kemanusiaan, Oei bekerja sebagai dokter sukarelawan untuk Yayasan Katolik di Magelang tahun 1964-1966 dan di Temanggung 1968-1991. Ia kerap bertandang ke daerah-daerah Jawa Tengah seperti; Ndekil, Balai Pengobatan Santa Maria di Magelang, Candi Mulyo, Rowo Seneng, Parakan, dan Kebon Ndalem. Ia juga aktif di Balai Pengobatan Pancasila, Temanggung.

Banyaknya pasien yang tidak sebanding dengan jumlah dokter dan tidak lengkapnya peralatan adalah sekelumit kenangan yang tersimpan. Namun, aktivitas sebagai dokter sukarelawan ini berhenti tatkala istrinya meninggal. "Anak-anak saya masih kecil, waktu saya habis untuk mengurus mereka," ujarnya.

Dengan apa yang telah ia miliki sekarang, Oei mengaku belum puas. Ada beberapa keinginan yang belum tercapai. Oei memaparkan satu diantaranya, "Banyak koleksi yang belum bisa saya tangani dengan baik." Kegemarannya pada seni ia tularkan pula pada teman-temannya. "Saya dijuluki provokator, bahkan virus, karena sering memengaruhi orang agar menyukai apa yang saya sukai," ungkapnya.

Ternyata, rumah berpagar batu-bata ini sangat istimewa. Berbeda dengan tampak luarnya, rumah ini semarak dengan bermacam benda seni dan iringan lagu dansa di dalamnya. Tak lagi lengang. Pria berkumis mengembangkan senyuman, pria kurus berucap selamat jalan, dan Oei tersenyum sembari melambaikan tangan.[ ]

Oei Hong Djien | Magelang, 5 April 1939

Pendidikan:

- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (lulus 1964/65)
- Pathology Anatomis Universitas Katolik Nijmegen Belanda (1966-1968)

Kegiatan:

Dokter sukarelawan di Magelang (1964-1966) dan Temanggung (1968-1991)

Grader PT Djarum sejak 1979

Kurator Museum H. Widayat sejak 1994

Penasihat Jogja Galery

Kurator Art Retreat Museum, Singapura

Honorary adviser Singapore Art Museum (2001-2005)

Anggota The Singapore Art Museum Board sejak 2006

Ketua Magelang Dance Asosiation (MDA) th 2007-sekarang

Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) th 2008

menjadi alternatif bukan pekerjaan gampang

sekilas balairung

Menjadi "cagar alam kebebasan pers", sebagaimana dikatakan Daniel Dakhidae, tentu bukan pekerjaan mudah. Menjadi yang alternatif diperlukan kecerdasan, . keuletan, dan yang lebih penting keberanian. Termasuk di dalamnya keberanian mengambil keputusan. Menempuh jalan yang kadang harus berlainan dengan jalur *mainstream* pers pada umumnya.

Setelah Gama Intrauniversiter (1950-an) mati dan Gelora Mahasiswa (1970-1979) dibredel, BALAIRUNG adalah generasi ketiga pers mahasiswa di universitas tertua di Indonesia ini. Sejak berdiri pertama kali pada 29 Oktober 1985, BALAIRUNG mencoba menjadi suara yang lain bagi dunia pers Indonesia sebagaimana yang menjadi ranah pers mahasiswa selama ini. Tentu saja dengan mewarisi semangat generasi sebelumnya.

Semua ditempuh karena BALAIRUNG, mengutip Prof T. Jacob, ingin menjadi tempat mahasiswa mengasah pena, melatih diri untuk kehidupan pasca-universiter, dengan tidak meninggalkan ciri kemahasiswaan, yaitu ingin tahu dan mencoba melihat segala sesuatu secara ilmiah. BALAIRUNG ingin menjadi "balairung", tempatbelajar, tempat berteduh, tempat bertemu banyak orang, banyak kepala, banyak keinginan, banyak cita-cita.

Sampai umurnya yang ke 24, BALAIRUNG telah menelurkan 35 edisi reguler, dan 8 edisi jurnal, selain berita dwi mingguan BALKON, situs maya balairungpress.com, dan Pusat Informasi Pers Mahasiswa Indonesia (PIPMI). Kerja keras ini berbuah manis dengan menyabet tiga kali berturut-turut juara I Lomba Penerbitan Pers Altenatif Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta.

informasi berlangganan :
Perumahan Dosen UGM, Jalan Kembang Merak Bulaksumur B-21, Sleman, Yogyakarta 55281

Menyambangi Tanah Tak Bertuan

Eka Suryana Saputra

For no philosophy had as yet identified God and Nature; no optimistic theory of the world had reconciled public and private interest.

Kalimat tersebut merupakan penggalan ceramah Arnold Toynbee[1] yang dibukukan dengan judul *Lectures On The Industrial Revolution In England: Popular Addresses, Notes and Other Fragments.*[2] Diutarakan ketika ia tengah membahas tentang merkantilisme serta Adam Smith, pemikir yang menurutnya banyak mengafirmasi sistem ekonomi negara-kerajaan-klasik. Perubahan besar-besaran wajah industri di Inggris pada abad 18, yang melingkupi metode dan sistem organisasi produksi, dipercayai Toynbee turut memengaruhi perkembangan peradaban umat manusia. Terutama menyangkut mode produksi, serta campur tangan kepentingan di dalamnya, pada proses pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam bentuk yang paling purba, kita sudah mengenal kegiatan "menciptakan" dan "menghabiskan" barang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan alamiah manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Ihwal pemenuhan kebutuhan mulanya digarap dengan cara-cara yang sederhana, yang paling mungkin dilakukan dalam konteks ruang dan waktu tersebut. Jadilah dikenal kegiatan berburu, meramu secara nomaden, sebelum kemudian bercocok tanam dan tinggal menetap, sebagai bagian dari metode *food gathering* manusia.

Pelan-pelan, ketika manusia makin menemukan bentuk kolektif kehidupannya, pola produksi yang dibangun makin terstruktur. Pola tersebut bersifat organis yang berjalin kelindan satu sama lain dalam wujud masyarakat, juga negara pada wilayah yang lebih luas. Namun, kendati organis, ikatan struktural yang terbangun tetap memiliki efek samping terhadap proses kreatif pemenuhan kebutuhan manusia. Terlebih di tengah iklim kehidupan negara klasik, dimana negara berada di bawah bayang-bayang institusi agama dan mencampuri hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Anasir kekuasaan yang dimiliki ikatan struktur menjadikannya mudah memasuki detail seluk-beluk kehidupan masyarakat manusia. Seperti tatkala tiap negara bangsa berlomba-lomba meningkatkan kekayaan dengan penyatuan ekonomi nasional lewat monopoli perdagangan luar negeri, memperbanyak cadangan emas atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan merkantilisme—seperti dalam pembahasan Toynbee. Kepentingan nasional, dengan mengatasnamakan kebaikan bersama, menjadi raja tanpa tanding dalam selubung kepentingan yang dapat dikatakan tidak pernah bebas nilai.

Padahal, sebagaimana akhirnya ditegaskan Toynbee, tidak ada harapan untuk mendapatkan titik temu antara kepentingan publik dan pribadi. Selalu ada pertentangan-pertentangan nilai dalam kehidupan. Tentu proposisi tersebut juga berlaku dalam dunia industri. Kendati industrialisasi memang mampu merekonstruksi peranan negara perihal mode produksi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,[3] ia tetap tidak menyelesaikan—kalau tidak dapat dikatakan justru menambah, masalah.

Pertentangan kepentingan itulah, yang seterusnya selalu diwaspadai dunia industri. Karena sekali ia mengkristal, dapat menghasilkan amuk massa yang meruntuhkan bangunan, sistem, ide, hingga cita-cita industrialis. Tentunya upaya pendamaian-pendamaian kepentingan juga merupakan bagian proyek etis modernisme, yang menurut Ross Poole, seorang pemikir yang banyak memberikan catatan kritis terhadap "filsuf besar" macam Immanuel Kant, Friedrich Nietschze, Karl Marx, hingga Jurgen Habermas, telah memunculkan sekaligus mencabut alasan penerimaan konsep moral tertentu.[4]

Industrialisasi yang merupakan salah satu tanda modernisme, dalam keseharian, bagaikan kiblat yang menjadi tempat bagi kita untuk selalu memalingkan wajah ke arahnya. Ia seolah menjadi pilihan tunggal untuk meraih kemajuan. Imbasnya, dalam pikiran kita selalu terbersit upaya-upaya mengembangkan sektor industri—atau di wilayah pengetahuan, kita banyak berdebat perihal menuju pencerahan pun

melanjutkan proyek modernisme dengan dalil "kemajuan" peradaban itu ada.

Catatan penting dari tiap gagasan etik universal, yang perlu kita mafhumkan sedari awal, yakni ia cukup diposisikan semata sebagai tujuan sementara hidup. Sementara dalam artian, nilai-nilai tersebut hanya bisa didekati tanpa pernah kita tahu sudah sampai di tempat yang dituju atau belum. Dalam kesementaraan itu diperlukan keinsafan bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia harus selalu diisi pencarian terus menerus menuju keadaan yang adil. Karena ia, kita, merupakan makhluk rasional yang selalu rindu pada kehidupan yang lebih baik. Pendamaian antara kepentingan pribadi dan publik harus dilihat bukan sebagai suatu titik mati, melainkan sekadar tanda koma yang selalu terbuka atas setiap negasi dan afirmasi.

Di tanda koma inilah persinggungan antara gerakan pers mahasiswa (persma) dan industri juga menemukan kendali analognya.[5] Jika industri menjadi instrumen paling ampuh dari modernisasi, dengan kemampuannya merekayasa pertentangan kepentingan, persma selalu digadang-gadang—bahkan dimitoskan, sebagai agen pencerahan suatu masyarakat bangsa di negara semacam Indonesia. Digadang-gadang dalam artian potensial untuk memunculkan "orang-orang besar", sementara dimitoskan sebab mengingat peran-peran kesejarahan penting yang dimainkan.[6]

Begitupun, nasib keduanya bagaikan bumi dan langit. Industri masih terus melaju pesat kendati modernisme secara konseptual sudah banyak digugat, sementara persma makin terasa melangkah gontai menuju sudut sunyi peradaban. Pasca era kebebasan pers menggejala di bumi pertiwi, harus diakui persma membutuhkan reposisi. Akan tetapi, ketika reposisi dibidikkan ke arah cerita-cerita kecilnya, ternyata belum tepat sasaran. Bahkan terkadang cerita-cerita kecil itu, hanya sekadar menjadi apologi atas kegagalan melanjutkan sejarah. Narasi persma tak ayal berada di wilayah sempalan paling ujung ruang diskursus masyarakat pembaca. Baik ditingkatan komunitas pun wacana.

Gejala ini tidak lain juga dipengaruhi keberhasilan industri menyusupi bidang media dan informasi. Dengan semangat memperbanyak hasil produksi ala industrialisasi, media lantas menerabas tiap jengkal peristiwa dan pemikiran untuk diwartakan. Pada satu jeda penerabasan ini dapat diterima sebagai bagian dari upaya transformasi pemahaman dan kesadaran. Namun pada jeda yang lain, sewaktu mulai memasuki "wilayah-wilayah tak bertuan", informasi yang dihambur-hamburkan media terpikir tidak lebih dari upaya industri mempertahankan kemapanannya.[7]

Persma saat ini bukan sebatas menghadapi episode-episode romantis[8] seperti pernah ditulis Hasan Bachtiar atau episode-episode menegangkan[9] sebagaimana dipaparkan Lukman Solikhin sewaktu "merayakan" dua puluh tahun BALAIRUNG. Lebih dari itu, persma sudah tiba pada episode-episode akhir, bukan terakhir, untuk memutus mata rantai perdebatan peran kesejarahan yang diemban. Tarik ulur entitas pers dan mahasiswa-nya bukan dalam kerangka lebih menonjolkan satu daripada yang lain. Kita sudah harus mengatakan dengan lantang dan penuh kesadaran bahwa kita adalah pers dan juga mahasiswa pada saat bersamaan.

Langkah ini jelas tidak semudah pelafalannya, apalagi setelah peleburan medan pertentangan. Kita, persma, jadi sibuk dengan pertarungan-pertarungan kecil yang menyedot tenaga tidak kalah besar. Dapat dilihat betapa bangga, atau lebih tepatnya lega, jika sebuah persma sudah berhasil menelurkan seeksemplar produk (baca: terbitan). Perlu ada pembacaan ganda atas peran persma, artinya upaya menghidupkan kembali pun menggeser sudut pandang nilai ideal persma harus berwatak menyeluruh. Bukan terbatas pada eksemplar produk, ataupun wacana yang diusung. Kita perlu bergerak cepat melampaui perdebatan rasionalisasi atas wujud produk, menyudahi arogansi intelektualitas, serta membuka lembaran baru refleksi diri.

Mengikuti lajur irisannya dengan dunia industri, persma perlu melihat kembali kapasitasnya untuk mendamaikan—dengan sementara sekaligus terus-menerus, kepentingan publik dan pribadinya. Tidak bisa sebatas duduk dalam laboratorium dokumentasi atau berkeliaran mencari data menjadi pemain lapangan. Kesemua itu harus disertai konsepsi dan strategi pergerakan yang matang. Sesekali, persma perlu keluar dari kamar penerbitannya dan mulai menimbang-nimbang konteks kedirian yang hadir tanpa terlepas kendali ruang dan waktu.

Di lingkup Indonesia, negara industrial gelombang belakangan, peranan persma sebagai "agen pencerahan" generasinya masih signifikan. Dengan catatan, capaian-capaian ditingkatan komunitas dan wacana ditindaklanjuti secara konsisten untuk merekonstruksi fenomena sosial yang lebih banyak memberi kebingungan. Langkah ini perlu dilakukan karena, beranjak dari pemahaman mendiang Kuntowijoyo—sejarawan, budayawan, serta sastrawan asli Bantul, Yogyakarta, yang melihat bahwa perguruan tinggi dan mahasiswa termasuk subjek aktif di dalamnya, perlu ditempatkan tidak hanya sebagai pengisi teknostruktur.[10] Melainkan juga, dalam sebuah kebudayaan industrial, memegang peran kritik sosial yang menjalankan fungsi kontrol agar laju gerak kepentingan tidak timpang. Jangan sampai atas nama publik wilayah personal terlindas, dan sebaliknya.

Pemaknaan tentang kepentingan publik dan pribadi, dalam tulisan ini, pada umumnya dapat diukur berdasarkan sebanyak subjek yang mampu terakomodasi kepentingannya. Semakin banyak, berarti ia kian mendekati kepentingan publik. Sehingga bisa jadi, kepentingan sebuah persma untuk menerbitkan produk tidak seterdesak penyatuan konsepsi persma secara umum guna menjalankan peran rekonstruksi sosialnya. Terlebih bila mencerna bahwa fakta sosial di Indonesia sudah menunjukkan gejala yang pernah ditakutkan Kuntowijoyo tentang wajah industri Indonesia.[11] Orang-orang jadi punya kepentingan kelas, menuju masyarakat berkelas, penuh konflik. Bahkan politik semata menjadi perwujudan dari kepentingan ekonomi.

Pemaknaan kelas pada konteks kekinian jelas tidak lagi cukup mengandalkan identifikasi strata ekonomi, melainkan turut menganalisis akumulasi kepentingan serta aksesibilitasnya atas otoritas kuasa. Mungkin memang sulit mendamaikan kepentingan publik dan pribadi, tetapi kita perlu berpikir dialektis supaya kepentingan tersebut tidak saling meniadakan. Salah satu kata kunci untuk membuka logika pikiran macam ini berbunyi etika, yang banyak membongkar ulang pemaknaan atas nilai moral.

Prof. Dr. T. Jacob, sudah mengingatkan kata kunci ini jauh hari ketika menyambut kelahiran edisi perdana BALAIRUNG. Etika harus menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga tidak terasa sebagai pembatas kebebasan, seperti juga kita berjalan sebelah kiri, berhenti pada lampu merah, tidak meludah waktu makan.[12] Akhirnya etika harus menyatu, mengalami internalisasi nilai, dengan kebudayaan sehingga dalam pertemuan kepentingan publik dan pribadi tidak terjadi represi, dominasi, pun hegemoni. Layaknya perjumpaan dua sahabat karib yang selalu diisi dengan dialog, dengan perbincangan hangat bernuansa terbuka.

Etika macam inilah, yang sudah membudaya serta memungkinkan tegur sapa dalam keberagaman, yang menjadi salah satu penghuni wilayah tak bertuan dalam keseharian kita. Wilayah yang lebih sering kita lupakan akibat terlalu banyak yang harus "dibaca". Industrialisasi, terutama di bidang media, telah banyak memangkas medan-medan permenungan sehingga kita menjadi manusia instan yang merasa lebih nyaman berpikir praktis. Pemangkasan tersebut harus dapat disikapi dengan cermat, mengingat kita pun tidak boleh tergesa memutuskan penolakan terhadap industri karena ketergesaan selalu dekat dengan kegegabahan.

Menyikapi perbedaan kepentingan kita sama tidak boleh gegabah menentukan vonis. Selalu dibutuhkan penundaan-penudaan. Menunda bukan dalam artian tidak mengambil keputusan, melainkan sikap selalu terbuka pada kemungkinan lain di masa depan. Persma tidak boleh selamanya khusyuk dalam dunia penerbitan yang serba teknis. Konsepsi, ide, dan gagasan yang dibangun harus mampu merepresentasikan dua dunia yang sudah mengalami persetubuhan: pers dan mahasiswa. BALAIRUNG pun masih terus belajar berdialog, menyambangi tiap pemikiran tanpa pernah ada kata puas. Harapannya masih senada, BALAIRUNG dapat menjadi wahana pergelutan intelektual bagi mahasiswa yang mesti berlatih berpikir tuntas dan detail.[13]

Tentu tuntutan-tuntutan terhadap persma tidak berhenti semata setelah terbitannya rampung. Secara moral ia, pegiat dan juga mantan pegiatnya, masih memiliki tanggungjawab lain. Tanggungjawab mengentaskan pikiran semampu dan sesuai konteks sosialnya. Roos Poole sudah menyatakan moralitas sebagai ungkapan tuntutan sebentuk kehidupan sosial tertentu, sebagai suara masyarakat yang juga ditujukan pada anggota masyarakat.[14] Artinya pikiran tersebut harus dikerjakan, atau kita hanya akan memelihara penyakit para cerdik pandai yang merasa cukup menghentikan kerjanya di wilayah gagasan.

Hanya saja memang ada kelemahan dari tiap seruan-seruan moral, yang juga tidak luput dari perhatian Poole. Sifat lahiriahnya membuat moralitas tidak bisa memberi penjelasan yang menjadi cukup alasan *bagi kita* mengapa seharusnya bertindak dengan cara-cara yang diperintahnya. Kita bisa mendengar suaranya, tetapi tidak tahu mengapa harus mematuhinya.[15] Watak normatifnya selalu dengan mudah dipatahkan penalaran—yang sering dianggap bebas nilai.

Menanggapi kelemahan ini diperlukan sudut pandang lain yang, bukan dengan niatan mempertahankan atau menyerang suatu argumen, terus membuka ruang dialog. Sejenis satu sudut pandang yang pernah dilontarkan James Rachels, moralis dari Amerika Serikat yang wafat tahun

2003 silam. "Moralitas, pertama-tama dan utama, bertautan dengan akal; hal yang secara moral benar dilakukan, dalam lingkup apapun juga ditentukan oleh alasan-alasan terbaik yang ada untuk melakukannya," tulisnya.[16] Sehingga antara kebaikan dan kebenaran tidak diperlukan ruang sekuler yang cenderung dapat diisi dengan pelbagai embel-embel kepentingan secara tersamar.

Pada pertautan dengan kepentingan, pertimbangan moralitas harus tidak berpihak pada salah sebuah kepentingan individual. Dengan kata lain setiap kepentingan individual bersifat sama.[17] Pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan jadi sangat menentukan "seberapa benar" konsepsi moral yang diambil. Sehingga langkah mengumpulkan bahan pertimbangan untuk membangun asumsi harus menyeluruh supaya tidak terjebak pertentangan kepentingan.

Budiarto Shambazy pernah terdengar sangat gemas melihat pertentangan kepentingan yang bermain dalam penilaian moral masyarakat—dalam konteks menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa.

> "Demo dinilai anarki. Mana yang lebih anarki: demo aspirasi rakyat atau keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak tiga kali dalam tiga tahun? Demo tidak simpatik karena membakari ban-ban bekas. Sampai kini tidak ada yang bertanggung jawab atas pembakaran manusia dan harta benda rakyat tak bersalah saat Tragedi Mei 1998. Demo mengganggu ketertiban umum karena menutupi jalan-jalan. Selama puluhan tahun warga kaya dan miskin Jakarta menutupi jalan dengan portal atau menjadikan jalur lambat sebagai tempat parkir pribadi," tulisnya.[18]

Akhirnya kita tidak dapat sebatas mengandalkan "teks" untuk mengambil sebuah keputusan. Isi sebuah teks tidak pernah dapat ditangkap di dalam dirinya sendiri, sehingga ia dengan mudah disisipi pemahaman-pemahaman liar yang belum tentu bertanggungjawab. Lebih jauh lagi, keputusan macam ini berpotensi memperkuat gesekan kepentingan publik dan pribadi. Gesekan yang cenderung menjauhkan proses konstruksi sosial menjadi lebih manusiawi. Untuk itu kita jadi perlu memperhatikan konteks historis, yang memang menyiadakan ruang permenungan lebih terbuka.

Menyoal peran dan posisi persma di palung sosial masyarakat, kita pun jadi perlu menyibak sejarahnya terlebih dahulu. Kegiatan membaca konteks-konteks sejarah memerlukan energi dan kesabaran khusus, karena kita bagaikan memasuki alam lain yang sakral. Alam di mana kita tidak dapat memberi campur tangan, hanya menjadi subjek pasif, sehingga tersadar akan keterbatasan diri selaku manusia. Kita bagai melakukan sebuah ziarah, mengunjungi tempat-tempat bernilai suci yang tidak akan hilang sucinya kendati apa yang dilakukan.

Sebuah ziarah tidak lain dari upaya melampaui kegiatan mengingat dan melupakan. Ia menuntut kesadaran penjedaan atas upaya penilaian, yang serupa dengan ujaran Eliyah, "Tidak, tidak, kawanku yang baik," katanya pada Efim "Sekalipun kau dan aku mati, besok pagi dunia masih akan terus berjalan tanpa kita."[19] Kesadaran yang disertai penyerahan total atas langkah yang ditempuh. Kebulatan tekad menjadi inti dari tiap ziarah, pasrah sekaligus aktif memaknai masa lalu.

Bersandar pada tahun berdirinya, 29 Oktober 1985, BALAIRUNG tercatat sebagai generasi ketiga persma di Indonesia pasca kemerdekaan.[20] Terlahir di tengah atmosfer politik orde baru yang melakukan pengawasan ketat terhadap setiap bentuk aktivitas pergerakan mahasiswa, menjadikan persma era tersebut dipenuhi semangat pembuka keran kebebasan berekspresi. Tidak mengherankan jika kemudian narasi sejarah persma banyak diisi catatan-catatan mengkritisi struktur kekuasaan institusional, mulai dari pemerintah tingkat nasional pun lokal hingga jajaran pengurus perguruan tinggi.

Keadaan sekarang jelas jauh berbeda, kita sudah berada dalam titik mabuk merayakan kebebasan (pers). Akan tetapi, justru di sanalah masalahnya. Kita tercerabut dari akar kesadaran eksistensial yang jadi landasan pokok segala tindak-tanduk. Imbasnya, peran kritis persma mengalami mistifikasi narsisme tanpa pernah kita paham mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Kata-kata kritis mengalami korupsi makna. Sehingga kita membutuhkan sebuah ruang jeda yang bebas dari desakan kepentingan, membendung arus deras informasi, serta menyediakan momen-momen—yang dalam kalimat Iwan Simatupang[21] senantiasa berupaya mengundurkan ke hari esok apa yang tidak diperoleh hari ini.[22]

Dalam karya ziarahnya itu, Iwan Simatupang pun menonjolkan satu term yang perlu dicamkan dalam menimbang-nimbang sebuah penilaian sebelum menjatuhkan putusan. Proporsi.[23] Sebuah perimbangan yang menempatkan tiap sesuatu pada arasnya. Kita boleh menempatkan yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi sesuai takaran alamiahnya. Bukan dengan rekayasa apalagi paksaan.[24]

Term tersebut cukup relevan untuk menjadi acuan semangat menghidupi sebentuk persma. Dengan dua entitas besar yang selalu dipenuhi pertarungan kepentingan, dalam domain publik dan pribadi, persma membutuhkan kebiasaan memandang segala sesuatu secara proporsional. Sesuai identitasnya sebagai pers yang juga mahasiswa—yang telah menjadikannya punya keistimewaan-keistimewaan tertentu.

Dengan identitas istimewa itu, persma mengemban harapan yang tidak sedikit. Ada banyak pengandaian, cita, pun imaji yang telah, dan perlu terus, digeluti. Dalam ziarahnya kita menemukan perubahan sifat persma sembari terus diiringi penyampaian semangat merekonstruksi realitas. Semangat untuk tidak pernah puas melakukan pencarian makna secara merdeka—sepenggal nilai yang tidak dapat lagi ditawar-tawar.

Proporsi mengajarkan ketepatan cakap dan tindak berpijak di dua dunia antara: pers dan mahasiswa, masa lalu dan masa depan. Yang jelas kita, persma—termasuk BALAIRUNG, masih akan terus berproses serta belajar berdialog dengan kenyataan untuk siap menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Sebuah masa yang akan datang yang kehadirannya kadang-kadang tidak kita harapkan.[25] Menghadapi kemungkinan masa itu, tidak perlu ada kecemasan berlebih karena hanya akan menjadikan kita seorang paranoia yang percaya pada satu kebenaran—yang selama ini diyakini tanpa tentu dihayati.

Harus ada sebuah keberanian dalam menjawab tantangan zaman, termasuk keberanian untuk mengakui kesalahan, kekurangan, pun kelemahan. Karena, meminjam

kalimat Emmanuel Subangun—seorang pemerhati sosial budaya yang juga sempat memimpin lembaga penelitian Alocita, kita adalah makhluk yang bathil, jahat, penuh intrik dan sok kuasa, tak tahu terima kasih, tapi juga oleh sang maha kuasa tetap juga dilirik sebagai wajah ilahi yang diwajibkan mengarungi laut, membajak tanah dan menghirup udara yang sehat.[26] Namun, sebelum menjawab tantangan itu, kita masih perlu menyambangi sejarah sebagai kawasan tak bertuan yang siap dikoreksi dan diacak-acak. Bukan untuk mendapatkan jawaban tentang benar dan salah, tetapi sekadar melanjutkan misi peradaban menghadirkan wajah kehidupan yang lebih manusiawi—dengan tiap pertentangannya.

Jurnal BALAIRUNG, pertama-tama memang merupakan sebuah produk. Maksudnya, ia adalah hasil kerja dari sekelompok identitas pers yang juga mahasiswa. Hasil penyambangan sejarah persma sebagai kawasan tidak bertuan. Namun, kita tidak dapat serta-merta melupakannya sebagai sebuah proses. Sesuatu yang tidak mengenal kata usai. Ia, eksemplar jurnal itu, juga perlu diingat sebagai tanda pergulatan mencari makna secara merdeka.

Memahami jurnal BALAIRUNG, kita lebih dituntut melampaui logika tafsir dikotomis antara proses dan hasil atau privat dan publik. Keterlibatan, bagi kita, dalam konteks kekinian sudah merupakan sebuah keberhasilan proses sekaligus hasil. Meskipun keberhasilan tersebut, lagi-lagi, bukan sesuatu yang selesai. Karena setiap keberhasilan pun harus mengenal sebuah proporsi. Artinya, perlu senantiasa ingat bahwa bisa jadi dalam wilayah-wilayah lain, yang tidak bertuan, kita gagal.

Kebisajadian itulah yang patut dijaga ingatan, supaya kita tetap bisa memandang langit sambil terus memijakkan kaki di bumi. Dalam pertimbangan proporsionalnya, jurnal BALAIRUNG edisi ini dapat dikatakan gagal sekaligus berhasil. Gagal dengan mengingat kenyataan bahwa kajian "rokok dan hubungan industrialnya" ini semula dimimpikan dapat menyapa pembaca lewat Edisi 42 l Tahun XXIII l 2008.

Bisa ada seribu satu alasan yang dapat dituangkan selaku pembenaran. Yang jelas, ketidakmampuan kami mengalahkan si waktu lah yang terutama "memaksa" membuatnya hadir di Edisi 43. Kendati demikian, kegagalan tersebut tidak sedikitpun membuat kami merasa kalah. Bila boleh mengafirmasi seruan Chairil Anwar, penyair kesohor Indonesia itu, *aku tidak akan menyerah*. Kegagalan bagi kami, awak persma, bukan akhir dari kehidupan. Lagipula akhir kehidupan, kalaupun nanti ada, bagi kami juga bukan merupakan sesuatu yang perlu dihadapi dengan ketakutan (yang berlebihan). []

catatan akhir

[1] Pakar sejarah ekonomi berkebangsaan Inggris yang hidup dari tahun 1852-1883. Ia merupakan paman dari salah seorang sejarawan dunia terkemuka yang memiliki nama mirip dengannya, Arnold Joseph Toynbee (1889-1975).

[2] Buku tersebut diterbitkan tahun 1884 oleh Rivingtons Waterloo Place, London, dengan disertai sebuah "Laporan Singkat" dari B. Jowett.

[3] Seperti ketika kemudian sistem ekonomi (politik) merkantilisme "menghilang" tersapu badai liberalisme yang menghendaki kebebasan hidup, memperkecil peran pemerintah dalam usaha-usaha pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat.

[4] Lebih lanjut baca, Ross Poole, *Moralitas dan*

Modernitas, Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme, terj. F. Budi Hardiman, 1991, Yogyakarta: Kanisius.

[5] Lewat kalimat singkat Lukman Solihin pernah menuliskan bahwa entitas persma lahir dari aras modern. Lihat, "Melewati Episode-episode Menegangkan 20 Tahun BALAIRUNG: Bertaruh Dengan Usia", dalam Dapur Jurnal *BALAIRUNG* Edisi 39/XX/2006. Hal 188.

[6] Baca Hasan Bachtiar, "Bekerja Dengan Detail, Mengapa Jurnal Balairung?", dalam Dapur Jurnal *Balairung* Edisi 34/XVI/2001.

[7] Wilayah-wilayah tak bertuan di sini dimaksudkan untuk menggambarkan lahan yang lengang, jauh dari hiruk-pikuk "orang-orang di jalanan" sehingga memungkinkan kerja permenungan untuk memahami suatu gejala hidup dengan lebih mendalam dan utuh.

[8] *Op.cit*. Hasan Bachtiar. Hal 177. Frase ini merujuk pada subjudul tulisan tersebut.

[9] *Op.cit*. Lukman Solihin. Hal 187.

[10] Baca M. Alfaris dan A.A Santoso (ed.), *Industrialisasi dan Perguruan Tinggi*, dalam Temu Wicara BALAIRUNG Nomor 1 Tahun I Januari 1986. Hal 13.

[11] *Ibid*. Hal 8-12.

[12] Prof. Dr. T. Jacob, *Suatu Balairung Tulisan*, dalam Sambutan Rektor UGM di BALAIRUNG Nomor 1 Tahun I Januari 1986. Hal 13.

[13] *Op.cit*. Hasan Bachtiar. Hal 182.

[14] *Op.cit*. Ross Poole. Hal 179.

[15] *Ibid*. Hal 180.

[16] James Rachels, *Filsafat Moral, The Elements of Moral Phylosophy*, terj. A. Sudiarja, 2003, Yogyakarta: Kanisius. Hal 35.

[17] *Ibid*. Hal 38.

[18] Budiarto Shambazy, "Nasionalisme 'nonton bareng'", Politika *Kompas* edisi Sabtu 7 Juni 2008. Hal 15.

[19] *Leo Tolstoy, Ziarah (Kumpulan Cerita)*, terj. Anton Kurnia, 2002, Yogyakarta: Jalasutra. Hal 132. Tolstoy merupakan merupakan anak tuan tanah di Rusia yang dalam perkembangannya menjadi salah seorang sastrawan besar yang banyak melahirkan karya bercorak realis, bernuansa religius, serta sarat perenungan moral filosofis.

[20] *Op.cit*. Hasan Bachtiar. Hal 179. Ia memetakan tiga tahapan tumbuh kembangnya persma di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertama, di masa demokrasi liberal (1945-1959) persma lahir sebagai sarana publlikasi ide modernisme. Kedua, generasi persma berikutnya muncul dari tekanan demokrasi terpimpin (1959-1966) yang menyumbat keran kebebasan. Kemudian memasuki fase pemerintahan orde baru yang lamat-lamat menampakkan wajah korporatisnya, persma generasi ketiga mulai menggedor-gedor kekuasaan.

[21] Sastrawan kelahiran Sibolga, Sumatera Utara, 18 Januari 1828. Ia wafat di Jakarta 4 Agustus 1970 dengan meninggalkan karya-karya sastra, cerpen, puisi, novel, drama juga esai yang banyak menonjolkan sisi-sisi eksistensialis.

[22] Lihat Iwan Simatupang, *Ziarah: Sebuah Novel*, 1997, Jakarta: Djambatan. Hal 20.

[23] *Ibid*. Hal 14-17. Silahkan simak dialog antara Pak Walikota, Opseter Pekuburan, dan Tokoh Kita si Pengapur.

[24] Perihal paksaan kita perlu selalu mengingat-ingat sifatnya yang mudah bersalin rupa dalam wujud otoritas kuasa seperti represi, dominasi, atau hegemoni.

[25] Jacques Derrida, dekonstruksionis Prancis yang lahir di Aljazair, dalam film dokumenter tentang kehidupannya, karya Kirby Dick dan Amy Ziering Kofman, pernah berujar, *"In general I try to distinguish between what one calls the future and "l'avenir". The future is that which—tomorrow, later, next century—will be. There is a future which is predictable, programmed, scheduled, foreseeable. But there is a future, "l'avenir", (to come) which refers to someone who comes whose arrival is totally unexpected. For me, that is a real future."*

[26] Emmanuel Subangun, *Syuga Derrida, Jejak Langkah Posmodernisme di Indonesia*, 1994, Yogyakarta: CRI Alocita. Hal 17-18.

Alumnus Fakultas Ekonomi UGM ini telah lama bekecimpung dalam dunia transportasi. Lahir pada tahun 1952 di Yogyakarta - Jawa Tengah. Lulus S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1978 dan S2 Magister Manajemen Institut Teknologi Bandung tahun 2000. Pernah mengikuti pelatihan Indonesia Executive Program. Strategic Management Cause General Electric, Cottonville, USA pada tahun 1995. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PERUMKA tahun 1988 dan Direktur Utama PT KAI tahun 1999. Mulai bergabung dengan Angkasa Pura II sejak tahun 2002 sebagai Direktur Utama dan diangkat kembali tahun 2004 hingga sekarang.

BANDARA HARUS BEBAS ROKOK

Di sela kesibukannya,Balairung disambut hangat di ruang kerjanya. Bapak yang sudah 6 tahun berkarir menjadi direktur utama PT (Persero) Angkasa Pura II ini mengaku benci melihat orang yang merokok di tempat umum. Karena merokok di tempat umum sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurutnya, Bandara harus bebas rokok. Sebuah langkah yang patut kita acungi jempol. [Teguh]

Edie Haryoto

Presiden Direktur
PT. (Persero) Angkasa Pura II

Alumnus FISIPOL UGM jurusan Ilmu Pemerintahan ini merupakan orang yang aktif berorganisasi semasa mahasiswa. Wakil Ketua dewan mahasiswa UGM (sekarang BEM) di era 70an sudah lama bekerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selama di Departemen Transmigrasi, Ketua Keluarga Alumni Fisipol Gadjah Mada (KAFISPOLGAMA) ini.pertama kali berkarir di Pontianak.

KESEJAHTERAAN BURUH ROKOK HARUS DITINGKATKAN

Bapak yang satu ini sangat konsen dengan buruh mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan kesejahteraan para buruh. Kaitannya dengan rokok, ia berpendapat bahwa kesejahteraan buruh rokok, memang harus di tingkatkan. Karena sejauh ini para buruhlah yang harus sejahtera. Apabila kesejahteraan para buruh rokok ditingkatkan maka buruh akan bekerja lebih serius dan terfokus. [Teguh]

Djoko Sidiq Pramono

Direktur Jendral P2MKT Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

CHANGE IS NOT AN OPTION, ITS ESSENTIAL

TOGETHER WE BUILD A BETTER FUTURE

AIRPORT AND AIR TRAFFIC SERVICES ANGKASA PURA II

TANTANGAN BARU
DUNIA FANTASI
Dufan
TORNADO
EXPRESIKAN ADRENALINMU!
Ancol
Taman Impian